



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026**

Membangun Kaltim Untuk Nusantara



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada Tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 sebagai pedoman Pj. Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2026 dengan Peraturan Gubernur.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);

12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM
 - BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - BAB V TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
 - BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - BAB IX PENUTUP
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Daerah digunakan oleh Pejabat (Pj.) Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026.
- (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari Rencana Pembangunan Daerah yang harus dicapai pada tahun 2026 yang diambil dari indikator Tujuan dan Sasaran strategis Pembangunan Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 78,92;
 - b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,50-5,30 persen;
 - c. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,55 persen;

- d. Indeks Gini pada angka 0,305;
 - e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada angka 75,20;
 - f. Presentase Penurunan Emisi dari *Bussiness As Usual* (BAU) sebesar 32,03 persen;
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada angka 70,01 (BB);
 - h. Prevalensi Stunting pada angka 10,00 persen;
 - i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,14 persen;
 - j. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada angka 67,98;
 - k. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada angka 8,14; dan
 - l. Bauran Energi Baru dan Terbarukan sebesar 14,68 persen.
- (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Gini merupakan indikator makro pembangunan yang perlu diselaraskan dengan pencapaian target nasional setiap tahunnya.
- (4) Target indikator makro pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menyelaraskan target indikator makro pembangunan antara kabupaten/kota dengan provinsi setiap tahunnya.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja antara lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan lingkup Perangkat Daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun.

- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada :
- a. Capaian target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. Capaian target Program Prioritas Daerah dan Program Perangkat Daerah;
 - d. Efektivitas Program Prioritas Daerah dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - e. Efektivitas Program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD).

Pasal 6

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin konsistensi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan kinerja Rencana Pembangunan Daerah.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan untuk menjamin konsistensi kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Program/Kegiatan/Subkegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah telah mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah.

- (6) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Program/Kegiatan/Subkegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran, pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD), serta pencapaian kinerja dan efektivitas Program Prioritas Daerah dan Program Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran, pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan, pencapaian kinerja dan efektivitas Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan untuk memastikan pencapaian indikator makro pembangunan daerah dalam rangka penyesuaian kinerja dengan rencana pembangunan nasional.
- (6) Evaluasi dapat dilaksanakan pada paruh waktu dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan atau pembaharuan terhadap klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Program sesuai ketentuan peraturan perundangan dapat langsung disesuaikan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd
SRI WAHYUNI



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 16.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2024-2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023, maka RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 juga akan berakhir. Untuk itu Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengatur penyusunan rencana pembangunan pada masa transisi sampai Pilkada serentak tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Melalui instruksi tersebut, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi dengan kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2025, dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2023-2042. Selain itu, dokumen RPD disusun dengan memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
 15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

19. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2023-2042;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3 Hubungan Antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dan RTRW Tahun 2023-2042. Selanjutnya, dokumen RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan. Penjelasan hubungan antara dokumen RPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterkaitan RPD dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 memperhatikan pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Provinsi Kalimantan Timur.

2. Keterkaitan RPD dengan RPJPD Tahun 2005-2025

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. RPD Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari

tahapan kelima RPJPD Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD guna mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang.

3. Keterkaitan RPD dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan RPD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042. Penyelarasan RPD dengan RTRW dilakukan pada substansi isu strategis pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

4. Keterkaitan RPD dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. Dalam penyusunan RKPD, prioritas, tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan tujuan, sasaran dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program pada RPD masih bersifat indikatif dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

5. Keterkaitan RPD dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan. Keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam RPD.

6. Keterkaitan RPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur memperhatikan dokumen perencanaan lain antara lain dokumen RAD GRK, kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, RAD TPB/SDGs, dan Rencana Induk IKN.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024-2026 menjelang terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode tahun 2025-2029;
2. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2024-2026; dan
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2024-2026.

Tujuan disusunnya RPD Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024, 2025, dan 2026; dan
3. Menjadi pedoman bagi penyusunan RPD kabupaten/kota dan Perubahan RPJMD kabupaten/kota.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen RPD Tahun 2024-2026 ini mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yakni terdiri dari 9 (sembilan) bab. Sistematika dokumen dimaksud sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5. Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2019-2023

- 2.6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN
- 2.8. Kerjasama Daerah
- 2.9. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda
- BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - 3.1. Kinerja Masa Lalu
 - 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.3. Kerangka Pendanaan
- BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 4.2. Isu Strategis
- BAB V TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
 - 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
 - 6.2. Arah Pembangunan Kewilayahan
 - 6.3. Program Prioritas Pembangunan
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan
 - 7.2. Program Perangkat Daerah
- BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - 8.1. Indikator Kinerja Utama
 - 8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, khususnya di luar Jawa termasuk di Provinsi Kalimantan Timur sudah lebih dari 6 (enam) dasawarsa dimanfaatkan sebagai modal pembangunan ekonomi (*natural resources based economy*). Alasannya tentu saja karena sumber daya tersebut telah tersedia dan secara mudah dengan langsung mengekstraksi dan memperdagangkan tanpa adanya upaya pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk. Akses yang mudah terhadap sumber daya alam ditambah pertumbuhan penduduk, peningkatan standar hidup dan tersedianya pasar atas komoditas sumber daya alam telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, pemanfaatan sumber daya alam secara langsung/ekstraktif ini disadari sangat rentan bagi laju pertumbuhan karena dipengaruhi oleh harga pasar atas komoditas, terlebih bilamana orientasinya ekspor. Apabila harga baik maka baik pula laju pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Dalam dasawarsa terakhir Provinsi Kalimantan Timur menyadari kualitas pertumbuhan sama pentingnya dengan laju pertumbuhan tersebut. Kualitas pertumbuhan yang diharapkan tentu saja yang mampu menghemat (terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan) dan/atau menjaga keberlanjutannya (sumber daya alam terbarukan), salah satunya adalah dengan melakukan transformasi ekonomi.

Strategi jangka panjang yang secara bertahap dilakukan, yaitu potensi sumber daya alam terbarukan terus dikembangkan, baik dari sektor pertanian dalam arti luas maupun sektor jasa lingkungan, sehingga diharapkan akan menggeser struktur ekonomi ekstraktif terhadap sumber daya alam tidak terbarukan. Disamping itu hilirisasi komoditas sektor pertanian melalui pembangunan dan pengembangan industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (*added value*) produk, terjadinya penciptaan tenaga kerja dan perlahan menggeser dominasi aktivitas pertambangan dan penggalian ke struktur perekonomian yang lebih berkelanjutan termasuk secara merata dan berkeadilan menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada ekonomi kawasan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai dokumen transisi rencana pembangunan jangka menengah yang dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

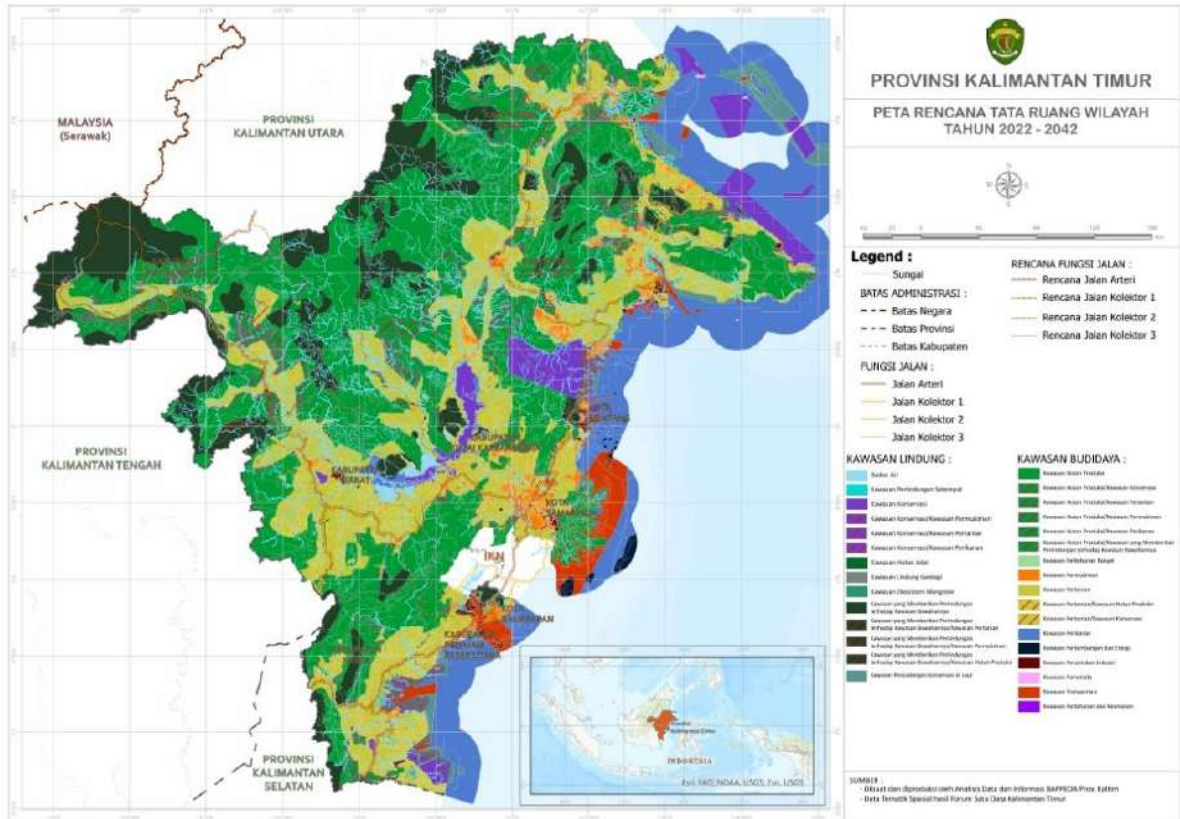
2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 37' 12.99" Lintang Utara (LU) dan -2° 28' 19.31" Lintang Selatan (LS), 113° 50' 3.61-119° 14' 13.06" Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 15.344.552 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.446.113 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.



Gambar II.1
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

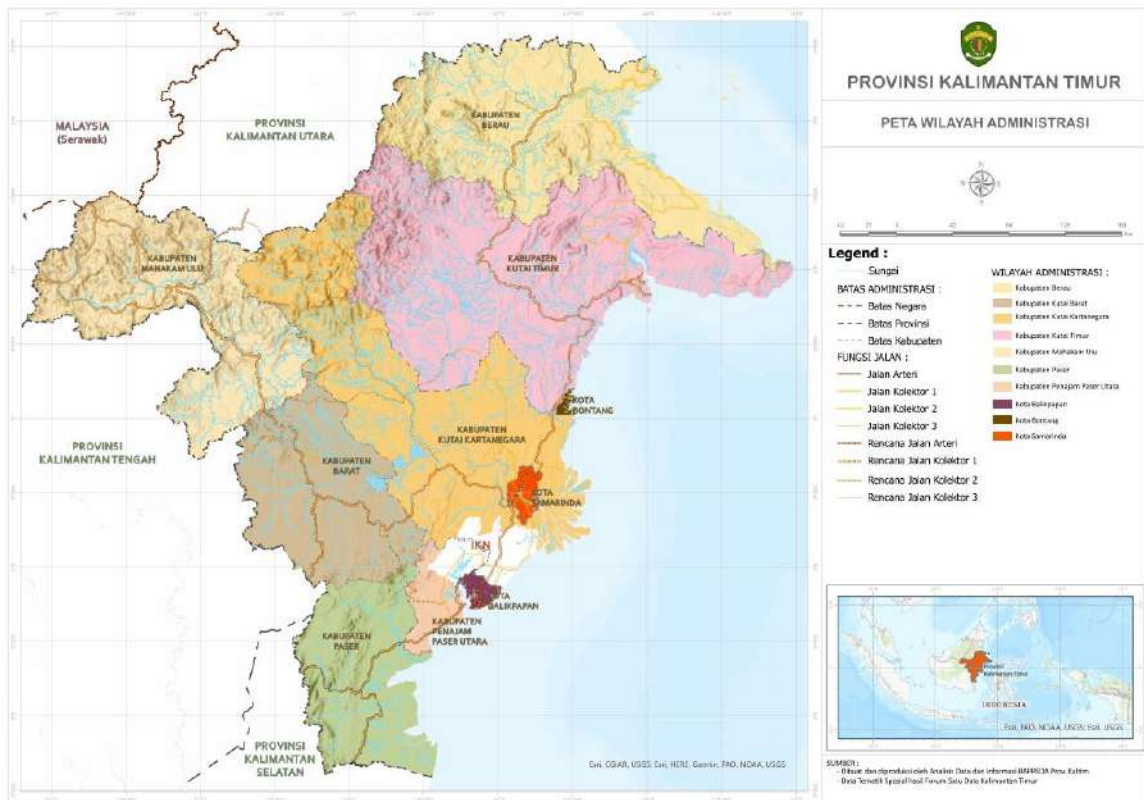
Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel II.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.104.644	10	144
2	KUBAR	1.361.117	16	194
3	KUKAR	2.529.239	20	237
4	KUTIM	3.122.720	18	141
5	Berau	2.137.135	13	110
6	PPU	203.254	4	54
7	MAHULU	1.849.224	5	50
8	Balikpapan	51.023	6	34
9	Samarinda	71.678	10	59
10	Bontang	16.077	3	15
Luas Wilayah Laut 12 Mil		2.898.439	-	-
Kalimantan Timur		15.344.552	105	1.038

Sumber: RTRW Provinsi KALTIM 2023-2042

Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar II.7.



Gambar II.2
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, terbagi 2 kawasan yaitu kawasan lindung seluas 2.975.994 ha dan kawasan budidaya seluas 6.925.495 ha. Kawasan lindung terdiri dari badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi (perikanan, permukiman, pertanian), kawasan hutan adat, kawasan lindung geologi, kawasan ekosistem mangrove, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan hutan produksi) dan kawasan pencadangan konservasi di laut sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan perkebunan rakyat, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri dan kawasan transportasi.

Setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

tentang Ibu Kota Negara, luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang dimana wilayah IKN Nusantara seluas 324.331 Ha yang terdiri dari luas wilayah daratan mencapai 256.142 ha dan wilayah laut mencapai 68.189 ha.

Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 m sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

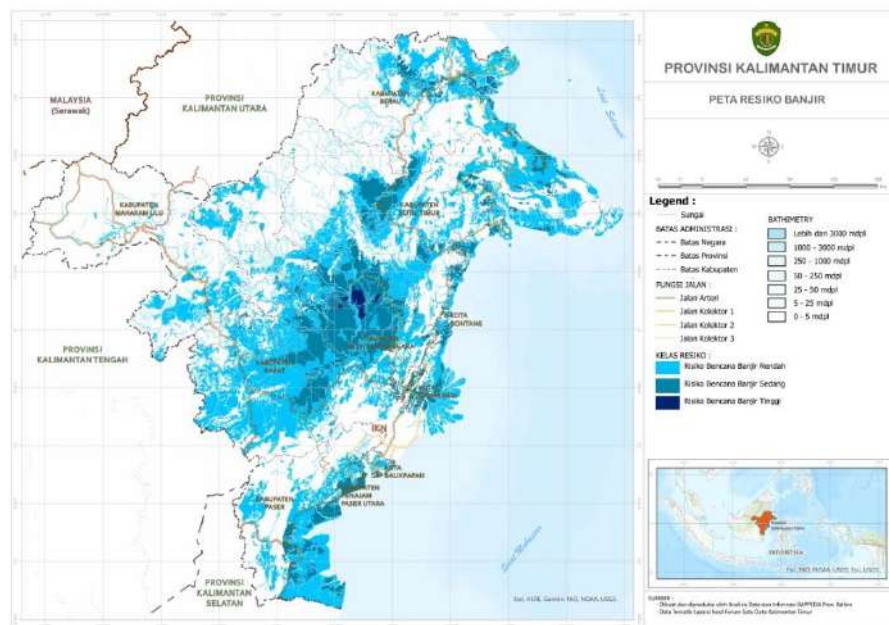
Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya, luas wilayah pada kemiringan di atas 40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai). Beberapa sungai yang ada di wilayah Kalimantan Timur adalah Sungai Berau, Sungai Kelai, Sungai Dondang, Sungai Mahakam, Sungai Belayan, Sungai Jembayan, Sungai Karang Mumus, Sungai Kaso, Sungai Kedang Pahu, Sungai Lawa, Sungai Loa Haur dan Sungai Telen.

Aktivitas geologi yang telah berlangsung di wilayah Kalimantan Timur menghasilkan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terbentuk berupa sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik

ditemukan berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (*mineral industry*) serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi bahan galian tambang yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Pada praktiknya keberadaan bahan galian tambang yang berlimpah, menarik orang untuk mengeksploitasi secara berlebihan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan pertambangan berkelanjutan sesuai kaidah “*Good Mining Practice*” yang berwawasan lingkungan.

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.



Gambar II.3
Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kaltim, diolah Bappeda Provinsi KALTIM, 2023)

Aktivitas manusia yang berpotensi meningkatkan bahaya dan risiko bencana Banjir yakni: pembudidayaan daerah dataran banjir; peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir.

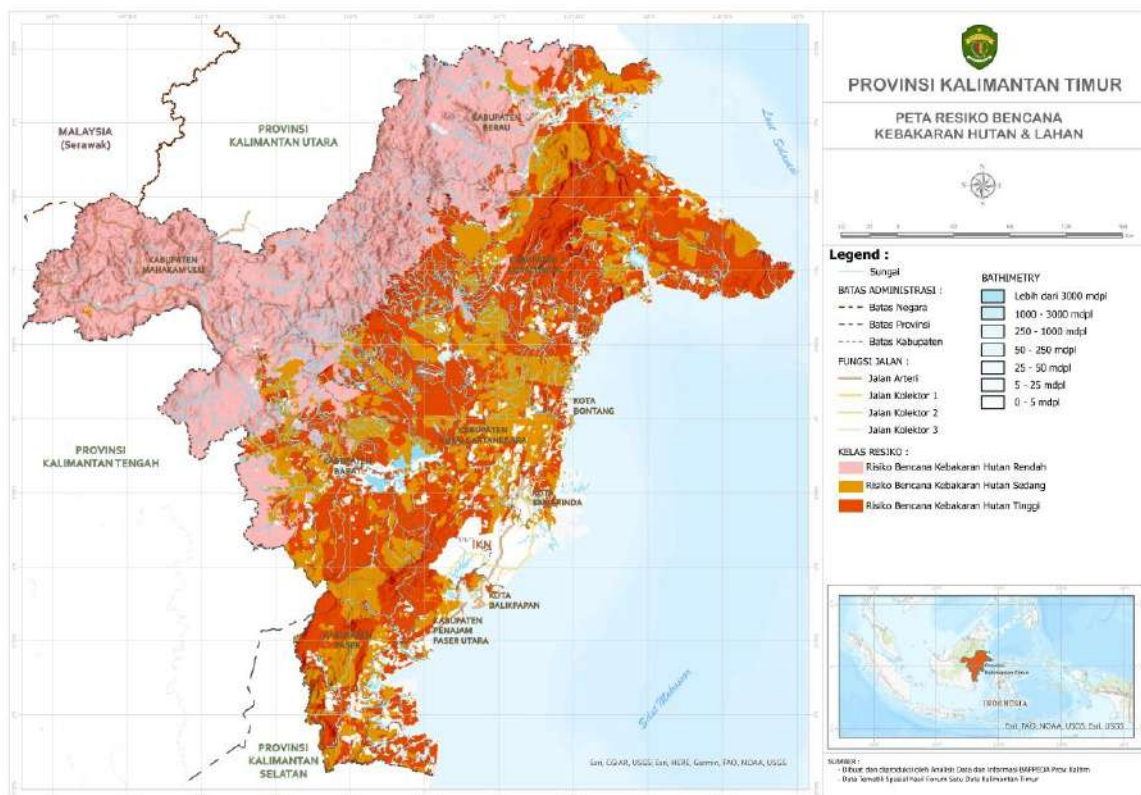
Terjadinya bencana banjir tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana banjir, antara lain:

- Buruknya saluran air/drainase. Kota-kota besar hampir setiap tahun mengalami Banjir karena tidak terawatnya saluran air. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran air sangat rendah sehingga saluran air dipenuhi sampah dan akhirnya jalan untuk lalu lintas air menjadi kecil. Selain sampah, juga banyaknya bangunan-bangunan yang menyebabkan saluran air tertutup beton bangunan sehingga saluran dalam arti air tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, air menggenang di jalan dan lama-lama menyebabkan Banjir.
- Kurangnya daerah resapan air.
Daerah resapan air merupakan suatu daerah yang ditanami pohon atau mempunyai danau yang berfungsi sebagai tampungan atau menyerap air ke dalam lapisan tanah kemudian disimpan sebagai cadangan air tanah. Masalah yang terjadi pada dewasa ini adalah semakin banyaknya bangunan yang didirikan terutama di kota-kota besar sehingga fungsi lahan hijau sebagai tempat resapan air mulai tergeser oleh adanya beton-beton bangunan yang berakibat terhambatnya air meresap ke dalam tanah, sehingga membentuk genangan dan akhirnya terjadi banjir.
- Penebangan pohon secara liar.
Selain memiliki fungsi untuk mencegah longsor dengan mempertahankan kontur tanah tetap pada posisinya, pohon juga berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah melalui akar-akarnya. Dewasa ini, penebangan pohon secara liar kerap kali dilakukan sehingga ketika terjadi hujan deras air tidak mampu terserap ke tanah namun

mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah seperti daerah pada hilir, perkotaan atau pedesaan yang menyebabkan banjir.

- Sungai yang tidak terawat.

Sungai memiliki peranan yang sangat besar ketika berbicara tentang banjir karena semestinya menjadi tempat untuk mengalirnya air dari air hujan menuju ke laut. Ketika sungai tidak terawat, rusak atau menjadi tercemar maka keberlangsungan fungsi sungai juga akan terganggu. Dewasa ini, kerusakan sungai pada umumnya disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan, atau tercemar karena adanya limbah pabrik yang menyebabkan terjadinya pendangkalan, bahkan ekosistem sungai itu sendiri menjadi rusak. Selain itu, warga sering menyalahgunakan sempadan atau bantaran sungai untuk dijadikan pemukiman.



Gambar II.4
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi KALTIM)

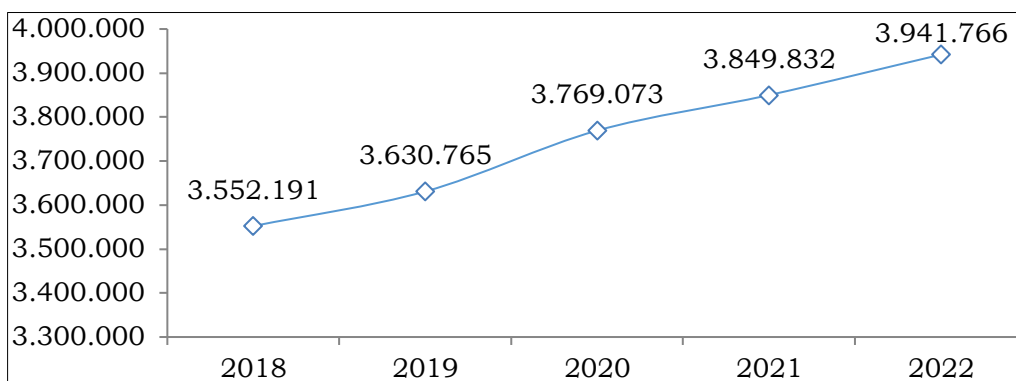
Pada tahun 2021, Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memiliki indeks 153,28 dan di tahun 2022 IRBI Kalimantan Timur mengalami penurunan risiko bencana menjadi 146,47, atau penurunan sebesar 6,81 poin dari tahun 2021, meskipun demikian Provinsi Kalimantan Timur masih

berada dalam zona yang memiliki risiko bencana yang tinggi. Capaian penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah keberhasilan pemerintah daerah dalam peningkatan Ketahanan Daerah.

Ketahanan Daerah merupakan sebuah ukuran keberhasilan, yang ditandai dengan meningkatnya sebuah kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan menjadi salah satu parameter penting untuk menentukan tingkat risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; Penanganan tematik kawasan rawan bencana; Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem pemulihan bencana.

2.1.3. Demografi

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 3.552.191 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.941.766 jiwa pada tahun 2022.

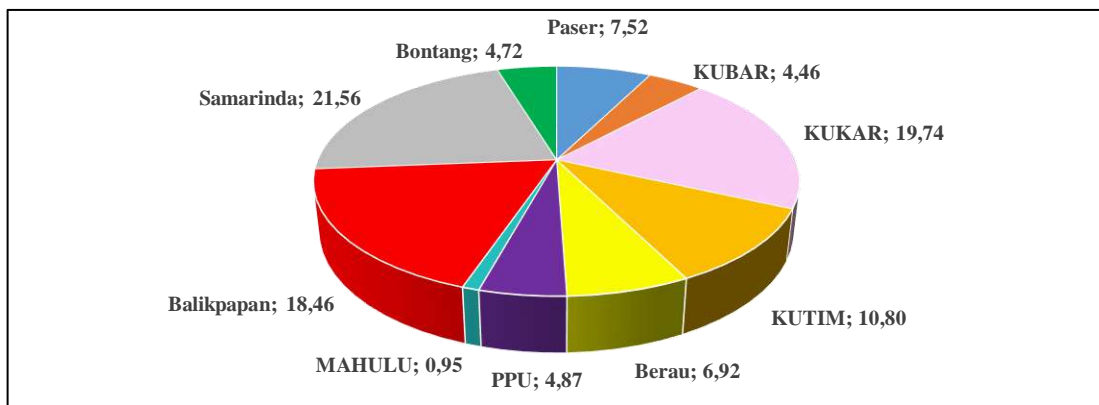


Gambar II.5

Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023)

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,56 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kota Bontang (4,72%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,87%), Kabupaten Kutai Barat (4,46%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,95%).



Gambar II.6
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023)

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,98 persen selama lima tahun sejak tahun 2018–2022. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya hingga mencapai 4,39 persen dalam lima tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Timur dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,20 persen.

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Laju Pertumbuhan Penduduk (2018-2022) (%)
1	Paser	259.417	265.148	277.401	288.225	296.582	2,26
2	KUBAR	162.200	164.048	165.938	170.871	175.610	1,33
3	KUKAR	677.755	696.784	734.485	753.862	778.096	2,33
4	KUTIM	420.760	422.905	424.334	424.743	425.787	0,20
5	Berau	224.654	232.189	251.439	263.150	272.887	3,29
6	PPU	170.475	173.671	181.349	186.801	191.967	2,00
7	MAHULU	28.833	30.321	35.010	35.274	37.318	4,39
8	Balikpapan	649.806	670.505	697.079	710.293	727.665	1,90
9	Samarinda	778.883	793.576	817.254	831.220	849.717	1,46
10	Bontang	179.408	181.618	184.784	185.393	186.137	0,62
Kalimantan Timur		3.552.191	3.630.765	3.769.073	3.849.832	3.941.766	1,98

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

Kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di Kota Balikpapan mencapai 1.426,15 per km². Sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 2,02 per km². Dimana total kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 31,67 per km². Selanjutnya, berdasarkan *Sex Ratio*, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

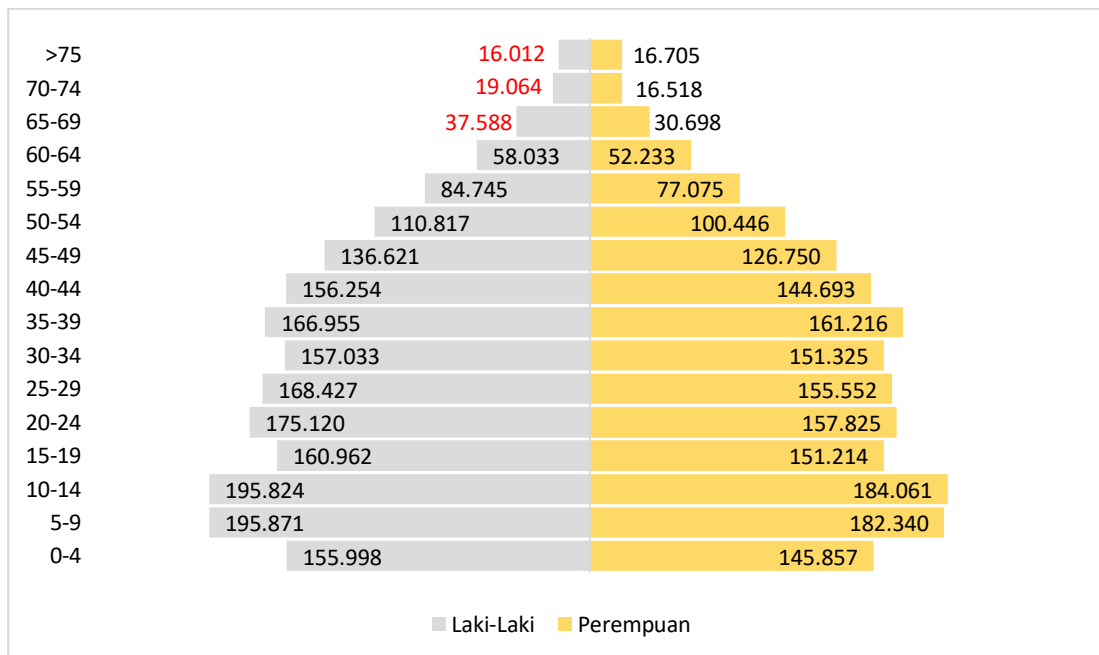
Tabel II.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Paser	153.455	143.127	296.582	107,22	26,85
2	KUBAR	92.207	83.403	175.610	110,56	12,90
3	KUKAR	405.154	372.942	778.096	108,64	30,76
4	KUTIM	227.438	198.349	425.787	114,67	13,64
5	Berau	144.720	128.167	272.887	112,92	12,77
6	PPU	99.423	92.544	191.967	107,43	94,45
7	MAHULU	19.920	17.398	37.318	114,50	2,02
8	Balikpapan	371.777	355.888	727.665	104,46	1.426,15
9	Samarinda	432.306	417.411	849.717	103,57	1.185,46

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
10	Bontang	96.433	89.704	186.137	107,50	1.157,78
	Kalimantan Timur	2.042.833	1.898.933	3.941.766	107,58	31,67

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) yang mencapai 68,92 persen dari total penduduk Kalimantan Timur, sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat sebesar 45,16 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang tidak dan belum produktif.



Gambar II.7

Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

Rata-rata usia penduduk pada usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi di Kalimantan Timur pada tahun 2022 pada laki-laki dan perempuan mengalami penurunan menjadi sebesar 0,42 persen jika dibanding dengan tahun 2021 yaitu sebesar 0,36 persen. Sedangkan untuk usia anak 13-15 tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,05 persen jika dibanding dengan tahun 2021 sebesar 0,58 persen. Untuk usia 16-18 tahun, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,35 persen jika dibanding dengan tahun 2021 sebesar 0,06 persen, dan pada

kategori penduduk usia 19-24 tahun sebesar 0,38 persen pada tahun 2022 yang berarti meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,02 persen. Dengan demikian secara umum, hanya pada kategori 13-15 tahun yang mengalami penurunan pada tahun 2022.

Tabel II.4
Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2022

Kelompok Usia Sekolah	Tidak / Belum Pernah Bersekolah				
	2018	2019	2020	2021	2022
7-12	0,24	0,16	0,12	0,36	0,42
13-15	0,25	0,19	0,05	0,58	0,05
16-18	0,38	0,09	0,17	0,06	0,35
19-24	0,38	0,35	0,12	0,02	0,38
7-24	0,31	0,21	0,12	0,23	0,33
Kelompok Usia Sekolah	Masih Bersekolah				
	2018	2019	2020	2021	2022
7-12	99,67	99,68	99,73	99,60	99,57
13-15	98,89	98,83	99,07	98,90	28,74
16-18	81,55	81,81	81,88	82,01	81,43
19-24	29,84	29,89	29,71	29,86	29,33
7-24	74,46	74,34	73,63	73,88	74,02
Kelompok Usia Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi				
	2018	2019	2020	2021	2022
7-12	0,00	0,16	0,14	0,04	0,01
13-15	0,86	0,98	0,88	0,52	1,21
16-18	18,07	18,10	17,95	17,93	18,22
19-24	69,78	69,76	70,17	70,12	70,29
7-24	25,23	25,45	26,25	25,88	25,65

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut agama, maka mayoritas penduduk Kalimantan Timur memeluk agama Islam sebesar 87,4 persen dari jumlah penduduk Kalimantan Timur. Secara rinci sebaran penduduk berdasarkan agama dimuat pada tabel di bawah.

Tabel II.5
Jumlah Penduduk Menurut Agama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Kab/Kota	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Kong Huchu	Lainnya	Jumlah
1	Paser	272.788	9.769	9.299	488	530	0	5	292.879
2	KUBAR	82.408	54.238	36.078	141	36	1	99	173.001
3	KUKAR	706.546	41.426	14.400	2.569	254	6	83	765.284
4	KUTIM	345.969	41.996	34.964	2.522	133	6	23	425.613
5	Berau	224.748	24.263	15.961	224	649	22	8	265.875
6	PPU	179.143	7.046	2.603	91	39	0	1	188.923
7	MAHULU	8.528	5.422	22.137	60	3	0	3	36.153
8	Balikpapan	648.261	49.750	13.041	1.390	5.935	31	15	718.423

No	Kab/Kota	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Kong Huchu	Lainnya	Jumlah
9	Samarinda	766.265	42.477	21.141	825	7.880	284	63	838.935
10	Bontang	167.023	15.248	3.221	298	138	0	0	185.928
Kalimantan Timur		3.401.679	291.635	172.845	8.608	15.597	350	300	3.891.014

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan tren yang meningkat dari komposisi sektor non migas dan batubara. Penurunan terjadi pada tahun 2020 baik di sektor migas maupun non migas sebagai akibat pandemi COVID-19. Nilai PDRB dengan migas Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 607,59 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 505,55 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 314,89 triliun. Penurunan Nilai PDRB pada tahun 2020 dikarenakan terjadi anomali dimana karena dampak Pandemi COVID-19 yang sangat signifikan khususnya dalam hal ekspor. Akan tetapi pada tahun 2022 nilai PDRB kembali meningkat seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Timur dengan berkurangnya dampak pandemi COVID-19, nilai PDRB dengan migas mencapai Rp 921,33 triliun, nilai PDRB non migas sebesar Rp 792,53 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 381,97 triliun.

Tabel II.6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Tahun	Migas	Non Migas	Non Migas dan Batubara
2018	636.454.483	518.074.570	291.567.584
2019	652.158.057	539.448.590	310.699.091
2020	607.744.486	505.786.456	315.126.677
2021	696.584.498	584.205.939	338.613.743
2022	921.332.980	792.531.260	381.969.993

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Mayoritas lapangan usaha utama Tahun 2022 mengalami perbaikan ekonomi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 53,24 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 490,50 triliun pada tahun 2022 dimana nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai Rp 314,20 triliun dan kontribusi sebesar 45,11 persen.

Tabel II.7
Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50.147.994 (7,89)	51.567.377 (7,91)	53.455.323 (8,80)	59.089.937 (8,48)	64.891.735 (7,04)
B	Pertambangan dan Penggalian	296.725.329 (46,69)	297.371.390 (45,60)	250.845.967 (41,27)	314.198.045 (45,11)	490.501.116 (53,24)
C	Industri Pengolahan	115.272.211 (18,14)	116.204.903 (17,82)	115.564.453 (19,02)	123.816.183 (17,77)	138.636.144 (15,05)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	315.059 (0,05)	344.961 (0,05)	385.062 (0,06)	395.471 (0,06)	422.609 (0,05)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	288.891 (0,05)	307.667 (0,05)	326.534 (0,05)	348.377 (0,05)	379.899 (0,04)
F	Konstruksi	53.500.578 (8,42)	58.472.319 (8,97)	58.308.248 (9,59)	62.313.147 (8,95)	70.945.215 (7,70)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	35.227.602 (5,54)	38.245.238 (5,86)	39.053.042 (6,43)	41.474.909 (5,95)	47.547.015 (5,16)
H	Transportasi dan Pergudangan	22.990.716 (3,62)	24.172.248 (3,71)	22.067.334 (3,63)	23.218.927 (3,33)	28.980.671 (3,15)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.106.132 (0,96)	6.691.563 (1,03)	6.479.402 (1,07)	6.707.636 (0,96)	7.520.922 (0,82)
J	Informasi dan Komunikasi	7.988.163 (1,26)	8.708.382 (1,34)	9.390.805 (1,55)	10.206.752 (1,47)	11.087.181 (1,20)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.717.119 (1,53)	10.216.630 (1,57)	10.490.249 (1,73)	11.244.159 (1,61)	13.379.873 (1,45)
L	Real Estate	5.574.934 (0,88)	5.768.853 (0,88)	5.868.848 (0,97)	5.891.471 (0,85)	6.152.947 (0,67)
M,N	Jasa Perusahaan	1.299.480 (0,20)	1.346.710 (0,21)	1.334.744 (0,22)	1.384.556 (0,20)	1.516.507 (0,16)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.337.921 (1,94)	13.019.826 (2,00)	12.750.605 (2,10)	13.198.181 (1,89)	14.448.961 (1,57)
P	Jasa Pendidikan	10.107.377 (1,59)	10.995.564 (1,69)	11.724.048 (1,93)	12.340.328 (1,77)	13.132.703 (1,43)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.905.167 (0,61)	4.289.673 (0,66)	5.331.020 (0,88)	6.205.096 (0,89)	6.692.400 (0,73)
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.994.008 (0,63)	4.434.754 (0,68)	4.368.801 (0,72)	4.551.864 (0,65)	5.097.080 (0,55)
PDRB		635.498.680 (100,00)	652.158.057 (100,00)	607.744.486 (100,00)	696.584.498 (100,00)	921.332.980 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

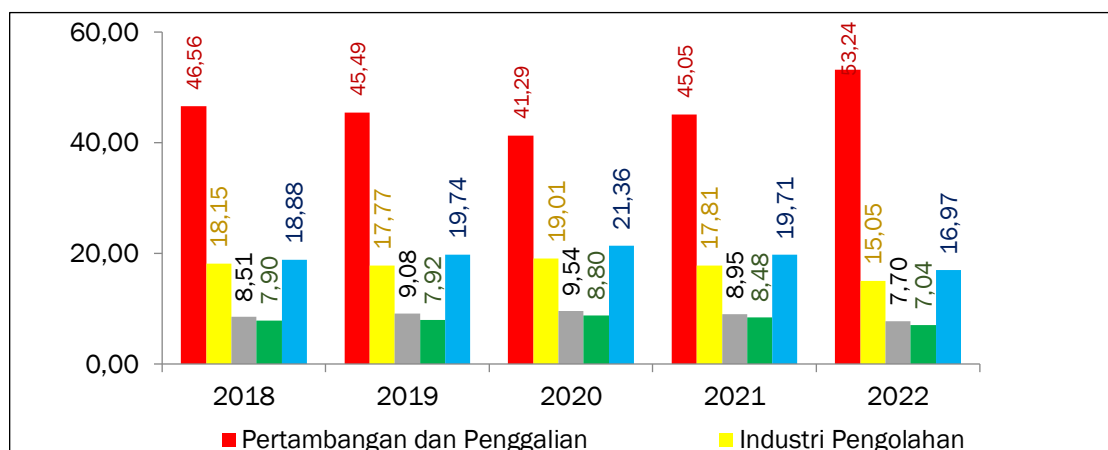
Tabel II.8
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32.140.165 (6,92)	33.396.194 (6,86)	33.026.690 (6,99)	33.001.680 (6,81)	33.649.338 (6,75)
B	Pertambangan dan Penggalian	218.686.722 (47,06)	233.762.253 (48,03)	222.909.197 (47,17)	227.991.366 (47,07)	235.949.043 (46,72)
C	Industri Pengolahan	96.797.539 (20,83)	96.824.494 (19,89)	93.909.767 (19,90)	96.208.521 (19,86)	99.651.978 (19,70)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	261.834 (0,06)	284.529 (0,06)	317.368 (0,07)	324.789 (0,07)	337.250 (0,06)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	224.574 (0,05)	235.440 (0,05)	247.995 (0,05)	258.504 (0,05)	278.099 (0,06)
F	Konstruksi	33.754.000 (7,26)	35.682.996 (7,33)	35.601.166 (7,49)	37.005.238 (7,63)	39.887.735 (7,68)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25.678.998 (5,53)	27.025.570 (5,55)	27.069.910 (5,76)	28.216.889 (5,83)	30.137.130 (5,94)
H	Transportasi dan Pergudangan	13.937.815 (3,00)	14.264.273 (2,93)	13.281.104 (2,83)	13.667.051 (2,83)	15.301.391 (3,00)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.080.239 (0,88)	4.340.118 (0,89)	4.108.417 (0,87)	4.193.399 (0,86)	4.577.468 (0,90)
J	Informasi dan Komunikasi	7.295.360 (1,57)	7.795.537 (1,60)	8.338.485 (1,76)	8.994.261 (1,86)	9.712.239 (1,92)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.751.780 (1,45)	6.966.068 (1,43)	7.137.891 (1,51)	7.320.021 (1,51)	8.012.391 (1,58)
L	Real Estate	4.227.269 (0,91)	4.316.690 (0,89)	4.321.113 (0,91)	4.290.183 (0,89)	4.397.865 (0,88)
M,N	Jasa Perusahaan	896.170 (0,19)	914.126 (0,19)	889.600 (0,19)	911.510 (0,19)	960.338 (0,19)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.941.460 (1,71)	8.252.791 (1,70)	7.951.124 (1,68)	8.108.290 (1,67)	8.727.045 (1,71)
P	Jasa Pendidikan	6.780.283 (1,46)	7.036.310 (1,45)	7.244.720 (1,53)	7.420.372 (1,53)	7.679.667 (1,53)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.691.435	2.864.486	3.404.048	3.861.218	4.048.704

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
		(0,58)	(0,59)	(0,72)	(0,80)	(0,80)
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.548.786 (0,55)	2.750.363 (0,57)	2.634.733 (0,56)	2.665.592 (0,55)	2.851.225 (0,56)
PDRB		464.694.427 (100,00)	486.712.237 (100,00)	472.393.329 (100,00)	484.438.884 (100,00)	506.158.907 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim. Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2018, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama. Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka terlihat penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian hingga menjadi 41,29 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan pada Kategori Industri Pengolahan dan Kategori Pertanian. Sedangkan pada tahun 2021 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan mencapai 45,05 persen sedangkan sektor yang lain mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2022, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian kembali meningkat tajam hingga mencapai 53,24 persen akan tetapi sektor yang lain mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar II.8
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (persen)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal melalui upaya hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan.

Lapangan Usaha yang dapat didorong diantaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kaltim secara rata-rata dari tahun 2018-2022 sebesar 8,05 persen. Capaian ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk melakukan perubahan yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian terutama pada sub tanaman perkebunan.

Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara. Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian.

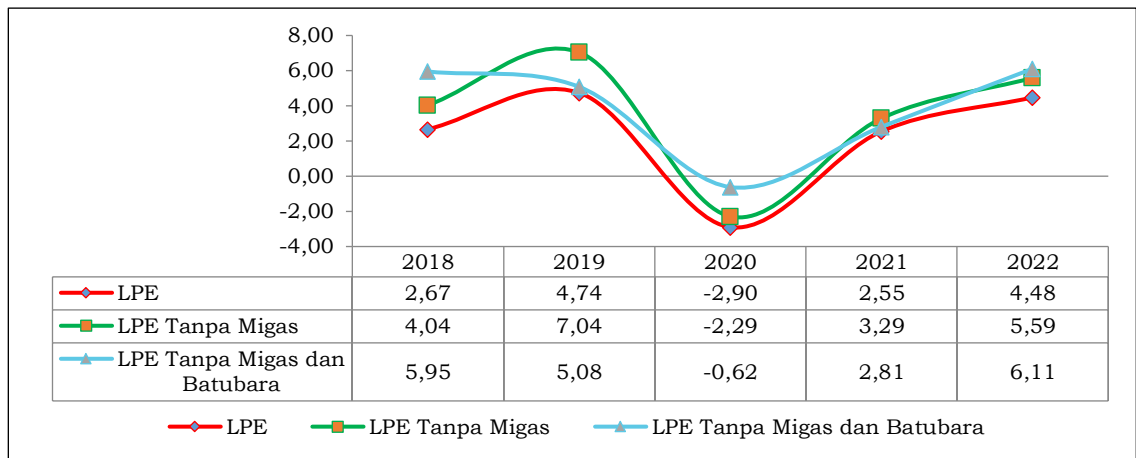
Perlu diketahui bahwa *share* Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif kecil, pada tahun 2022 kontribusinya hanya sebesar 4,71 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 2,67 persen pada tahun 2018, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,04 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,95 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi negatif 2,90 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar 0,62 persen.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 4,48 persen dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 2,55 persen. Pertumbuhan bersumber dari peningkatan

permintaan global maupun domestik serta juga turut ditopang oleh peningkatan aktivitas masyarakat, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mencapai 5,59 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,11 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim tersebut utamanya bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan sejalan dengan tingginya pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Di samping itu, berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kaltim, mobilitas masyarakat yang terus membaik, dan masa panen produk pangan dan pertanian menjadi penopang pertumbuhan.



**Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)**

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan banyak proyek pembangunan fisik di Provinsi Kalimantan Timur yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif mendatang didukung oleh peningkatan kinerja di industri pengolahan minyak yang diperkirakan akan lebih tinggi, seiring aktivitas masyarakat yang makin menggeliat. Tenaga kerja Kaltim akan terserap, kebutuhan ribuan pekerja di IKN pasti akan berhubungan dengan petani dan pedagang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk akomodasi baik hotel maupun penginapan juga akan laku karena banyak tamu untuk berbisnis maupun dinas, bahkan pelaku UMKM juga terkena dampak dalam penjualan produk.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2020 dimana terlihat pertumbuhan negatif di beberapa lapangan usaha karena pandemi COVID-19 dan ditahun 2022 seiring dengan pulihnya perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan diikuti dengan pertumbuhan seluruh sektor lapangan usaha.

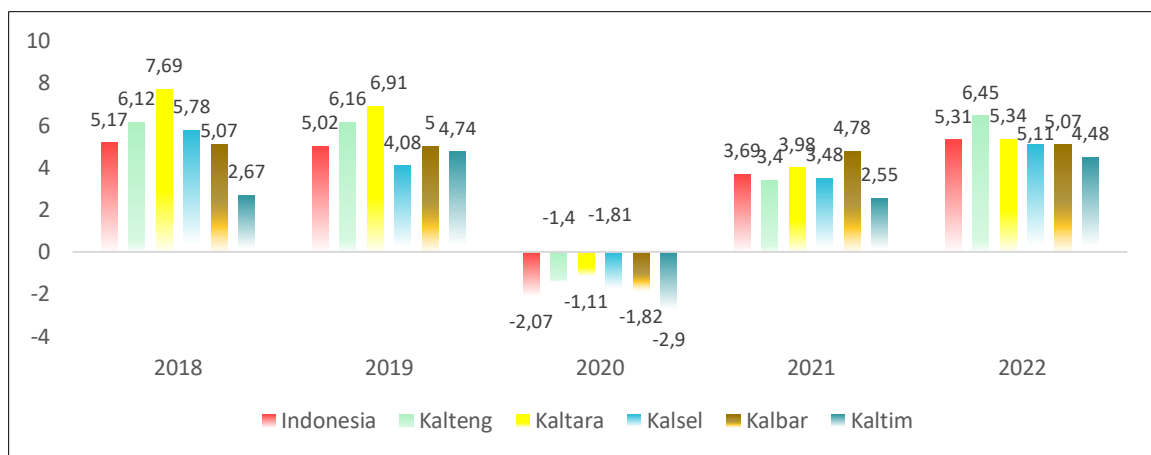
Tabel II.9

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,14	3,91	(0,98)	-0,08	1,96
B	Pertambangan dan Penggalian	1,07	6,89	(4,61)	2,28	3,49
C	Industri Pengolahan	0,69	0,03	(2,99)	2,45	3,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,76	8,67	11,47	2,34	3,84
E	Pengadaan Air	3,22	4,84	5,33	4,24	7,58
F	Konstruksi	7,91	5,71	(0,87)	3,94	7,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,16	5,24	0,57	4,24	6,81
H	Transportasi dan Pergudangan	5,80	2,34	(6,58)	2,91	11,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,70	6,37	(5,34)	2,07	9,16
J	Informasi dan Komunikasi	4,38	6,86	7,56	7,86	7,98
K	Jasa Keuangan	4,05	3,17	2,47	2,55	9,46
L	<i>Real Estate</i>	4,83	2,12	0,69	(0,72)	2,51
M,N	Jasa Perusahaan	4,96	2,00	(3,14)	2,46	5,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,11	3,92	(3,83)	1,98	7,63
P	Jasa Pendidikan	7,73	3,78	2,96	2,42	3,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	6,43	20,22	13,43	4,86
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,02	7,91	(3,01)	1,17	6,96
Laju Pertumbuhan Ekonomi		2,67	4,74	(2,90)	2,55	4,48

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Secara regional, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mulai membaik. Provinsi Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 6,45 persen, lalu diikuti Kalimantan Utara sebesar 5,34 persen, Kalimantan Selatan sebesar 5,11 persen, Kalimantan Barat sebesar 5,07 persen dan Kalimantan Timur sebesar 4,48 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dengan pertumbuhan sebesar 5,31 persen, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga masih tertinggal.



Gambar II.9

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Tabel II.10

Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	102.584,20	109.767,66	111.183,75	115.437,96	125.598,38
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.958,20	3.238,86	3.250,60	3.407,57	3.689,59
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23.760,62	26.298,93	26.257,95	27.422,86	31.283,12
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	173.474,79	187.939,11	188.195,89	210.237,72	232.491,11
5	Perubahan Inventori	1.613,95	722,91	1.238,58	383,59	401,29
6	Net Ekspor Barang & Jasa	331.106,93	324.190,59	277.049,17	338.268,63	527.869,49
PDRB		635.498,68	652.158,06	607.320,78	695.158,33	921.332,98

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2018-2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena Pandemi COVID-19, dimana PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami

penurunan menjadi sebesar Rp 607,32 triliun. Pada tahun 2022 ekonomi Kalimantan Timur mulai mengalami perbaikan ekonomi yang mencapai Rp 921,33 triliun meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Tabel II.11
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16,26	16,79	18,30	16,61	13,63
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,47	0,50	0,54	0,49	0,40
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,73	4,03	4,32	3,94	3,40
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,25	28,72	30,97	30,24	25,24
5	Perubahan Inventori	0,25	0,11	0,20	0,06	0,04
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	52,10	49,71	45,67	48,66	57,29

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018-2022 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor barang dan jasa. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri dimana ekspor barang tambang dan penggalian sangat mendominasi dalam ekspor barang dan jasa. Fenomena tersebut merupakan aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi komoditas bahan bakar mineral (batubara, minyak bumi dan gas alam).

Tabel II.12
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,14	3,15	(0,48)	1,20	3,41
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,57	6,77	(0,99)	0,30	3,03
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,91	7,70	(1,95)	2,03	8,48
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,54	4,79	(1,06)	8,03	5,47
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang & Jasa	0,17	5,17	(4,60)	5,99	4,05
PDRB		2,64	4,74	-2,90	2,55	4,48

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2022 mencapai 4,48 persen. Dimana pertumbuhan terendah dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 3,03 persen. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 8,48 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB Kalimantan Timur dari sisi pertumbuhannya meningkat dikarenakan kegiatan Pemerintah.

Dominasi struktur ekonomi kewilayahan didominasi oleh PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Nilai PDRB (ADHK) pada tahun 2022 mencapai Rp 128,81 triliun disusul perekonomian Kutai Timur dan Kota Balikpapan yang masing-masing dengan nilai PDRB (ADHK) sebesar Rp 97,17 triliun dan Rp 91,10 triliun. Ketiga daerah ini memang layak memiliki kontribusi dominan karena memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian yang cukup menjanjikan dalam memberikan sumbangsih nilai PDRB.

Tabel II.13
Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Miliar Rp)

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	34.362,05	35.734,75	34.712,07	36.581,32	36.980,15
2	KUBAR	20.108,76	21.253,83	20.644,38	21.509,56	22.535,73
3	KUKAR	121.509,48	126.272,37	120.953,68	124.197,10	128.805,43
4	KUTIM	88.582,49	95.815,41	92.868,68	92.039,29	97.174,42
5	Berau	26.769,40	28.275,57	27.337,09	28.802,65	29.940,78
6	PPU	6.590,45	6.762,58	6.604,62	6.492,78	7.433,74
7	MAHULU	1.675,32	1.767,80	1.763,93	1.786,29	1.802,46
8	Balikpapan	79.807,11	83.793,41	83.034,71	86.817,89	91.104,44
9	Samarinda	43.323,57	45.491,36	45.041,33	46.294,41	49.342,39
10	Bontang	41.316,22	40.427,70	39.320,23	39.949,08	40.931,39

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan, salah satu faktor penyebab meningkatnya kinerja ekonomi adalah mulai menurunnya pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah Kalimantan Timur, khususnya pasar global, meningkatnya rata-rata harga komoditas pangan (tandan buah segar/TBS kelapa sawi dan minyak kelapa sawit/CPO), Harga Batu Bara Acuan (HBA) serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sehingga terdapat peningkatan *demand* terhadap komoditas energi, yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan

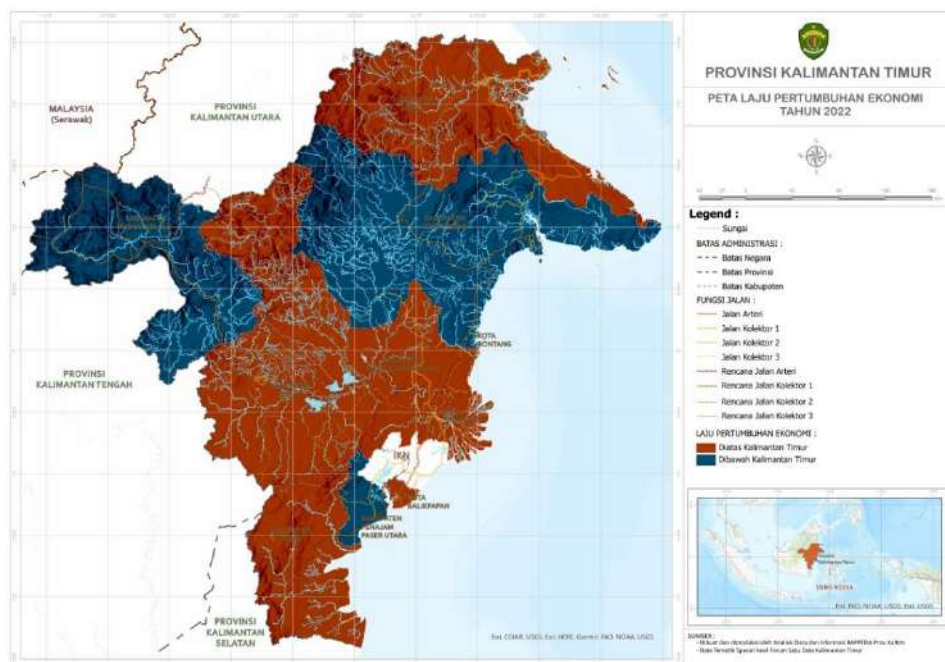
batubara dan kemudian diikuti peningkatan harga komoditas energi tersebut di pasar internasional.

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Kabupaten yang masih mengalami pertumbuhan yang melambat adalah Kabupaten Paser yaitu 1,09 persen dan Kabupaten Mahakam Ulu 0,91 persen. Sementara itu, wilayah kabupaten/kota lainnya mengalami pertumbuhan yang cepat dengan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan capaian 14,49 persen.

Tabel II.14
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)

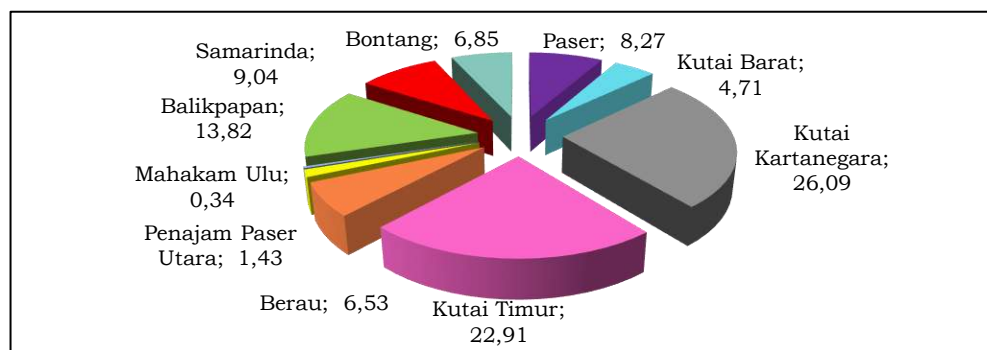
No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	3,69	3,99	-2,86	5,39	1,09
2	KUBAR	5,06	5,69	-2,87	4,19	4,77
3	KUKAR	2,16	3,92	-4,21	2,68	3,71
4	KUTIM	2,38	8,17	-3,08	-0,89	5,58
5	Berau	2,07	5,63	-3,32	5,36	3,95
6	PPU	1,28	2,61	-2,34	-1,69	14,49
7	MAHULU	5,40	5,52	-0,22	1,27	0,91
8	Balikpapan	4,97	4,99	-0,91	4,56	4,94
9	Samarinda	4,96	5,00	-0,99	2,78	6,58
10	Bontang	-4,08	-2,15	-2,74	1,60	2,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023



Gambar II.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Tahun 2022
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, maka terlihat bahwa peranan Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 26,09 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 22,91 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memberikan peran sebesar 13,82 persen sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 10 persen.



Gambar II.11
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022 (%)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Pada tahun 2022, terdapat 5 (lima) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebagai sektor ekonomi utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalan sangat mendominasi terutama pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 85,09 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Tabel II.15
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2022

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	76,37	Pertanian	10,05	Industri	4,17
KUBAR	Pertambangan	57,88	Pertanian	12,27	Konstruksi	9,22
KUKAR	Pertambangan	70,77	Pertanian	10,72	Konstruksi	6,35
KUTIM	Pertambangan	85,09	Pertanian	5,90	Industri	2,55
Berau	Pertambangan	66,98	Pertanian	9,33	Perdagangan	4,99
PPU	Konstruksi	24,11	Pertambangan	22,62	Pertanian	19,41

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
MAHULU	Pertanian	74,53	Konstruksi	6,73	Pertambangan	6,29
Balikpapan	Industri	47,20	Konstruksi	15,81	Transportasi	10,75
Samarinda	Konstruksi	20,51	Perdagangan	16,07	Pertambangan	15,66
Bontang	Industri	78,72	Konstruksi	7,04	Perdagangan	3,32

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 76,37 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 70,77 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya. Kabupaten lain dengan sektor utama pertambangan juga tercatat di Berau. Adapun daerah yang menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota Bontang dan Kota Balikpapan, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel II.16
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2022

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	74,38	PMTB	13,57	K. Ruta	9,53
KUBAR	Net Ekspor	54,77	PMTB	27,13	K. Ruta	11,94
KUKAR	Net Ekspor	58,34	PMTB	30,48	K. Ruta	8,79
KUTIM	Net Ekspor	80,07	PMTB	13,92	K. Ruta	4,45
Berau	Net Ekspor	73,45	PMTB	14,41	K. Ruta	8,79
PPU	PMTB	55,19	K. Ruta	34,20	K. Pemerintah	10,18
MAHULU	Net Ekspor	32,87	PMTB	28,89	K. Ruta	24,43
Balikpapan	PMTB	37,72	Net Ekspor	35,07	K. Ruta	23,53
Samarinda	K. Ruta	43,94	PMTB	42,20	K. Pemerintah	12,75
Bontang	Net Ekspor	73,21	PMTB	13,99	K. Ruta	10,35

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

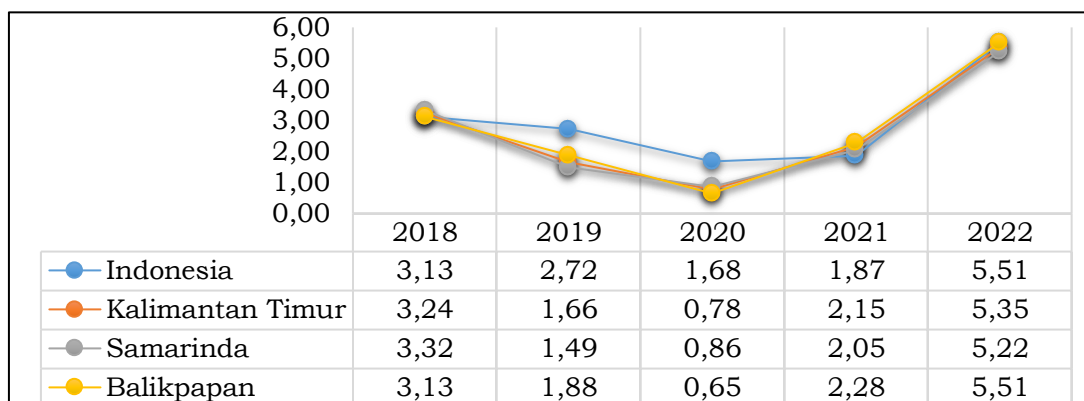
Pada tahun 2022, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebanyak tujuh kabupaten/kota memiliki perekonomian yang didominasi oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT). Kabupaten/kota yang perekonomiannya didominasi oleh komponen selain Net ekspor adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan didominasi oleh komponen PMTB (investasi) yang masing-masing memberi *share* sebesar 55,19 persen dan 37,72 persen. Sementara itu, perekonomian wilayah Kota Samarinda didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga dengan *share* 43,94.

Kabupaten/kota yang porsi terbanyak merupakan Net Ekspor merupakan wilayah dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, seperti batubara, minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan porsi komponen Net Ekspor antar wilayah tersebut, yang memiliki nilai *share* Net Ekspor terbesar adalah Kabupaten Kutai Timur, yaitu sebesar 80,07 persen. Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau juga memiliki *share* Net Ekspor yang signifikan, yaitu masing-masing sebesar 74,38 persen dan 73,45 persen. Sementara itu, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki nilai *share* Net Ekspor masing-masing sebesar 73,21 persen, 54,77 persen, 58,34 persen dan 32,87 persen.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai 5,35 persen. Hal ini karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.



Gambar II.12
Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

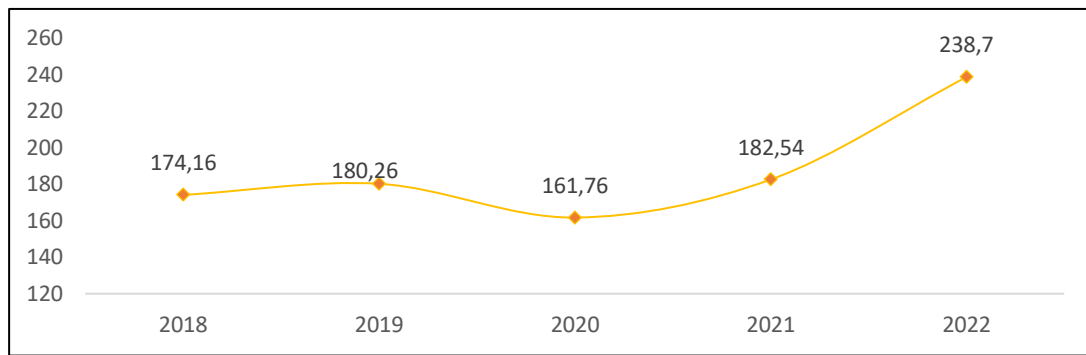
Tingkat Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur masih disumbang secara dominan oleh bahan makanan menjadi penyumbang terbesar inflasi umum yang berpotensi meningkatkan kemiskinan mengingat alokasi makanan dalam *budget* rumah tangga miskin cenderung lebih besar ketimbang alokasi makanan dalam *budget* rumah tangga non miskin karena harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan. Kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan yang mengakibatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur meningkat. Peningkatan inflasi pada tahun 2022 terjadi seiring dengan membaiknya optimisme masyarakat terhadap prospek perekonomian seiring semakin terkendalnya kasus COVID-19 yang mendorong normalisasi permintaan masyarakat.

Kota Balikpapan pada tahun 2022 mengalami inflasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya menjadi 5,51 persen, dan lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Samarinda sebesar 5,22 persen. Sehingga secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 5,35 persen.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRB-nya besar dengan jumlah penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya.

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dari sebesar Rp 180,26 juta menjadi Rp 160,11 juta. Hal ini tentu saja disebabkan adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian daerah, khususnya ekonomi makro. Namun di tahun 2022 nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku kembali meningkat mencapai Rp 238,70 juta.



Gambar II.13

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2022 yakni di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 450,27 juta, Kota Bontang sebesar Rp 344,56 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 325,67 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 72,05 juta dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 94,51 juta.

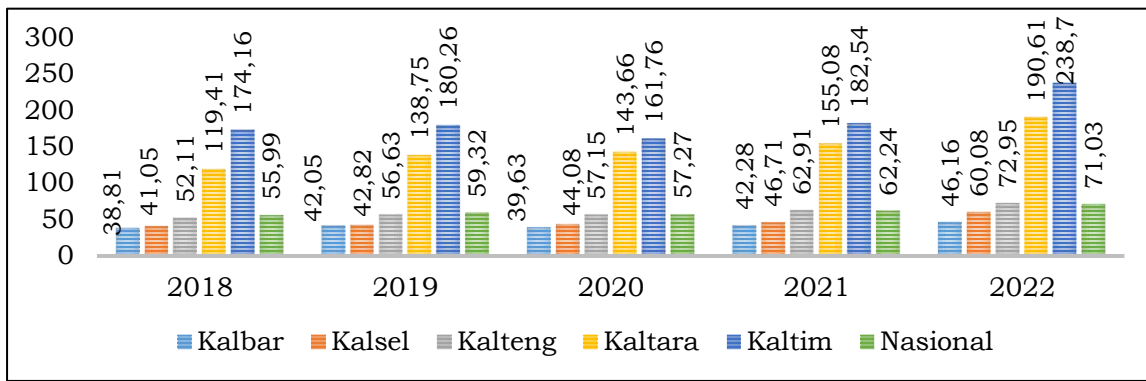
Tabel II.17

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	171,64	173,34	157,18	194,12	272,09
2	KUBAR	192,10	195,40	158,03	184,46	246,65
3	KUKAR	210,47	212,76	204,50	241,84	325,67
4	KUTIM	353,74	367,11	268,80	304,16	450,27
5	Berau	166,27	173,83	143,67	170,34	232,68
6	PPU	55,70	57,76	50,78	55,85	72,05
7	MAHULU	95,32	102,46	85,38	90,17	94,51
8	Balikpapan	151,30	165,69	151,31	160,20	180,96
9	Samarinda	74,08	79,95	80,36	85,60	99,82
10	Bontang	337,45	327,06	311,88	320,44	344,56

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 238,70 juta dan tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarnya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.



Gambar II.14
PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan
Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

D. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,31 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi sebanyak 236,25 ribu jiwa dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 241,77 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 728.208 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan. Penurunan angka kemiskinan terjadi karena mulai pulihnya perekonomian sehingga memberikan pengaruh positif pada beberapa lapangan usaha.

Tabel II.18
Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2018	405.108	169.596	574.704	218,90	6,03
Maret 2019	429.165	179.991	609.155	219,92	5,94
Maret 2020	463.823	198.479	662.302	230,26	6,10
Maret 2021	485.445	203.590	689.035	241,77	6,54
Maret 2022	513.874	214.334	728.208	236,25	6,31

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Tingkat kemiskinan masyarakat di Kaltim juga tercermin dari peningkatan Garis Kemiskinan (GK) Kaltim dengan peningkatan GK di perdesaan yang lebih besar dibandingkan di perkotaan. GK meningkat dari Rp689.035/kapita/bulan pada bulan Maret 2021 menjadi Rp728.208/kapita/bulan pada Maret 2022. Peningkatan garis kemiskinan Kaltim bersumber dari peningkatan garis kemiskinan baik dari perkotaan

maupun perdesaan. Dari sisi lokasi, peningkatan garis kemiskinan di wilayah perdesaan sebesar 6,67% atau lebih besar dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang meningkat sebesar 5,23%. Komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKM di perkotaan dan perdesaan utamanya disebabkan oleh komoditas beras, rokok kretek filter dan telur ayam ras, sedangkan komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKNM di perkotaan dan perdesaan adalah komoditas perumahan. Komoditas beras merupakan penyumbang terhadap GKM di perkotaan dan perdesaan dengan masing-masing tercatat sebesar 14,88% dan 17,41%. Selanjutnya, rokok kretek filter merupakan komoditas yang menyumbang GKM terbesar kedua yang tercatat sebesar 11,14% di perkotaan dan 14,24% di perdesaan. Selanjutnya, diikuti oleh komoditas telur ayam ras yang tercatat sebesar 4,66% di perkotaan dan 4,35% di perdesaan. Komoditas lainnya yang memberi sumbangan GKM adalah daging ayam ras, mie instan, gula pasir, ikan tongkol, bawang merah, ikan kembung, dan cabai rawit.

Tabel II.19
Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan
Menurut Daerah Tahun 2022

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	69,33	Beras	73,30
2	Rokok Kretek Filter	11,14	Rokok Kretek Filter	14,24
3	Daging ayam ras	5,01	Telur ayam ras	4,35
4	Telur ayam ras	4,66	Tongkol/Tuna/Cakalang	3,30
5	Mie Instan	3,50	Mie Instan	3,19
6	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,94	Daging Ayam Ras	2,99
7	Gula Pasir	2,18	Gula Pasir	2,61
8	Bawang Merah	1,92	Bawang merah	2,29
9	Cabe Rawit	1,84	Kembung	1,92
10	Tempe	1,65	Cabe Rawit	1,85

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

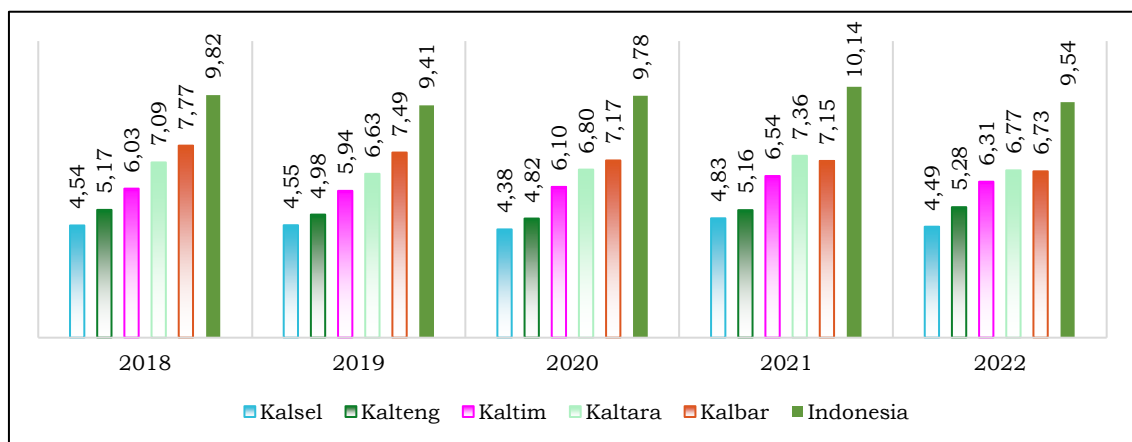
Bila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2022 masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,55 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,45 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu. Namun dalam perjalanannya, perkembangan positif selalu ditunjukkan dari hasil pembangunan daerah hingga mulai berkurangnya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia.

Tabel II.20
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	9,03	8,95	9,23	9,73	9,43
2	KUBAR	9,15	9,09	9,29	10,24	10,20
3	KUKAR	7,41	7,20	7,31	7,99	7,96
4	KUTIM	9,22	9,48	9,55	9,81	9,28
5	Berau	5,04	5,04	5,19	5,88	5,65
6	PPU	7,40	7,18	7,36	7,61	7,25
7	MAHULU	11,62	11,25	11,44	11,90	11,55
8	Balikpapan	2,64	2,42	2,57	2,89	2,45
9	Samarinda	4,59	4,59	4,76	4,99	4,85
10	Bontang	4,67	4,22	4,38	4,62	4,54

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Regional Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan tengah meningkat sebanyak 0,12 poin, sementara Kalimantan Timur menurun sebanyak 0,23 poin. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,54 persen.



Gambar II.15
Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional
Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 62.870 jiwa, Kota Samarinda sebanyak 41.950 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 36.840 jiwa. Disisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah share PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap

total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel II.21
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (jiwa)

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	25.140	25.450	26.770	27.560	27.020
2	KUBAR	13.490	13.450	13.780	15.380	15.380
3	KUKAR	56.560	56.340	58.420	62.360	62.870
4	KUTIM	33.020	35.310	36.980	37.780	36.840
5	Berau	11.330	11.620	12.300	13.620	13.310
6	PPU	11.760	11.520	11.930	12.130	11.590
7	MAHULU	3.250	3.190	3.260	3.180	3.100
8	Balikpapan	17.010	15.780	17.020	18.530	15.830
9	Samarinda	39.230	39.800	41.920	42.840	41.950
10	Bontang	8.100	7.470	7.910	8.410	8.390

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

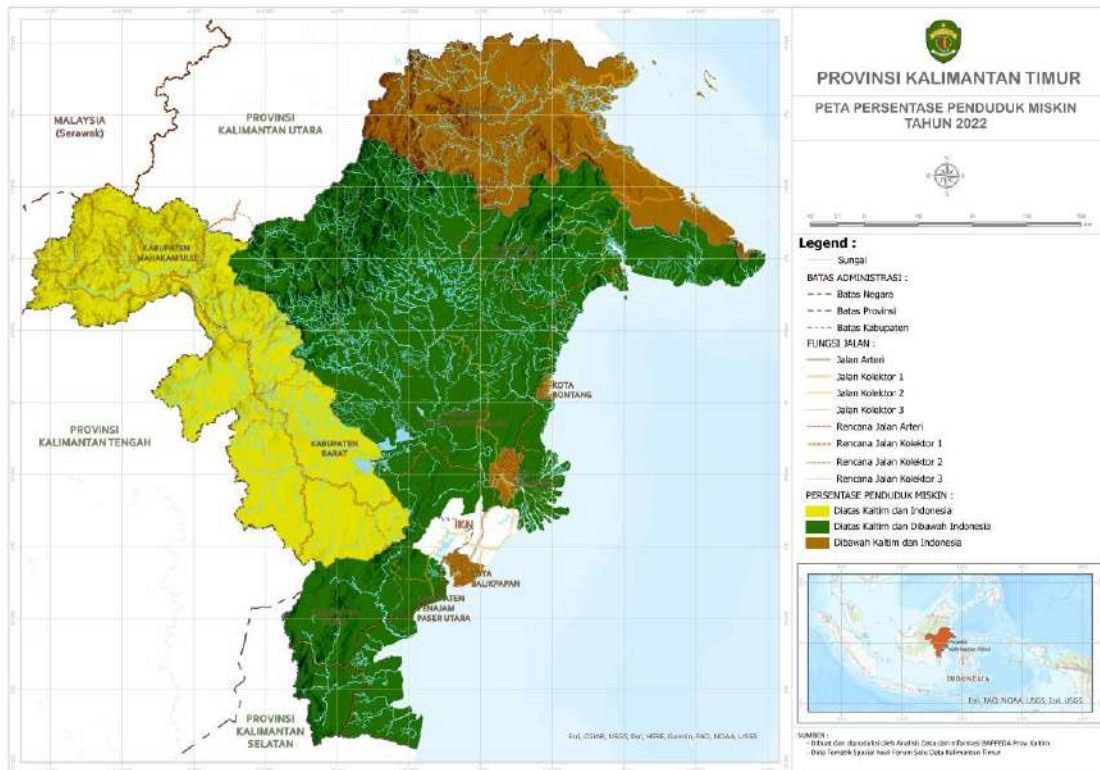
Tabel II.22
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparah
Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah
Tahun 2018-2022

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2018	0,656	1,229	0,846
Maret 2019	0,610	1,530	0,910
Maret 2020	0,664	1,743	1,015
Maret 2021	1,017	1,673	1,223
Maret 2022	0,672	1,687	0,989
Indeks Keparah			
Kemiskinan (P2)			
Maret 2018	0,161	0,270	0,197
Maret 2019	0,130	0,380	0,210
Maret 2020	0,157	0,412	0,240
Maret 2021	0,303	0,413	0,337
Maret 2022	0,149	0,395	0,226

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan begitu juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2022. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun menjadi 0,989. Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,337 menjadi 0,226 pada periode yang sama. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada bulan Maret 2022, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,672 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,687. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,149 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,395. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

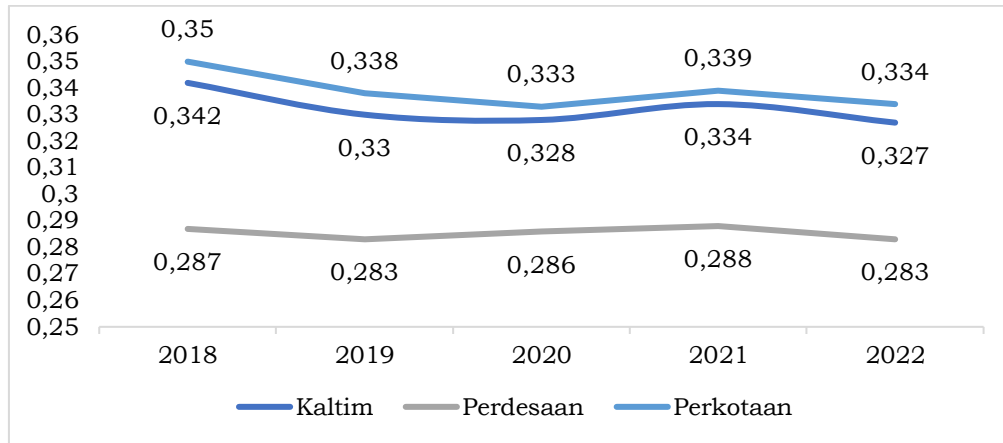
Indeks Kedalaman Kemiskinan terus meningkat dari tahun 2019-2021 dalam 3 tahun ini (2019, dengan nilai 0,910 di tahun 2021 tercatat berada pada nilai 1,223. Sempat menyentuh nilai 1,015 (2020) dan 1,223 (2021) yaitu pada masa Pandemi COVID-19. Serupa dengan Tingkat Keparahan kemiskinan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kalimantan Timur. Sejak tahun 2019 dengan nilai 0,197 meningkat menjadi 0,337 di tahun 2021. Bahkan pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan pernah berada di nilai 0,303 di tahun 2021, yaitu pada masa Pandemi COVID-2019. Kondisi yang tidak baik tersebut akan dipadukan dengan Program Pemerintah Pusat yaitu Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada tahun 2023 dalam upaya penanganan pengentasan kemiskinan di wilayah Perkotaan dan wilayah perdesaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kalimantan Timur menurun 0,989 dan 0,226. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati batas garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran penduduk miskin menjadi semakin kecil.



Gambar II.16
Peta Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Timur yang diukur dengan Indeks Gini, selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pengalaman performa baik pada tahun 2018 ke 2020 yaitu kondisi penurunan pernah ditunjukkan pada nilai 0,342 menjadi 0,328. Pada tahun 2021 Indeks Gini mengalami peningkatan menjadi 0,334. Rasio gini di Kalimantan Timur tahun 2022 menunjukkan penurunan sebesar 0,327 hal ini menunjukkan geliat usaha yang semakin adaptif pasca Pandemi COVID-19. Hal tersebut yang menjadi faktor utama membaiknya kinerja aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari perputaran roda perekonomian, sehingga terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kalimantan Timur. Akan tetapi capaian indeks gini tahun 2022 masih dibawah target sebesar 0,308. Sehingga perlu perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelesaikan ketimpangan pendapatan penduduk.



Gambar II.17

Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki indeks gini paling rendah dengan capaian 0,269. Kabupaten Berau memiliki Indeks Gini tertinggi dengan capaian 0,352.

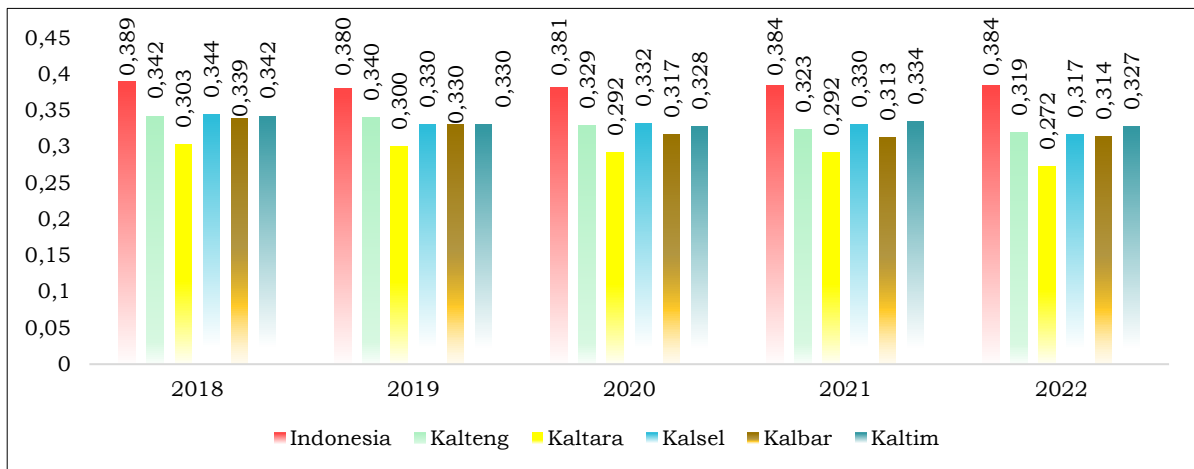
Tabel II.23

**Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (jiwa)**

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	0,299	0,262	0,290	0,288	0,282
2	KUBAR	0,311	0,334	0,338	0,317	0,300
3	KUKAR	0,302	0,278	0,294	0,283	0,269
4	KUTIM	0,326	0,346	0,325	0,328	0,304
5	Berau	0,303	0,345	0,300	0,377	0,352
6	PPU	0,313	0,322	0,292	0,263	0,274
7	MAHULU	0,334	0,302	0,259	0,270	0,288
8	Balikpapan	0,356	0,302	0,311	0,325	0,334
9	Samarinda	0,317	0,341	0,324	0,322	0,346
10	Bontang	0,376	0,338	0,405	0,340	0,324

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,272. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,384 pada tahun 2022. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.



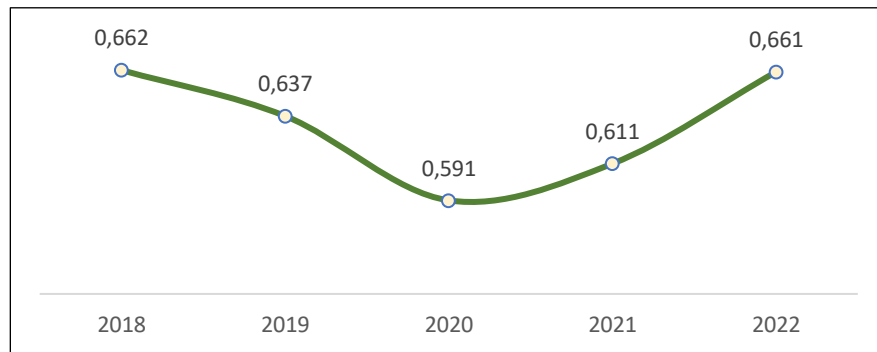
Gambar II.18

Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

E. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada di atas angka 0,60, walaupun terdapat kecenderungan semakin menurun sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,594. Namun di tahun 2022 angka Indeks Williamson mengalami peningkatan yang mencapai 0,661.

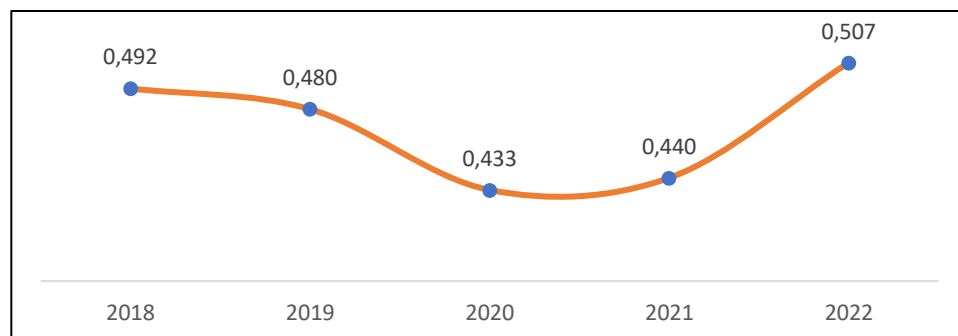


Gambar II.19
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamsons)
Regional Kalimantan Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor Pertanian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalan menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup tinggi pada regional Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai Indeks Williamsons di dalam wilayah Kalimantan Timur yang berada pada kisaran 0,40-0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang relatif homogen. Namun, disisi lain besaran yang relatif sama tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.



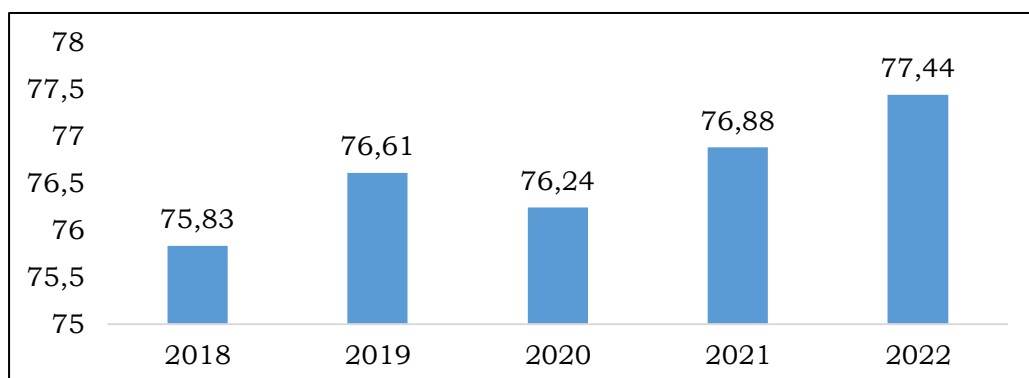
Gambar II.20
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamsons) Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis sektor primer. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber perekonomian.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2018-2022, angka IPM Kalimantan Timur mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 angka IPM mengalami penurunan. Angka IPM tahun 2020 turun 0,37 poin menjadi 76,24 dari yang sebelumnya sebesar 76,61 di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak pada rumusan IPM Kalimantan Timur. Pada tahun 2021-2022 IPM Kalimantan Timur kembali mengalami peningkatan mencapai 76,88 dan 77,44. Capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur masih sama seperti pada tahun sebelumnya, yaitu berstatus “tinggi” dan berada pada posisi ketiga di Nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.



Gambar II.21

**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022**

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

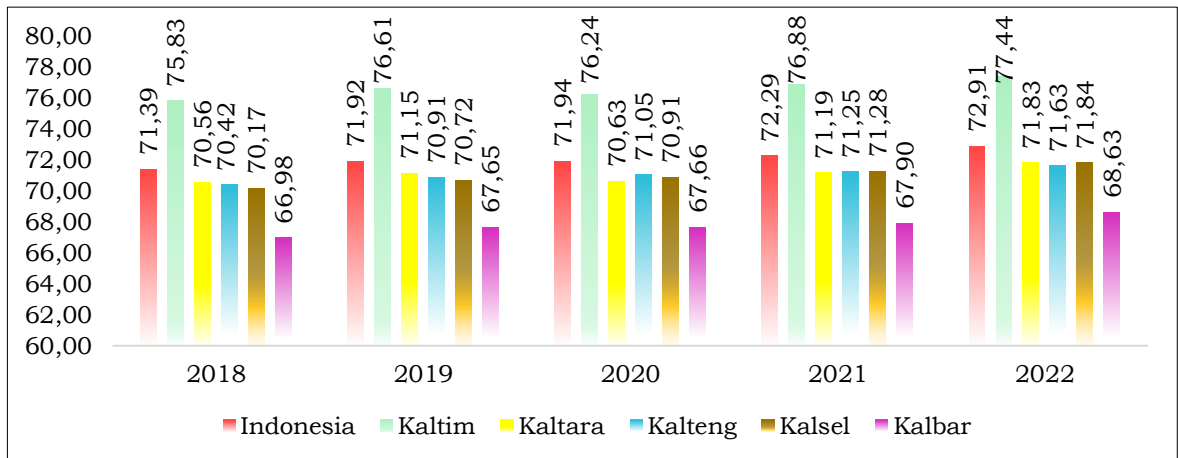
Peningkatan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2022, angka IPM seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkoreksi naik. Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan terbesar adalah Kabupaten Kutai Barat sebesar 1,18 persen dari 72,07 di tahun 2021 menjadi 72,92 di tahun 2022. Selain Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu juga mengalami peningkatan angka IPM yang signifikan yaitu sebesar 1,18 persen dari 67,95 di tahun 2021 menjadi 68,75 di tahun 2022.

Tabel II.24
Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	71,61	72,29	72,04	72,93	73,44
2	KUBAR	70,69	71,63	71,19	72,07	72,92
3	KUKAR	73,15	73,78	73,59	74,06	74,67
4	KUTIM	72,56	73,49	73,00	73,81	74,35
5	Berau	74,01	74,88	74,71	75,20	75,74
6	PPU	71,13	71,64	71,41	72,01	72,55
7	MAHULU	66,67	67,58	67,09	67,95	68,75
8	Balikpapan	79,81	80,11	80,01	80,71	81,13
9	Samarinda	79,93	80,20	80,11	80,76	81,43
10	Bontang	79,86	80,09	80,02	80,59	80,94

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

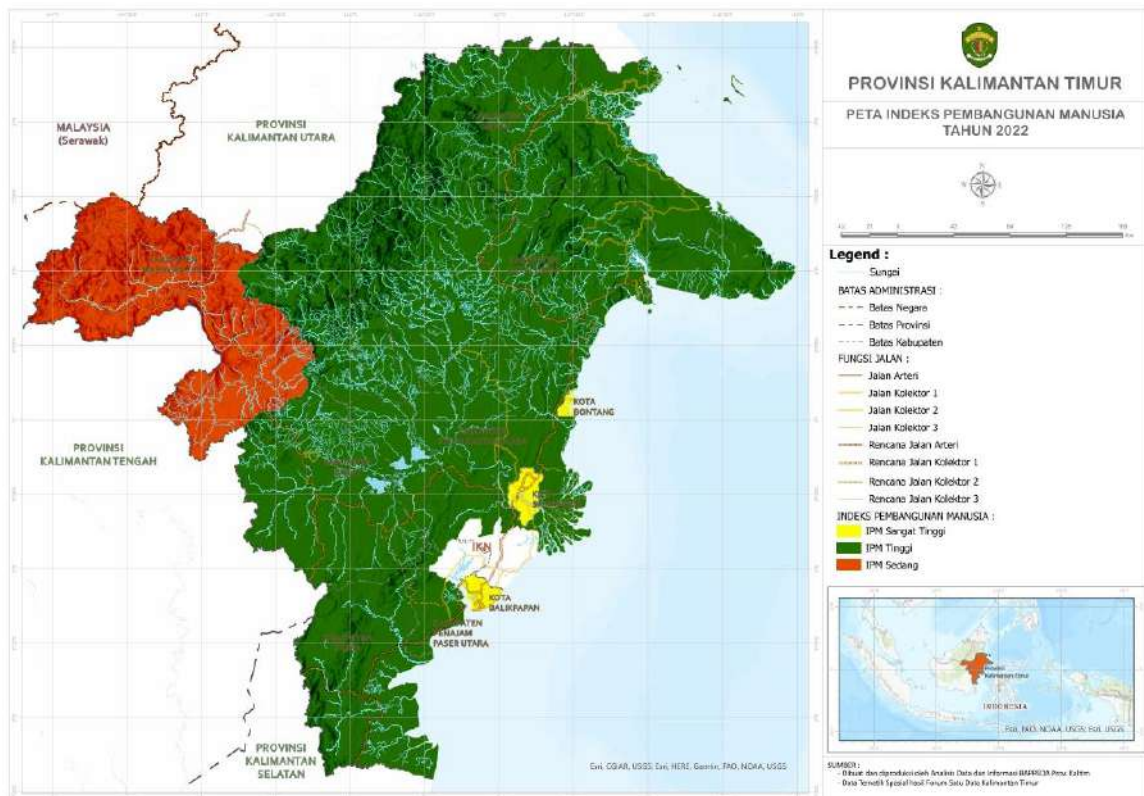
Jika dilihat dari perbandingan dengan regional Kalimantan, maka IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan IPM tertinggi dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 68,63 – 71,84. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi telah berkurang di seluruh wilayah Kalimantan sehingga seluruh provinsi terdampak positif, khususnya kualitas SDM dari sisi pengeluaran per kapita.



Gambar II.22
Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah rangking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

Pola spasial capaian IPM kabupaten/kota tahun 2022 menunjukkan kondisi adanya kesenjangan dalam pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Penduduk kabupaten/kota dengan status pencapaian IPM yang sudah masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dan “Tinggi” memiliki kemudahan dan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses hasil pembangunan terutama dalam hal memperoleh atau bahkan meningkatkan pendapatan serta memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibanding penduduk di kabupaten dengan status pencapaian IPM kategori “sedang”, “rendah” dan “sangat rendah”.



Gambar II.23

Pola Spasial Status Pencapaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2022

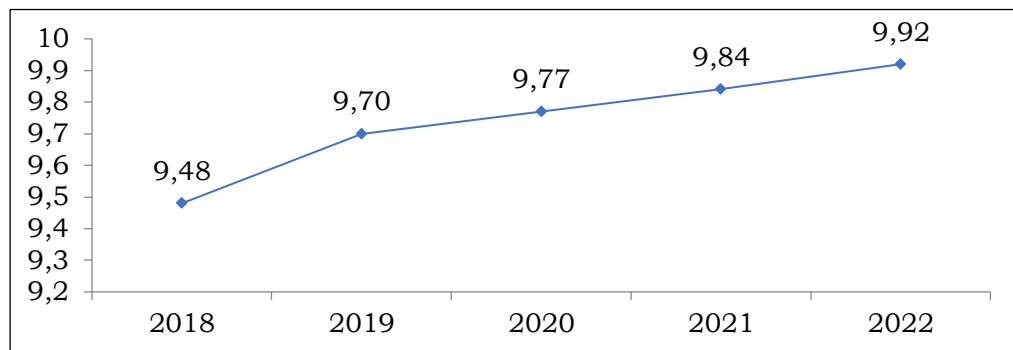
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Pada tahun 2022 tidak ada perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Samarinda memiliki status IPM “Sangat Tinggi”, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki status IPM “Tinggi” sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki status “Sedang”.

Perkembangan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM diuraikan sebagai berikut:

1) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2022 mencapai 9,92 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2022 berada di atas target yang ditetapkan sebesar 9,40 tahun.



Gambar II.24
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (Tahun)

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-rata lama sekolah tertinggi diatas rata-rata lama sekolah Provinsi, yang dimana Kota Balikpapan memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi mencapai 10,92 tahun. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama sekolah paling

rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian 8,36 tahun pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP Kelas III). Angka ini masih-belum mencapai target pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Tabel II.25
Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2022 (tahun)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	8,22	8,54	8,55	8,79	8,80
2	KUBAR	8,07	8,34	8,47	8,70	8,78
3	KUKAR	8,84	9,10	9,22	9,23	9,24
4	KUTIM	9,08	9,18	9,19	9,43	9,44
5	Berau	8,98	9,25	9,52	9,53	9,54
6	PPU	8,03	8,16	8,28	8,36	8,51
7	MAHULU	7,69	7,89	7,97	8,18	8,36
8	Balikpapan	10,65	10,67	10,68	10,91	10,92
9	Samarinda	10,46	10,47	10,48	10,49	10,71
10	Bontang	10,72	10,73	10,79	10,80	10,81

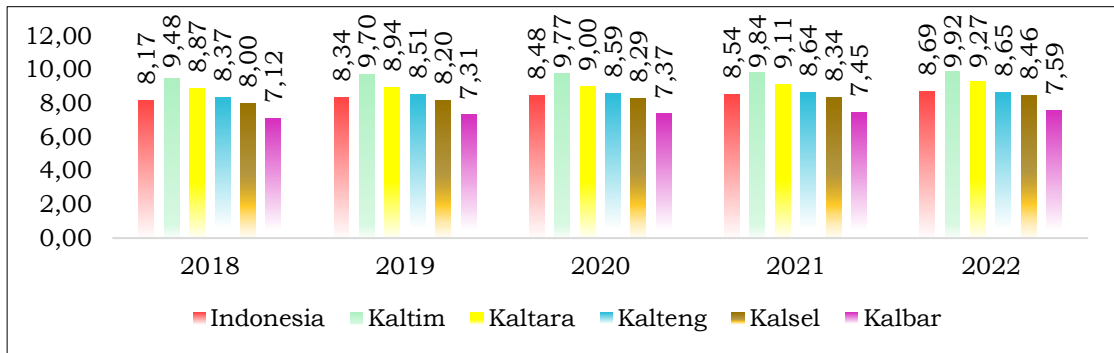
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Seperti data yang tersaji pada Tabel II.25 diatas, sampai dengan tahun 2022 masih terdapat tujuh Kabupaten yaitu Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu yang memiliki angka rata-rata lama sekolah dibawah angka rata-rata lama sekolah provinsi. Namun demikian dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terlihat adanya tren kenaikan angka rata-rata lama sekolah pada keempat Kabupaten tersebut walaupun tidak signifikan.

Jika dilihat berdasarkan capaian rata-rata lama sekolah yang tertinggi ditahun 2022, Kota Balikpapan menduduki peringkat pertama rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini disebabkan antara lain karena sarana dan prasarana pendidikan yang sudah lengkap ataupun memadai di semua jenjang Pendidikan di Kota Balikpapan, sedangkan Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah terendah adalah Kabupaten Mahulu dengan capaian tahun 2022 sebesar 8,36 tahun, hal ini dimungkinkan antara lain karena infrastruktur pendidikan di Kabupaten Mahulu masih perlu mendapat perhatian khusus baik oleh Pemerintah Pusat maupun daerah.

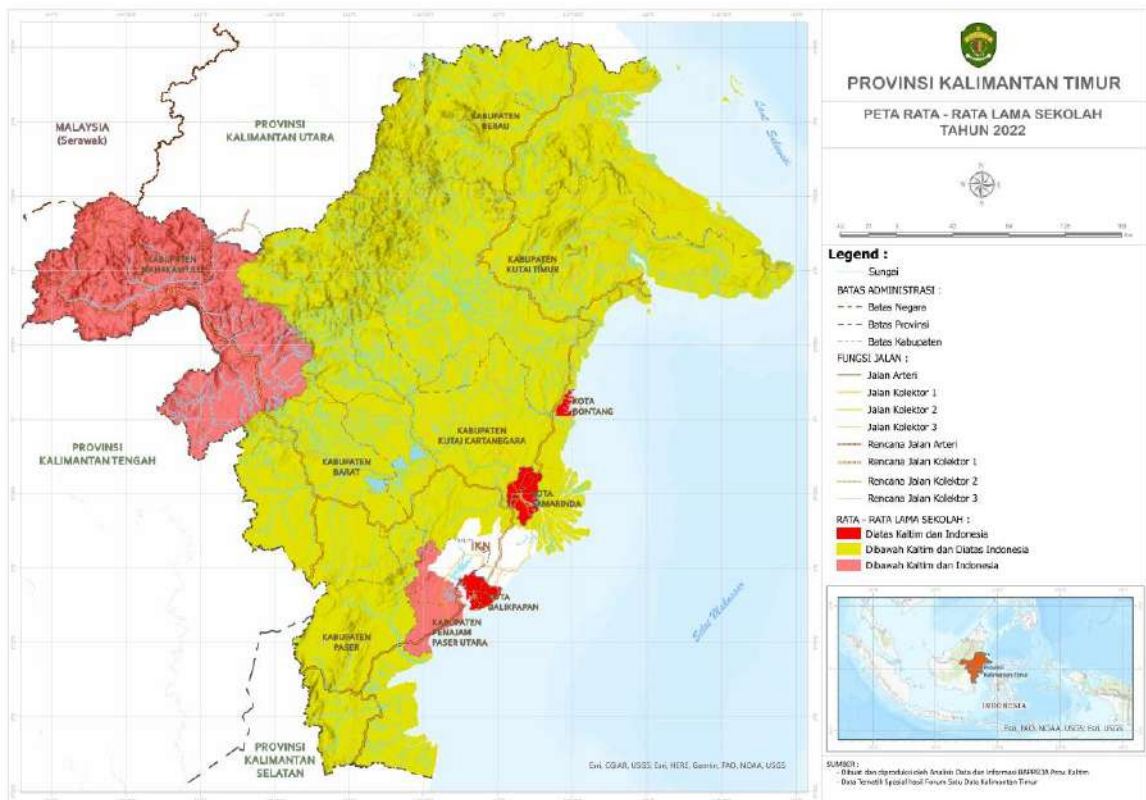
Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,92 tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari

Nasional sebesar 8,69 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 9,27 tahun dan 8,65 tahun.



Gambar II.25
Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

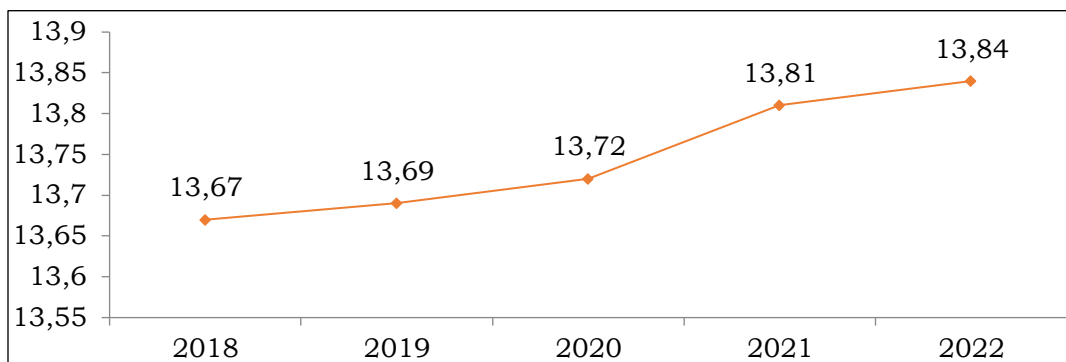
Pola spasial capaian Rata-Rata Lama Sekolah kabupaten/kota tahun 2022 menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tingginya angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.



Gambar II.26
Pola Spasial Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

2) Harapan Lama Sekolah

Di tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,84 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.



Gambar II.27
Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (Tahun)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 15,10 tahun sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 12,62 tahun pada tahun 2022 merupakan capaian harapan lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya.

Tabel II.26
Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2022 (tahun)

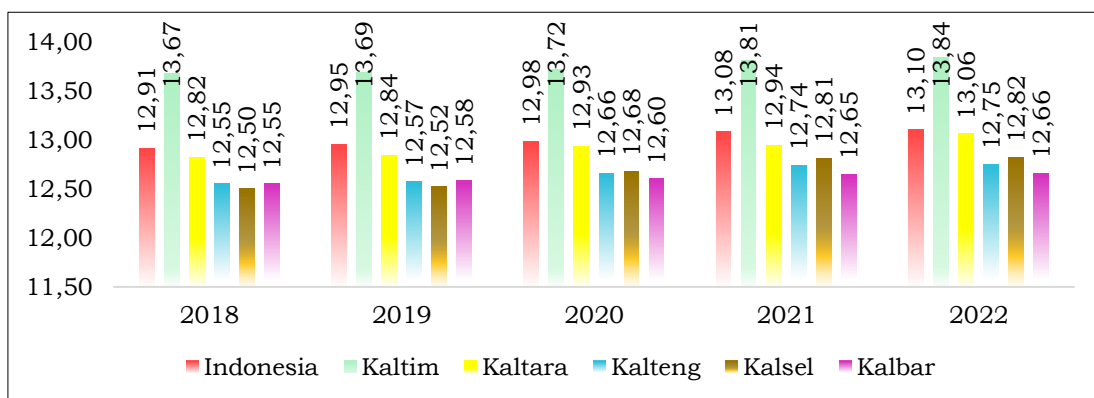
No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	12,99	13,00	13,10	13,25	13,27
2	KUBAR	12,88	12,89	12,90	13,02	13,09
3	KUKAR	13,57	13,58	13,59	13,60	13,63
4	KUTIM	12,65	12,78	12,89	12,90	13,00
5	Berau	13,3	13,31	13,32	13,33	13,35
6	PPU	12,54	12,55	12,56	12,57	12,70
7	MAHULU	12,48	12,50	12,51	12,61	12,62
8	Balikpapan	14,12	14,13	14,14	14,22	14,23
9	Samarinda	14,66	14,70	14,89	15,09	15,10
10	Bontang	12,89	12,90	13,03	13,17	13,18

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023

Secara umum Harapan Lama Sekolah pada kabupaten/kota mengalami tren kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 meskipun kenaikan harapan lama sekolah di kabupaten/kota belum menunjukkan kenaikan secara signifikan. Sebagai upaya pemerintah terhadap peningkatan harapan lama sekolah di delapan kabupaten dengan angka harapan lama sekolah masih berada dibawah provinsi yaitu Mahulu, PPU, Kutim, Kubar, Bontang, Paser, Berau dan Kukar. Khususnya Kabupaten Mahulu dengan angka harapan lama sekolah yang paling rendah, maka diperlukan adanya langkah konkret sebagai upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan baik pada peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan maupun pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikannya sehingga peningkatan angka harapan lama sekolah dapat segera diwujudkan.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi di Regional Kalimantan. Namun tren laju pertumbuhan komponen ini (2018-2022) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

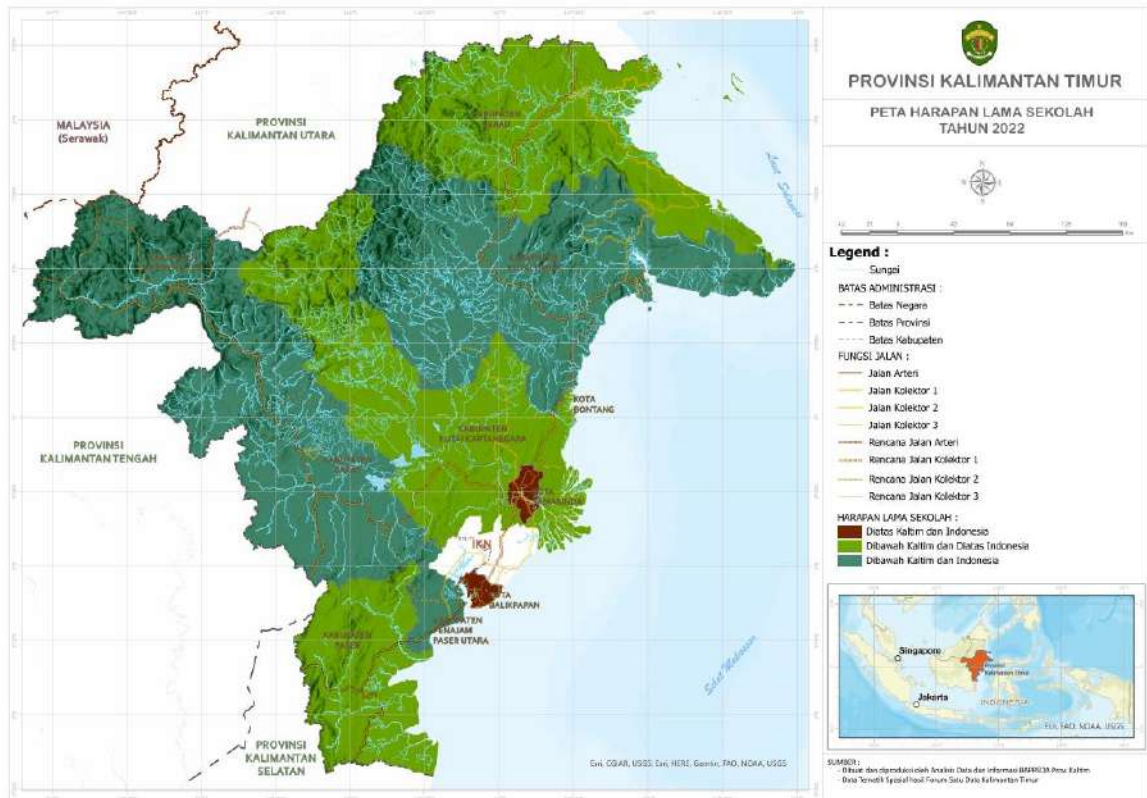
Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.



Gambar II.28
Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Pola spasial capaian Harapan Lama Sekolah kabupaten/kota tahun 2022 menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam Pendidikan formal pada waktu tertentu.



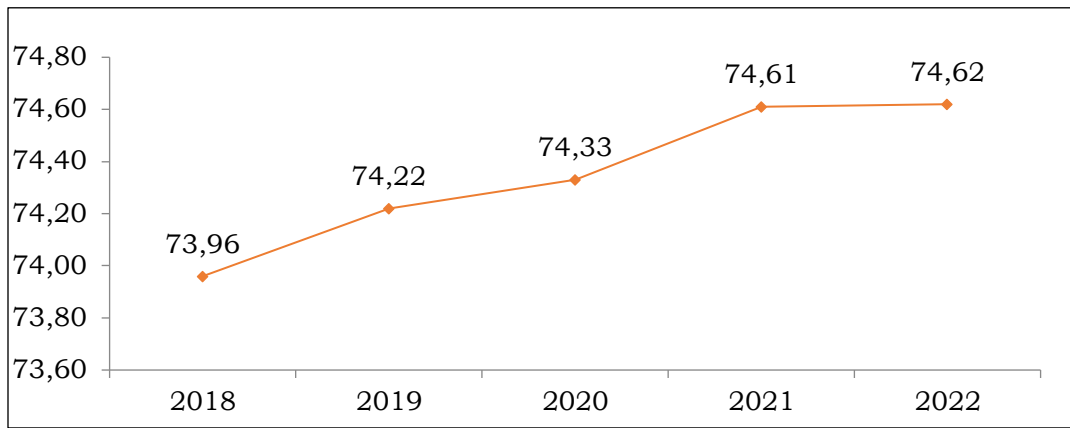
Gambar II.29

Pola Spasial Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

3) Umur Harapan Hidup

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 mencapai 73,96 tahun dan pada tahun 2022 menjadi 74,62 tahun. Selama periode tersebut secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,20 persen per tahun atau secara kumulatif terdapat peningkatan 1,34 poin. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun. Sehingga, angka ini bisa dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 74,75 tahun. Dari sisi preventif Keberhasilan Pemerintah dalam menanggulangi penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal dan penyakit-penyakit terkait gizi. Sedangkan dari sisi kuratif tergambar upaya pemerintah dan swasta di kabupaten/kota dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.



Gambar II.30

Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup tertinggi mencapai 74,78 tahun dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai usia harapan hidup 71,71 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 akan memiliki harapan hidup hingga usia 71 tahun.

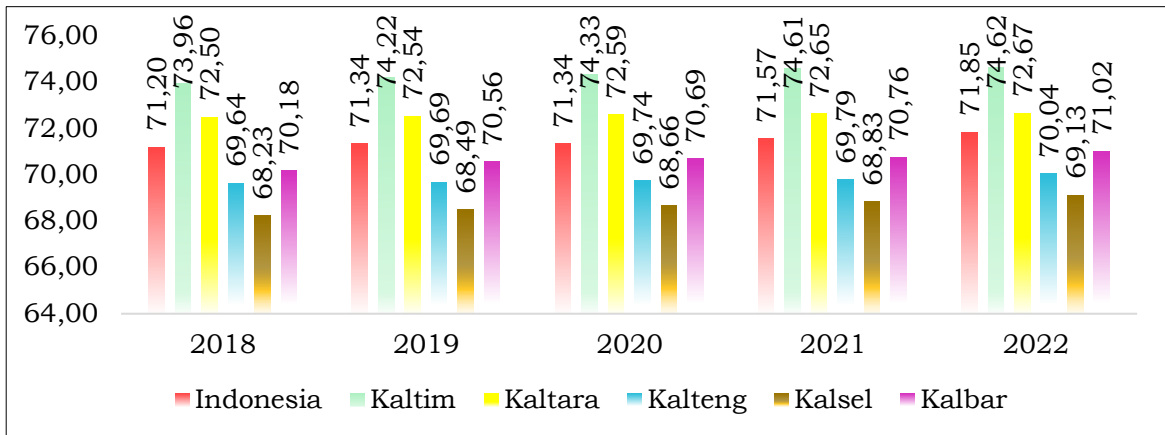
Tabel II.27

Umur Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (tahun)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	72,28	72,52	72,62	72,88	72,89
2	KUBAR	72,57	72,79	72,86	73,10	73,10
3	KUKAR	71,93	72,21	72,34	72,64	72,65
4	KUTIM	72,76	73,03	73,16	73,46	73,47
5	Berau	71,68	71,94	72,06	72,32	72,32
6	PPU	71,05	71,30	71,41	71,68	71,71
7	MAHULU	71,56	71,90	72,10	72,33	72,35
8	Balikpapan	74,18	74,41	74,49	74,76	74,78
9	Samarinda	73,93	74,17	74,27	74,54	74,56
10	Bontang	73,94	74,18	74,28	74,55	74,57

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

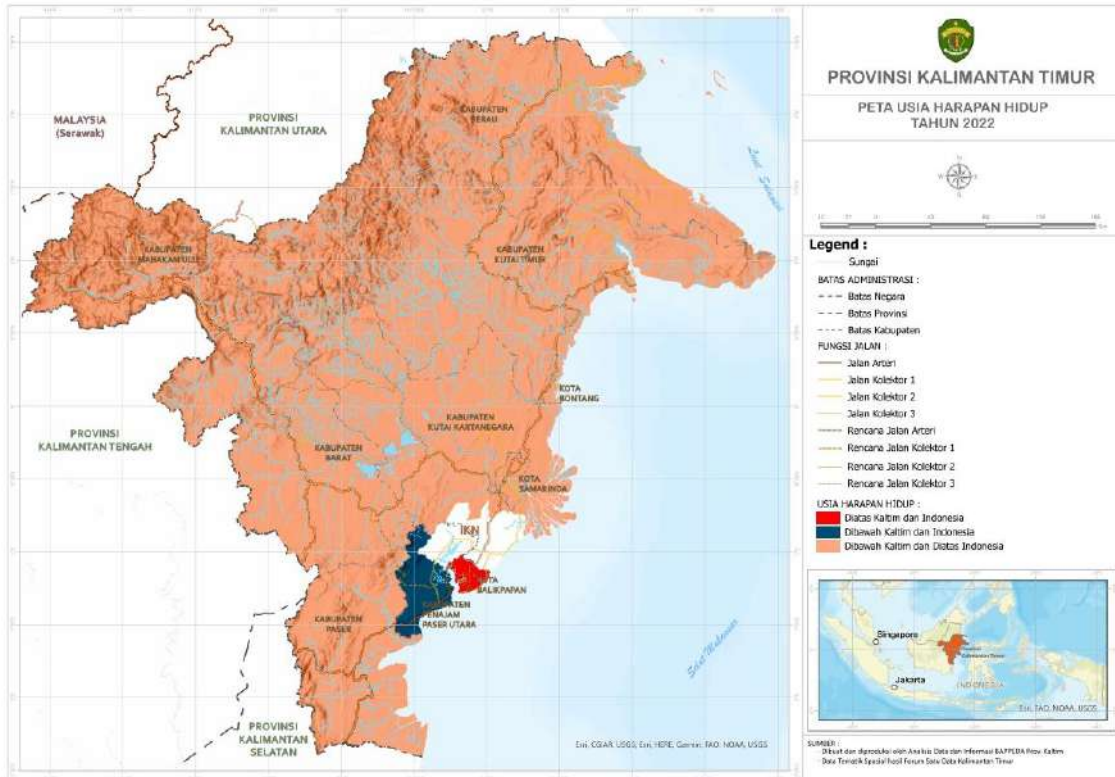
Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional sebesar 71,85 tahun.



Gambar II.31
Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia
Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

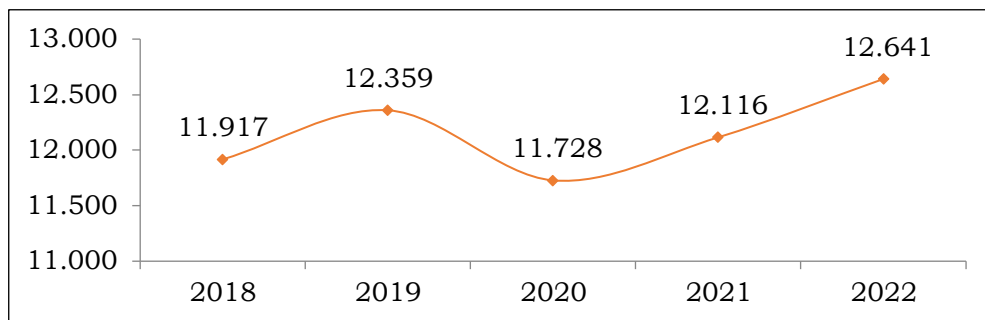
Pola spasial capaian Usia Harapan Hidup kabupaten/kota tahun 2022 menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat didalamnya.



Gambar II.32
Pola Spasial Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2022
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

4) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per Kapita Disesuaikan selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 4,34 persen per tahun. Pada tahun 2022, Pengeluaran per Kapita disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 12,64 juta per tahun, atau naik Rp 525 ribu dibandingkan tahun 2021.



Gambar II.33
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (Ribu Rp)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 merupakan dampak dari adanya pemulihan pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali yang menyebabkan daya beli masyarakat meningkat karena pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat.

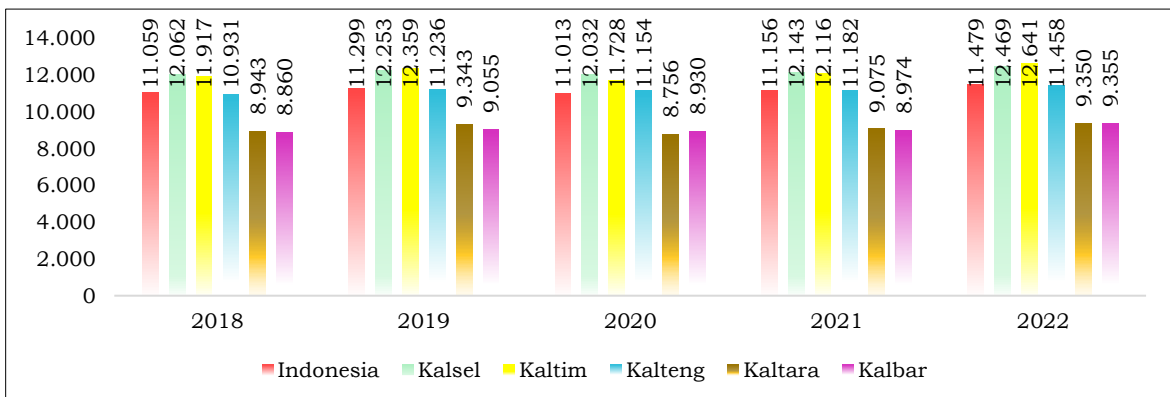
Sedangkan jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kota Bontang memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan paling besar diantara kabupaten/kota lainnya mencapai 17.327 ribu rupiah dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 8.215 ribu rupiah merupakan pengeluaran per kapita terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Secara umum, peningkatan pengeluaran per kapita menggambarkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan pemulihan pandemi COVID-19 dengan banyaknya masyarakat yang telah vaksin di tahun 2022.

Tabel II.28
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (Ribu Rupiah)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	10.605	10.767	10.344	10.673	11.181
2	KUBAR	9.849	10.338	9.712	10.062	10.740
3	KUKAR	10.959	11.152	10.720	11.048	11.677
4	KUTIM	10.614	11.196	10.485	10.868	11.322
5	Berau	12.207	12.726	12.018	12.435	13.095
6	PPU	11.492	11.750	11.231	11.651	11.890
7	MAHULU	7.653	8.008	7.524	7.802	8.215
8	Balikpapan	14.557	14.791	14.549	14.862	15.455
9	Samarinda	14.466	14.613	14.135	14.582	15.162
10	Bontang	16.698	16.843	16.278	16.765	17.327
Kalimantan Timur		11.917	12.359	11.728	12.116	12.641

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2022, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi kedua setelah Kalimantan Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas nasional. Capaian ini harus dipertahankan agar kesejahteraan masyarakat dapat terus terlihat peningkatannya dari sisi pendapatan rumah tangga.



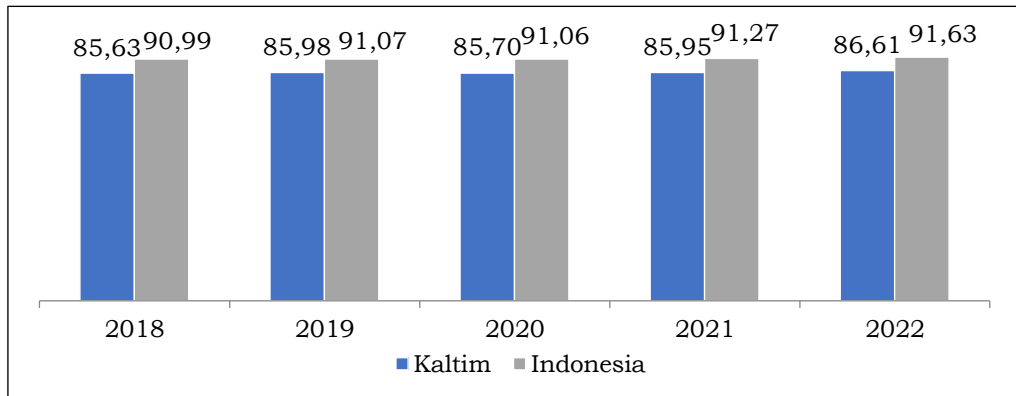
Gambar II.34
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribu Rupiah)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

G. Indeks Pembangunan Gender

Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut gender, *United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender. Seiring dengan penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun 2010. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki.

Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



Gambar II.35
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (tahun)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 86,61. Dalam rumusan IPG, dilakukan formulasi menggunakan komponen IPM yang dipisahkan sesuai jenis kelamin, sehingga penurunan IPM akibat dampak COVID-19 akan berpengaruh pada penurunan IPG. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan mulai berkurangnya COVID-19 tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 86,61. Rendahnya Indeks Pembangunan Gender disebabkan oleh tingginya kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Perempuan dibanding dengan laki-laki yaitu untuk Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki tahun 2022 sebesar 10,24 tahun sedangkan perempuan 9,71 tahun. Adapun dari sisi pengeluaran perkapita untuk Laki-laki sebesar 19,22 juta rupiah sedangkan perempuan hanya 7,46 juta rupiah. Sehingga diperlukan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sekaligus keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender yang bersifat multi program dan lintas sektor.

Tabel II.29
Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender

No	Komponen	Laki-Laki	Perempuan
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,80	76,52
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,81	13,92
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,24	9,71
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp)	19,22	7,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 89,76 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 70,64 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

Tabel II.30
Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (tahun)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	70,64	71,41	71,15	71,19	71,98
2	KUBAR	83,52	83,84	83,87	84,28	84,62
3	KUKAR	78,83	79,14	78,90	79,12	79,80
4	KUTIM	76,03	76,51	76,26	76,40	77,11
5	Berau	87,92	87,93	87,61	87,76	87,76
6	PPU	86,34	86,22	86,39	86,57	86,83
7	MAHULU	80,18	80,89	80,98	81,65	82,32
8	Balikpapan	89,76	89,71	89,65	89,83	89,96
9	Samarinda	89,42	89,41	89,27	89,27	89,75
10	Bontang	86,61	86,72	86,87	87,12	87,52
Kalimantan Timur		85,63	85,98	85,70	85,95	86,61

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

H. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel II.31
Indeks Pemberdayaan Gender Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (tahun)

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	62,76	66,20	65,66	65,67	64,94
2	KUBAR	63,68	61,14	60,60	65,34	66,01
3	KUKAR	56,44	63,74	61,43	62,76	63,40
4	KUTIM	55,72	56,35	53,77	53,78	51,55
5	Berau	50,55	57,66	57,91	56,48	58,17
6	PPU	50,02	50,36	49,75	49,85	50,58

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
7	MAHULU	76,04	80,61	80,41	80,43	81,11
8	Balikpapan	66,33	69,11	68,97	68,62	69,27
9	Samarinda	69,61	66,29	70,65	67,54	68,63
10	Bontang	46,36	51,99	51,97	45,67	46,12
Kalimantan Timur		57,53	65,65	65,54	66,64	66,89

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi dengan capaian 57,53 menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 65,54. Tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 66,89. Masih rendahnya indeks pemberdayaan gender di Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan perempuan di parlemen hanya 20,00 persen dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 24,02 persen. Adapun persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional 49,78 persen.

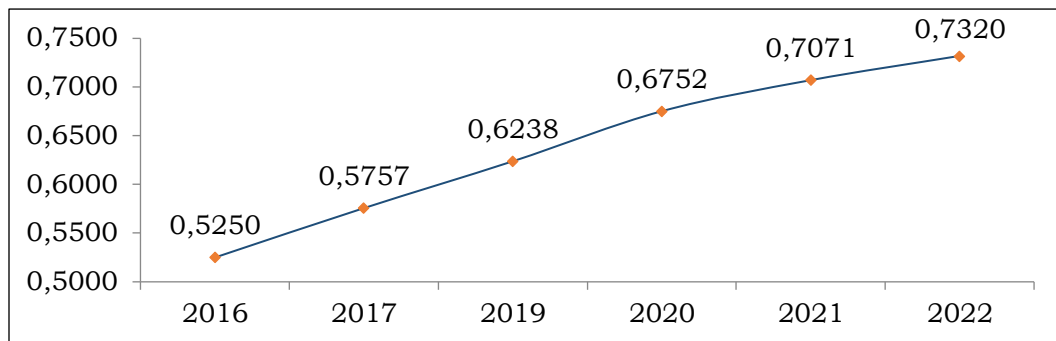
Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 81,11 sedangkan Bontang memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 46,12 yang artinya bahwa di Kota Bontang memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

I. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan desa didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Capaian Indeks Desa Membangun merupakan cerminan status kemajuan dan kemandirian Desa, yang terbagi dalam Klasifikasi Status Desa yaitu Desa Mandiri ($IDM > 0.8155$), Desa Maju ($0.7072 < IDM \leq 0.8155$), Desa Berkembang ($0.5989 < IDM \leq 0.7072$), Desa Tertinggal ($0.4907 < IDM \leq 0.5989$) dan Desa Sangat Tertinggal ($IDM \leq 0.4907$).

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir IDM Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dengan capaian terakhir pada tahun telah mencapai 0,7320. Capaian ini menempatkan Kalimantan Timur pada peringkat ke 8 diantara seluruh provinsi di Indonesia. Peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif bagi pemerataan dan pemberdayaan pembangunan hingga level administrasi terkecil di Kalimantan Timur.



Gambar II.36
Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2022

(Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023)

Capaian IDM pada 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir seiring berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana desa dan bantuan keuangan spesifik ke seluruh desa. Capaian IDM terendah pada tahun 2022 terdapat pada Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 0,6646 dengan status Berkembang, dan capaian tertinggi pada Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai capaian sebesar 0,7769.

Tabel II.32
Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2022

No	Kab/Kota	2017	2019	2020	2021	2022
1	Paser	0,5856	0,6092	0,6664	0,7240	0,7500
2	KUBAR	0,5233	0,5900	0,6660	0,6953	0,7298
3	KUKAR	0,5815	0,6415	0,6846	0,7128	0,7465
4	KUTIM	0,6037	0,6378	0,6782	0,7119	0,7305
5	Berau	0,6097	0,6539	0,6999	0,7177	0,7261
6	PPU	0,6505	0,6905	0,7085	0,7340	0,7769
7	MAHULU	0,5352	0,5862	0,6181	0,6318	0,6646
Kalimantan Timur		0,5757	0,6238	0,6752	0,7071	0,7320

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023

Pada tahun 2022, dari 841 desa di Provinsi Kalimantan Timur yang tersebar di tujuh kabupaten tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal dan hanya tersisa 17 desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 8 desa, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 6 desa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 2 desa dan Kabupaten Berau sebanyak 1 desa. Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal di Kalimantan Timur, perlu upaya pemerintah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan desa terutama dalam meningkatkan pencapaian indeks ketahanan ekonomi yang masih rendah daripada 2 komponen lainnya.

Tabel II.33
Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Kab/Kota	Desa Mandiri	Desa Maju	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Desa Sangat Tertinggal
1	Paser	17	76	46	0	0
2	KUBAR	32	75	77	6	0
3	KUKAR	46	73	74	0	0
4	KUTIM	18	61	58	2	0
5	Berau	11	41	47	1	0
6	PPU	12	15	3	0	0
7	MAHULU	0	8	34	8	0
Kalimantan Timur		136	349	339	17	0

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023

J. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pengembangan budaya dan seni di Kalimantan Timur ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 mencapai 52,49. Capaian IPK Kalimantan Timur berada diatas capaian IPK Nasional yaitu sebesar 51,90. Dari dimensi penilaian yang tercakup dalam IPK, Kalimantan Timur mendapatkan nilai di atas angka nasional, yaitu pada dimensi Ekonomi Budaya 29,65, Dimensi Pendidikan dengan nilai 72,20, dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai 72,46 dan dimensi budaya literasi dengan nilai 60,09.

Tabel II.34
Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Dimensi IPK	Provinsi	Nasional
Ekonomi Budaya	29,65	20,69
Pendidikan	72,20	68,71
Ketahanan Sosial Budaya	72,46	66,83
Warisan Budaya	37,44	46,63
Ekspresi Budaya	24,33	27,13

Dimensi IPK	Provinsi	Nasional
Budaya Literasi	60,09	54,29
Gender	55,88	58,55
IPK	52,49	51,90

Sumber: KEMENDIKBUD, 2022

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut, peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif dikarenakan capaian berada diatas capaian IPK nasional. Capaian ini patut diapresiasi dalam pengembangan budaya dan seni serta pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. Meskipun beberapa dimensi IPK terus mengalami peningkatan, namun masih diperlukan sinergi antar lembaga terkait di Provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

K. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2017 IPP Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari 53,50 pada tahun 2017 menjadi 54,83 pada tahun 2020. Dengan capaian ini IPP Kalimantan Timur menduduki Peringkat 7 secara nasional meningkat dari tahun 2017. Semua capaian domain mengalami peningkatan, kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan. Penurunan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan disebabkan oleh naiknya angka kehamilan remaja.

Tabel II.35
Domain Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Domain: Pendidikan	73,33	73,33	73,33	73,33	76,67
1. Rata-Rata Lama Sekolah	10,92	10,72	11,24	11,28	11,44
2. APK Sekolah Menengah	95,52	94,35	93,00	93,96	93,85
3. APK Perguruan Tinggi	35,58	35,64	37,78	39,16	40,21
Domain: Kesehatan dan Kesejahteraan	67,50	72,50	70,00	57,50	67,50
1. Angka Kesakitan Pemuda	6,15	5,37	6,52	4,07	6,31
2. Pemuda Menjadi Korban Kejahatan	1,37	0,93	1,37	1,67	0,23
3. Pemuda Merokok	20,80	20,80	20,82	20,39	19,14
4. Remaja Perempuan Sedang Hamil	7,99	7,99	2,52	25,55	26,88
Domain: Lapangan dan Kesempatan Kerja	40,00	35,00	45,00	50,00	35,00
1. Pemuda Berwirausaha Kerah Putih	0,40	0,24	0,48	0,70	0,38
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	15,78	15,21	12,80	13,94	16,01
Domain: Partisipasi dan Kepemimpinan	40,00	43,33	43,33	43,33	30,00

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	77,25	70,55	70,55	70,55	50,56
2. Partisipasi Pemuda yang aktif dalam organisasi	3,63	4,87	4,87	4,87	4,15
3. Pemuda Berpendapat Dalam Rapat	6,21	5,12	5,12	5,12	2,62
Domain: Gender dan Diskriminasi	46,67	50,00	50,00	50,00	53,33
1. Angka Perkawinan Usia Anak	13,90	11,54	12,36	11,79	8,64
2. Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah Menengah dan Perguruan Tinggi	44,83	44,39	46,10	45,88	46,76
3. Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	24,21	25,29	27,96	24,48	25,17
Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim	53,50	54,83	56,33	54,83	52,50
Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia	49,33	51,50	52,67	51,00	53,33

Sumber: BAPPENAS, 2022

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.3. Urusan Wajib

A. Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Tabel II.36
Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

Usia Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Sekolah					
7-12	99,76	99,68	99,73	99,60	99,57
13-15	98,89	98,21	99,07	98,90	98,75
16-18	81,55	82,07	81,88	82,10	81,43
Angka Partisipasi Kasar					
Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
SD	108,02	106,84	105,75	105,26	105,21
SLTP	92,57	91,03	92,17	92,03	91,47
SLTA	96,08	94,96	95,23	95,52	95,09
Angka Partisipasi Murni					
Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
SD	98,40	98,41	98,44	98,36	98,45
SLTP	79,68	80,42	81,28	81,30	82,65
SLTA	68,43	68,55	69,00	69,29	69,10

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Angka partisipasi sekolah (APS) di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur ternyata belum capai 100 persen, terbukti pada jenjang

usia 16-18 tahun mengalami penurunan (81,43) tahun 2022, artinya masih ada anak belum sepenuhnya mengenyam pendidikan formal bahkan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 angkanya mengalami penurunan (81,88). Penyebab tersebut mungkin dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah). Untuk itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan bidang Pendidikan berdasarkan kewenangannya lebih memfokuskan/melaksanakan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan ruang kelas baru SD, pembangunan SD, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, bantuan untuk siswa.

APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar 105,21. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5,21 persen penduduk yang bukan golongan umur 7-12 tahun masih bersekolah ditingkat SD, ini hal disebabkan adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Sebenarnya wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya namun tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan terkecuali jenjang SLTA mengalami sedikit penurunan di tahun 2022. Peningkatan APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi penanda dari meningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur. Namun, meskipun APM terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap mendorong peningkatan yang lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa pemberian bantuan operasional Pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, pemerataan guru, dan sebagainya.

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah

menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel II.37
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.652	347.886	22.323	15,58	210,84
Swasta	268	63.435	3.546	17,89	252,73
MI	133	30.179	2.194	13,76	226,91
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	453	127.778	8.593	14,87	285,86
Swasta	233	32.664	2.247	14,54	147,80
MTs	170	31.829	3.027	10,52	187,23
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	143	65.859	3.941	16,71	463,80
Swasta	90	12.905	963	13,40	150,06
MA	80	10.890	1.565	6,96	136,13
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	87	65.859	3.941	16,71	463,80
Swasta	131	12.905	963	13,40	150,06

Sumber: Disdikbud dan Kemenag Kaltim, 2023

Pada tahun 2022, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Tabel II.38
Jumlah Satuan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

KABUPATEN/KOTA	SATUAN PENDIDIKAN									TOTAL KESELURUHAN
	SMA			SMK			SLB			
	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	
Kab. Berau	15	4	19	8	6	14	1	0	1	34
Kab. Kutai Barat	17	5	22	7	7	14	1	0	1	37
Kab. Kutai Kartanegara	35	17	52	17	27	44	1	4	5	101
Kab. Kutai Timur	22	2	24	13	12	25	1	2	3	52
Kab. Mahakam Ulu	4	3	7	0	2	2	1	0	1	10
Kab. Paser	13	4	17	4	8	12	1	0	1	30
Kab. Penajam Paser Utara	7	3	10	6	4	10	1	0	1	21
Kota Balikpapan	9	19	28	6	27	33	1	3	4	65
Kota Bontang	3	8	11	4	9	13	1	5	6	30
Kota Samarinda	18	25	43	22	29	51	2	9	11	105
TOTAL	143	90	233	87	131	218	11	23	34	485

Tabel II.39
Jumlah Peserta Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

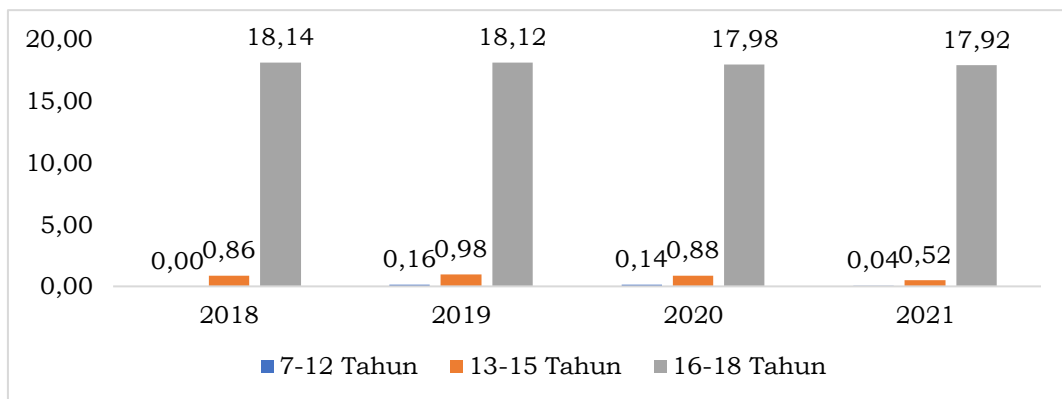
KABUPATEN/KOTA	PESERTA DIDIK									TOTAL KESELURUHAN
	SMA			SMK			SLB			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
Kab. Berau	3445	3925	7370	2012	1468	3480	119	63	182	11032
Kab. Kutai Barat	2177	2366	4543	1784	1319	3103	76	35	111	7757
Kab. Kutai Kartanegara	7614	9194	16808	8594	5178	13772	227	106	333	30913
Kab. Kutai Timur	3269	4036	7305	4408	2880	7288	101	50	151	14744
Kab. Mahakam Ulu	654	611	1265	81	64	145	4	2	6	1416
Kab. Paser	2749	3072	5821	2697	1758	4455	41	25	66	10342
Kab. Penajam Paser Utara	1538	2243	3781	2542	1534	4076	73	39	112	7969
Kota Balikpapan	5023	7075	12098	10060	7333	17393	460	193	653	30144
Kota Bontang	1777	2744	4521	2748	1363	4111	172	58	230	8862
Kota Samarinda	7368	9524	16892	12538	10696	23234	459	268	727	40853
TOTAL	35614	44790	80404	47464	33593	81057	1732	839	2571	164032

Tabel II.40
Jumlah Guru di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

KABUPATEN/KOTA	GURU									
	SMA			SMK			SLB			TOTAL KESELURUHAN
	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	
Kab. Berau	392	61	453	205	84	289	17	0	17	759
Kab. Kutai Barat	357	25	382	184	78	262	15	0	15	659
Kab. Kutai Kartanegara	885	136	1021	479	375	854	31	19	50	1925
Kab. Kutai Timur	440	15	455	323	140	463	17	7	24	942
Kab. Mahakam Ulu	96	5	101	0	21	21	2	0	2	124
Kab. Paser	360	33	393	218	102	320	17	0	17	730
Kab. Penajam Paser Utara	192	26	218	220	64	284	11	0	11	513
Kota Balikpapan	467	221	688	492	392	884	44	35	79	1651
Kota Bontang	132	173	305	190	117	307	23	24	47	659
Kota Samarinda	682	279	961	1014	366	1380	66	62	128	2469
TOTAL	4003	974	4977	3325	1739	5064	243	147	390	10431

Selama beberapa tahun terakhir, Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2021, Angka Putus Sekolah mengalami penurunan di seluruh kelompok usia sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,10 poin untuk kelompok usia 7-12 tahun, kelompok usia 13,15 tahun turun 0,36 poin, dan untuk kelompok usia 16-18 tahun turun 0,06 poin.

Faktor penyebab putus sekolah antara lain karena masih kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan sering kali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, faktor ekonomi sering kali memunculkan anggapan bahwa lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan yang berimplikasi pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh rumah tangga.



Gambar II.37
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2021 (persen)

(Sumber: BPS Kaltim, 2022)

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 54 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2022, jumlah mahasiswa mencapai 96.091 dengan jumlah dosen sebanyak 4.424 orang.

Tabel II.41
Indikator Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kategori	Jumlah Perguruan Tinggi	Jumlah Tenaga Pendidik	Jumlah Mahasiswa
Negeri	5	2.123	44.714
Swasta	49	2.301	51.377
Jumlah	54	4.424	96.091

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

B. Kesehatan

1) Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting

Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Tren Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2017–2018 sudah terjadi penurunan, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu. Sedangkan jumlah kematian bayi (0–11) bulan sudah mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil RPJMN 2020-2024 prevalensi stunting balita 14 persen (prioritas di 514 kabupaten/kota), Renstra Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 target kinerja Kementerian Kesehatan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) (%) tahun 2024 14 persen, NSPK yang ditetapkan oleh K/L dan Indikator SDGs 26 persen.

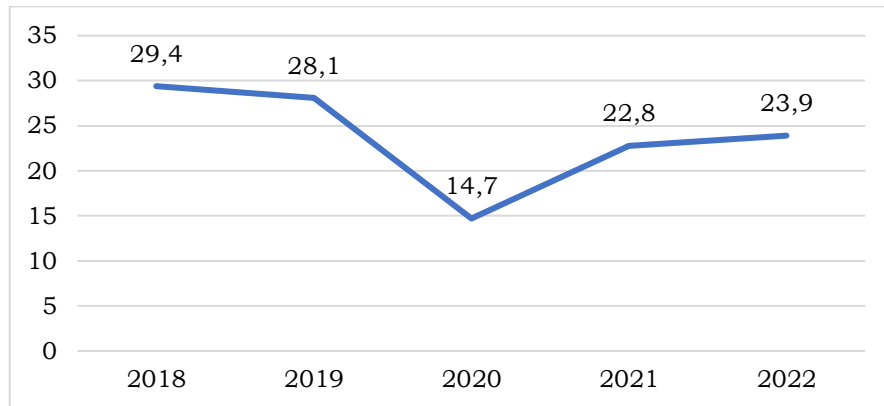
Tabel II.42
Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Persen)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	27,50	32,20	15,50	23,60	24,90
2	KUBAR	30,00	35,70	16,60	15,80	23,10
3	KUKAR	35,70	36,50	14,30	26,40	27,10
4	KUTIM	30,50	39,40	16,10	27,50	24,70
5	Berau	31,70	24,70	17,60	25,70	21,60
6	PPU	31,60	27,00	11,40	27,30	21,80
7	MAHULU	32,80	36,60	9,60	20,30	14,80
8	Balikpapan	23,80	14,00	13,30	17,60	19,60
9	Samarinda	26,30	24,70	11,90	21,60	25,30
10	Bontang	26,60	29,00	20,90	26,30	21,00

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2023

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,00 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan *Cut of Point* menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Walau sempat turun tajam pada tahun 2020 menjadi 14,7, namun prevalensi stunting di Kalimantan Timur tahun 2021 dan 2022 cenderung meningkat mencapai 23,9. Angka ini diatas prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,6. Secara regional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada urutan

kedua terendah setelah Provinsi Kalimantan Utara. Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2022 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kabupaten Mahakam Hulu dan Kota Balikpapan yang masing-masing mencapai 14,8 persen dan 19,6 persen.



Gambar II.38
Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 berdasarkan Hasil Survei SSGI
(Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2023)

Untuk wasting sendiri hasil SSGI Tahun 2022 menunjukkan Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9,1. Angka ini lebih tinggi dibandingkan wasting nasional yang mencapai 7,7. Wasting di Kalimantan Timur dibandingkan daerah lain di Pulau Kalimantan berada pada posisi ketiga terendah setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihat data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dalam rangka percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi dan stunting serta wasting di Provinsi Kalimantan Timur.

2) Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, upaya penambahan jumlah fasilitas kesehatan diwujudkan untuk mengoptimalkan dukungan pelayanan Kesehatan masyarakat. Terdapat penambahan sebanyak 15 Rumah Sakit Umum, 6 Rumah Sakit Swasta, 28 Puskesmas, sampai dengan bertambahnya 221 terlihat persebaran fasilitas Kesehatan di kabupaten kota sudah merata. Dengan jumlah 59 Rumah Sakit Umum dan Swasta di Kalimantan Timur pada tahun 2022, terdata pada Mahulu dan Bontang sudah memiliki 2 RS. Persebaran fasilitas kabupaten kota lainnya memiliki lebih dari jumlah

tersebut. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 188 unit, setiap kabupaten kota setidaknya memiliki minimal 6 puskesmas yaitu pada Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Selanjutnya jumlah pedagang besar farmasi dan apotek secara kuantitas tersebar merata, sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota.

Tabel II.43
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

No	Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Sakit Umum	54	53	57	59
2	Rumah Sakit Swasta	19	19	22	22
3	RS Bersalin	15	9	7	10
4	Puskesmas	186	187	187	188
5	Puskesmas Pembantu	716	716	730	742
6	Pedagang Besar Farmasi	48	49	52	53
7	Apotek	637	704	759	745

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Pada umumnya, jumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan atau tetap (puskesmas) jika dibandingkan dengan tahun 2021. Seluruh jenis fasilitas kesehatan mengalami penurunan, kecuali jumlah apotek meningkat dari 745 menjadi 826.

Tabel II.44
Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan					
		RS. Umum	RS. Swasta	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pedagang Besar Farmasi	Apotek
1	Paser	2	0	19	123	0	38
2	Kutai Barat	2	1	19	84	0	36
3	Kutai Kartanegara	3	0	32	175	0	122
4	Kutai Timur	3	5	21	116	1	51
5	Berau	2	0	21	112	0	71
6	Penajam Paser Utara	2	0	11	43	0	34
7	Mahakam Ulu	2	0	6	30	0	6
8	Balikpapan	11	4	27	14	19	165
9	Samarinda	14	3	26	0	32	285
10	Bontang	1	4	6	2	0	18
JUMLAH		42	17	188	699	52	826

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Terjaminnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan setiap warga merupakan tanggung jawab Pemerintah. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan baik secara promotif, preventif, dan kuratif demi mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang baik. Pelaksanaan pelayanan di bidang Kesehatan harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Tabel II.45
Jumlah Tenaga Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

No	Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020	2021
1	Dokter Umum	1.010	1.024	1.106	2.097
2	Dokter Gigi	309	314	320	411
3	Dokter Spesialis	503	597	649	768
4	Perawat	7.823	6.524	7.510	10.789

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Hal utama selanjutnya yaitu pemenuhan tenaga Kesehatan yang mencukupi secara kualitas dan kuantitas yang adil dan merata di setiap wilayah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti juga dengan penambahan jumlah sumber daya manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak 2017 sampai dengan 2022 penambahan Dokter umum bertambah 983 orang, Dokter gigi 91 orang, Dokter spesialis 90 orang, dan perawat sejumlah 4.127 orang. Persebaran tenaga Kesehatan di Kabupaten Kota sudah merata walaupun perlu di akurasi sampai pada kebutuhan di tingkat kecamatan. Dengan jumlah 11.976 tenaga Kesehatan utama pada tahun 2022, yang terdiri dari Dokter umum, Dokter gigi, Dokter Spesialis dan Perawat menggambarkan persebaran tenaga kesehatan di kabupaten/kota upaya pemenuhan pelayanan pada masyarakat sudah terpenuhi.

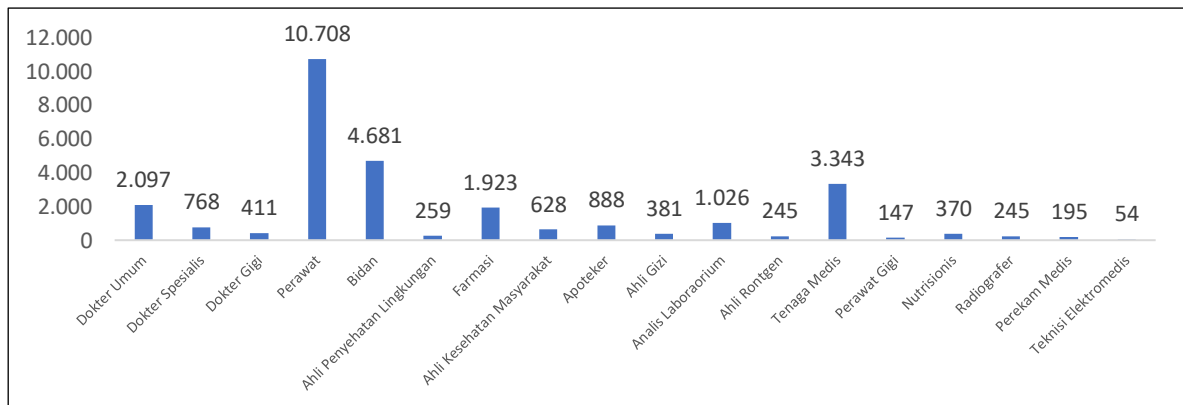
Tabel II.46
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan			
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat
1	Paser	61	23	32	543
2	Kutai Barat	62	16	18	611
3	Kutai Kartanegara	111	33	68	1.096
4	Kutai Timur	113	34	50	858
5	Berau	108	23	25	665

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan			
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat
6	Penajam Paser Utara	39	13	23	287
7	Mahakam Ulu	24	2	1	211
8	Balikpapan	368	89	393	1.974
9	Samarinda	305	112	302	2.438
10	Bontang	163	35	104	763
JUMLAH		1.354	380	1.016	9.226

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mutlak diperlukan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara Sehat, Program *Internship* Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis (Dokter Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.



Gambar II.39
Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021

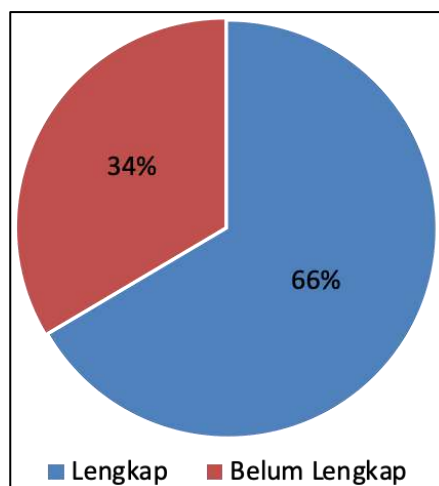
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022)

Tabel II.47
Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Lengkap	Belum Lengkap	% Pemenuhan
1	Paser	19	17	2	89.47
2	Kutai Barat	19	4	15	21.05
3	Kutai Kartanegara	32	22	10	68.75
4	Kutai Timur	21	7	14	33.33
5	Berau	21	15	6	71.43
6	Penajam Paser Utara	11	5	6	45.45
7	Mahakam Hulu	6	1	5	16.67
8	Kota Balikpapan	27	26	1	96.30
9	Kota Samarinda	26	22	4	84.62
10	Kota Bontang	6	6	0	100.00
Jumlah		188	125	63	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan Kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaganya.



Gambar II.40
Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022)

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebesar 55 persen RSUD di Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dengan jumlah 9 RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang.

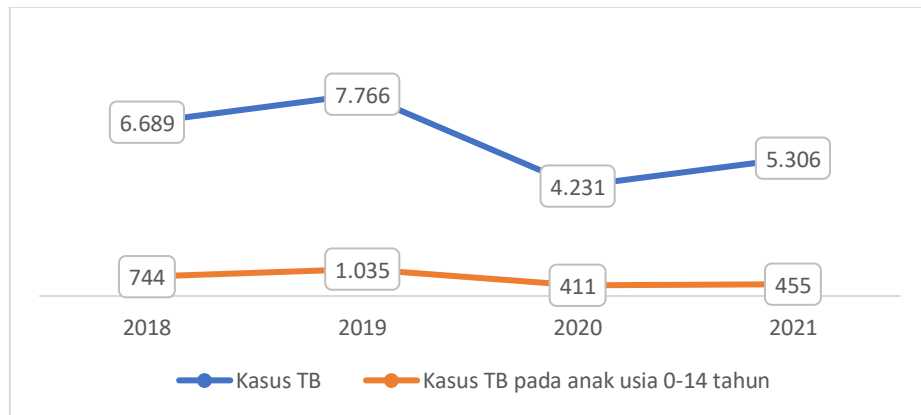
Tabel II.48
Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kab/Kota	Milik	Tipe	Nama Fasyankes	Medik SPES Dasar				Medik SPES Penunjang		
					Sp.A	Sp.B	Sp.OG	Sp.PD	Sp.An	SP.PK	Sp.Rad
1.	Kabupaten Berau	Kab/Kota	RSUD	RSUD Talisayan		1	1	1	1		
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Dr. Abd. Rival berau	3	2	3	3	1	1	2
2.	Kota Balikpapan	Kab/Kota	RSUD	RSUD Balikpapan	2	2	3	4	3	2	
3.	Kota Bontang	Kab/Kota	RSUD	RSUD Taman Husada	3	2	4	3	3	2	2
4.	Kota Samarinda	Kab/Kota	RSUD	RSUD Inche Abdoel Moeis	3	3	3	4	3	2	2
5.	Kabupaten Kutai Barat	Kab/Kota	RSUD	RSUD Harapan Insan Sendawar	2	3	2	3	1	3	1
6.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab/Kota	RSUD	RSUD AM Parikesit Tenggarong	4	3	5	6	4	2	2
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Dayaku Raja	1	1		1			
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	2	1	1	3	1	1	1
7.	Kabupaten Kutai Timur	Kab/Kota	RSUD	RSUD Sangkuliran g		1	1	1		1	
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Kudungga	1	3	3	4	3	2	1
8.	Kabupaten Paser	Kab/Kota	RSUD	RSUD Panglima Sebaya	3	4	4	3	3	2	2
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Kerang			1				
9.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kab/Kota	RSUD	RSUD Sepaku	1		1				
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Ratu Aji Putri Botung	1	3	2	2	1	2	2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

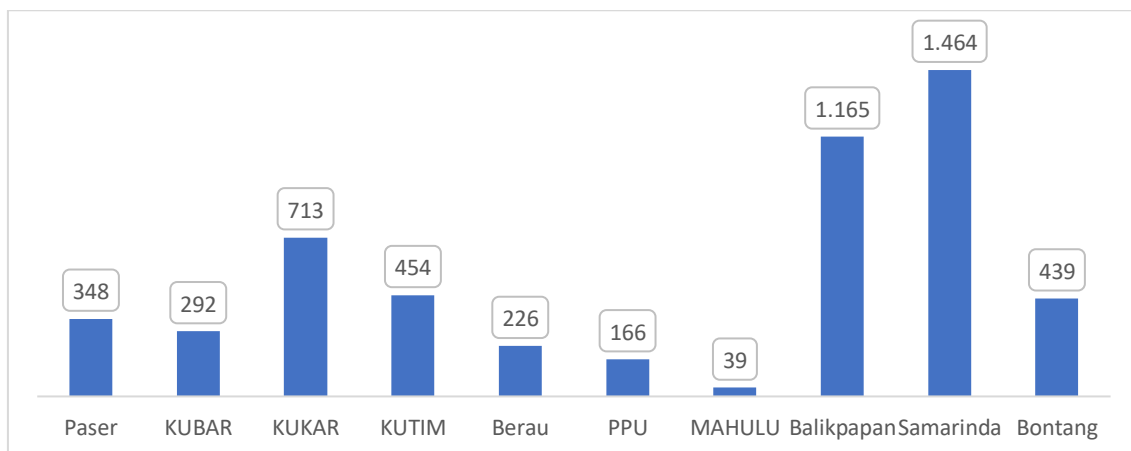
3) Penyakit menular

Salah satu penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyakit Tuberkulosis (TBC) atau TB, hal ini dikarenakan jumlah kasus TBC dan Jumlah kematian selama pengobatan Tuberkulosis tinggi dan meningkat di setiap tahunnya.



Gambar II.41
Kasus TB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021
(Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Kaltim, 2022)

Jumlah kasus TB mengalami peningkatan di tahun 2017 – 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 akan tetapi pada tahun 2021 meningkat kembali hingga mencapai 5.306 kasus sama halnya juga dengan kasus TB pada anak usia 0-14 tahun sedikit mengalami peningkatan tahun 2021 mencapai 455 kasus.



Gambar II.42
Jumlah Kasus TB menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021
(Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Kaltim, 2022)

Kota Samarinda, Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara berada di urutan tertinggi untuk kasus TB, hal ini juga terkait dengan lebih

banyak fasilitas Kesehatan yang aktif melapor dan besarnya jumlah penduduk di ketiga wilayah tersebut.

Tabel II.49
Jumlah Kasus Penyakit Menular Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018 - 2021

No	Penyakit/Kasus	2018	2019	2020	2021
1.	CNR Seluruh Kasus TBC (Per 100.000 Penduduk Kalimantan Timur)	176	206	123	140
2.	Jumlah Kematian selama Pengobatan Tuberkulosis (Kab/Kota)	191	207	210	281
3.	Jumlah Kasus HIV (Kab/Kota)	1,512	1,355	1,023	1,143
4.	Jumlah Kasus Baru AIDS (Kab/Kota)	420	319	179	374
5.	Jumlah Kematian akibat AIDS (Kab/Kota)	154	32	24	46

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

TBC (Tuberkulosis) yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah.

Tabel II.50
Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2021

No	Penyakit/Kasus	2018	2019	2020	2021
1.	Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Kab/Kota)	207.231	239.736	245.676	206.848
2.	Deteksi Dini Kanker (Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Iva & Sadanis*)	122	151	110	130

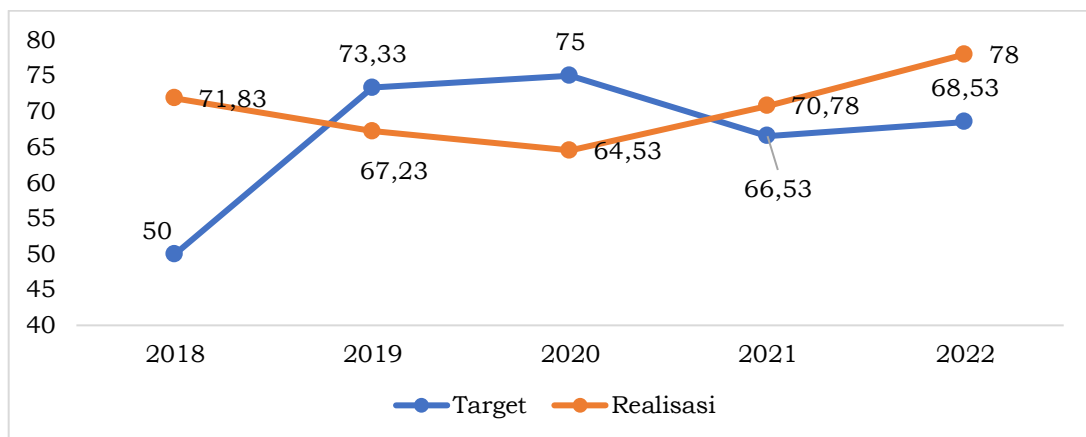
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Air Minum

Selain upaya pencapaian target SPM air minum (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal), Kalimantan Timur memiliki target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak. Akses air minum layak merupakan kemudahan/kemampuan penduduk memperoleh kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari dari sumber terlindungi baik dari jaringan perpipaan maupun non perpipaan.

Persentase akses air minum layak merupakan rasio antara jumlah penduduk yang telah memperoleh suplai air minum dengan total jumlah penduduk. Dalam 5 tahun terakhir, capaian akses air minum layak menunjukkan kinerja yang baik. Walaupun target tidak tercapai pada awal dan pertengahan tahun perencanaan (2019-2020), namun sejak tahun 2021, realisasi pemenuhan akses air minum layak telah melampaui target yang ditetapkan. Grafik target dan realisasi direpresentasikan pada gambar dibawah ini.



Gambar II.43

Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak 2018-2022 (%)

(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2023 – Web SPM, 2022)

Angka capaian merupakan agregat dari pencapaian 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur (tabel II. 42). Seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki capaian di atas 50% kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara yang aksesnya baru mencapai 30.90%. Sementara capaian tertinggi berada di Kota Balikpapan. Walaupun secara cakupan Kalimantan Timur menunjukkan layanan yang baik, perhatian perlu diberikan pada aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku. Hampir seluruh area perkotaan, terutama tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) utama, memiliki cakupan di atas 80%. Sayangnya, suplai air baku yang mendukung tingginya capaian ini masih berasal dari air tanah, terutama di Kota Bontang dan Balikpapan. Kondisi ini dapat dikatakan tidak ideal dan tidak berkelanjutan. Sehingga diperlukan upaya untuk menyediakan air baku yang memenuhi standar keandalan, yakni bersumber dari air permukaan.

Tabel II.51
Capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota 2022

No	Kabupaten/Kota	Air minum layak (%)
1	Balikpapan	99.25
2	Penajam Paser Utara	30.90
3	Paser	70.14
4	Bontang	83.55
5	Kutai Timur	51.73
6	Berau	82.16
7	Samarinda	87.27
8	Kutai Kartanegara	72.85
9	Kutai Barat	86.02
10	Mahakam Ulu	66.06
Provinsi		78.00

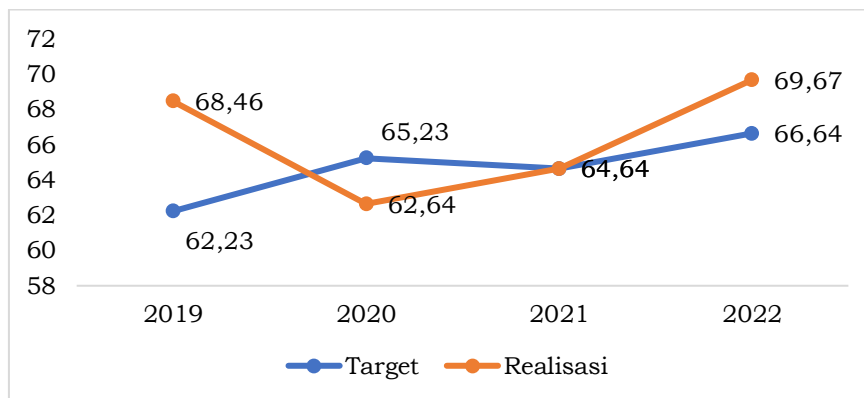
Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023

Dari sisi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Data Susenas Kor (Maret 2022) menunjukkan bahwa terdapat 17.118 Rumah Tangga di Kaltim (1,3%) yang sumber air minumnya berasal dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung. Sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Sementara untuk keperluan domestik lainnya (memasak, mandi, mencuci, dll), terdapat sekitar 5.55% Rumah Tangga yang menggunakan air dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung dan sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Hal ini mengartikan bahwa terdapat penduduk yang sumber air bersihnya memiliki potensi terkontaminasi dengan air buangan/limbah domestik (termasuk tangki septik). Kondisi ini dapat membawa risiko negatif bagi kesehatan karena masyarakat berpotensi terpapar bakteri dari buangan air limbah.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target akses air minum layak secara nasional adalah 100% pada tahun 2024. Hingga tahun 2022, capaian air minum layak di Kaltim baru mencapai 78% (tabel II. 52). Oleh karena itu, masih terdapat gap yang cukup besar antara capaian Kalimantan Timur dengan target nasional. Pemerintah Provinsi tidak dapat sepenuhnya mengejar target tersebut mengingat kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada suplai air baku untuk air minum pada cakupan regional atau lintas kabupaten/kota. Dari 841 desa & kelurahan yang ada di Kaltim,

rencana SPAM regional diperkirakan hanya mampu menyuplai air minum curah untuk kurang lebih 260 desa/kelurahan. Oleh karena itu, untuk mencapai target 100% cakupan layanan, diperlukan strategi penanganan khusus, salah satunya melalui mekanisme bantuan keuangan. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terutama untuk kompilasi data capaian di setiap kabupaten/Kota yang akan diagregat menjadi capaian provinsi.

Capaian layanan air minum layak melalui sistem perpipaan telah diterima oleh 69.67% dari jumlah penduduk Kaltim (Gambar II. 52) . Nilai ini adalah angka layanan baik sistem perpipaan PDAM maupun non-PDAM. Dalam konteks capaian berdasarkan dokumen RPJMD Kaltim 2019 – 2023, capaian air minum layak perpipaan tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 66,64%. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, air minum layak perpipaan di Kaltim ditargetkan mencapai 71.75% pada tahun 2024, sehingga terdapat *gap* antara target nasional dengan kondisi saat ini, yakni berkisar 2.77%.



Gambar II.44
Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan Kaltim
(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2023 – Web SPM, 2022)

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur air limbah oleh provinsi yang dilakukan hingga saat ini belum secara langsung memperlihatkan manfaat/dampak yang nyata terkait pencapaian SPM air limbah skala provinsi. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis sektor air limbah serta pemberian pendampingan untuk implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Tahun 2022, pendampingan dilakukan untuk Kota Samarinda dan Kabupaten Berau sementara tahun 2023, pendampingan

akan dilakukan untuk Kabupaten Paser, Mahulu, dan Kota Bontang. Nilai capaian sektor sanitasi yang digunakan sebagai indikator merupakan nilai capaian agregat 10 Kabupaten/Kota. Pada dimensi layak, sudah 81,79% penduduk mendapat layanan sanitasi. Namun, capaian masih sangat minim pada dimensi aman, yakni baru mencapai kurang dari 5%.

Tabel II.52
Capaian Sektor Air Limbah 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Air Limbah	
		Layak (%)	Aman (%)
Balikpapan	718.423	91,40	9,18
Penajam Paser Utara	186.801	95,68	3,70
Paser	288.225	71,24	0,71
Bontang	185.928	94,93	7,63
Kutai Timur	424.743	89,10	2,70
Berau	263.150	88,45	3,35
Samarinda	838.935	78,02	7,95
Kutai Kartanegara	753.862	75,02	0,32
Kutai Barat	170.871	59,82	1,59
Mahakam Ulu	35.274	52,50	2,91
Kaltim 2022	3.866.212	81,79	4,71

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022. Agregasi capaian Kabupaten/Kota

Walaupun belum mencapai kondisi ideal dan masih jauh dari kondisi aman, secara nasional Kaltim memperlihatkan kemajuan penanganan sanitasi yang baik, terutama dari sisi tempat pembuangan tinja. Pada tahun 2022 (Maret), hampir seluruh Rumah Tangga di Kaltim atau 92,83 persen terlayani oleh tangki septik. Kondisi ini sudah berada di atas rata-rata nasional yakni 82,56 persen. Walaupun secara persentase terlihat baik, angka absolut untuk Rumah Tangga yang membutuhkan perhatian dapat dikatakan cukup signifikan. Pada tahun 2021, terdapat 75.956 Rumah Tangga yang masih membuang tinja secara langsung ke berbagai obyek geografis lingkungan alam, seperti kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun/dan lainnya.

3) Jalan Dalam Kondisi Mantap

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana jaringan jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2022 mencapai 693,86 Km atau 77,52 persen. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 284,86 Km, kondisi sedang 409,00 Km, kondisi rusak ringan 104,81 Km, dan kondisi rusak berat 96,42 Km.

Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,96 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2021 mencapai 1.409,94 Km atau 82,40 persen. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 305,83 Km, kondisi sedang 1.104,11 Km, kondisi rusak ringan 223,89 Km, dan kondisi rusak berat 77,12 Km.

Tabel II.53
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan (Km)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Status	Panjang (Km)	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya
1	Nasional	1.710,96	1.428,99	16,25	0	265,72
2	Provinsi	895,09	465,29	127,59	27,17	275,04

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023

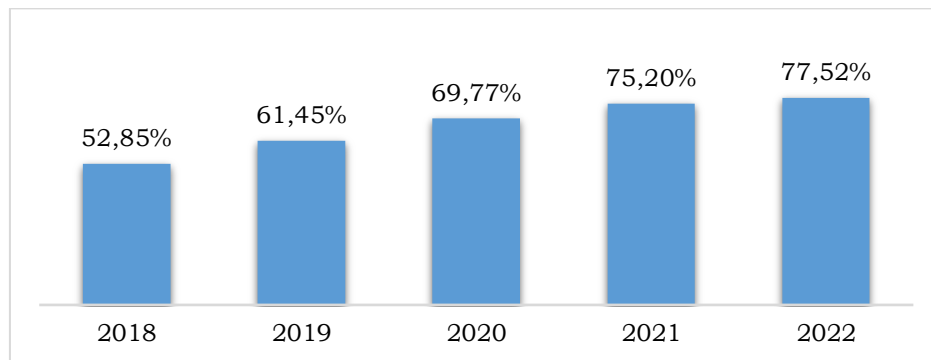
Data jalan kewenangan provinsi pada Tahun 2022 menunjukkan cukup besarnya rasio jalan yang dalam kondisi rusak sedang dan berat. Kondisi ini membutuhkan perhatian untuk pemeliharaan, sehingga dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

Tabel II.54
Rasio Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Status	Baik	Sedang	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Nasional	305,83	1.104,11	223,89	77,12
2	Provinsi	284,86	409,00	104,81	96,42
3	Kabupaten/Kota	6.859,70	2.265,13	2.035,89	2.355,49
TOTAL		7.450,39	3.778,24	2.364,59	2.529,03

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 yang hanya mencapai 473,05 Km, meningkat 220,81 km sehingga pada tahun 2022 telah mencapai 693,86 Km. faktor pendorong yang membuat capaian jalan mantap bertambah setiap tahunnya adalah pemeliharaan jalan provinsi oleh UPTD Pemeliharaan Dinas PUPR PERA untuk menjaga kemantapan jalan dan alokasi pendanaan untuk rekonstruksi jalan yang bertambah setiap tahunnya untuk menambah proporsi jalan mantap yang ada di Provinsi Kaltim. Lokus penanganan jalan untuk meningkatkan persentase jalan mantap adalah ruas-ruas jalan provinsi yang mendukung sektor perekonomian seperti ruas jalan Tanjung Redeb–Talisayan yang mendukung Pariwisata dan ruas jalan Patung Lembuswana – Sebulu yang mendukung Pertanian.



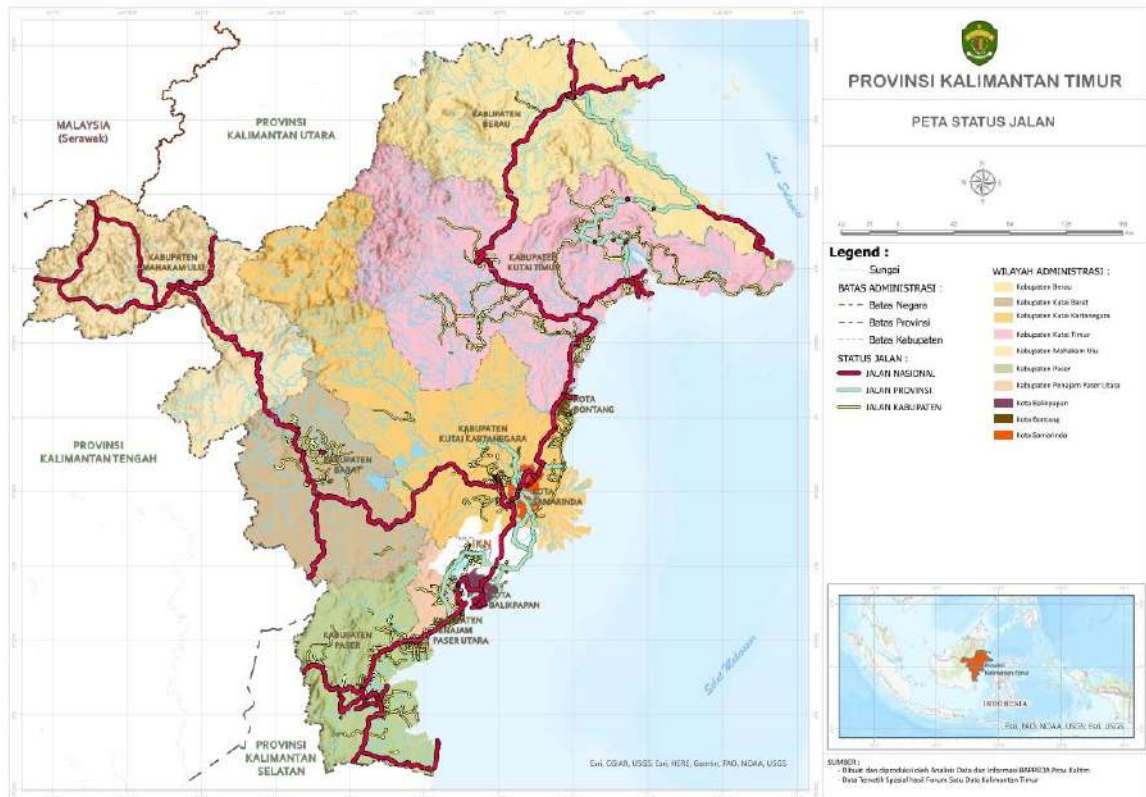
Gambar II.45

Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2019-2022

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022)

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km/1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km². Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
- 2) Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas Kalimantan;
- 4) Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
- 5) Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
- 6) Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal; dan
- 7) Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor



Gambar II.46
Peta Jalan Menurut Status Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

4) Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian. Pada dimensi pendayagunaan air aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius penyediaan kapasitas air baku.

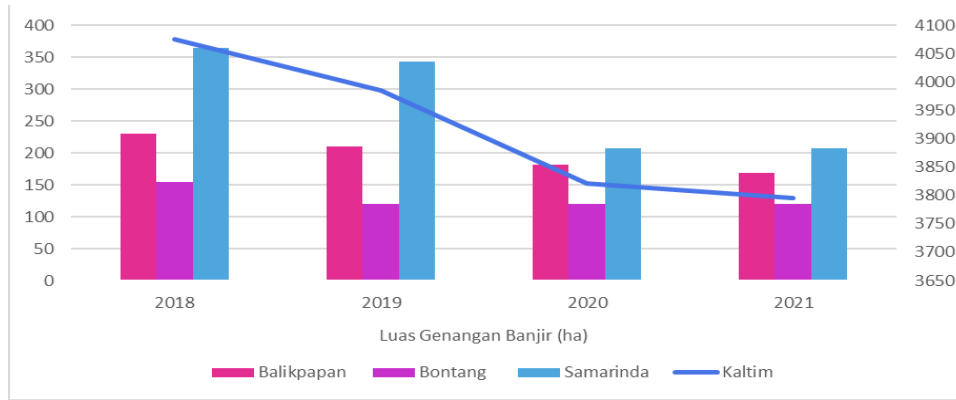
Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku saat ini adalah sebesar 7.922 liter/detik. Hal ini masih jauh dari kebutuhan air baku yang diharapkan, kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pembangunan Bendungan Marangkayu dan Sukarahmat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku di Kota Bontang terkendala dalam pelaksanaannya yaitu pembebasan lahan, tumpang tindih dengan HGU, dan lokasi bendungan yang berada di kawasan lindung.

Pemenuhan kebutuhan air baku masih perlu untuk ditetapkan menjadi prioritas daerah, utamanya pada Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang masih sangat bergantung pada penggunaan air tanah. Pemenuhan air baku dengan mengandalkan air permukaan sangat diperlukan untuk jangka

panjang, sementara untuk pemenuhan air baku untuk jangka pendek masih tetap mengandalkan penggunaan air tanah dengan pembangunan sumur dalam. Penambahan kapasitas air baku juga dianggap sangat penting, terutama dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Dengan penetapan IKN di Kalimantan Timur maka diperkirakan akan terjadi peningkatan kebutuhan air baku sebagai konsekuensi dari pertambahan penduduk dan tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dalam mendukung IKN.

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengurangan luas genangan banjir dan penanganan pantai kritis. Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, baik karena faktor alam maupun manusia. Faktor alam terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kondisi topografi, pasang surut dan kondisi geografis DAS yang luas. Sedangkan faktor manusia disebabkan oleh daerah tangkapan air (DTA) yang berubah fungsi, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai serta sistem drainase yang tidak tertata dan berfungsi dengan baik. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir.

Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang. 3 Kota tersebut ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Timur yang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar II.46, capaian kinerja pengurangan luas genangan banjir selalu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Namun demikian kendala yang dihadapi dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan pembebasan lahan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem pengendali luapan air sungai, adanya utilitas terbangun (jalur pipa PDAM, Listrik, Telekomunikasi dan kabel optik), lokasi penanganan banjir yang merupakan daerah padat penduduk, serta faktor cuaca yang tidak menentu. Selain permasalahan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum optimal.



Gambar II.47
Luas Genangan Banjir 3 Kota Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2021 (Ha)

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022)

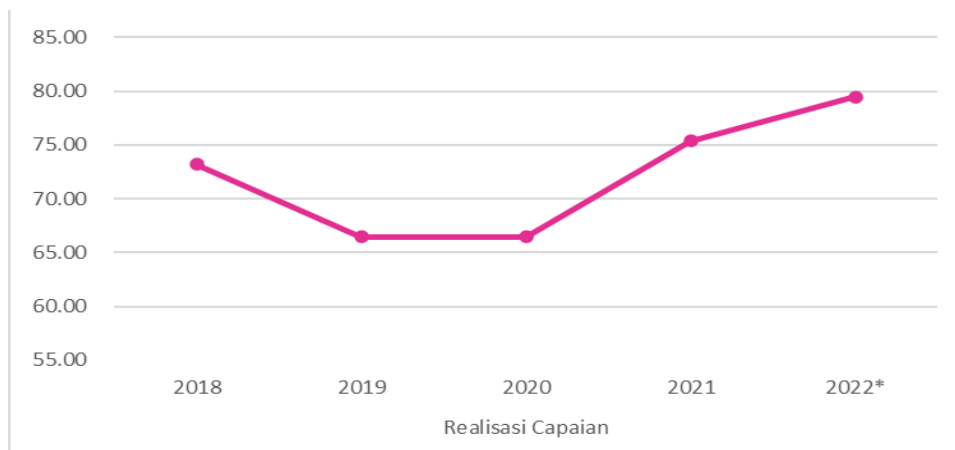
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menurunkan luas genangan banjir seluas 279 Ha dalam kurun waktu 4 tahun. Meskipun capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan, namun penanganan banjir masih perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat pada awal periode RPJMD (Tahun 2018) Provinsi Kalimantan Timur, luas genangan banjir masih 4.075 Ha yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur mempunyai garis pantai sepanjang 3.925 Km yang terbentang dari Kabupaten Berau di bagian Utara dan Kabupaten Paser di wilayah Selatan. Dengan garis pantai yang sangat panjang maka potensi terjadinya pengikisan akibat gelombang dan arus laut yang bersifat destruktif atau merusak menjadi cukup tinggi. Sementara pembangunan infrastruktur pengaman pantai masih rendah capaiannya, tidak berbanding lurus dengan panjang pantai kritis yang ada. Berdasarkan data perhitungan tahun 2019 terdapat 13.600 meter pantai kritis yang berada di dalam WS. Kewenangan Provinsi (Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau), sementara itu pembangunan infrastruktur pengaman pantai sampai dengan tahun 2022, baru mencapai 455 meter. Sehingga kedepannya penanganan pantai kritis harus dilanjutkan setiap tahunnya, agar dapat meminimalisir daya rusak air terhadap pantai. Namun penanganan ke depan perlu juga dipikirkan penanganan alternatif selain pembangunan fisik seperti konservasi/vegetasi.

Berdasarkan hasil laporan capaian terhadap Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang

penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2019 sebesar 66.46% dan capaian yang sama pada tahun 2020.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi ditetapkan dengan Perda RRTR melainkan menjadi bagian dari substansi Perda RTRW itu sendiri, sehingga hal ini mempengaruhi indikator pada aspek pelaksanaan penataan ruang. Sehingga, pada tahun 2021 dan 2022, terdapat peningkatan skoring menjadi 75,38 persen dan 78,57 persen dikarenakan progres revisi RTRWP telah berjalan sesuai dengan target.



Gambar II.49
Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang

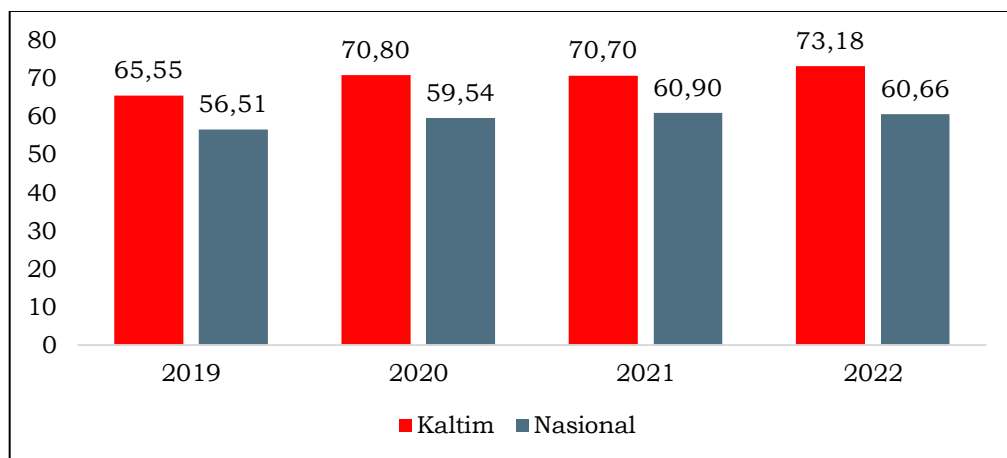
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023)

Pada tahun 2023 ditargetkan pencapaian Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang mencapai 83,10% dimana diperlukan peningkatan sebesar 4,53%. Adapun target ini didasarkan kepada peningkatan kinerja dari masing-masing aspek yaitu Aspek Pembinaan Penataan Ruang (38,30), Aspek Pengaturan Penataan Ruang (23,50) dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang (23,10). Selain itu diharapkan pada awal tahun 2023, Revisi RTRWP sudah dapat ditetapkan menjadi Perda sehingga Kabupaten/Kota yang saat ini sedang melakukan peninjauan kembali dan proses revisi perda dapat mengacu perda RTRWP.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rumah Tidak Layak Huni

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Data SUSENAS KOR tahun 2022 (Maret) menunjukkan bahwa Rumah Tangga di Kalimantan Timur yang telah menempati rumah layak huni mencapai 73,18%. Kondisi ini naik sekitar 2,84% dari tahun sebelumnya (Gambar II. 53). Meskipun demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar karena masih terdapat 345.031 Rumah Tangga (26,82%) yang belum bertempat tinggal di rumah yang layak huni.

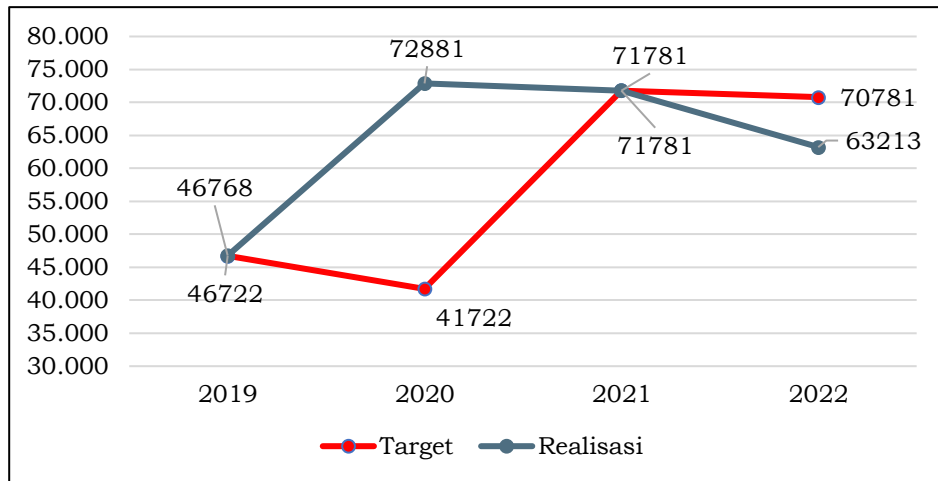


Gambar II.50

Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni di Kaltim Tahun 2019 – 2022

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023)

Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah tahun 2019 – 2023. Dalam rentang waktu tersebut, pengurangan ditargetkan mencapai 25.000-unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dana APBN, APBD Provinsi Kaltim, serta APBD kabupaten/kota. Berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2022, terdapat setidaknya 63.213 RTLH di Kaltim yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Dari sisi pelaksanaan, penanganan melalui Dana APBD dilakukan dengan berpedoman pada kriteria penentuan kelayakan hunian bangunan. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui perbaikan atap, lantai, serta dinding pada bangunan-bangunan yang telah terdata dan terverifikasi.



Gambar II.51
Target dan Realisasi Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023)

Gambar II.50 menunjukkan jumlah rumah layak huni tahun 2019 hingga 2022, yakni target dan capaian. Kinerja dikalkulasi melalui pengurangan RTLH setiap tahun, sehingga semakin kecil nilai RTLH maka kinerja dikatakan semakin baik. Kenampakan visual grafik memiliki sedikit anomali. Hal ini juga menunjukkan salah satu kendala atau kesulitan dalam perhitungan capaian kinerja penanganan RTLH, yakni inkonsistensi data *baseline* yang menyebabkan perubahan basis perhitungan. Kelemahan pada kondisi data *baseline* ini akan menjadi perhatian dalam proses perencanaan program penanganan RTLH tahun-tahun berikutnya.

2) Kawasan Kumuh

Kalimantan Timur memiliki 1,881.67 Ha area yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mendefinisikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Secara lebih detail, Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018 menjabarkan aspek yang menjadi penentu dalam penetapan kawasan kumuh, yakni meliputi tujuh aspek dan 16 variabel. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, pengaruh kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, kondisi pengelolaan persampahan, aspek pengelolaan air limbah, aspek drainase lingkungan, serta kondisi jalan lingkungan.

Tabel II.55
Target dan Realisasi Luas Kawasan Kumuh Tahun 2018-2022

Uraian	Luas kawasan kumuh (Ha)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Target	673.42	620.06	1.287,82	1.237,82	1.187,82
Realisasi		645.47	1.287,82	1,190.14	1.185,14

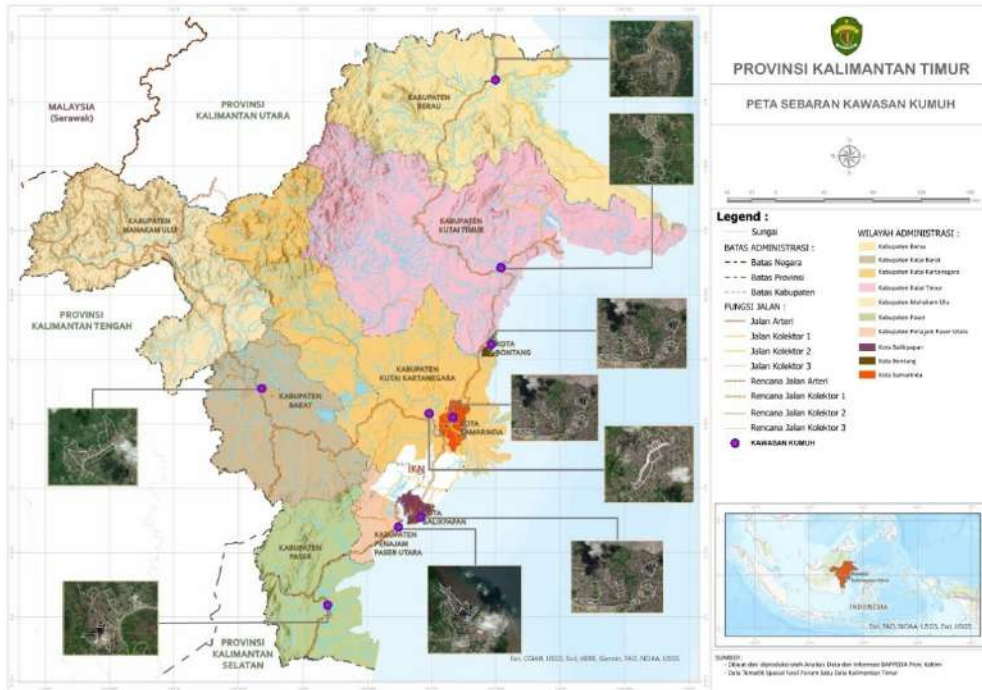
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023)

Lokasi kawasan kumuh ditetapkan oleh bupati/wali kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menangani areal kumuh dengan luasan 10-15 Ha, pemerintah pusat untuk luasan di atas 15 Hektar, sementara pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menangani areal di bawah 10 Ha. Hingga tahun 2022, luas kawasan kumuh tersisa 1.185,14 Ha (Tabel II. 59). Capaian penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi penanganan antara berbagai sumber pendanaan.

Tabel II.56
Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan

No.	Kab/Kota	Luas (Ha)			SK Bupati/Walikota
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	
1	Paser	180,74	35,06	8,72	No. 653/KEP-116/2021
2	KUBAR	969,43	37,5	38,69	No. 592/K.425/2021
3	KUKAR	122,99	37,51	7,61	No. 454/SK-BUP/HK/2019
4	KUTIM	783,73	0	0	No. 050/KK.268/2016
5	Berau	0	25,79	2,47	No. 30 Tahun 2020
6	PPU	49,07	0	0	No. 593.33/270/2017
7	MAHULU	37,15	0	2,45	No. 050.136.146/K.63/2020
8	Balikpapan	137,51	10,39	5,4	No. 188.45-326/2020
9	Samarinda	21,43	24,25	24,83	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	32,8	33,35	7,41	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kaltim		2.334,85	203,85	97,58	

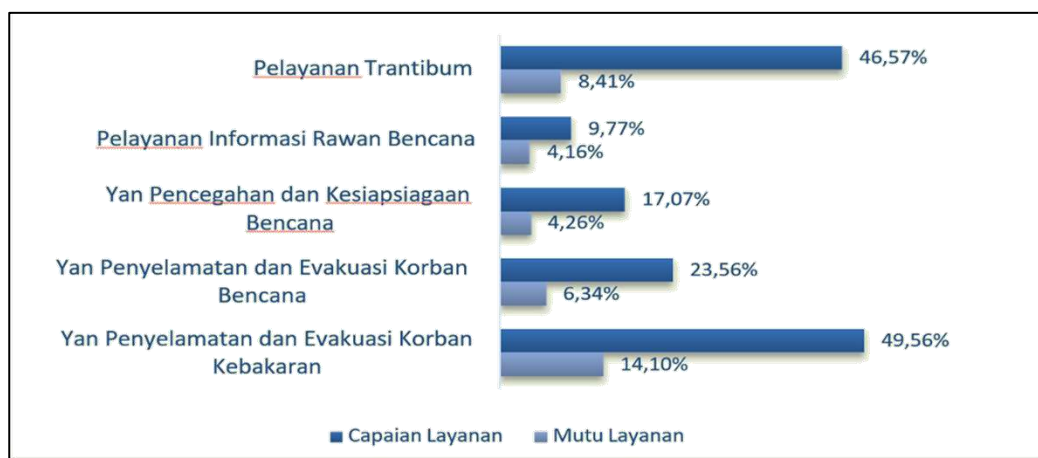
Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022



Gambar II.52
Peta Sebaran Kawasan Kumuh
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan pelaporan Standar Pelayanan Minimal ada Sekretariat Bersama SPM Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada triwulan III (tiga) tahun 2022, bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 46,57% pada pelayanan dasar trantibum dengan kualitas pelayanan 8,41%. Hal ini disebabkan belum dialokasikan anggaran terkait pencapaian Standar Pelayanan Minimal terkhusus bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Linmas Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II.53
Capaian SPM Trantibum Tahun 2022
(Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda Kemendagri)

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walau demikian Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Secara umum kondisi ketertiban dan ketenteraman sampai dengan tahun 2020 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap baik aparat pemerintah dan aparat keamanan. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Upaya penurunan peristiwa kejahatan dan pelanggaran ini memang terus diupayakan. Berdasarkan data yang ada, penurunan angka kejahatan dan pelanggaran saat ini masih belum optimal. Pada tahun 2017, persentase penurunan angka kejahatan dan pelanggaran sebesar 31 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 11 persen, hingga pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14 persen.

Tabel II.57
Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

Elemen Data	Tahun				Satuan	Ket.
	2018	2019	2020	2021		
Jumlah Aparat Satpol PP dan Linmas	23.026	23.028	23.811	23.812	Orang	Jumlah Aparat Satpol PP dan Satlinmas
Jumlah Aparat Satpol PP	493	441	1.224	1.225	Orang	Jumlah PNS dan Non PNS
a. Provinsi	143	145	172	173	Orang	Jumlah PNS dan Non PNS
b. Kab/Kota	1.502	1.502	1.052	1.052	Orang	Jumlah PNS dan Non PNS
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	22.587	22.587	22.587	22.587	Orang	Linmas Cadangan umum
a. Provinsi	30	30	30	30	Orang	Jumlah Non PNS
b. Kab/Kota	22.557	22.557	22.557	22.557	Orang	Jumlah Linmas
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 jam	2.793	2.793	2.793	2.793	Kali	24 Jam (1 Tahun)
Jumlah Pos Siskamling	1.927	1.927	1.927	12.293	Unit	Pos Jaga
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	2	2	2	0,49		
Jumlah Pelanggaran K3	138	138	138	5.157	Kasus	
Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3	365	365	365	4.508	Kasus	

Elemen Data	Tahun					Ket.
	2018	2019	2020	2021	Satuan	
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	264	264	264	41	%	
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	4	4	3	0,01		

Masih belum optimalnya penurunan angka kriminalitas disebabkan karena pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat juga kurang. Berdasarkan indikator persentase poskamling aktif, pada tahun 2016, jumlahnya hanya sebesar 2.242. Angka ini mengalami penurunan menjadi 1927 pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai upaya penurunan angka kriminalitas untuk jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 63 kali, tahun 2017 sebanyak 211 kali, tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 2.793 kali.

Saat ini total jumlah petugas linmas adalah 30 orang. Idealnya setiap pos kamling dijaga minimal 2 orang dengan asumsi penjagaannya selama 24 jam bukan hanya pada malam hari saja. Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020, karena keterbatasan tersebut, satlinmas diorientasikan untuk membantu pelaksanaan pengawasan Pilkada. Kurangnya jumlah petugas linmas ini karena aturan terdahulu belum memberikan insentif kepada petugas linmas yang berasal dari anggaran dinas. Mengikuti aturan terbaru dari Permendagri, program satlinmas ini nantinya berhak mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja bagi para petugas linmas.

Angka kriminalitas khususnya jumlah tindak pidana di Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang tercatat pada Polda Kaltim, yang pada tahun 2018 terdapat 6.715 tindak pidana, yang turun menjadi 5.253 tindak pidana pada 2019, dan turun kembali pada 2020 menjadi 4.368 tindak pidana.

Persentase penyelesaian kasus terhadap peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 85,00 persen, yang berarti mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 87,00 persen.

Tabel II.58
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2017	11.705	1.591	8.622	73,66	33,39
2018	6.715	1.228	5.487	81,71	18,90
2019	5.253	670	4.583	87,25	14,47
2020	4.368	506	1.696	87,00	6,01
2021	4.184	506	1.696	85,00	6,01

Sumber: POLDA KALTIM, 2022

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir yakni Tahun 2018 s/d Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan yang mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2022, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 115 dimana 20,00% (23 demonstrasi) terkait Ekonomi; 10,43% (12 demonstrasi) terkait Politik; 13,04% (15 demonstrasi) terkait Sosial; 46,09% (53 demonstrasi) terkait Hukum; 0,87% (1 demonstrasi) terkait Agama; 9,57% (11 demonstrasi) terkait Kamtibmas.

Tabel II.59
Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Jenis Demo	Tahun					Jumlah
	2018	2019	2020	2021	2022	
Ekonomi	9	9	1	8	23	65
Politik	2	0	6	5	12	36
Sosial	22	15	14	15	15	119
Budaya	4	0	0	0	0	5
Pendidikan	0	0	0	0	0	2
Hukum	33	18	32	34	53	202
Agama	6	0	1	1	1	13
Hankam	0	0	0	0	0	1
Tapal Batas	0	0	0	0	0	0
Sengketa Lahan	0	8	14	2	0	24
Kamtibmas	0	4	2	2	11	19
Lingkungan	0	0	0	3	0	3
Jumlah	76	54	70	70	115	489

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi KALTIM, 2023

F. Sosial

Perkembangan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 tahun terakhir fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas kehidupan sosial masyarakat. Hal ini tergambar pada peningkatan jumlah PMKS yang harus menerima bantuan dengan puncak jumlah tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 108.434 orang.

Tabel II.60
Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

Jumlah PMKS	Satuan	2018	2019	2020	2021
Jumlah PMKS	Orang	243.459	251.234	251.234	247.465
PMKS yang ditangani	Jenis	26	26	26	26
Persentase Penanganan PMKS	%	1	1	1	1
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	78.387	78.387	81.247	108.434
PMKS yang diberikan Bantuan	Orang	1.200	1.052	1.134	2.708
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	1,53	1,34	1,40	2,50
Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	%	0,1	1,34	1,4	1,4
Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	KK	n/a	46.510	46.510	23.355
Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	KK	n/a	100	100	24

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2022

Penanganan dan pemberdayaan PPKA dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curative*), pemulihan (*rehabilitative*) dan pengembangan (*promotive*) seperti meningkatkan jumlah Keluarga miskin dan PPKS yang memiliki usaha ekonomi produktif dengan melibatkan multi program dan lintas sektor.

Berdasarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur terdapat kenaikan dari tahun 2018 sebanyak 243.459 orang menjadi 247.465 orang pada tahun 2021, atau bertambah sebanyak 4.006 orang. Jumlah PMKS yang terbesar pada kabupaten/kota

berada pada Kabupaten Kutai Barat dan Kota Samarinda yaitu sebesar 87.726 dan 34.899. Berdasarkan inventarisasi permasalahan penanganan PMKS hal utama yang perlu dilakukan selain peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga adalah belum tersedianya panti rehabilitasi untuk penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Tabel II.61
Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Jenis Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Anak Balita Terlantar	94	-	68	-	1.841	-	59	-	102	-	82	-
2	Anak Terlantar	327	-	743	-	1.542	-	274	-	326	-	1.625	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	71	-	79	-	66	-	48	-	26	-	21	-
4	Anak Jalanan	124	-	81	-	206	-	-	-	-	-	39	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	76	-	63	-	435	-	31	-	14	-	164	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	187	-	24	-	97	-	170	-	59	-	93	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	161	-	921	-	816	-	23	-	-	-	43	-
8	Lanjut Usia Terlantar	29	-	668	-	1.162	-	-	-	422	-	-	-
9	Penyanggah Disabilitas	314	-	2.349	-	1.626	-	1.097	-	449	-	530	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	11	-	4	-	51	-	-	-	26	-	10	-
12	Pengemis	9	-	8	-	55	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	21	-	5	-	64	-	-	-	-	-	7	-
14	Kelompok Minoritas	65	-	-	-	38	-	93	-	-	-	17	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP)	143	-	134	-	439	-	110	-	240	-	298	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.091	-	180	-	1.990	-	19	-	43	-	7	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	303	-	75	-	508	-	4	-	6	-	3	-
18	Korban Trafficking	2	-	3	-	8	-	6	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	56	-	-	-	73	-	-	-	-	-	51	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	399	-	-	-	59	-	-	-	48	-	34	-
21	Korban Bencana Alam	2.807	591	169	43	5.950	1.267	981	214	47.301	9.748	1.211	287
22	Korban Bencana Sosial	948	171	2.477	412	3.288	612	781	192	25.304	5.941	1.011	214

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	56	-	-	-	-	-	27	-	29	-	48	-
24	Fakir Miskin	14.704	3.114	20.114	3.193	14.248	3.101	12.047	3.012	12.678	2.870	13.647	3.291
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	34	-	337	-	-	-	581	-	11	-
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-	72	27	1.697	378
JUMLAH		21.998	3.876	28.199	3.648	34.899	4.980	15.770	3.418	87.726	18.586	20.648	4.170

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2022

Tabel II.63 Lanjutan

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BERAU		KUTIM		BONTANG		MAHULU	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Anak Balita Terlantar	77	-	128	-	78	-	-	-
2	Anak Terlantar	502	-	213	-	437	-	-	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	172	-	442	-	43	-	18	-
4	Anak Jalanan	16	-	-	-	51	-	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	35	-	872	-	43	-	-	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	139	-	187	-	56	-	-	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	147	-	587	-	-	-	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	-	-	198	-	337	-	-	-
9	Penyandang Disabilitas	276	-	612	-	795	-	310	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	75	-	19	-	17	-	-	-
12	Pengemis	-	-	-	-	4	-	-	-
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	44	-	-	-	-	-	-	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	31	-	159	-	160	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	2	-	4	-	4	-	-	-
18	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	52	-	-	-	34	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	-	-	712	154	869	196	-	-
22	Korban Bencana Sosial	422	106	392	98	377	95	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Fakir Miskin	9.307	2.107	12.001	3.001	4.587	1.047	1.067	264
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil	1.717	411	575	104	-	-	1.250	249
JUMLAH		13.014	2.624	17.101	3.357	7.892	1.338	2.645	513

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2022

G. Ketenagakerjaan

Bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur persentase terbesar adalah pendidikan SMA/SMK dan persentase terkecil adalah tamatan Diploma I/II/III.. Pada tahun 2022 persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah tercatat 25,98 persen menurun dibanding tahun 2021 yang mencapai 28,57 persen. Sementara Persentase penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan lulus Diploma I/II/III sekitar 3,26 persen meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 3,77 persen.

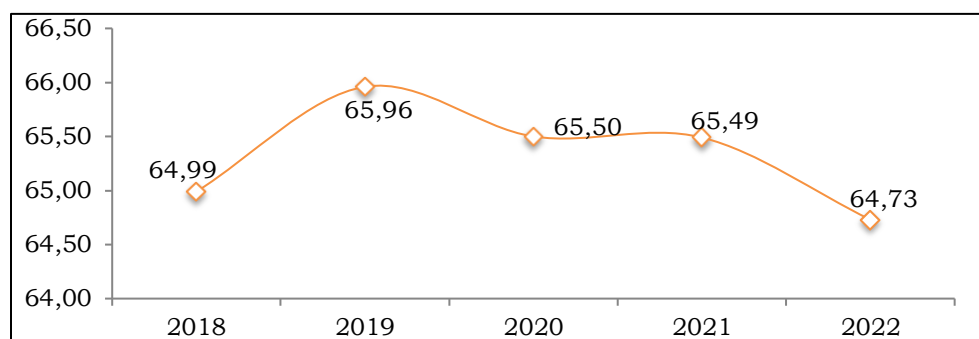
Tabel II.62
Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2022

No	Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD ke Bawah	477.106	482.844	493.889	491.456	453.853
		(29,43)	(28,51)	(29,18)	(28,57)	(25,98)
2	SMP	260.843	273.257	267.721	260.789	259.693
		(16,09)	(16,14)	(15,82)	(15,16)	(14,87)
3	SMA/SMK	609.994	659.047	643.105	666.878	760.250
		(37,63)	(38,92)	(37,99)	(38,76)	(43,52)
4	Diploma I/II/III	64.291	57.174	64.507	64.906	56.923
		(3,97)	(3,38)	(3,81)	(3,77)	(3,26)
5	Universitas/DIV	208.735	221.159	223.574	236.332	216.201
		(12,88)	(13,06)	(13,21)	(13,74)	(12,38)
Kalimantan Timur		1.620.969	1.693.481	1.692.796	1.720.361	1.746.920
		(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Perkembangan jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja selama tahun 2018-2022 selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang sempat turun dari 1.693.481 orang di tahun 2019 menjadi 1.692.796 orang di tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk yang bekerja tersebut merupakan salah satu dampak pandemi COVID- 19 yang menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaannya atau usahanya, pengurangan jam kerja ataupun pemberhentian kerja. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu serta program pemulihan ekonomi pasca pandemi yang dilaksanakan pemerintah, jumlah penduduk yang bekerja telah kembali meningkat. Kondisi itu tercermin pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.720.361 orang di tahun 2021 kemudian menjadi sebanyak 1.746.920 orang di tahun 2022.

Pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi Diploma dan Sarjana ke atas. Sebaliknya, terjadi peningkatan pada penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tertinggi SMA dan SMK. Kedua hal ini juga dapat mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan lulusan SMA dan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memilih untuk bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi yang dominan menyerap tenaga kerja di Kalimantan Timur tidak memerlukan kompetensi/keahlian pada jenjang Diploma dan Universitas. Jika melihat fakta, penduduk paling banyak bekerja di wilayah perkotaan dengan lapangan usaha dominan di sektor perdagangan dan jasa (20,06%). Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa para pekerja sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk mendapatkan peluang kesejahteraan yang lebih baik apabila berpendidikan lebih tinggi yang didukung dengan kebutuhan perkembangan sektor ekonominya.



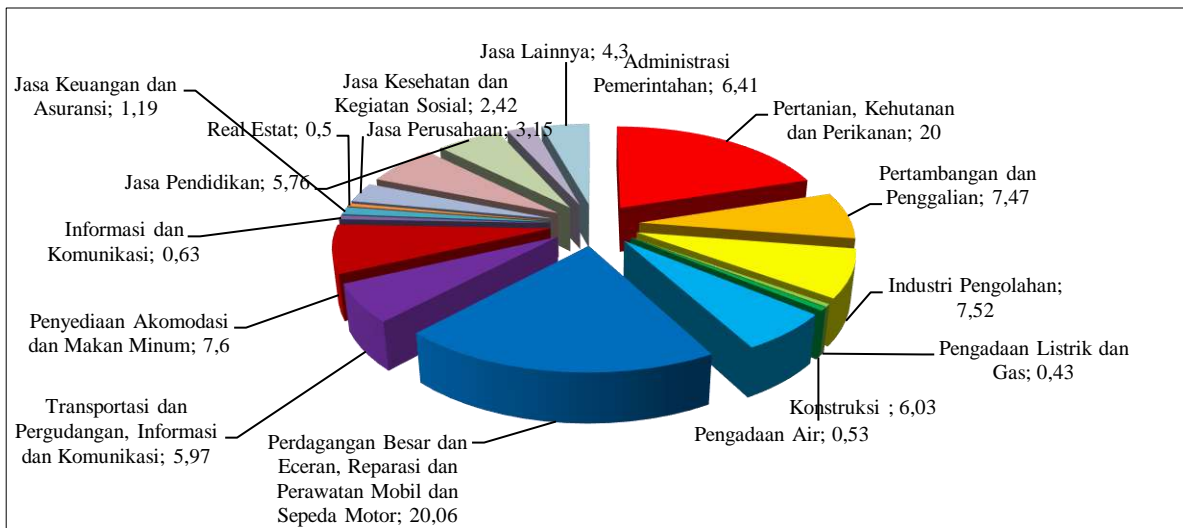
Gambar II.54

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022**

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

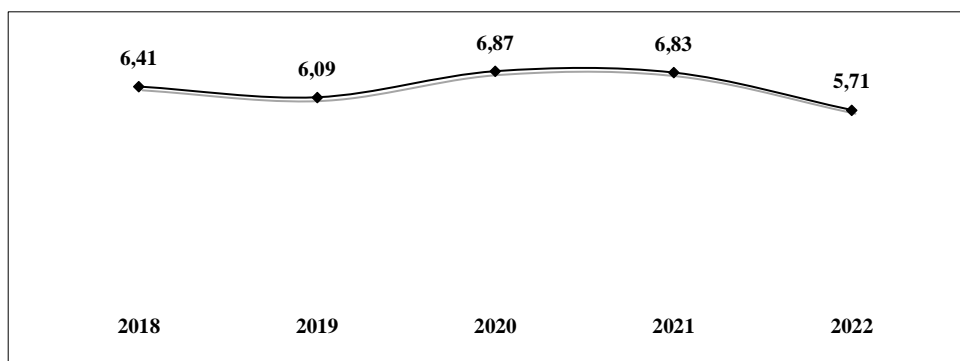
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja turun dari 65,49 persen menjadi 64,73 persen. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja. Membaiknya kinerja ekonomi turut

berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja yang tersedia dan hal tersebut juga membantu menurunkan angka pengangguran.



Gambar II.55
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Tahun 2022, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 20,06 persen diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 20,00 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor pengadaan listrik dan gas mencapai 0,43 persen.



Gambar II.56
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan yang mencapai 6,87 persen dimana angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,94 persen. Peningkatan ini diperkirakan akibat dampak dari Pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di dunia pada akhir tahun 2019 dan mulai terasa dampaknya di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur pada awal tahun 2020 terutama pada sektor transportasi dikarenakan beberapa negara memberlakukan pembatasan berskala besar bahkan ada yang memberlakukan karantina wilayah. Sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja pada sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate* dan jasa perusahaan. Namun di tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan mencapai 5,71 persen, penurunan terjadi dikarenakan di tahun 2022 pandemi COVID-19 sudah mulai berkurang dan banyaknya masyarakat yang telah di vaksin serta pemulihan ekonomi mulai membaik.

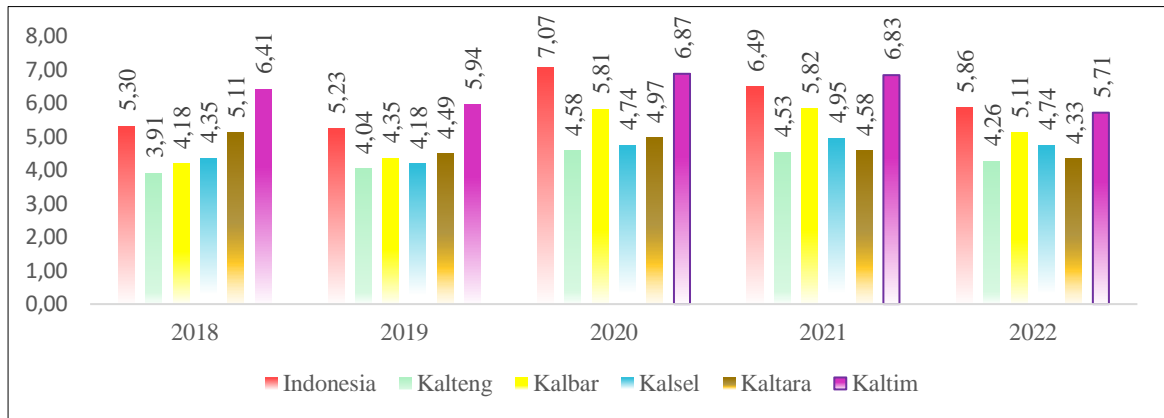
Tabel II.63
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	5,00	4,55	4,52	5,70	4,88
2	KUBAR	4,86	5,08	4,97	5,14	4,62
3	KUKAR	5,96	5,98	5,70	5,66	4,14
4	KUTIM	5,93	5,53	5,45	5,35	6,48
5	Berau	5,62	5,08	5,08	5,82	5,02
6	PPU	4,76	6,26	6,22	2,95	2,12
7	MAHULU	4,17	3,69	3,49	3,14	2,44
8	Balikpapan	9,52	7,29	9,00	8,94	6,90
9	Samarinda	6,16	5,87	8,26	8,16	6,78
10	Bontang	9,61	9,19	9,46	9,92	7,81

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

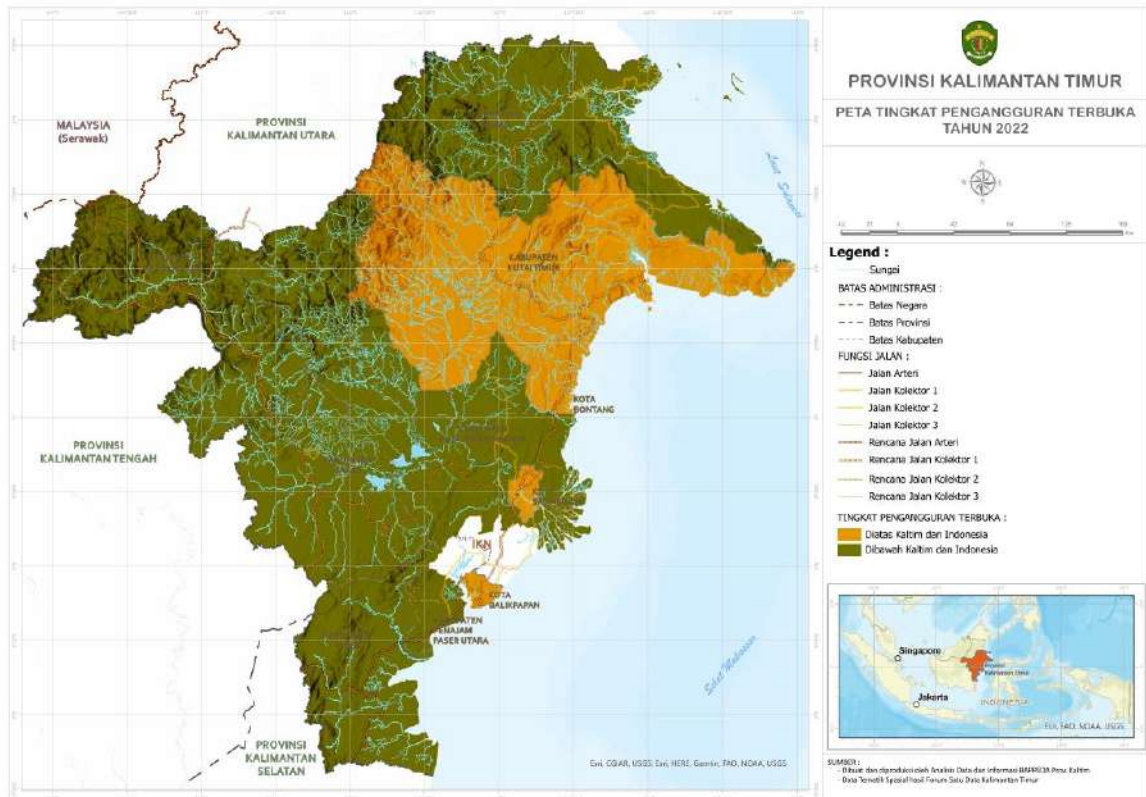
Pada tahun 2022 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur paling tinggi terdapat di Kota Bontang sebesar 7,81 persen, Kota Balikpapan sebesar 6,90 persen, dan Kota Samarinda sebesar 6,78 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terendah ditorehkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,12 persen. Jika dilihat dari perbandingan regionalnya, maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2022 masih menjadi yang tertinggi diantara provinsi

lainnya di regional Kalimantan dan berada di atas tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 5,86 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.



Gambar II.57
Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia
Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS RI, 2022)

Meskipun TPT Kaltim mengindikasikan penurunan, namun peringkat TPT Kaltim berada di atas TPT wilayah Kalimantan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kaltim relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. TPT Kaltim pada Februari 2022 sebesar 6,77% atau berada di posisi paling tinggi dibandingkan dengan TPT provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Secara nasional, Kaltim menempati 10 besar provinsi yang memiliki TPT tertinggi dan berada di atas level TPT nasional sebesar 5,83%



Gambar II.58

Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur Tahun 2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Salah satu upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan memberikan kemudahan akses informasi kepada pencari kerja terutama yang telah mendaftarkan ke dalam *database* pada Disnakertrans. Untuk kemudian akan disesuaikan dengan data yang bersumber dari perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja cenderung fluktuatif dan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2020 dan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu mencapai 15,79 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini masih diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja melalui Balai-Balai Pelatihan Kerja baik yang dibawah wewenang Disnakertrans maupun perangkat daerah lainnya.

Tabel II.64
Persentase Penempatan Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pencari Kerja yang Mendaftar (orang)	49.552	26.148	30.719	22.358	47.254
2	Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	11.266	7.690	5.538	3.531	12.334
4	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	22,74	29,41	18,03	15,79	26,10

Sumber: *Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2023*

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat capaian tertinggi persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2022 adalah Kabupaten Kutai Timur mencapai 65,14 persen. Capaian yang cukup tinggi kemudian diikuti oleh Kota Samarinda yang mencapai 44,07 persen dan Kota Balikpapan mencapai 39,98 persen.

Tabel II.65
Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	KAB/KOTA	Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Penempatan Pencari Kerja (Orang)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)
1	Paser	2.592	657	25,35
2	KUBAR	3.116	388	12,45
3	KUKAR	13.622	335	2,46
4	KUTIM	3.815	2.485	65,14
5	Berau	6.215	2.282	36,72
6	PPU	1.149	447	38,90
7	MAHULU	-	-	-
8	Balikpapan	4.077	1.630	39,98
9	Samarinda	4.261	1.878	44,07
10	Bontang	8.407	2.232	26,55

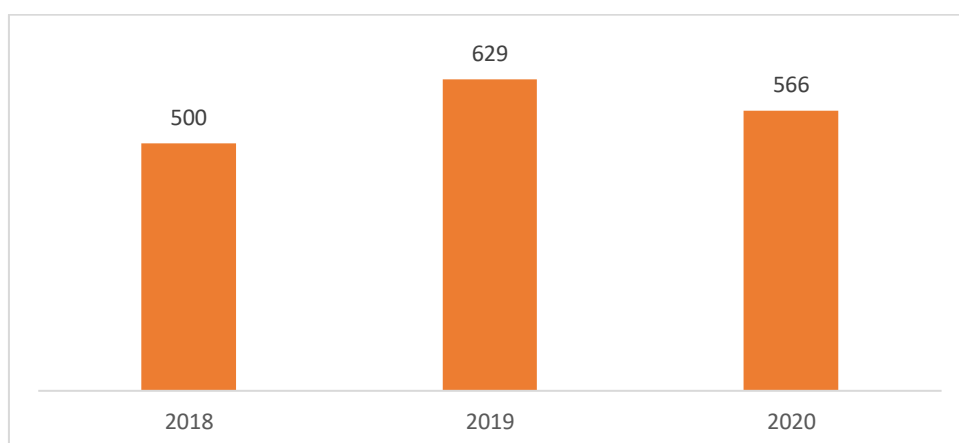
Sumber: *Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2023*

H. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota.

Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 629 kasus dan terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 566

kasus di Provinsi Kalimantan Timur, secara lengkap dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Gambar II.59
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kalimantan Timur
Tahun 2018-2020

(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data simfoni tahun 2020 terdapat jumlah kekerasan pada anak sebanyak 347 kasus.

Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif selain Pemerintah juga meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan mas media. Beberapa kelembagaan perlindungan anak adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum Anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota, jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak anak serta melakukan percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup

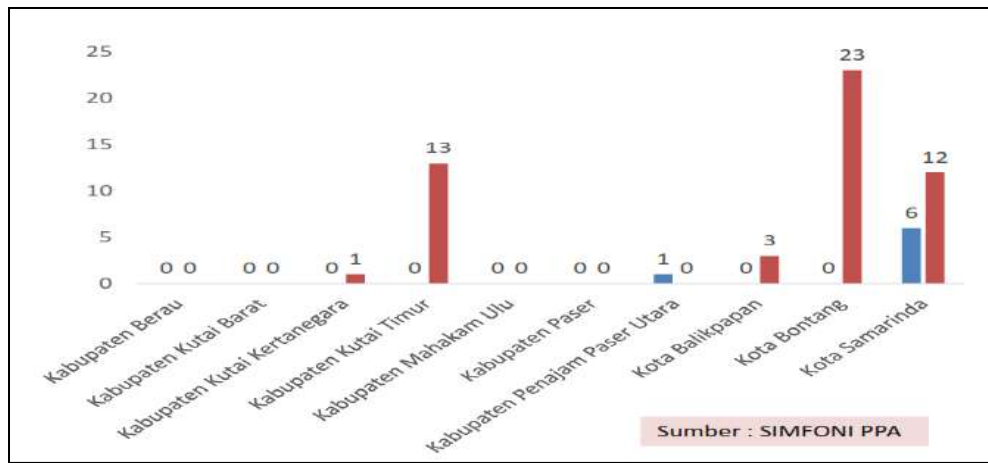
tinggi. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut.

Tabel II.66
Jumlah penduduk disabilitas di Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Cacat Fisik	Cacat Netra	Cacat Rungu	Cacat Mental Jiwa	Cacat Fisik Mental	Cacat Lainnya
1	Paser	2	0	2	0	0	0
2	Kukar	40	5	6	6	3	16
3	Berau	5	1	2	0	3	3
4	Kubar	2	1	1	0	2	6
5	Kutim	11	4	5	0	1	13
6	PPU	7	1	1	1	1	2
7	Mahakam Ulu	7	0	3	1	2	1
8	Balikpapan	12	1	4	0	0	2
9	Samarinda	10	5	5	1	1	2
10	Bontang	9	0	2	1	0	6
JUMLAH		105	18	31	10	13	51

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022

Disabilitas/kecacatan merupakan bagian dari keberagaman. Disabilitas disebabkan oleh lingkungan, bukan kekurangan fisik seseorang. Lingkunganlah yang harus berubah agar kaum disabilitas, khususnya anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Anak-anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual dari lingkungannya. Mereka juga rentan mendapat stigma atas kondisi kedisabilitasiannya. Rentan menjadi korban pemasungan, rentan mendapat *bullying*, dan rentan menjadi korban kekerasan fisik atau eksploitasi. Berikut data korban kekerasan difabel di Kaltim pada tahun 2020.



Gambar II.60
Korban Kekerasan Difabel di Kalimantan Timur Tahun 2020
 (Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

I. Pangan

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP (Indeks Ketahanan Pangan) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan, Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Tabel II.67
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Paser	72,76	72,25	82,26	80,48	81,76
2.	KUBAR	70,64	66,85	54,98	57,76	66,94
3.	KUKAR	79,50	84,51	84,28	84,73	84,44
4.	KUTIM	71,27	57,58	73,13	66,19	60,09
5.	Berau	79,47	84,19	85,34	86,77	86,16
6.	PPU	80,18	84,26	86,20	86,24	85,51
7.	MAHULU	68,88	58,73	63,17	52,75	53,29
8.	Balikpapan	83,62	88,74	87,66	88,68	89,47
9.	Samarinda	82,56	85,19	80,75	83,72	84,66
10.	Bontang	81,42	85,34	84,59	87,24	84,21
	Kalimantan Timur	77,03	76,90	78,24	77,46	77,65

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar 77,65 mengalami peningkatan dari IKP Tahun 2021 yang sebesar 77,46. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai mampu meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sejalan dengan hal tersebut, apabila dilihat hingga level desa masih terdapat 412 pada Tahun 2022 desa di Kalimantan Timur masih termasuk dalam kategori rawan pangan. Desa rawan pangan ini merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Adapun penyebab terbesar terjadinya desa rawan pangan disebabkan oleh faktor Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih (beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu dan stok), rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk dan persentase angka kesakitan/angka harapan hidup.

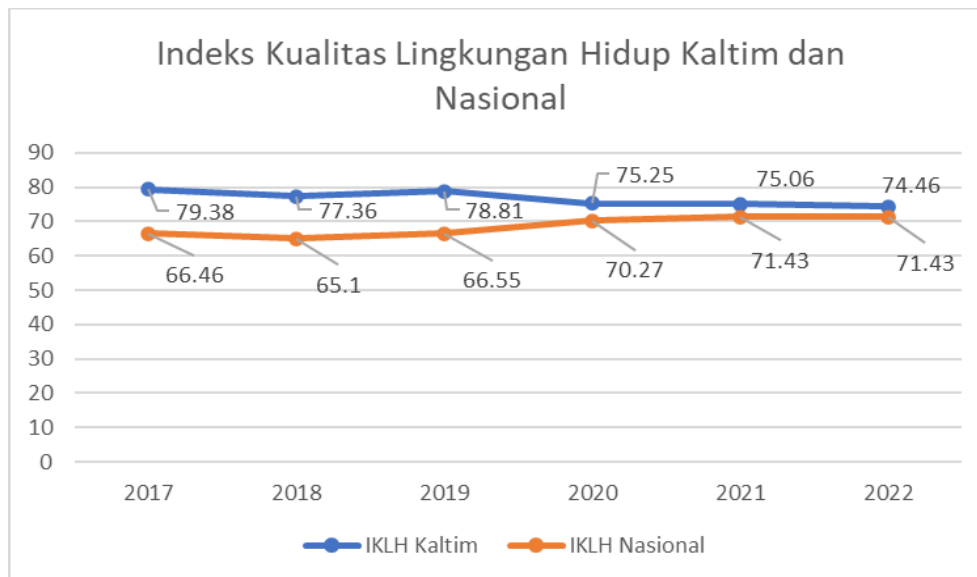
Tabel II.68
Jumlah Desa Rawan Pangan Berdasarkan Hasil FSVA Kabupaten/Kota Tahun 2021 dan 2022

No	Kab/Kota	Jumlah		2021			2022		
		Kecamatan	Desa	Desa Rawan Pangan	% Per Kab/Kota	% Provinsi	Desa Rawan Pangan	% Per Kab/Kota	% Provinsi
1.	Paser	10	144	35	24,31	12,20	24	16,67	5,84
2.	KUBAR	16	194	50	25,77	17,42	62	31,96	15,09
3.	KUKAR	18	237	60	25,32	20,91	85	35,86	20,68
4.	KUTIM	18	141	44	31,21	15,33	96	68,09	23,36
5.	Berau	13	110	19	17,27	6,62	56	50,91	13,63
6.	PPU	4	54	11	20,37	3,83	20	37,04	4,87
7.	MAHULU	5	50	21	42,00	7,32	21	42,00	5,11
8.	Balikpapan	6	34	16	47,06	5,57	18	52,94	4,38
9.	Samarinda	10	59	26	44,07	9,06	23	38,98	5,60
10.	Bontang	3	15	5	33,33	1,74	6	40,00	1,46
Kalimantan Timur		103	1.038	287	27,65	100,00	411	39,60	100,00

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi KALTIM, 2022

J. Lingkungan Hidup

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat eksploitatif dan banyak menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Secara umum, IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.



Gambar II.61
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2017-2022
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022)

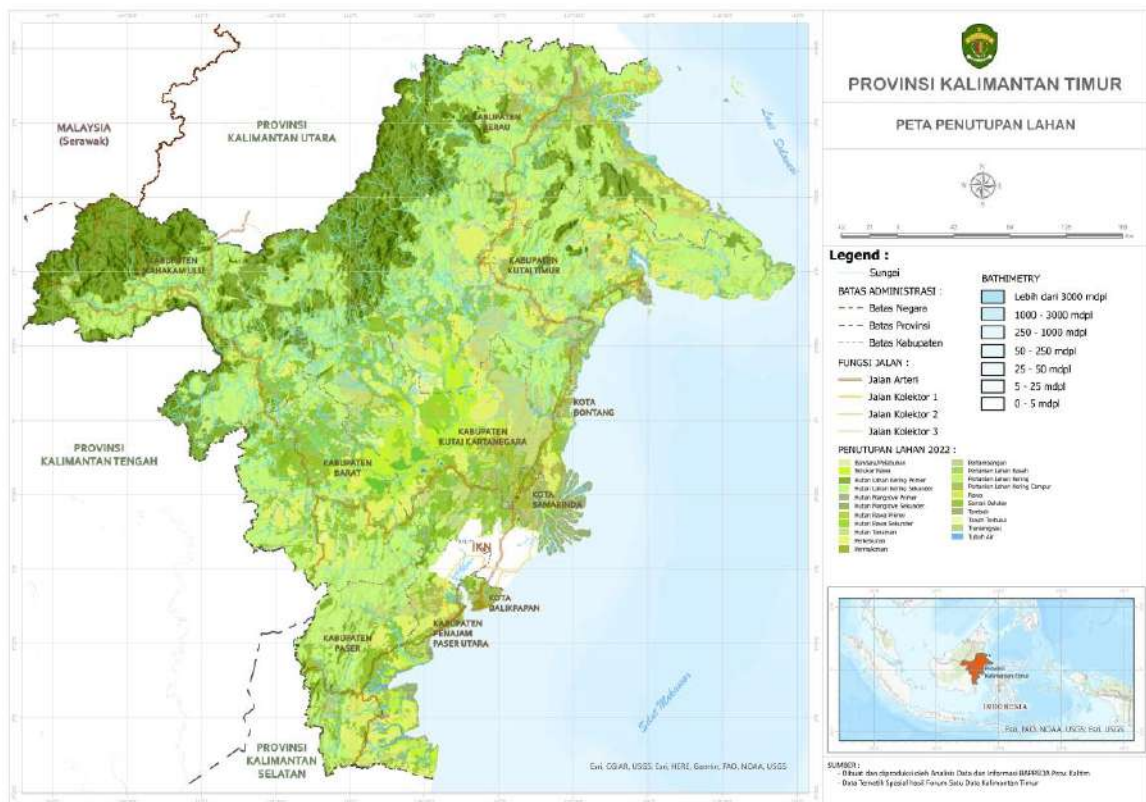
Pada tahun 2019, IKLH Kalimantan Timur mengalami kenaikan angka indeks dari 77,36 di tahun 2018 menjadi 78,81 (predikat baik, $70 < \text{IKLH} \leq 80$) dan terus menurun pada tahun 2022 menjadi 74,46. Menurunnya IKLH tahun 2021 dapat dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 kemudian menurun menjadi 74,46. Capaian ini berada di bawah Target P-RPJMD Kaltim 2019-2023 pada tahun 2022 yakni, 76,05. Capaian IKLH Tahun 2022 ini menurun dikarenakan adanya penurunan angka indeks pada Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kaltim masih belum tercapai apabila dibandingkan dengan target di P-RPJMD.

Tabel II.69
Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

INDEKS	2018	2019*)	2020	2021	2022	KET
IKA	57,73	77,09	53,7	51,92	53,02	*)IKAL/Indeks Kualitas Air Laut masih belum masuk menjadi salah satu penilaian IKLH pada Tahun 2019.
IKU	83,36	89,42	89,06	88,84	87,59	
IKL	87,59	72,12	79,76	82,21	81,85	
IKAL	-	-	83,51	85,4	81,45	

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar II.62
Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur
 (Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak hanya diukur di tingkat Nasional dan Provinsi saja namun juga ada pada tingkat Kabupaten/Kota. Jika dilihat melalui capaian IKLH dari 10 Kabupaten/Kota di Tahun 2022 yang ada di Kalimantan Timur, Capaian IKLH Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten dengan capaian terbaik, yakni 82,65 dengan Rating Baik. Capaian ini didukung oleh Capaian Indeks Kualitas Lahan yang

sempurna yakni 100 Indeks. Sementara Kabupaten/Kota dengan capaian Rating Sedang adalah Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selengkapnya dapat terlihat di tabel berikut:

Tabel II.70
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	IKA	IKU	IKL	IKLH	Target	Rating
1	Kabupaten Kutai Timur	50,00	86,61	81,09	71,64	70,44	BAIK
2	Kota Balikpapan	50,00	84,29	49,79	63,84	68,15	SEDANG
3	Kota Bontang	60,00	86,60	36,30	65,58	65,33	SEDANG
4	Kabupaten Kutai Barat	62,31	91,50	66,09	74,96	70,08	BAIK
5	Kabupaten Kutai Kartanegara	53,08	89,31	70,87	71,65	73,14	BAIK
6	Kota Samarinda	45,81	81,81	25,90	56,03	58,25	SEDANG
7	Kabupaten Mahakam Ulu	61,88	92,56	100,00	82,65	83,86	BAIK
8	Kabupaten Paser	54,09	89,53	72,02	72,37	71,43	BAIK
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	48,33	89,90	61,70	68,09	73,18	SEDANG
10	Kabupaten Berau	53,48	83,76	94,73	74,77	76,71	BAIK

Sumber: ppkl.menlhk.go.id/iklh

Kabupaten/kota yang memiliki capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang baik adalah kabupaten/kota yang menghasilkan capaian Indeks Kualitas Lahan yang baik pula. Hal ini disebabkan porsi perhitungan Indeks Kualitas Lahan yang lebih besar dalam rumus perhitungan IKLH, yakni 40%.

Indonesia dan Kalimantan Timur diakui turut berkontribusi terhadap pemanasan global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dimana Indonesia termasuk penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, sementara Kalimantan Timur sendiri penghasil emisi terbesar ke-6 secara nasional (WRI, 2016). Penyumbang emisi GRK di Kalimantan Timur sampai tahun 2015 didominasi oleh sektor berbasis lahan berupa alih guna dan degradasi hutan (64%), energi (17%), limbah (17%) dan pertanian (2%).

Strategi transformasi ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan pembangunan dengan cara meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sumber daya alam yang ada selama ini. Dengan melihat semakin menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan semakin menurunnya ekonomi dari sumber daya alam tak terbarukan, maka

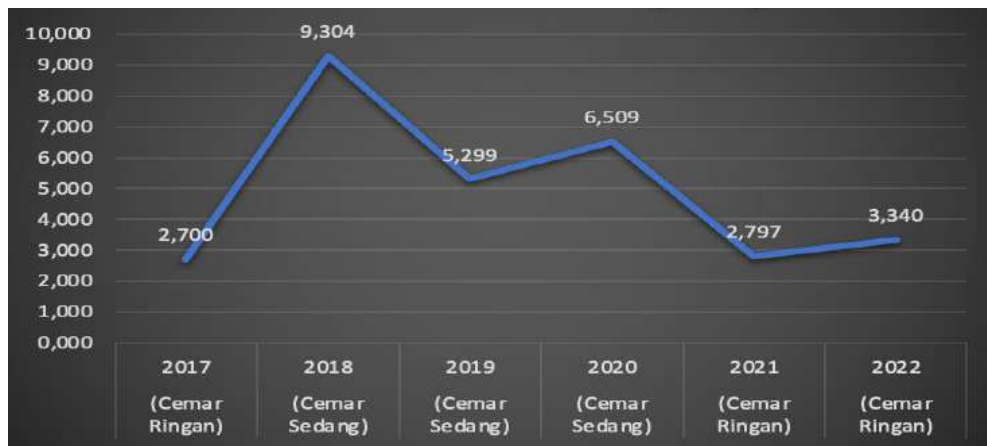
Pemprov Kaltim melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang, antara berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam yang terbarukan, yang dilakukan secara sistematis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengarahkan rencana pembangunan di Kalimantan Timur sejalan dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan strategi pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan disertai upaya mengarusutamakan ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota di Kaltim.

Dalam Konteks Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) adalah suatu keharusan untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar Pemerintah Daerah mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAD GRK, meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target penurunan emisi dan penyerapan GRK. Selain itu, tahapan PEP ini dapat menjadi momentum untuk penyiapan bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan/Tindakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan RAD GRK di tahun-tahun berikutnya. Sejak Tahun 2017, Kalimantan Timur tercatat sudah melakukan inventarisasi aksi mitigasi perubahan iklim dan di PEP kan. Hingga tahun 2022 total aksi yang sudah disetujui dan final di PEP/Aplikasi AKSARA Bappenas adalah sebanyak 836 aksi.

Kalimantan Timur sebagai Provinsi yang terpilih sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang baru juga memiliki masalah yang populer terjadi di Provinsi yang memiliki kota besar lainnya di Indonesia, yakni permasalahan pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan penanganan yang serius oleh semua pihak agar penanganannya dilakukan secara serius dan cepat tanggap. Maka dari itu dalam menentukan tingkat pencemaran lingkungan dilakukan pengukuran Indeks Pencemaran Lingkungan. Indeks Pencemaran Lingkungan adalah Indeks Pencemaran (IP) dari pemantauan Kualitas Air yang kemudian dilakukan penghitungan indeks pencemarannya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Tahun 2021 capaian Indeks Pencemaran 2,797 (Status Cemar Ringan) dari rata-rata 27 titik pemantauan kualitas air, sedangkan target yang ditetapkan adalah 8 (Status Cemar Sedang) artinya Indeks Pencemaran pada tahun 2021 masih dibawah status cemar sedang, yaitu

cemar ringan. Tahun 2022 data Indeks Pencemar yang dihitung adalah 3,34 (Cemar ringan) dari 179 titik pemantauan kualitas air, sedangkan target tahun 2022 yang ditetapkan adalah 8 (cemar sedang) artinya capaian sementara tahun 2022 masih dibawah status mutu air cemar sedang. Jika dibandingkan dengan capaian IP tahun 2021 (2,797) dan IP sementara tahun 2022 (3,34) terdapat selisih nilai yaitu 0,543, hal ini disebabkan adanya pada Tahun 2022 nilai Indeks Pencemaran dilakukan perhitungan penggabungan titik pantau kualitas air sebanyak 179 titik pemantauan kualitas air antara titik KLHK, titik Provinsi Kaltim dan titik Kabupaten/Kota, sehingga nilai tersebut dapat mempengaruhi hasil perhitungan Indeks Pencemar pada Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II.63
Indeks Pencemaran Lingkungan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022)

Selanjutnya, Kaltim telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada Oktober 2015. Program FCPF *Carbon Fund* dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim (12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan. Apabila dilihat dari pengurangan emisi gas rumah kaca, Provinsi Kaltim terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi.

Tabel II.71
Angka Penurunan Emisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq)	54,12	42,14	34,65	24,41	20,89	36,4

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022

Dalam pengukuran emisi GRK Kalimantan Timur Tahun 2022 (Sementara), menggunakan 2 rumus dalam mendapatkan nilai persentase penurunan emisi dari BAU (%), berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan:

$$\text{Jumlah Penurunan Emisi GRK} = \text{BAU } \textit{Baseline} \text{ Total} - \text{Total Emisi GRK}$$
$$\text{Persentase Penurunan Emisi GRK} = \left(\frac{\text{Jumlah Penurunan Emisi GRK}}{\text{BAU } \textit{Baseline} \text{ Total}} \right) \times 100\%$$

Saat ini merujuk pada data sementara Tahun 2022, Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebanyak 36,4 Juta Ton CO₂ eq atau sebanyak 70,68%. Capaian persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian persentase penurunan emisi dari BAU (*Business As Usual*) di P-RPJMD Kaltim 2019-2023, yakni 28,50. Sehingga dapat dikatakan sementara ini capaian penurunan emisi dari BAU telah melampaui target pada P-RPJMD. Menurut Data Tahun 2021, potensi penurunan emisi sebesar 20,89 Juta ton CO₂ eq, dimana penurunan emisi terbesar berasal dari sektor lahan sebesar 18.9 Juta ton CO₂ eq, energi dan transportasi sebesar 1.6 Juta ton CO₂ eq, sektor limbah sebesar 0.2 Juta ton CO₂ eq dan pertanian-peternakan sebesar 0.098 Juta ton CO₂ eq. Total Penurunan Emisi pada tahun tersebut sebesar 41.96%, penurunan ini jauh dari targetan dalam dokumen RAD GRK 2010-2030 yang sebesar 27.75% untuk tahun 2021. Besaran capaian penurunan Emisi jika di bandingkan target sebesar 151.21%. Fluktuatif capaian ini jelas sangat terlihat dari tingginya capaian penurunan emisi dari sektor lahan.

K. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Indikator Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD di Tahun 2022 bernilai 100 persen yang didapat dari Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun dengan realisasi dan target sebanyak 2 kali. Pada Indikator Pemanfaatan data kependudukan LPPD OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian 107 kerja sama sebanyak 9 kabupaten/kota dari 34 kabupaten/kota.

Tabel II.72
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. (persen)	82,84	84,83	-	-	-
2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (persen)	92,30	92,69	-	-	-
3	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk (kebijakan)	-	0	0	6	6
4	Kebijakan terkait pencatatan sipil (kebijakan)	-	0	0	6	6
5	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan (kebijakan)	-	0	0	5	5
6	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD (kali)	-	-	-	100%	100%
7	Pemanfaatan data kependudukan lppd (OPD)	-	-	-	18,92	26,47

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2022

L. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki target sasaran desa prioritas sebanyak 10.000 desa dari 74.953 desa di seluruh Indonesia, kemudian dari 271 kawasan perdesaan ditetapkan jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN sebanyak 62 kawasan dan 30 sasaran Kawasan perdesaan non KPPN yang sudah memiliki indeks perkembangan kawasan perdesaan. Dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi pengembangan KPPN yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Pada Kabupaten Kutai Timur memiliki keunggulan berupa potensi wisata terpadu, sedangkan pada Kabupaten Berau memiliki potensi Minapolitan (Udang dan Bandeng).

Tabel II.73
Lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
Provinsi Kalimantan Timur

NO	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Kawasan Perdesaan
1.	Kutai Timur	Sangatta Selatan	Sengata Selatan, Sangkima, Teluk Sangkima	Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kutai Timur yang ditetapkan dalam SK Bupati Nomor 050/K.433/2018 dan Perbup No 27 Tahun 2018 tentang RPKP
		Kecamatan Teluk Pandan	Kandolo dan Teluk Pandan	
2.	Berau	Pulau Derawan	Pulau Derawan, Teluk Semanting, Pegat Bertumbuk, Kasai dan Tanjung Batu	Kawasan Perdesaan Mina-Bestari Tanjung Redeb yang ditetapkan dalam Kep. Bupati Berau Nomor 227 tahun 2017 dan Nomor 236 tahun 2017

Sumber: Renstra Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDDT 2021

Berikut ini merupakan indikator kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.74
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	-	-	27	-
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	-	-	8	-
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	-	-	-	15	-
4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan	-	-	-	30	-

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
	lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan					
5	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	-	-	90,00	68,52
6	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-	-	-	0,66	92,25
7	Indeks Desa Membangun	-	0,6238	0,6752	0,7071	0,7320
8	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan	-	35	35	-	-
9	Jumlah Bumdes Yang Aktif	289	304	323	353	388
10	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	80	80	-	-
11	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	-	1	1	-	-
12	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar	-	18	18	-	-
13	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan	-	150	165	-	-
14	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	-	1	1	-	-
15	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-	15	363	-	-
16	Jumlah Desa berkembang	-	15	329	-	339
17	Jumlah Kampung/Desa Iklim	-	-	40	-	-
18	Desa Tertinggal (Desa)	381	285	128	78	17
19	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	-	-	-	30	35
20	Desa yang telah melaksanakan Penataan	-	-	-	7	7
21	Kampung/Desa Iklim + (Desa	-	-	-	25	27
22	Meningkatnya Desa Berkembang (Desa)	381	285	128	30	35
23	Desa Berkembang	-	-	-	30	30
24	Meningkatnya Bumdes yang aktif (Bumdes)	289	304	323	353	388
25	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	-	-	-	30	30
26	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh pembinaan	323	338	363	-	-

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

M. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Indikator kinerja lainnya pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu Tahun 2018-2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.75
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

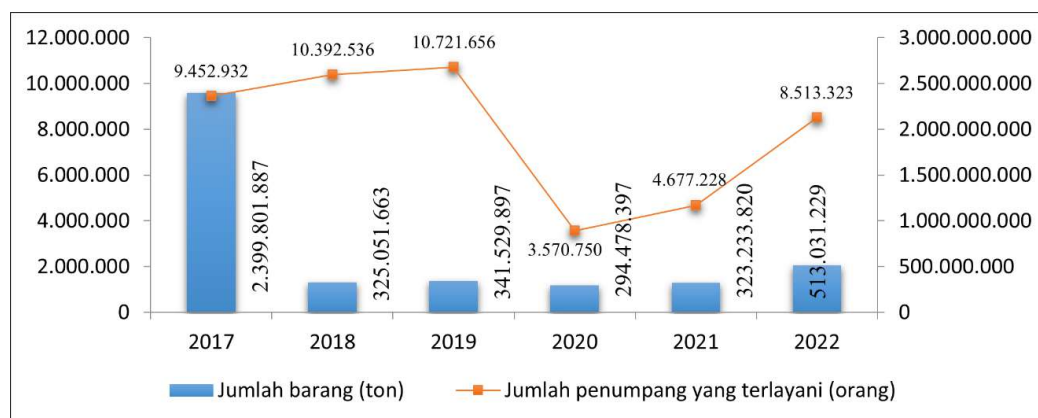
No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	peran perempuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga	-	100	-	-	-
2	terwujudnya keluarga berencana dalam kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk	-	100	-	-	-
3	jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	-	100 org	-	-	-
4	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	50	-	70	-	-
5	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	0	0	1	1	-
6	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	0	33	40	-
7	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	1	1	-
8	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	-	-	-	1	-
9	Jumlah dokumen grand desain pembangunan Kab/Kota dalam 5 aspek	-	-	-	1	-
10	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	160	-
11	Peningkatan jumlah peserta KB	-	-	-	160	-
12	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	140	-
13	Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-	-	-	140	-
14	TFR (Angka Kelahiran Total)	-	-	-	2,51	2,18
15	Kampung KB	154	160	175		

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
16	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	-	-	-	50,82	55,50
17	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	-	-	-	22,18	29,70

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

N. Perhubungan

Jumlah Penumpang yang terlayani dan jumlah barang yang diangkut terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2019 jumlah orang yang terlayani sebesar 10.721.656 orang penumpang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 7.150.906 orang penumpang sehingga menjadi 3.570.750 orang penumpang, kemudian mengalami peningkatan kembali sehingga menjadi 4.667.228 orang penumpang. Pada tahun 2019 jumlah barang yang diangkut sebesar 341.529.297 ton, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 47.041.900 ton sehingga menjadi 294.487.397 ton. Hal ini disebabkan beberapa negara telah melakukan pembatasan penerbangan untuk mencegah wabah pandemi COVID-19 masuk ke negara tersebut. Pada tahun 2021, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian dikarenakan telah berkurangnya pandemi COVID-19 dan telah dilaksanakannya vaksinasi sehingga jumlah penumpang dan barang yang diangkut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 4.667.228 orang dan 323.233.820 ton. Pada tahun 2022 jumlah penumpang dan barang yang diangkut terus mengalami peningkatan, untuk jumlah penumpang menjadi 8.513.323 orang dan jumlah barang menjadi 513.031.229 ton.



Gambar II.64
Jumlah Penumpang yang Terlayani dan Jumlah Barang
Tahun 2017-2022

(Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2022)

Terjadi penurunan jumlah kecelakaan di Kalimantan Timur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data kecelakaan pada tahun 2018 mencapai 846 kasus kecelakaan, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 418 kasus kecelakaan. Hal yang mengakibatkan penurunan kasus kecelakaan adalah pemasangan fasilitas pengaman jalan pada ruas-ruas jalan provinsi di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, sinergitas dan koordinasi antar *stakeholders* untuk menurunkan angka kasus kecelakaan semakin baik. Hal tersebut dicapai melalui rapat – rapat koordinasi secara berkala antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Polda Kaltim dan *stakeholders* lainnya. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus kecelakaan menjadi sebanyak 510 kasus kecelakaan, hal ini diakibatkan oleh aktivitas masyarakat yang berkendara di jalan terus meningkat karena pada tahun 2022 merupakan tahun pemulihan perekonomian pasca kasus COVID-19.



Gambar II.65

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018 – 2022

(Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2022)

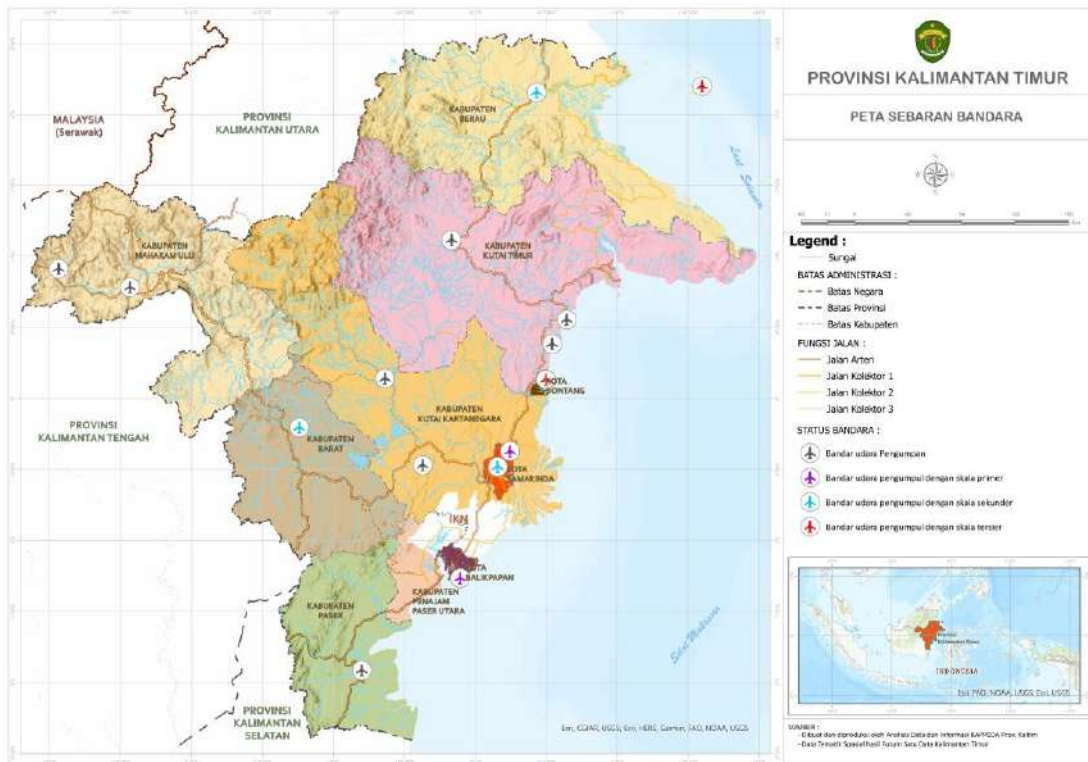
Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pengembangan pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Terminal Peti Kemas Balikpapan dan Pelabuhan Maloy.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang yang terletak di Kota Balikpapan. Selain itu layanan transportasi udara yang cukup memadai juga difasilitasi oleh Bandara Kalimarau di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini

terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan sejak tahun 2017, namun kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Datah Dawai.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang *runway* 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di daerah perbatasan.



Gambar II.66
Peta Bandara Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektivitas dan pola distribusi nasional yang handal (*reliable*) dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan hierarki pelabuhan, di Kalimantan Timur tahun 2017 telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 3 (Tiga) Pelabuhan Regional. Selanjutnya pada tahun 2022 penetapan Pelabuhan tersebut mengalami perubahan menjadi 1 (satu) Pelabuhan Utama, 10 (Sepuluh) Pelabuhan Pengumpul dan 2 (Dua) Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Mantaritip di Kabupaten Berau dan Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel II.76
Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Di Kalimantan Timur Berdasarkan KP 432 Tahun 2017

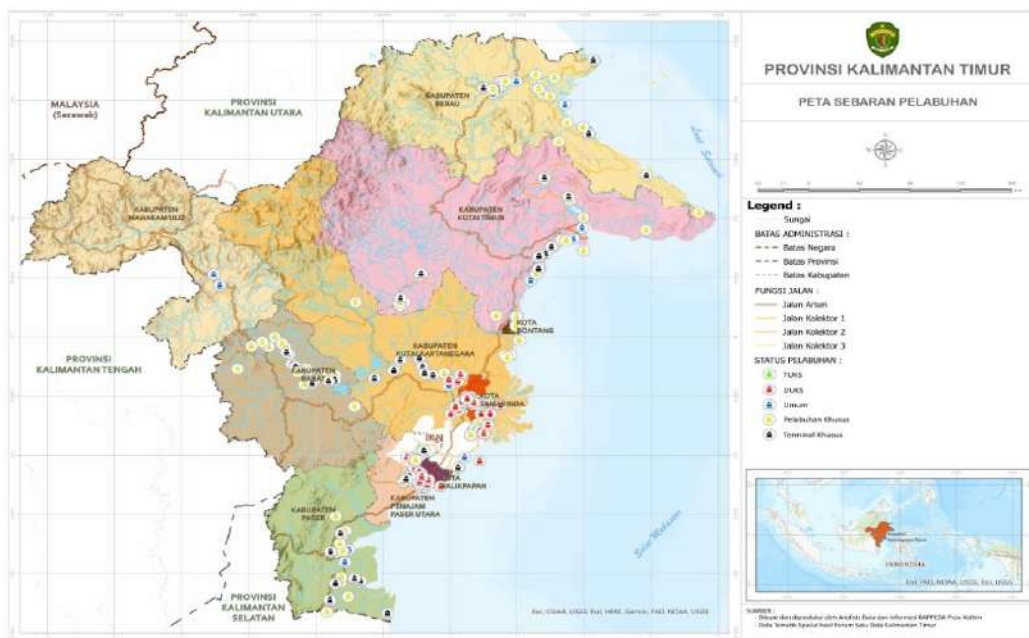
No.	Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan						
	Kab/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
				2017	2022	2027	2037
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur							
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU
305	Berau	2	Mataritip	PR	PR	PR	PR
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP
309	KUKAR	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP
310	KUKAR	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP
311	KUTIM	8	Maloy	PP	PP	PP	PP
312	KUTIM	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP
313	KUTIM	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP
315	PPU	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP

Sumber: Kementerian Perhubungan Provinsi KALTIM

Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong, dan 4

(empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.

Untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas. Selanjutnya untuk melayani Antar Kota Dalam Provinsi ditetapkan 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota.



Gambar II.67
Peta Pelabuhan Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

O. Komunikasi Dan Informatika

1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada tahun 2021 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai menjadi 2,22 dibandingkan tahun sebelumnya berada di angka 3,14. Hal ini disebabkan karena perubahan aspek penilaian dan evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2018 hingga 2020 pedoman evaluasi yang dilakukan menggunakan Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan tahun 2021 hingga saat ini menggunakan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020

tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel II.77
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
INDEKS SPBE	2.89	3.04	3.14	2.22	2.11

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi KALTIM, 2023

Pelaksanaan SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga diikuti dengan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan data 2022, terdapat 6 (enam) daerah yang memiliki SPBD dengan predikat Cukup, sedangkan sisanya masih berpredikat Kurang. Ini menunjukkan masih perlunya penyiapan dan peningkatan penerapan SPBR baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Tabel II.78
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

INSTANSI	INDEKS SPBE	PREDIKAT
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2,22	CUKUP
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	2,48	CUKUP
Pemerintah Kab. Paser	1,36	KURANG
Pemerintah Kab. Kutai Barat	1,83	CUKUP
Pemerintah Kab. Kutai Timur	1,03	KURANG
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,14	CUKUP
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	1,03	KURANG
Pemerintah Kota Samarinda	2,46	CUKUP
Pemerintah Kota Balikpapan	2,44	CUKUP
Pemerintah Kota Bontang	2,11	CUKUP

Sumber: Keputusan MENPAN RB No. 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada seluruh Instansi Pemerintah Se-Indonesia Tahun 2021

L. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pentingnya peran koperasi dan UKM Koperasi dan UKM ditujukan untuk membantu pemberdayaan perekonomian masyarakat terutama para pengusaha mikro kecil dan menengah. Pembangunan dan pembinaan Koperasi dan UKM telah menunjukkan dampak yang positif, meskipun belum optimal mengubah struktur perekonomian daerah. Pentingnya peran koperasi dan UKM di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa Koperasi dan UKM merupakan bentuk perekonomian kerakyatan di Kalimantan Timur. Adapun jumlah koperasi aktif tahun 2022 adalah sebanyak 3.117 Koperasi dari jumlah koperasi sebanyak 6.041 Koperasi. Secara rinci perkembangan aktivitas koperasi dijelaskan melalui tabel berikut:

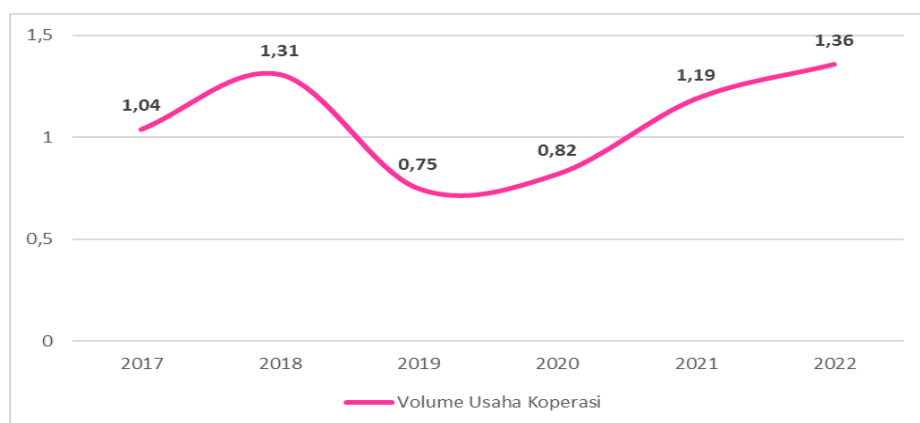
Tabel II.79
Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi Aktif	3.428	2.832	2.751	2.844	3.117
2	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	657	583	351	457	451
3	Jumlah Seluruh Koperasi	5.406	5.664	5.619	5.676	6.041
4	Jumlah Anggota Koperasi	86.297	82.054	57.381	68.580	96.940

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2023

Pada tabel diatas terlihat jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dan jumlah seluruh koperasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pengurus koperasi dalam pertanggung jawaban koperasi. Disamping itu masih rendahnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun sekali atau paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Pelaksanaan RAT bagi koperasi menjadi syarat untuk menjadi koperasi yang bisa dikatakan aktif dan sehat.

Jumlah anggota koperasi di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, kondisi tahun 2020 mengalami penurunan jumlah anggota yakni 57.381 orang. Secara umum kendala penurunan di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19, namun kendala lain yang dihadapi adalah berkurangnya modal, berkurangnya pelanggan, dan harga produk yang menurun. Hal ini juga memberi pengaruh pada jumlah volume usaha koperasi yang tergambar pada gambar berikut.



Gambar II.68
Volume Usaha Koperasi Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016–2022 (Triliun Rupiah)

(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2023)

Jumlah volume usaha koperasi di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah volume usaha koperasi tahun 2019 dan 2020 berada di bawah 1 Triliun Rupiah. Tahun 2021 jumlah volume usaha koperasi kembali pulih mencapai 1,19 Triliun Rupiah dan 1,36 Triliun Rupiah pada tahun 2022 yang diikuti dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif, jumlah anggota koperasi, dan koperasi yang melaksanakan RAT.

Sementara Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pergerakan perekonomian daerah khususnya perekonomian masyarakat. Usaha kecil dan menengah merupakan usaha yang mampu bertahan lebih baik di saat pandemi COVID-19. Secara rinci jumlah UKM berdasarkan jenis usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel II.80
Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten/Kota
Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Industri			Dagang	Jasa	Total
		Kuliner	Industri Pengolahan	Kerajinan			
1	Paser	18.469	983	783	21.886	5.368	47.489
2	KUBAR	2.235	-	861	8.511	2.223	13.830
3	KUKAR	35.320	825	130	23.719	434	60.428
4	KUTIM	11.221	1.204	30	3.360	875	2.989
5	Berau	4.509	62	53	9.467	851	14.942
6	PPU	5.813	489	18	6.269	878	13.467
7	MAHULU	338	1	-	247	-	586
8	Balikpapan	59.861	1.999	443	52.791	12.581	127.675
9	Samarinda	60.629	1.626	620	53.172	14.477	130.524
10	Bontang	16.631	968	160	16.282	475	34.516
	Jumlah	215.026	8.157	3.098	195.704	38.162	460.147

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2023

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebanyak 460.147 UMKM. Jumlah terbanyak berada di Kota Samarinda yakni 130.524 UMKM, sedangkan terbanyak kedua adalah Kota Balikpapan sebanyak 127.675 UMKM. Jenis usaha UMKM yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur beragam, mulai dari kuliner, industri pengolahan, industri kerajinan, perdagangan dan jasa. Jenis usaha didominasi pada usaha kuliner sebanyak 215.036 UMKM dan usaha dagang sebanyak 195.704 UMKM. Banyaknya usaha dagang dan kuliner ini tidak dipungkiri karena kemudahan dalam penyediaan modal dan

banyak peminat. Sedangkan jenis usaha paling sedikit adalah industri kerajinan yakni 3.098 UMKM dimana jenis usaha ini tidak terdapat pada Kabupaten Mahulu.

M. Penanaman Modal

1) Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah proyek investasi merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Tabel II.81
Jumlah Proyek PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Tahun	PMDN	PMA	Total
2018	520	513	1.033
2019	2.227	903	3.130
2020	3.924	778	4.702
2021	9.291	1.034	10.325
2022	6.706	1.055	7.711

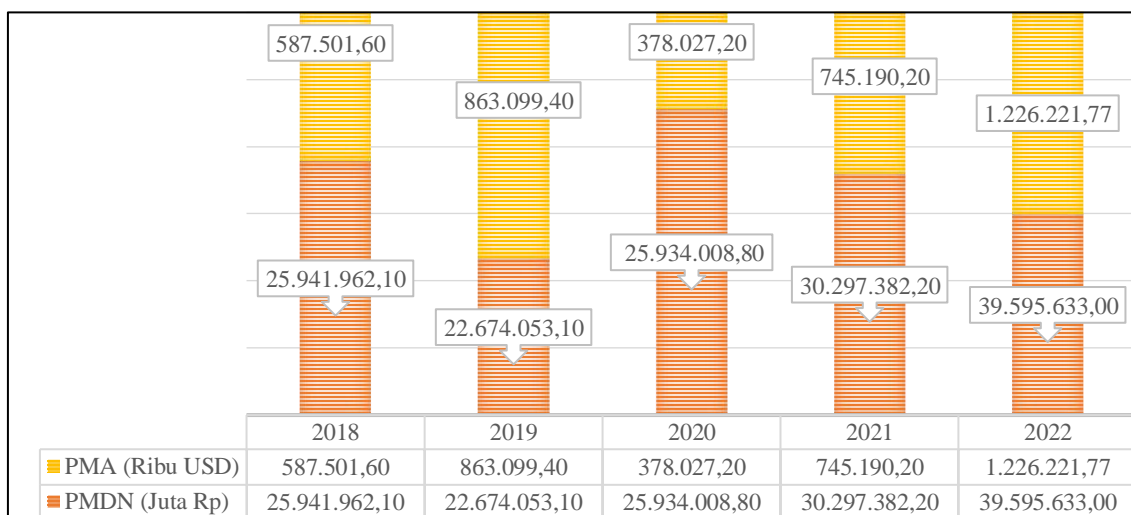
Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2022

Dilihat dari total jumlah proyek PMDN/PMA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah proyek PMDN/PMA di Kalimantan Timur sebanyak 10.325 proyek, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sebanyak 4.702 proyek. Kenaikan jumlah proyek pada investasi Dalam Negeri sebesar 5.367 proyek dan kenaikan proyek pada investasi Asing sebesar 256 proyek. Peningkatan jumlah proyek baik penanaman modal dalam negeri maupun asing ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada nilai investasi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan lebih baik. Pada tahun 2022 jumlah proyek PMDN sebesar 6.706 proyek dan PMA sebesar 1.005 proyek. Proyek pada investasi Dalam Negeri dominan berlokasi di Kota Balikpapan dengan jumlah 1.850 proyek dan di Kota Samarinda dengan jumlah 1.845 proyek. Begitu juga untuk proyek investasi asing dominan berlokasi di Kota Balikpapan dengan jumlah 332 proyek.

2) Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Nilai realisasi investasi dalam negeri tahun 2022 mencapai Rp 39,59 triliun dengan 5 (lima) sektor utama yakni pertambangan (37,91%), Industri

Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi (37,67%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (9,22%), Industri Makanan (6,04%), dan Perdagangan dan Reparasi (1,74%). Selanjutnya nilai realisasi investasi asing mencapai US\$ 1.266,22 Juta dengan 5 (lima) sektor utama yaitu pertambangan (40,74%), Industri Mineral Non Logam (17,06%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (15,01%), Industri makanan (7,59%), dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (7,42%). Dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur tentunya akan membawa pengaruh yang baik terhadap nilai investasi di kemudian hari dikarenakan adanya peningkatan aktivitas investasi oleh investor.



Gambar II.69
Nilai Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

(Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2023)

Kalimantan Timur telah dikenal sebagai provinsi yang punya banyak kekayaan alam, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, maupun sektor lainnya seperti Agrikultur, Pariwisata dan Industri pengolahan. Hal ini menjadi daya tarik investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal di Kalimantan Timur baik pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Di samping itu, kehadiran IKN Nusantara tentu menjadi potensi yang baik untuk investasi ke depan.

Berdasarkan Realisasi Investasi PMDN, mulai tahun 2017-2019 sektor pertambangan merupakan sektor yang paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, namun sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia sektor yang paling dominan di tahun 2020 adalah sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi yang mencapai Rp 7.965,22 miliar dan meningkat tajam di tahun 2021 hingga mencapai Rp 15.145,34 miliar.

Investasi sektor pertambangan juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai Rp 5.859,33 miliar meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3.818,59 miliar diikuti sektor Tanaman pangan dan perkebunan yang mencapai Rp 4.828,00 miliar. Pada tahun 2022 sektor pertambangan kembali menjadi sektor paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri yakni Rp 15.012,38 miliar. Peningkatan ini terjadi karena adanya momentum membaiknya harga komoditas batubara pada level tinggi dan menjadi faktor pendorong investasi di sektor pertambangan. Sektor lain yang juga berkontribusi cukup besar adalah sektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi mencapai Rp 14.914,62 miliar, serta sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan mencapai Rp 3.650,82 miliar.

Tabel II.82
Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No.	Sektor Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	3.747.269,70	4.278.148,30	4.738.083,60	4.828.002,20	3.650.817,60
2.	Kehutanan	602.835,40	283.625	125.549,60	73.973,60	346.853,60
3.	Perikanan	.	.	3,00	0,50	2,00
4.	Pertambangan	12.559.385,40	8.712.257,70	3.818.587,60	5.859.330,30	15.012.379,10
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri Makanan	1.687.495,70	569.890,60	1.397.339,40	671.841,30	2.390.781,50
2.	Industri Tekstil	.	.	-	2,00	431,00
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	-	-	-
4.	Industri Kayu	264.104,30	350.224	97.509,90	5.996,00	24.001,70
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	0	5,00	500,00
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	1.034,70	444.145,60	7.965.221,90	15.145.338,40	14.914.625,40
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	.	9.000	70,80	-	7.209,90
8.	Industri Mineral Non-Logam	17.919,90	292.133,10	95,00	2.351	18.184,90
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	.	.	5.000	10,30	521.796,50
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	.	0	39,50	4.381,50
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	7.620	151.706,50	3.626,30	9.221,80	21.487,30
12.	Industri lainnya	.	509,50	70.348,60	5.200,50	48.889,00
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, Gas, dan Air	2.559.556,90	2.021.363,60	759.122,70	298.896,80	165.780,50
2.	Konstruksi	3.204.289,50	1.223.384,70	5.777.776,90	113.413,70	55.394,60

No.	Sektor Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
3.	Perdagangan dan Reparasi	82.557,40	341.327,60	218.379,90	295.260,00	687.631,40
4.	Hotel dan Restoran	480	1.086.261,80	25.127	55.384,90	199.549,50
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	165.403,80	940.606,30	459.299,20	1.503.072,30	573.564,20
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	26.874,40	345.944,10	53.687,40	840.351,30	286.654,80
7.	Jasa Lainnya	1.015.135	1.623.524,70	419.150	589.690,80	664.717,90
Total		25.941.962,10	22.674.053,10	25.934.008,80	30.297.382,20	39.595.633,00

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2023

Disamping itu pada realisasi investasi PMA, lapangan usaha pertambangan yang memiliki peranan terbesar di Kalimantan Timur tahun 2018-2022 mengalami peningkatan nilai investasi PMA yang mencapai US\$ 515.919,94 Ribu dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 252.125,20 Ribu. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan tahun 2021 yaitu sektor Industri Makanan yang mencapai US\$ 242.430,00 Ribu. Kondisi ini merupakan posisi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2022 yang hanya mencapai US\$ 96.106,59 Ribu diikuti sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi, serta tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

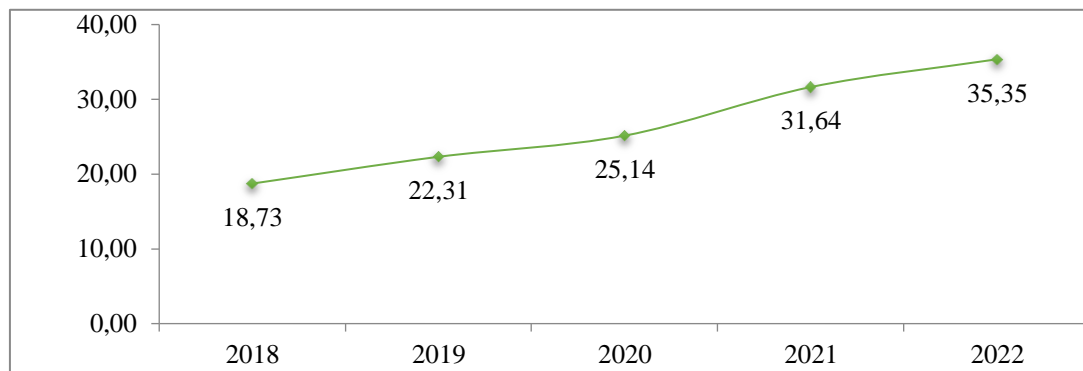
Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan masuknya investasi asing ke Kalimantan Timur. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi baru yang dikembangkan serta tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerja sama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional.

Tabel II.83
Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (US\$)

No	Sektor Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	64.114.100	185.796.300	67.781.500	58.097.000	190.013.892
2.	Kehutanan	657.100	2.751.700	2.071.400	2.330.000	37.276.491
3.	Perikanan	135.500	.	-	-	-
4.	Pertambangan	188.763.000	306.457.800	167.858.400	252.125.200	515.919.940
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri Makanan	118.386.600	14.264.600	41.235.500	242.430.000	96.106.592
2.	Industri Tekstil	.	.	-	-	-
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	-	-	-
4.	Industri Kayu	6.600	33.300	-	15.291.200	1.811.899
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	-	-	-
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	760.700	60.000	32.861.600	66.411.000	60.176.592
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	256.700	561.100	986.400	990.600	136.400
8.	Industri Mineral Non-Logam	.	15.809.600	24.840.000	40.020.700	216.016.282
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	22.600	1.879.400	276.400	24.600	93.934.693
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	253.200	1.533.400	3.550.700	1.084.700	1.967.500
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	.	43.800	-	-	10.091.596
12.	Industri lainnya	526.100	134.600	-	-	-
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, Gas, dan Air	53.012.000	280.607.900	278.800	-	-
2.	Konstruksi	5.093.100	.	-	-	-
3.	Perdagangan dan Reparasi	3.738.700	4.258.100	5.618.500	3.804.800	9.497.500
4.	Hotel dan Restoran	2.245.800	1.297.000	791.000	586.000	3.682.299
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	86.566.000	14.847.700	29.415.000	52.588.300	16.726.698
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	301.200	146.900	221.300	9.379.800	6.288.898
7.	Jasa Lainnya	62.662.600	32.616.200	240.700	26.300	6.574.500
	Total	587.501.600	863.099.400	378.027.200	745.190.200	1.266.221.770

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2022

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan pada tahun 2018 yang mencapai Rp 11,42 triliun dan mengalami peningkatan ditahun berikutnya hingga mencapai Rp 35,35 triliun pada tahun 2022.



Gambar II.70
Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)

(Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2023)

Nilai investasi sektor non migas dan batubara tahun 2021 yang mencapai Rp 31,64 triliun ini terdiri dari investasi PMDN sebesar Rp 24,44 triliun dan PMA sebesar Rp 7,2 triliun. Peningkatan nilai investasi ini dipengaruhi oleh masih tingginya angka kasus COVID-19 di tahun 2021 sehingga kontribusi sektor usaha Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni mencapai Rp 15,145 triliun. Selanjutnya nilai investasi sektor non migas dan batubara tahun 2022 ditargetkan di angka Rp 35 triliun. Tahun 2022 nilai investasi tercapai sebesar Rp 35,35 triliun. Tahun 2023 Nilai Investasi sektor non migas dan batubara ditargetkan mencapai Rp 35,67 triliun dan diharapkan ke depannya investasi sektor non migas dan batubara lebih maksimal.

N. Kepemudaan Dan Olah Raga

Setelah sukses meraih peringkat 7 besar pada PON XX Tahun 2021, Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. dari hasil capaian tersebut Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam *Event* berskala nasional maupun internasional. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam *Event* berskala nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang ada.

Pada urusan kepemudaan dan olahraga ada 2 (dua) indikator kinerja yang perlu menjadi perhatian serius dalam menunjang peningkatan sumber daya pemuda yaitu :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, indikator ini cukup menggambarkan tingkat partisipasi pemuda dalam berwirausaha.
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, indikator ini mewakili peningkatan pemuda yang berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat.

Pemuda Kaltim diharapkan mampu memberikan dampak serta solusi ke depan dengan menjawab segala tantangan pembangunan di era revolusi industri 4.0 dan era *society* 5.0.

Pemuda Kaltim harus mampu bersaing dalam kepemimpinan dan kepeloporan ditingkat nasional agar memberikan motivasi bagi pemuda-pemuda lainnya untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi pemuda dan kemasyarakatan yang saat ini masih belum optimal. Tingkat kepercayaan diri pemuda Kaltim harus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam kebebasan berpendapat yang bertujuan terhadap perubahan ke arah yang lebih baik dan maju.

Tabel II.84
Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Organisasi Pemuda	107	107	107	107	107	305
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	42	42	42	45	45	38
Jumlah Klub Olahraga	1.050	1.050	1.087	1.109	1.109	1.112
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	97	101	102	105	105	105
Jumlah Kegiatan Olahraga	152	152	152	161	161	120
Jumlah Organisasi Olahraga	57	57	63	63	63	63

Sumber: DISPORA Provinsi KALTIM, 2022

O. Statistik

Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah bernilai 100 persen pada tahun

2021. Hal ini dikarenakan jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah berjumlah 37 OPD dari 37 OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja urusan statistik lainnya dalam kurun waktu Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.85
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik
Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022
1	Tersedianya buku profil daerah	1	-
2	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	1	-
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	-
4	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1	-
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	-
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan Statistik sektoral	100	-
7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100	-
8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%
9	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%
10	Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	50	-
11	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur di Lingkup Daerah Provinsi	50	-

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

P. Persandian

Pada Indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada Tahun 2021 bernilai 1,73, dimana didapat dari hasil penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI), yang dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu: 1. Fase Persiapan: 2,54 2. Fase Aksi 1,76 3. Fase Tindak Lanjut 0,90. Sedangkan untuk Indikator yang lain sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.86
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian
Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	40	-
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	63,28	-
3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan risiko kategori rendah	54,69	-
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	84,33	-
5	Tingkat keamanan informasi pemerintah	173,33	38,76
6	Indeks keamanan informasi	Level 2	-
7	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	Level 2	-

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

Q. Kebudayaan

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain. Pada tahun 2020 menyertifikasikan calon TACB, berdasarkan hasil sertifikasi maka dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim. dan yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang Mangkalihat dan Situs Penguburan Gunung Selendang.

Tabel II.87
Karya Budaya Benda dan Tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur
yang Telah Dipatenkan Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda	Peringkat
1.	KUBAR	Alat Musik Kelentangan	Nasional	Bunker Komando	Kabupaten
		Tari Ngerangkau	Nasional	Gudang Peluru	Kabupaten
		Tari Gong	Nasional	Kolam Belanda	Kabupaten
		Alat Musik Sapeq	Nasional	Penampungan Air Belanda	Kabupaten
					Kabupaten

Tabel II.88
Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Kab/Kota	Jenis Kekayaan Budaya				
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya	Tenaga Budaya	Adat Istiadat/ Tradisi
1	Paser	83	1	58	9	7
2	KUBAR	13	1	81	31	19
3	KUKAR	187	2	69	39	8
4	KUTIM	57	0	7	10	7
5	Berau	167	3	7	7	2
6	PPU	33	0	24	12	7
7	MAHULU	47	0	0	9	137
8	Balikpapan	75	1	29	29	29
9	Samarinda	32	1	222	93	0
10	Bontang	4	0	40	6	0
Kalimantan Timur		698	9	537	245	216

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2022

R. Perpustakaan

Perkembangan Indikator Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (*online* dan *onsite*) di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuatif, dimana di tahun 2018 berjumlah 137.841 orang, meningkat di tahun 2019 menjadi 145.731 orang, namun menurun Kembali di tahun 2019 menjadi 77.884 orang. Sedangkan untuk Indikator yang lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.89
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	-	-	-	5,49	-
2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	-	-	-	1,43	-
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	-	-	-	0,001	-
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	-	-	-	6.16	-
5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	-	-	-	19	-
6	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	-	-	-	575	-
7	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	-	-	-	3050	-
8	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	-	-	-	5	-
9	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	-	-	-	575	-
10	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media	-	-	-	30	-

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
	(digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya					
11	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa	-	-	-	0	-
12	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	-	-	-	150	-
13	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	-	-	-	8,1	-
14	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Wahana Pembelajaran Sepanjang Hayat	-	-	-	100	-
15	Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif	-	-	-	2	-
16	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (<i>online</i> dan <i>onsite</i>) (orang)	137.841	145.731	77.884	-	-
17	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (skor)	-	-	-	60,85	46,27
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	-	-	-	17,74	34,16

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

S. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan mempunyai tujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan. Indikator kinerja bidang Kearsipan dalam kurun waktu Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.90
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	73,09	-
2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	-
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	80,48	-
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	4	-
5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	16991	-
6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	-
7	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	3552	-
8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	23115	-

No	Indikator	2021	2022
9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	625	-
10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	33	-
11	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	64.30%	74,65%
12	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek 7.39 % 111 kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	7,39	3,34
13	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip	90	-
14	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan	10	-
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip yang Autentik dan Terpercaya	125	-
16	Pelaksanaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	1 OPD	-
17	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta	200	-
18	Penyelamatan Arsip OPD akibat Penggabungan, Pembubaran dan Pemekaran Organisasi	2 OPD	-

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

T. Kepegawaian

Peningkatan penerapan sistem merit yang menjadi salah satu prioritas kerja nasional Presiden Republik Indonesia dalam pembangunan SDM. BKD Prov Kaltim telah mengikuti penilaian mandiri dalam penerapan sistem merit berdasarkan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022 mendapatkan poin sebesar 263,5 atau berada pada kategori "III" (Baik) dan belum mencapai pada kategori ke IV "Sangat Baik".

Tabel II.91
Nilai Sistem Merit Pemprov. Kaltim

No.	Aspek Skor Sistem Merit	2021	2022
1.	Perencanaan Kebutuhan	35	35
2.	Pengadaan	32	36
3.	Pengembangan Karier	62,5	67,5
4.	Promosi dan Mutasi	17,5	17,5
5.	Manajemen Kinerja	45	42,5

No.	Aspek Skor Sistem Merit	2021	2022
6.	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	30	30
7.	Perlindungan dan Pelayanan	16	16
8.	Sistem Informasi	18	19
	Jumlah Nilai	256	263,5

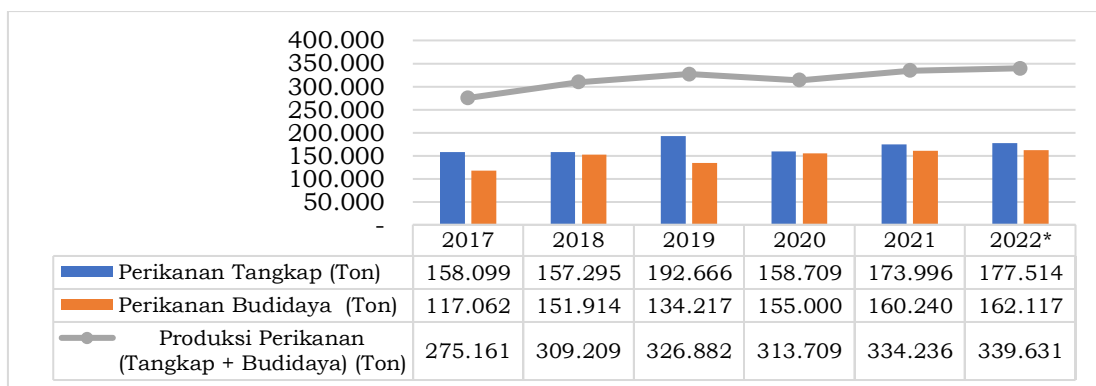
Sumber: KASN, 2022

2.3.4. Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan.

Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Namun pada tahun 2022 produksi perikanan di Kalimantan Timur diperkirakan mencapai 339.631 Ton atau menurun dari tahun sebelumnya. Dalam pencapaian produksi perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian yakni tingginya harga pakan mengakibatkan beberapa pelaku usaha menurunkan produksinya atau berhenti produksi sementara waktu, masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan, serta sistem pemasaran dan peningkatan nilai tambah produk perikanan.



Gambar II.71
Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2022

(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2023 (diolah))

B. Pariwisata

Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 tahun mengalami tren penurunan. Penurunan terjadi akibat terjadinya wabah COVID – 19 yang masuk ke Indonesia tahun 2020 sehingga terjadinya pembatasan sosial berskala besar seperti adanya larangan bepergian ke dalam maupun luar negeri. Di samping itu belum optimalnya kerja sama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata terutama dalam hal promosi dan destinasi pariwisata. Pengembangan sarana dan prasarana masih sangat diperlukan dalam rangka menunjang perkembangan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk capaian jumlah kunjungan wisatawan (wisman – wisnus) pada Triwulan III tahun 2022 sebesar 2,511,419 orang tercapai 125,26 dari target 2022 sebesar 2,005,000 orang. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat hambatan dalam analisis pasar promosi pariwisata. Diharapkan dengan analisis tersebut promosi pariwisata bisa lebih terarahkan.

Tabel II.92
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2018–2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	Tw III 2022
1	Kota Balikpapan	2.837.034	2.878.561	1.072.569	1.431.862	1,214,958
2	Kota Samarinda	2.036.236	1.643.536	654.984	1.119.174	700,798
3	Kota Bontang	409.319	472.037	215.029	156.212	93,965
4	Kabupaten Paser	39.566	7.501	32.965	89.931	44,534
5	Kabupaten Penajam Paser Utara	86.375	57.576	20.263	114.869	49,824
6	Kabupaten Kutai Kartanegara	1.715.660	1.394.171	692.689	617.018	221,918
7	Kabupaten Kutai Timur	36.717	70.560	40.129	72.438	12,757
8	Kabupaten Kutai Barat	32.205	56.125	25.929	10.871	54,126
9	Kabupaten Mahulu	3.464	3.058	2.596	5.590	5,002
10	Kabupaten Berau	283.294	292.692	127.176	141.398	102, 770
Jumlah Se-Kalimantan Timur		7.479.870	6.875.817	2.884.329	3.759.363	2.500.652

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi KALTIM

Tabel II.93
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2018-2021

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	TW III 2022
1	Kota Balikpapan	47.040	56.577	16.510	17.458	8,860
2	Kota Samarinda	4.835	2.735	2.075	444	80
3	Kota Bontang	174	168	-	-	1,024
4	Kabupaten Paser	431	-	-	1	1
5	Kabupaten Penajam Paser Utara	135	8	26	-	-
6	Kabupaten Kutai Kartanegara	4.557	3.872	557	46	4
7	Kabupaten Kutai Timur	2.340	345	365	6	2
8	Kabupaten Kutai Barat	279	273	28	5	190
9	Kabupaten Mahulu	47	-	5	-	562
10	Kabupaten Berau	2.586	8.323	220	85	44
Jumlah Se-Kalimantan Timur		62,424	72.301	19.786	18.045	10.767

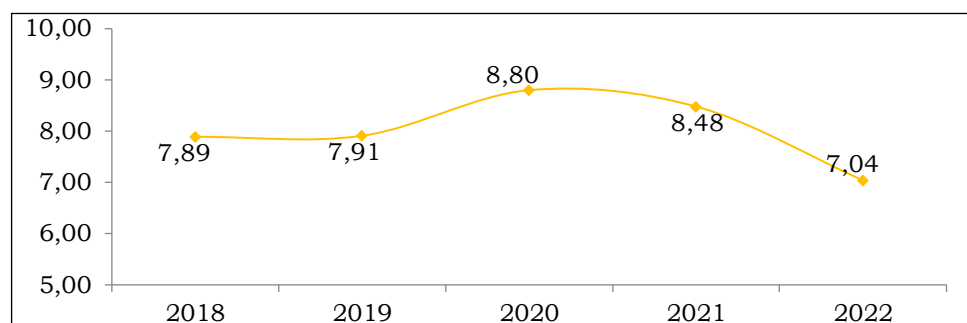
Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi KALTIM

C. Pertanian

Kontribusi sektor Pertanian Arti Luas Tahun 2018-2022 secara umum mengalami tren fluktuasi, dimana tercatat pada Tahun 2022 kontribusi sektor mencapai 7,04%. Kontribusi sektor pertanian arti luas di Kaltim didominasi oleh kinerja sub sektor Tanaman Perkebunan dan sub sektor Perikanan. Kedua kontributor tersebut sangat dipengaruhi oleh harga komoditi di pasar dan biaya produksi. Sub sektor Tanaman Perkebunan pada tahun 2022 terjadi penurunan pendapatan di tingkat petani dikarenakan adanya pelarangan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang mengakibatkan hasil panen petani tidak terserap dan berimbas pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani turun signifikan. Untuk Sub sektor perikanan sangat dipengaruhi oleh biaya produksi dan iklim. Selain itu usaha pertambangan batu bara sejak 2021 sudah kembali bangkit, yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB belum dapat menyaingi kecepatan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian. Sejalan dengan hal tersebut, sektor pertanian di Kalimantan Timur masih belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal terutama pada tingkat produksi dan produktivitas komoditas pertanian.

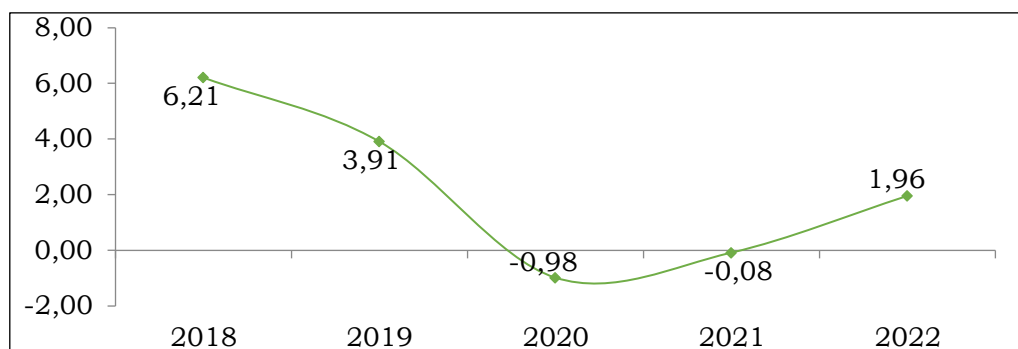
Pada gambar di bawah, terlihat pada tahun 2022 masih mengalami penurunan dimana target kontribusi PDRB sektor pertanian di tahun 2022 sebesar 8,99 persen. Berdasarkan hasil evaluasi, belum berhasilnya pencapaian target pada tahun 2022 ini salah satunya dikarenakan sektor

pertanian masih belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal terutama pada tingkat produksi dan produktivitas sektor pertanian.



Gambar II.72
Kontribusi Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Dari sisi Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian Arti Luas dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Sub sektor Pertanian Arti Luas mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada angka $-0,98$ dan $-0,08\%$. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang berkontraksi cukup pada tahun 2020 yaitu sebesar $-6,28$ dan kontraksi yang cukup dalam juga terjadi pada sub sektor tanaman pangan pada tahun 2021 yaitu sebesar $-4,48$. Namun hal menggembirakan terjadi pada tahun 2022, dimana Laju Pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian telah mampu tumbuh positif sebesar $1,96$ persen, dengan sub sektor perkebunan yang menjadi penopang utamanya.



Gambar II.73
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

1) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Secara umum, terjadi penurunan produktivitas padi selama empat tahun terakhir dimana pada tahun 2018 mencapai 4,04 ton per hektar dan menurun hingga 3,63 ton/ha. Selain karena penurunan produksi, menurunnya produktivitas ini juga ternyata dikarenakan fluktuasinya luas panen secara umum. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi salah satunya adalah pemberian bantuan saprodi pertanian kepada petani dan Kegiatan Gerakan Tanam yang menjadi motivasi bagi petani untuk menanam padi. Namun program tersebut belum terlalu efektif untuk mewujudkan swasembada pangan.

Tabel II.94
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2018	64.961	262.774	4,04
2019	69.708	253.818	3,64
2020	73.569	262.436	3,57
2021	66.269	244.678	3,69
2022	64.031	232.144	3,63

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

2) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 (lima) komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Lima komoditas unggulan itu adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan lada. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investor dari luar daerah adalah kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,59 juta Ha dengan tingkat produksi mencapai 17,36 juta ton. Kemudian komoditas yang juga

cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian adalah tanaman karet dengan luas tanam saat ini mencapai 123.776 Ha dan produksi sebesar 71,4 ribu ton pada Tahun 2022. Luasan dan Produksi ini meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada Tahun 2022 sehingga membangkitkan semangat pekebun untuk berbudidaya dan memanen hasil budidayanya. Namun peningkatan produksi perkebunan di Kalimantan Timur masih dihadapkan pada tantangan berupa mahalnya harga pupuk yang berpengaruh pada produksi tanaman. Serta masih adanya tanaman tua/rusak belum dilakukan peremajaan maupun rehabilitasi.

Tabel II.95
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	123.776	71.483	0,58
2.	Kelapa	20.068	7.201	0,36
3.	Kopi	1.495	165	0,11
4.	Lada	8.321	5.080	0,61
5.	Kakao	7.777	2.566	0,33
6.	Kelapa Sawit	1.411.861	16.938.307	11,99

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2023

Secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki perkebunan Kelapa Sawit dengan Kabupaten Kutai Timur sebagai kabupaten yang memiliki produksi terbanyak yaitu sebanyak 6,84 juta ton pada tahun 2022, Sedangkan Kabupaten Kutai Barat merupakan penghasil jenis karet terbesar di Kalimantan Timur sebanyak 32,06 Ribu Ton. Untuk tanaman lada, produksi terbesar ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah produksi sebanyak 2.961 ton, Kabupaten Paser menjadi kabupaten dengan penghasil kelapa terbesar dibanding kabupaten/kota lain dengan jumlah produksi sebesar 2.325 ton dan Kabupaten Kutai Timur dengan produksi tanaman kakao terbesar yaitu 1.664 ton. Dengan tingkat produksi yang ada, akan terus dilakukan pengembangan salah satunya melalui pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi sehingga kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi namun akan dapat terintegrasi dari hulu – hilir. Dimana pengadaan benih/bibit, pengolahan/produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir diintegrasikan dan dikelola oleh korporasi petani sedemikian rupa sehingga

nilai tambah terbesar dari kegiatan pertanian bisa dinikmati pekebun yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Tabel II.96
Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), Tahun 2022

No	Kab/Kota	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Lada
1	Paser	1.974.991	2.325	8.703	71	4	18
2	KUBAR	728.607	147	32.064	21	24	6
3	KUKAR	2.901.860	1.667	15.466	7	44	2.961
4	KUTIM	6.835.708	751	1.868	51	1.664	156
5	Berau	4.063.493	1.110	7.256	13	484	556
6	PPU	299.681	723	1.564	1	2	1.240
7	MAHULU	124.824	4	-	-	339	-
8	Balikpapan	477	340	4.246	1	1	127
9	Samarinda	8.548	126	316	-	4	16
10	Bontang	118	8	-	-	-	-

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2022

Namun jika dilihat dari pola pengelolaannya dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat masih jauh jika dibandingkan dengan produktivitas komoditi perkebunan yang dikelola oleh perusahaan/swasta. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pendampingan pemerintah terhadap petani terutama pada aspek akses terhadap benih unggul, sarana dan prasarana produksi, serta akses modal dan pasar.

Tabel II.97
Data Perbandingan Produktivitas Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Swasta (Ton/Ha)

Kabupaten / Kota	Kelapa Sawit		Karet	
	Swasta	Rakyat	Swasta	Rakyat
1. Kutai Kartanegara	14.92	9.75	0.63	0.65
2. Kutai Timur	14.81	11.37	0.01	0.11
3. Kutai Barat	6.54	0.87	0.02	0.73
4. Penajam Paser Utara	10.80	4.51		0.24
5. Paser	13.42	8.80	0.75	0.48
6. Berau	22.52	15.97		0.01
7. Mahakam Ulu	5.88	0.00		0.00
8. Samarinda		7.21		0.54
9. Balikpapan		12.82		0.60
10. Bontang	13.60	0.75		
Kalimantan Timur	14.06	11.85	0.09	0.52

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi KALTIM, 2022 (diolah)

Disamping itu, guna meningkatkan daya saing hasil komoditi perkebunan diperlukan upaya hilirisasi hasil produk perkebunan. Dengan

adanya upaya hilirisasi maka geliat produksi pada sektor hulu akan semakin meningkat dan harga komoditi perkebunan di tingkat pasar akan cenderung stabil. Terdapat 97 Perusahaan Besar Sawit (PBS) di Kalimantan Timur dimana perusahaan tersebut mengolah dari produk mentah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi produk setengah jadi berupa *Crude Palm Oil* (CPO). Diperlukan upaya pemerintah untuk menarik investor untuk membangun industri pengolahan berupa turunan produk rumah tangga, membentuk korporasi pekebun serta penyediaan infrastruktur pendekat dari kebun menuju pabrik pengolahan guna meningkatkan geliat perekonomian Kalimantan Timur.

Tabel II.98
Jumlah Perusahaan Besar Sawit (PBS)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Kabupaten / Kota	Perusahaan Besar Sawit	Kapasitas Produksi TBS (ton/jam)	
		Terpasang	Terpakai
1. Kutai Kartanegara	18	975	858.87
2. Kutai Timur	35	1917	1746.32
3. Kutai Barat	8	460	446.99
4. Penajam Paser Utara	7	360	238.33
5. Paser	17	890	674.67
6. Berau	11	685	636
7. Mahakam Ulu	1	60	50.5
8. Samarinda	0	0	0
9. Balikpapan	0	0	0
10. Bontang	0	0	0
KALIMANTAN TIMUR	97	5347	4651.68

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi KALTIM, 2022

3) Peternakan

Populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini didominasi ternak ayam ras pedaging sebanyak 72,28 juta ekor, ayam kampung 4,96 juta ekor dan ayam ras petelur 1.975,93 ribu ekor. Sedangkan untuk populasi sapi potong hanya sebesar 124,93 ribu ekor dan babi sebanyak 78,58 ribu ekor yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Tabel II.99
Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (ekor)

No	Hewan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi Potong	117.504	119.485	119.974	121.290	124.930
2	Sapi Perah	110	91	87	76	78
3	Kambing	66.378	67.892	69.929	68.997	71.068
4	Domba	439	590	635	694	714
5	Babi	78.968	82.546	83.652	76.292	78.581
6	Kerbau	6.157	6.194	6.552	6.539	6.734
7	Kuda	97	102	95	143	146
8	Kelinci	14.189	8.859	10.830	11.044	
9	Ayam Kampung	4.569.169	4.372.415	4.435.205	4.815.976	4.960.453
10	Ayam Ras Pedaging	66.672.445	67.886.566	59.402.832	55.877.917	72.283.207
11	Ayam Ras Petelur	1.055.432	853.693	1.218.994	2.263.835	1.975.927
12	Itik	248.978	254.683	254.749	325.441	335.203

Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2022

Untuk mendukung program pemerintah berupa swasembada dan ketahanan pangan, maka jumlah ketersediaan daging sapi harus mampu mengimbangi jumlah kebutuhan daging sapi masyarakat di Kalimantan Timur dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau sehingga kebutuhan akan daging sapi terpenuhi. Ketersediaan daging sapi sampai saat ini belum bisa mengimbangi kebutuhan akan daging sapi setiap tahunnya untuk masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan hanya mampu memenuhi sekitar 30% kebutuhan. Hal ini dikarenakan populasi sapi di Kalimantan Timur masih tergolong sedikit, sehingga masih harus memasok dari luar daerah seperti dari Sulawesi Selatan, NTT, NTB. Keterbatasan fasilitas yang pada umumnya menimbulkan efek langsung untuk usaha peternakan juga mempengaruhi produksi daging sapi, serta adanya kecenderungan peternak berusaha sendiri. Sehingga sebagai upaya mendorong pemenuhan konsumsi daging sapi maka Pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan strategi pengembangan peternakan sapi pada lahan bekas tambang melalui fasilitasi *miniranch* dan areal kebun sawit melalui Program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA).

Tabel II.100
Jumlah *Miniranch* di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022
1	Paser	1	2	3	9
2	KUBAR	1	2	3	6
3	KUKAR	-	3	5	12
4	KUTIM	2	-	4	5
5	Berau		1	5	8

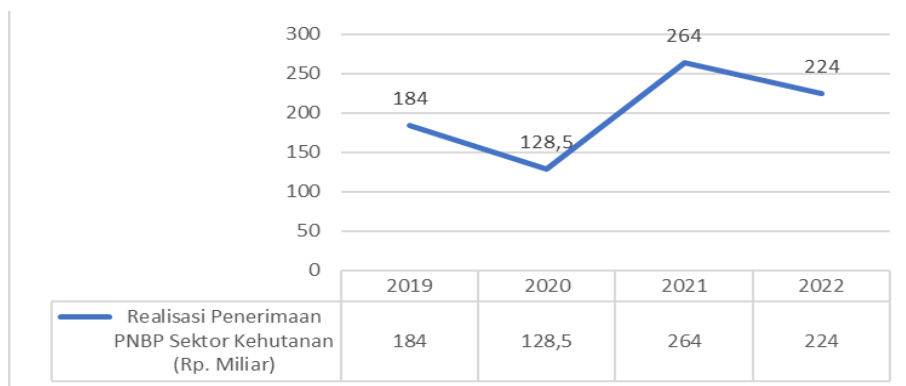
No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022
6	PPU	1	2	3	4
7	MAHULU	-	2	-	2
8	Balikpapan	-	-	-	2
9	Samarinda	-	-	-	1
10	Bontang	-	-	1	1
Kalimantan Timur		5	12	24	49

Sumber: Siranch, DPKH Provinsi KALTIM, 2022

D. Kehutanan

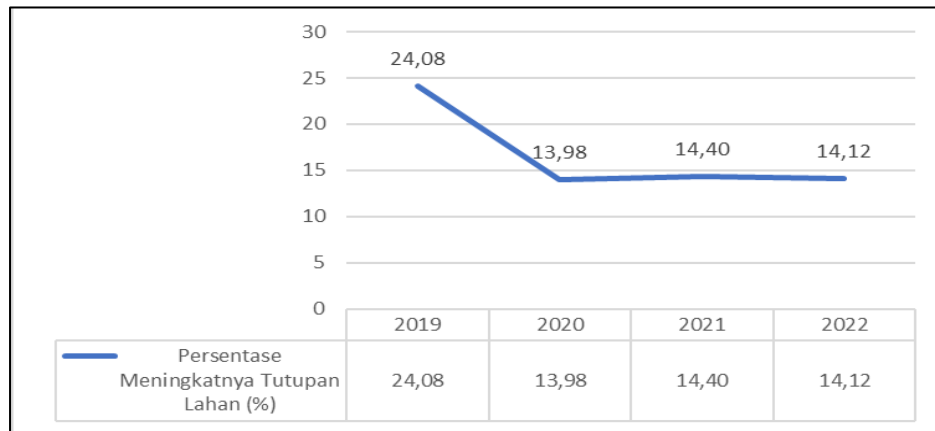
Peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektor Kehutanan menempatkan kewenangan terbatas dalam pemanfaatan hutan. Bilamana sebelumnya UPTD KHP dan Tahura dapat melakukan pemanfaatan Kawasan hutan, namun kemudian UPTD KPH dan Tahura berperan sebagai fasilitator dalam pemanfaatan Kawasan hutan. Perubahan kebijakan pemanfaatan hutan juga mengubah penyebutan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, yang dapat melakukan pemanfaatan hutan dengan multi-usaha kehutanan.

Dari pemanfaatan hutan tersebut, realisasi penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan adalah dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif namun jika dilihat secara umum maka terjadi penurunan. Dalam empat tahun terakhir, Pada tahun 2019 kontribusi sub sektor kehutanan sebesar Rp. 184 Milyar, lalu terjadi penurunan dengan kontribusi terendah pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 128,5 Milyar. Kontribusi terbesar sub sektor kehutanan terjadi pada tahun 2021 yang mencapai Rp. 264 Milyar sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 224 Milyar.



Gambar II.74
Realisasi PNBP Sektor Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 (Rp. Miliar)
 (Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022)

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi dari pembukaan lahan. Perubahan tutupan lahan di Kalimantan Timur dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami perubahan tutupan lahan dari satu tipe menjadi tipe lainnya, dengan laju perubahan Persentase Tutupan Lahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar 24,08%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan terendah yakni 13,98%, pada tahun 2021 meningkat sebesar 14,40%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 14,12%. Umumnya perubahan tersebut memicu berkurangnya luasan hutan alami karena perluasan hutan tanaman, perkebunan, pertanian, pertambangan, serta meningkatnya lahan-lahan tidur seperti tanah terbuka dan semak belukar.



Gambar II.75
Persentase Tutupan Lahan Di Kalimantan Timur
Tahun 2019–2022 (%)

(Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022)

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat besar. Luas hutan di Kalimantan Timur seluas 8.371.478,05 hektar yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan KSA/KPA.

Tabel II.101
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

No	Tahun	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)
1.	2018	38.771,77
2.	2019	66.302,27
3.	2020	38.737,80
4.	2021	39.900,80
5.	2022	1.144,00
TOTAL		184.856,64

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2018, Luas Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 275.272 Hektar (diperbaharui setiap 5 tahun). Pada tahun 2018 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.771,77 Hektar. Pada tahun 2019 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami peningkatan seluas 66.302,27 hektar. Pada tahun 2020 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami penurunan seluas 38.737,80 hektar. Pada tahun 2021 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 39.900,80 hektar dan pada tahun 2022 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.866,17 hektar. Jumlah total lahan kritis yang direhabilitasi hingga tahun 2022 adalah 222.578,81 hektar dengan persentase 80,86%.

Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi. Walaupun pada level tertentu, harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Terutama untuk wilayah yang di atasnya masih ditumbuhi pohon dan masih menjadi aset negara. Ini dapat ditemui di wilayah-wilayah berhutan yang akan dikonversi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada industri pengolahan kayu tetap harus dilakukan. Karena sangat mungkin di industri pengolahan ditemukan bahan baku dari sumber yang tidak sah. Hal ini merupakan tugas dan fungsi untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atas hilangnya aset-aset negara tersebut. Hal lain yang juga penting adalah bagaimana mendorong SDM untuk lebih cerdas dan profesional dalam menangani perkara-perkara ilegal *logging*/kebakaran hutan, memberikan dalam memberikan keterangan ahli untuk tujuan-tujuan penyidikan/penyelidikan, termasuk juga penanganan pelanggaran administratif kehutanan (perdata) yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

Tabel II.102
Jumlah Luas Hutan yang Rusak/Terbakar/Perambahan/Ilegal Logging
Tahun 2022

No	Kab/Kota	Jumlah Luas Hutan yang Rusak/ Terbakar/Perambahan/Ilegal Logging (dalam Ha)
1.	Kab. Berau	1.935
2.	Kab. Kutai Timur	2.157
3.	Kab. Kutai Kartanegara	2.518
4.	Kab. Kutai Barat	495
5.	Kab. PPU	1.136
6.	Kab. Paser	2.054

7.	Kab. Mahakam Ulu	64
8.	Kota Bontang	17
9.	Kota Balikpapan	25,84
TOTAL		10.401,84

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

Guna optimalisasi daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan (per tahun) melalui upaya menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan, diantaranya dengan menjaga hutan dari ilegal logging dan kebakaran hutan yang merupakan penyebab kerusakan hutan. Melalui Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistemnya di tahun 2022 berorientasi pada menurunnya intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, ilegal logging/perambahan, dan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan. Persentase pencegahan kerusakan hutan pada tahun 2022 sebesar 0,12% dan persentase pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2022 sebesar 0,0012%. Beberapa pencegahan kerusakan hutan yang dilakukan adalah patroli pencegahan kerusakan hutan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan serta pembentukan dan pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Dan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan kegiatan belanja sarana prasarana Karhutla (perlengkapan lapangan, alat pemadam kebakaran/selang pemadam, pompa air mesin pemadam, *drone* pemantau kebakaran hutan) patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi penyadartahuan kebakaran hutan, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Namun hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4.104.271,21 m³ menjadi 4.471.286,16 m³ di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan adanya faktor pendukung yaitu 1). Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Unit Manajemen terkait aspek produksi, lingkungan dan sosial; 2.) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada pemegang Izin terkait penatausahaan hasil hutan; 3). Adanya akses ke sistem

pelaporan (SI-PUHH, SI-CAKEP, SI-HHBK, SI-PNBP, SIMPONI) sehingga produksi Hasil Hutan unit manajemen dapat terpantau melalui sistem. Namun demikian, adapun yang menjadi penghambat pada pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu: 1). Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu menurun karena adanya beberapa faktor: a). Curah hujan tinggi menyebabkan produksi terganggu; b). Peralatan Produksi yang sudah berumur sehingga produktivitas alat rendah; c). Harga kayu yang menurun cukup tajam (terutama pada bulan – bulan terakhir) karena lesunya permintaan pasar dunia sementara biaya operasional meningkat karena kenaikan BBM, kenaikan biaya perawatan, biaya *sparespart*, dll

Sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022, serta lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara Eropa pada beberapa bulan. Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami Penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2021 sebesar 1.175,38 ton menjadi 826,05 ton di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena tanaman karet sudah masuk usia siap sadap.

Tabel II.103
Data Rekapitulasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)
Revisi VII Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	Kabupaten/Kota	Status dan Fungsi Kawasan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
1	Paser	6,703.20	11,483.43	3,421.56	23,528.38	45,136.57
2	Kutai Barat	13,809.10	10,806.60	-	5,271.50	29,887.19
3	Kutai Kartanegara	5,264.61	30,362.96	1,497.82	19,193.10	56,318.49
4	Kutai Timur	11,395.93	15,947.34	685.74	9,017.65	37,046.67
5	Berau	20,963.55	18,183.52	181.72	2,615.23	41,944.01
6	Penajam Paser Utara	-	2,421.47	-	-	2,421.47
7	Mahakam Ulu	11,742.98	6,863.48	318.73	25,332.58	44,257.77
8	Balikpapan	-	127.55	-	-	127.55
9	Bontang	-	-	61.98	-	61.98
TOTAL		69,879.36	96,196.35	6,167.55	84,958.44	257,201.70

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

Dalam rangka mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, menurunkan pengangguran dan memberikan akses secara legal kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan, maka Pemerintah berkomitmen meningkatkan alokasi lahan kawasan hutan dari 1,7 juta hektar menjadi 12,7 juta hektar dari total kawasan hutan Indonesia untuk dikelola oleh masyarakat setempat, dan Kalimantan Timur mendapatkan luas kawasan yang dikelola sebesar 250 ribu hektar. Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kawasan hutan ini, pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS). Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program Perhutanan Sosial lahir untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat perdesaan, telah dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan, bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) merupakan instrumen yang disiapkan untuk memberikan arahan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat dibawah skema Perhutanan Sosial tersebut. Namun Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat memiliki kendala yaitu Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan dari KLHK Yang belum Terukur dan Lokasi PIAPS Relatif Jauh Dari Pemukiman.

Tabel II.104
Data Rekapitulasi Perkembangan Perhutanan Sosial
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	Kabupaten/ Kota	Jumlah					Luas (Ha)					Total Per Kab/Kota	
		HD	HKm	HTR	Kemitaan	HA	HD	HKm	HTR	Kemitaan	HA	Jumlah	Luas (Ha)
1	Berau	10	-	1	3	-	80.089	-	1.096	425	-	14	81.610
2	Kutai Timur	5	3	9	1	-	24.945	2.996	9.482	109	-	18	37.532
3	Kutai Kartanegara	12	29	4	-	-	43.550	8.375	3.574	-	-	45	55.499
4	Kutai Barat	5	-	3	-	1	19.706	-	989	-	48,85	9	20.744
5	Paser	2	-	-	-	1	1.550	-	-	-	7.722	3	9.272
6	Mahakam Ulu	10	-	-	1	-	30.776	-	-	96	-	11	30.872
7	Balikpapan	-	11	-	-	-	-	1.897	-	-	-	11	1.897

TOTAL	44	43	17	5	2	200.61 6	13.26 8	15.14 1	630	7.770,8 5	11 1	237.42 6
--------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------------	--------------------	--------------------	------------	----------------------	-----------------	---------------------

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

Selain itu, dari sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat. Pada tahun 2022, perkembangan perhutanan sosial mencapai 111 unit dengan luas sebesar 237.426 hektar.

Perhutanan Sosial (*social forestry*) sebagai program pemerintah pada dasarnya sudah dimulai sekitar 4 (empat) dasawarsa lalu, namun baru menjadi program utama Kementerian LHK pada 4 (empat) tahun terakhir. Perhutanan Sosial secara resmi didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016).

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sangat penting diketahui karena berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar hutan. Desa yang memiliki hutan memiliki potensi membentuk KUPS. KUPS sendiri merupakan amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Desa yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) kepemilikan areal hutan didorong untuk membentuk KUPS. Namun, terlebih dahulu membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

KLHK membuat tingkatan kemandirian KUPS dengan beberapa kategori. Pertama adalah kategori Biru, yaitu baru mendapatkan izin/hak pengelolaan hutan sosial, Kedua adalah kategori Perak/Silver, yang berarti sudah menyusun Rencana Kerja Usaha dan melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya Ketiga adalah Kategori Emas/Gold, yaitu yang telah memiliki unit usaha dan memasarkan produk, dan terakhir, Kategori keempat adalah Platinum, yang berarti KUPS tersebut telah memiliki pasar yang luas, baik

nasional maupun internasional. Di Kalimantan Timur hingga tahun 2022 baru mencapai 2 KUPS dengan Kategori Gold, yakni Kelompok Tani Hutan Delta Mahakam, Desa Muara Jawa Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kelompok Tani Hutan Bunga Pisang, Desa Sungai Wain, Kota Balikpapan Melalui Dinas Kehutanan, Kalimantan Timur berfokus untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang telah mendapatkan izin hutan sosial.

Tabel II.105
Perkembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
Di Kalimantan Timur Tahun 2022

Kabupaten / Kota	HUTAN DESA						HUTAN KEMASYARAKATAN						HUTAN TANAMAN RAKYAT					
	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS
		Platinum	Gold	Silver	Blue			Platinum	Gold	Silver	Blue			Platinum	Gold	Silver	Blue	
Berau	80089	-	-	6	7	13	-	-	-	-	-	-	1096	-	-	-	-	-
Kutai Barat	19706	-	-	15	6	21	-	-	-	-	-	-	989	-	-	-	-	-
Kutai Kartanegara	43550	-	-	-	8	8	8375	-	1	1	12	14	3574	-	-	-	1	1
Kutai Timur	24895	-	-	-	7	7	2996	-	-	-	-	-	9482	-	-	-	-	-
Mahakam Ulu	30776	-	-	15	4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paser	1550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balikpapan	-	-	-	-	-	-	1400	-	1	-	24	25	-	-	-	-	-	-
TOTAL	200566	-	-	36	32	68	12771	-	2	1	36	39	15141	-	-	-	1	1

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

E. Energi Dan Sumber Daya Mineral

1) Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

Tabel II.106
Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022 TW IV

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik			Rasio Desa Berlistrik (%)	Rasio Elektrifikasi / Rasio KK Berlistrik (%)
					PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	NON PLN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=3-8	10	11	12=10+11	13=(8/3)*100	14=(12/4)*100%
I	Balikpapan	34	240.079	710.293	34	0	34	0	224.999	416	225.415	100,00%	93,89%
II	Berau	110	88.427	263.150	82	28	110	0	68.252	13.104	81.356	100,00%	92,00%
III	Kutai Kartanegara	237	243.862	753.862	221	16	237	0	198.502	13.426	211.928	100,00%	86,90%
IV	Samarinda	59	272.054	831.220	59	0	59	0	281.599	0	281.599	100,00%	100,00%
V	Kutai Timur	141	139.068	424.743	96	45	141	0	84.798	30.053	114.851	100,00%	82,59%
VI	Bontang	15	58.292	185.393	15	0	15	0	52.447	1.123	53.570	100,00%	91,90%
VII	Penajam Paser Utara	54	59.995	186.801	54	0	54	0	46.687	2.963	49.650	100,00%	82,76%
VIII	Paser	144	94.080	288.225	133	11	144	0	77.728	6.652	84.380	100,00%	89,69%
IX	Kutai Barat	194	55.789	170.871	124	70	194	0	44.152	8.383	52.535	100,00%	94,17%
X	Mahulu	50	12.185	35.274	21	29	50	0	4.596	6.461	11.057	100,00%	90,74%
TOTAL	KALTIM	1.038	1.263.831	3.849.832	839	199	1.038	0	1.083.760	82.581	1.166.341	100,00%	92,29%

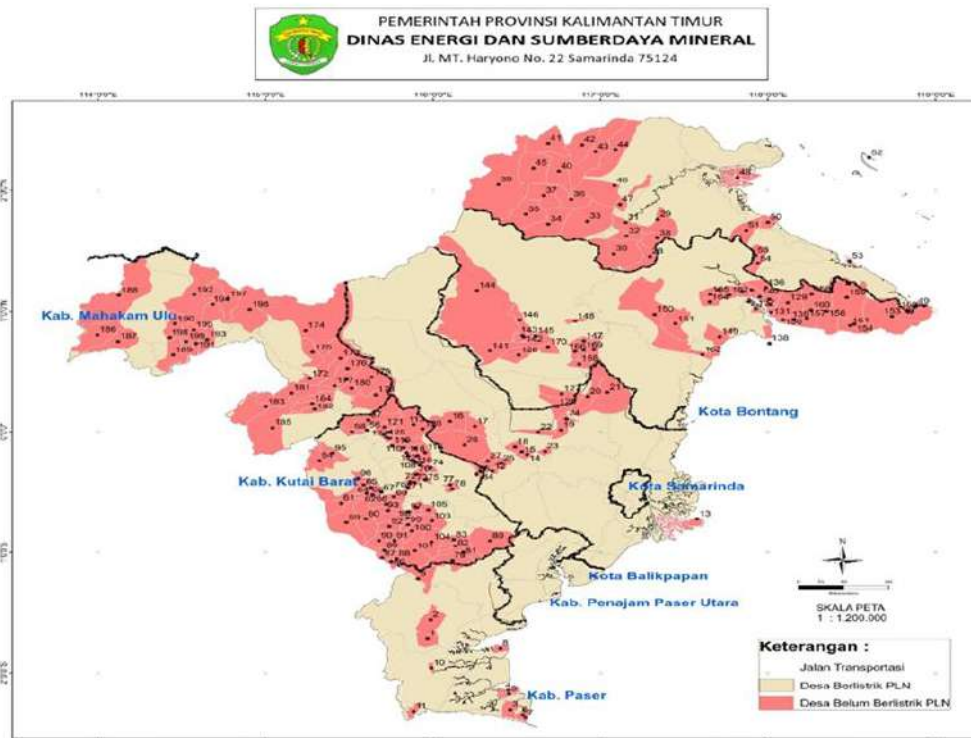
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022

Dari total 1.263.831 jumlah KK dan 3.849.832 jumlah penduduk di Kalimantan Timur, 85,75 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 6,53 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN dan sampai dengan tahun 2022 masih terdapat 199 Desa Berlistrik Non PLN dan 82.581 KK Berlistrik Non PLN. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN. Pada Tahun 2022, Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 91,98 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 92,29 persen pada tahun 2022.

Desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik hanya menggunakan genset dan listrik yang menyala tidak lebih dari 6 jam sehari. Terdapat 199 desa yang belum berlistrik PLN atau bisa dikatakan belum berlistrik selama 24jam, yang akan dikejar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PLN dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS).

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka

sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup besar. Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru.



DESA BERLISTRIK NON PLN DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021							
Kab. Paser (11 Desa)	Kab. Berau (28 Desa)	Kab. Kutai Barat (70 Desa)				Kab. Mahulu (29 Desa)	
1 Desa Rantau Buta	28 Desa Merabu	57 Desa Ujoh Halang	86 Desa Randa Empas	115 Desa Abit	143 Desa Long Lees	171 Desa Long Hurai	
2 Desa Rantau Layung	29 Desa Panaan	58 Desa Kelan Luar	87 Desa Tukuq	116 Desa Rambayan	144 Desa Mekar Baru	172 Desa Long Melaham	
3 Desa Keladen	30 Desa Merapun	59 Desa Besiq	88 Desa Tende	117 Desa Gunung Rampah	145 Desa Rantau Sentosa	173 Desa Memahak Besar/Ilir	
4 Desa Labuangkallo	31 Desa Muara Lesan	60 Desa Bermali	89 Desa Sambung	118 Desa Jenggan	146 Desa Long Nyelong	174 Desa Memahak Ulu	
5 Desa Selengot	32 Desa Lesan Dayak	61 Desa Muara Nilq	90 Desa Anjan Jaya	119 Desa Muara Kalag	147 Desa Long Noran	175 Desa Batu Majang	
6 Desa Random	33 Desa Long Belu	62 Desa Mantar	91 Desa Jelmu Sibak	120 Desa Tondoh	148 Desa Rantau Panjang	176 Desa Long Merah	
7 Desa Senpah	34 Desa Long Duhung	63 Desa Muara Bombo	92 Desa Suakong	121 Desa Tukul	149 Desa Sekerat	177 Desa Rukun Damai	
8 Desa Harapan Baru	35 Desa Long Lamcin	64 Desa Lumpat Dahug	93 Desa Penarung	122 Desa Muyub Ulu	150 Desa Tepian Langsat	178 Desa Matalbaq	
9 Desa Kepala Telake	36 Desa Long Keluh	65 Desa Muara Tokong	94 Desa Intu Lingau	123 Desa Muyub Aket	151 Desa Tebangan Lembak	179 Desa Tri Pariq Makmur	
10 Desa Luan	37 Desa Long Pelay	66 Desa Muara Nyahing	95 Desa Lakan Bilem	124 Desa Linggang Muyub Ilir	152 Desa Muara Bengalon	180 Desa Wana Pariq	
11 Desa Muara Andeh	38 Desa Mapulu	67 Desa Kelan Luar	96 Desa Sentalar	125 Desa Gabung Baru	153 Desa Sandaran	181 Desa Laham	
12 Desa Tanjung Batuq Hara	39 Desa Long Sului	68 Desa Muara Begai	97 Desa Betung	126 Desa Manubar	154 Desa Manubar	182 Desa Long Gelawang	
13 Desa Sepatin	40 Desa Long Lalai	69 Desa Lotaq	98 Desa Kraq	127 Desa Long Pog Baru	155 Desa Tadoan	183 Desa Muara Ratah	
14 Desa Muhuran	41 Desa Punan Segah	70 Desa Jerang Dayak	99 Desa Tendiq	128 Desa Senambah	156 Desa Marukangan	184 Desa Danum Paroy	
15 Desa Sembelimbangan	42 Desa Long Ayap	71 Desa Mendung	100 Desa Penawang	129 Desa Mulupan	157 Desa Susuk Luar	185 Desa Niarbungan	
16 Desa Lamin Telhan	43 Desa Long Ayan	72 Desa Jerang Melayu	101 Desa Lendan Ujung Nayu	130 Desa Kerayaan	158 Desa Susuk Dalam	186 Desa Naha Tifab	
17 Desa Lamin Pulut	44 Desa Punan Mahau	73 Desa Dasaq	102 Desa Kenyarian	131 Desa Tanjung Manis	159 Desa Tanjung M angkatkat	187 Desa Naha Siat	
18 Desa Teluk Muda	45 Desa Punan Mahaka	74 Desa Tanjung Pagat	103 Desa Rikong	132 Desa Perdan	160 Desa Susuk Tengah	188 Desa Long Apari	
19 Desa Tanjung	46 Desa Baru Rajang	75 Desa Gunung Bayar	104 Desa Kendiq	133 Desa Saka	161 Desa Manubar Dalam	189 Desa Delang Kerohong	
20 Desa Menamang Kiri	47 Desa Sidung Indah	76 Desa Muara Belan	105 Desa Muara Ponaq	134 Desa Mandu Dalam	162 Desa Kadungan Jaya	190 Desa Long Pakaq	
21 Desa Menamang Kanan	48 Desa Pegat Batumbi	77 Desa Muara Ohong	106 Desa Sakaq Lotog	135 Desa Sempayau	163 Desa Pengadan Baru	191 Desa Long Lunuk	
22 Desa Bukit Jering	49 Desa Teluk Sumbani	78 Desa Tanjung Jone	107 Desa Sakaq Tada	136 Desa Pelawan	164 Desa Mata Air	192 Desa Long Isun	
23 Desa Kupang Baru	50 Desa Tabakar Muara	79 Desa Gerungung	108 Desa Gemuruh	137 Desa Tepian Terap	165 Desa Bukit Permata	193 Desa Naha Aru	
24 Desa Bukit Buaya	51 Desa Tabakar Ulu	80 Desa Pereng Taliq	109 Desa Karang	138 Desa Kolek	166 Desa Beno Harapan	194 Desa Dajah Naha	
25 Desa Melintang	52 Desa Teluk Alulu	81 Desa Tanjung Soke	110 Desa Merayag	139 Desa Pulau Miang	167 Desa Muqi Rahayu	195 Desa Lirung Ubing	
26 Desa Enggelam	53 Desa Balkukup	82 Desa Deraya	111 Desa Linggang Marimun	140 Desa Perupuk	168 Desa Mawai Indah	196 Desa Long Tuyoq	
27 Desa Muara Enggelam	54 Desa Bisan Ulu	83 Desa Lempur	112 Desa Gadur	141 Desa Mandu Pantal Sejal	169 Desa Himba Lestari	197 Desa Liu Mularig	
	55 Desa Bukit Makmur	84 Desa Loa Deras	113 Desa Linggang Muara Bar	142 Desa Long Bantuq	170 Desa Melan	198 Desa Long Pakaq Baru	
	56 Desa Kelwai	85 Desa Minta	114 Desa Muara Jawaq	143 Desa Long Pejeng		199 Desa Long Lunuk Baru	

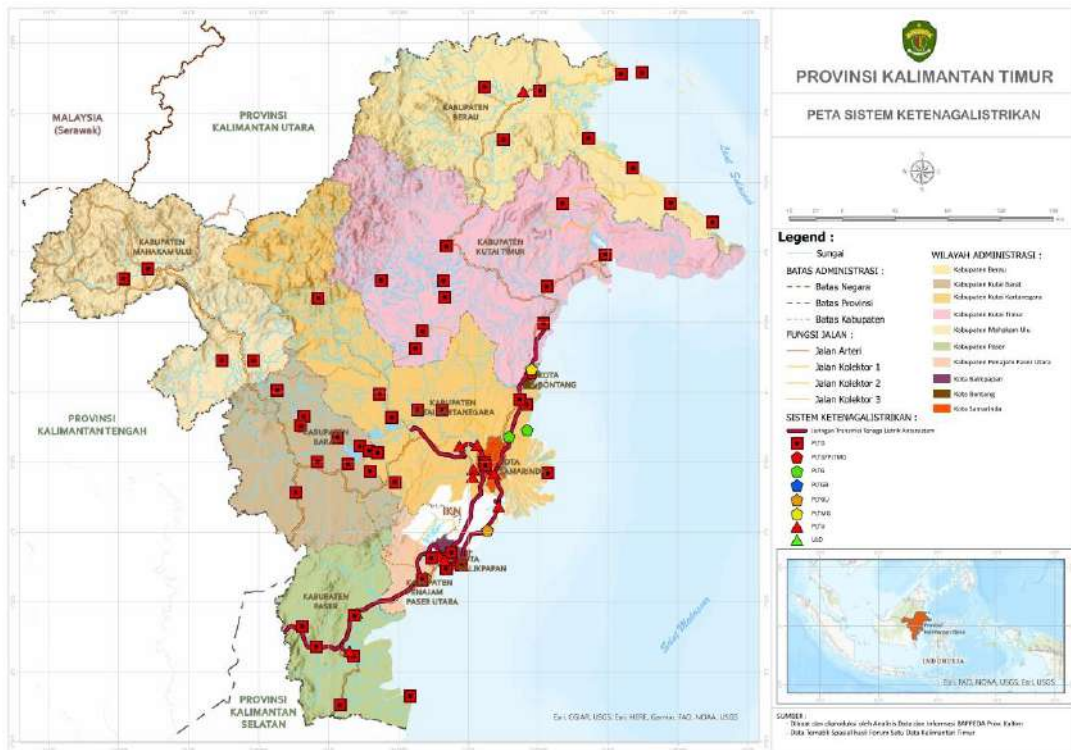
Gambar II.76

Data Desa Berlistrik Non PLN

(Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022)

Sistem ketenagalistrikan Kalimantan Timur ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi yang disebut Sistem Mahakam yang terkoneksi dengan Sistem Barito Kalimantan Selatan. Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Kalimantan Timur tidak hanya

ditopang oleh pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Timur namun juga Kalimantan Selatan.



Gambar II.77
Peta Sistem Ketenagalistrikan
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal, potensi energi matahari selalu ada setiap perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur ditambah dengan luasan wilayah merupakan Provinsi Peringkat 2 di NKRI sehingga dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari sangat lebih baik. Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai 7 Kabupaten (Paser, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, & Mahakam Ulu dan 3 Kota (Samarinda, Balikpapan & Bontang) dengan desa/kelurahan sebanyak 1.038 desa/kelurahan. Desa Belum Berlistrik PLN tahun 2021 sebanyak 199 desa yang mana diantaranya desa-desa tersebut akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pembangunan PLTS Terpusat merupakan satu diantara program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun pelaksanaan program unggulan pembangunan PLTS Terpusat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.107
Data Listrik di Seluruh Desa Berbasis Potensi Lokal

NO.	TAHUN	AKTIFITAS	LOKASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT/OUTCOME
1	2019				
2	2020	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Rantau Buta, Kec. Batu Sopang, Kab.Paser	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	51 Pelanggan, kapasitas 23 kWp
			Desa Sandaran, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur		130 Pelanggan, kapasitas 65.34 kWp
Desa Sandaran, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur	54 Pelanggan, kapasitas 27.72 kWp				
3	2021	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Tadoan, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur		203 Pelanggan, kapasitas 58.80 kWp
			Desa Enggelam, Kec. Muara Wis, Kab. Kutai Kertanegara		201 Pelanggan, kapasitas 83.16 kWp
			Dusun Ketibeh Desa Enggelam, Kec. Muara Wis, Kab. Kutai Kertanegara		91 Pelanggan, kapasitas 47.04 kWp
			Desa Long Lamcin, Kec. Kelay, Kab. Berau		67 Pelanggan, kapasitas 29.40 kWp
			Desa Rantau Layung, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser		79 Pelanggan, kapasitas 33.60 kWp
			Desa Tanjung Soke, Kab. Bongan, Kab. Kutai Barat		49 Pelanggan, kapasitas 29.40 kWp
4	2022	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Selengot, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser		293 Pelanggan, kapasitas 73.65 kWp
			Desa Pegat Betumbuk, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau	139 Pelanggan, kapasitas 40.45 kWp	
			Desa Menamang Kanan, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kertanegara	208 Pelanggan, kapasitas 65.54 kWp	
			Desa Menaman Kiri, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kertanegara	141 Pelanggan, kapasitas 37.45 kWp	
5	2023	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Long Duhung, Kec. Kelay, Kab. Berau	69 Pelanggan, kapasitas 21.89 kWp	
			Desa Pegat Betumbuk, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau		
			Desa Long Sului, Kec. Kelay, Kab. Berau		
			Desa Lemper dan Desa Seraya, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat		
			Desa Mata Libaq, Kec. Long Hubung, Kab. Mahakam Ulu		
			Desa Ujoh Halang, Kec. Long Iram, Kab. Kutai Barat		
			Dusun Muluy Desa Swan Slutung, Kec. Muara Komam, Kab. Paser		
			Desa Labuan Kallo, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser		

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022

Pembangunan PLTS Terpusat merupakan satu diantara program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Pada tahun 2020 pembangunan PLTS Terpusat berlokasi di Paser dengan jumlah 51 pelanggan dan Kutai Timur dengan jumlah 184 pelanggan dengan jumlah pembangunan 235 Pelanggan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Kutai Timur dengan jumlah 203 pelanggan, Kutai Kartanegara dengan jumlah 292 pelanggan, Berau dengan jumlah 67 pelanggan, Paser dengan jumlah 79 pelanggan, dan Kutai Barat dengan jumlah 49 pelanggan dengan jumlah pembangunan 690 pelanggan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Paser dengan jumlah 293 pelanggan, Berau dengan jumlah 208 pelanggan, dan Kutai Kartanegara dengan jumlah 349 pelanggan dengan jumlah pembangunan 850 Pelanggan pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 ini masih dalam proses pembangunan.

Infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebanyak 1.038 Desa dan telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non-PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 839 Desa dan yang bersumber dari non-PLN sebanyak 199 Desa, sehingga rasio desa berlistrik pada tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 90,21 persen pada tahun 2020 menjadi 91,98 persen pada tahun 2021.

Tabel II.108
Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	774.995	832.528	1.018.222	1.089.707	1.163.243
2	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (GWh)	1.801,72	1.748,94	2.053,4	2.213,4	2.379,9

Sumber: PT. PLN Wilayah KALTIMRA

2) Energi Baru Terbarukan (EBT)

Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Timur cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal, sementara pengembangan energi baru dan terbarukan masih mengalami kendala, lokasi sebagian besar berada di kawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai. Adapun potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angin, *bioenergy*, panas bumi, gelombang laut dan lahan bekas tambang.

Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (Solar Cell) merupakan pembangkit listrik yang mampu mengonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Energi matahari sesungguhnya merupakan sumber energi yang paling menjanjikan mengingat sifatnya yang berkelanjutan (*sustainable*) serta jumlahnya yang sangat besar. Untuk wilayah khatulistiwa seperti Kalimantan Timur, potensi radiasi sinar matahari mencapai 1000 Watt Peak (Wp) per meter persegi. Dengan efisiensi panel surya 20%, maka dapat diperoleh daya listrik sebesar 200 Wp per meter persegi. Bila diasumsikan

daya yang dapat diperoleh dari sistem tenaga surya sebesar 1 MWp per Hektar, maka apabila luasan void tambang yang dibangun dengan sistem tenaga surya terapung seluas 1000 Ha akan diperoleh daya listrik sebesar 1 GWp.

Tabel II.109
Rincian data Kualitatif/Absolut Terkait Presentasi Pemanfaatan EBT (Realisasi Capaian 7,27)

JENIS ENERGI	UNIT	2022	Konversi ke BOE	Satuan Energi	
				BOE	TOE
Minyak Bumi					
Total konsumsi					
1. BBM					
Avgas	KL		5,53	0	0
Avtur	KL	105932	5,8907	624013,6324	87361,90854
MFO 180/380	KL	89128	6,9612	620437,8336	86861,2967
RON 95/98	KL	1754	5,8275	10221,435	1431,0009
RON 88	KL	0	5,8275	0	0
RON 89/90	KL	480251	5,8275	2798662,703	391812,7784
RON 92	KL	52472	5,8275	305780,58	42809,2812
IDO	KL	0	6,6078	0	0
CN 48 (murni)	KL	23714,776	6,4871	153840,1234	21537,61727
CN 51 (murni)	KL	63526	6,4871	412099,5146	57693,93204
CN 53 (murni)	KL	16514	6,4871	107127,9694	14997,91572
Kerosene	KL	237	5,9274	1404,7938	196,671132
Biogasoil (B20/B30)	KL	2104371	6,4871	9555885,58	1337823,981
2. LPG	MT	112650	8,5246	960296,19	134441,4666
Total				15549770,35	2176967,85
Batubara					
total Konsumsi					
1. Bahan Bakar Pembangkit	Ton	660238,804	4,2	2773002,977	388220,4168
2. Bahan Bakar Industri	Ton		4,2	0	0
Total		660238,804		2773002,977	388220,4168
Gas Bumi					
Total Konsumsi					
1. bahan Bakar Pembangkit	mmscf	3710,36888	0,1796	666,3822508	93,29351512
2. Bahan bakar industri	mmscf	264,996	0,1796	47,5932816	6,663059424

JENIS ENERGI	UNIT	2022	Konversi ke BOE		Satuan Energi	
					BOE	TOE
3. Jargas Rumah Tangga	sambungan RT/mmscf	62735	0,1796		11267,206	1577,40884
4. Sektor Komersial	mscf		0,1796		0	0
Total					11981,18153	1677,365415
Energi baru terbarukan (EBT)						
Non Listrik						
Total konsumsi						
1. FAME	KL	2104371	6,4871		1010193,618	141427,1066
2. Etanol	KL		2,2979		0	0
3. Biomassa	Ton		3,2979		0	0
4. Kapasitas Biogas RT	m3/tahun	183898,4	0,00634		1165,915856	163,2282198
Total					1011359,534	141590,3348
Listrik			Cf	Eff		
Kapasitas Terpasang On Grid Off Grid			E	F		
1. PLTA	MW		0,6	0,33	0,00	0
2. PLTB	MW		0,5	0,25	0,00	0
3. PLT BIOGAS	MW	9	0,8	0,25	154652,54	21651,35616
4. PLT Biomassa	MW	11	0,8	0,25	189019,78	26462,76864
5. PLTM	MW		0,6	0,25	0,00	0
6. PLTMH	MW	0,529	0,6	0,25	6817,60	954,4639507
7. PLTP	MW		0,9	0,33	0,00	0
8. PLTS/PLTS ATAP	MW	9,16	0,2	0,13	75674,00	10594,36017
9. PLTS Hybrid	MW	0,15	0,17	0,13	1053,32	147,4651662
10. PLT Sampah	MW		0,8	0,25	0,00	0
11. PJUTS	MW				0,00	0
12. LTHSE	MW				0,00	0
Total					427217,24	59810,41409
Total EBT					1438576,78	201400,7489
Perhitungan Bauran Energi 2022						
Energi Primer			MTOE			%
Minyak Bumi			2176967,85			78,64011443
Batubara			388220,4168			14,02395447
Gas Bumi			1677,365415			0,06059263
EBT			201400,7489			7,275338468
Total			2768266,381			100

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022

Bio-energi yang berasal dari biomassa, baik dalam bentuk cair, gas atau padat yang didukung oleh:

- limbah ternak seperti kotoran sapi perah, potong, kambing dan unggas.
- limbah industri seperti tahu, kelapa sawit (POME), dan tapioka.
- limbah rumah tangga dan perkotaan seperti kotoran manusia, sampah industri dan rumah tangga, *biomass* seperti hutan tanaman energi, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, limbah kayu, sekam padi, tongkol jagung, cangkang sawit, tangkos sawit.

Tabel II.110
Potensi Bioenergi dari Pome

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pabrik Minyak Sawit	TBS Diolah / Tahun (ton)	Pome Yang Dihasilkan (m3)	Listrik Yang Dihasilkan (MWh)	Kabupaten Pembangkitan (MW)
1	Kutai Timur	34	8.325.264	4.995.158	264.978	32,6
2	Kutai Kartanegara	18	4.260.823	2.556.494	135.614	16,7
3	Berau	11	3.064.374	1.838.624	97.534	12
4	Kutai Barat	6	1.736.580	1.058.148	56.132	6,9
5	Penajam Paser Utara	7	1.405.494	843.296	44.734	5,5
6	Paser	17	3.080.340	1.848.204	98.942	12,1
7	Mahakam Ulu	1	152.550	91.530	4.855	0,60
	Jumlah	94	22.025.425	13.231.454	702.789	86,4

Sumber : Disbun Kaltim, 2021 (Data Diolah)

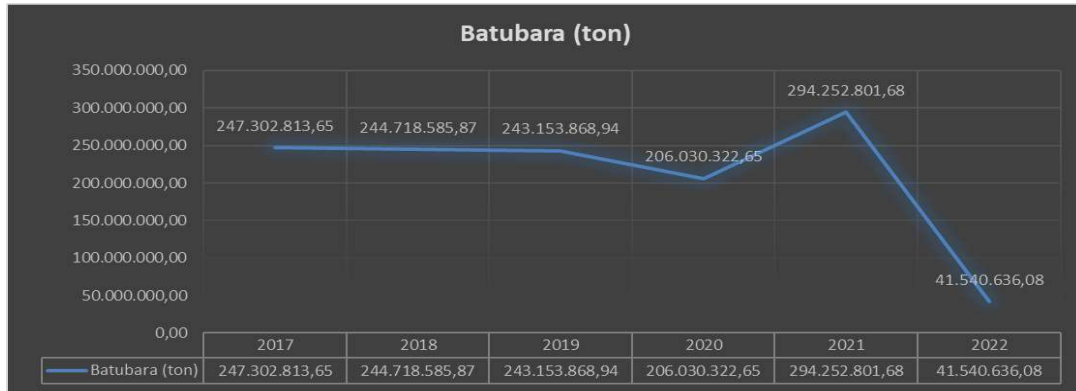
Tabel II.111
Potensi Bioenergi dari Biomass Hutan Energi

Unit Usaha	Lokasi (Kab)	Luas (ha)	Kelas Perusahaan	Luas Alokasi HTE	Rencana Penanaman 2015-2024	Jenis Tanaman Energi
Unit Usaha yang telah mengembangkan THE di Kaltim						
PT. Dharma Hutani Makmur	Kutai Kartanegara	41,545	Pertukangan dan energi	7,500	7,500	Akasia, Gamal, Giant Bamboo
Unit Usaha yang Berkomitmen untuk Mengembangkan Bioenergi di Kaltim						
PT. Inhutani I	Paser	16,816		0	0	
PT. Hutan Mahligai	Kutai Barat	11,275		100	0	
PT. Belantara Pusaka	Berau	14,010		500	500	
PT. Oceanic Timber Product	Berau	16,600		3000	0	

3) **Pertambangan**

Produksi batubara tahun 2021 adalah sebesar 289,53 juta ton, yang menunjukkan peningkatan sebesar 40,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi batubara disebabkan oleh permintaan batubara yang meningkat dari negara tujuan seperti Tiongkok dan India

akibat mulai berkurangnya pandemi COVID-19 serta peningkatan yang signifikan pada harga batubara global.



Gambar II.78
Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2022 (Ton)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Pada tahun 2022 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi. Penurunan produksi migas tak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja aktivitas hulu migas.

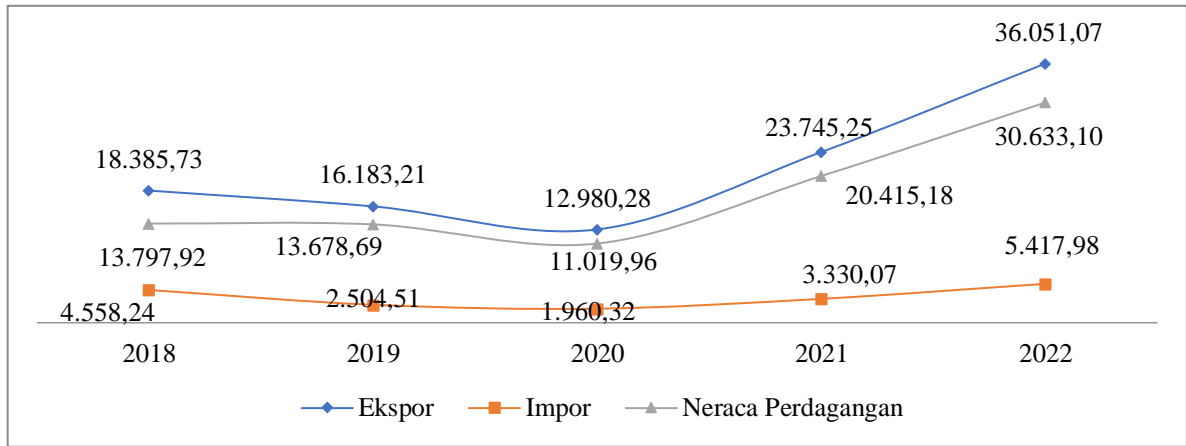
Tabel II.112
Produksi Pertambangan Unggulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

Tahun	Batubara (Ton)	Minyak Bumi (Ribuan Barrel)	Gas Bumi (Ribuan MMBTU)
2018	244.718.585,87	23.720,00	296.830,00
2019	243.153.868,94	21.038,83	231.067,41
2020	206.030.322,65	19.296,85	203.955,18
2021	294.252.801,68	17.742,36	172.829,53

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

F. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.



Gambar II.79
Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerja sama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2018-2022, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.

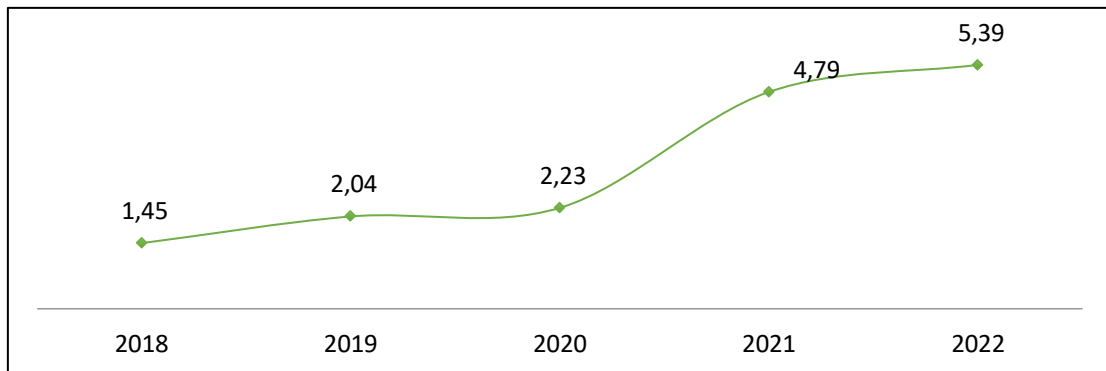
Tabel II.113
Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018 – 2022 (Juta US\$)

No	Golongan Barang	2018	2019	2020	2021	2022
Migas		4.302,83	3.356,38	2.068,20	1.605,15	2.998,12
1	Minyak Mentah	334,70	12,63	7,27	-	8,48
2	Hasil Minyak	12,97	224,05	108,64	7,40	763,12
3	Gas	2.977,57	1.831,52	1.032,38	1.597,75	2.226,52
Non Migas		13.230,03	15.029,36	14.113,59	22.554,76	33.052,95
1	Hasil Tambang	13.580,80	12.408	9.600,36	17.767,61	27.665,96
2	Hasil Industri	1.445,92	1.696,72	2.222,52	4.780,52	5.377,14
3	Hasil Pertanian	4,21	8,87	9,11	6,63	9,85
Total Ekspor		18.385,73	16.183,21	12.980,28	24.159,90	36.051,07

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 32,84 persen dibanding tahun 2021 yaitu dari US\$ 24,16 miliar menjadi US\$ 36,05 miliar. Peningkatan ekspor tahun 2022 disebabkan oleh naiknya nilai ekspor barang migas maupun non migas. Ekspor barang migas tahun 2022 mencapai US\$ 2,99 miliar naik sebesar 129,01 persen dibanding tahun 2021. Sementara ekspor barang non migas mencapai US\$ 33,05 miliar naik sebesar 24,39 persen dibanding tahun 2021.

Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 5,39 miliar US\$ pada tahun 2022 mengalami peningkatan 12,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,79 miliar US\$.

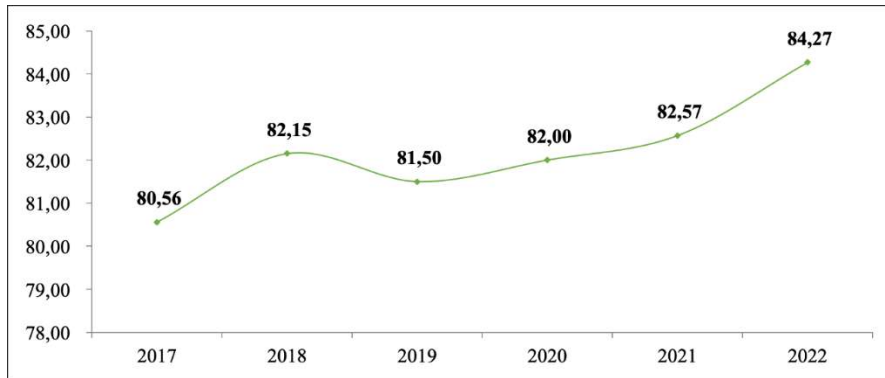


Gambar II.80
Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Miliar US\$)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

2.3.5. Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2022 meningkat di angka sementara 84,27 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 82,57. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur walaupun belum stabil sehingga terjadi fluktuasi pada angka IKM.



Gambar II.81
Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2022

(Sumber: Biro Organisasi Provinsi KALTIM)

2) Nilai SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan nilai sebesar 78,10 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel II.114
Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI				
		2018	2019	2020	2021	2022
a. Perencanaan Kinerja	30	25.35	25.59	25.92	25.94	26,06
b. Pengukuran Kinerja	25	18.28	18.77	18.97	18.99	22,50
c. Pelaporan Kinerja	15	12.47	12.54	12.75	12.76	12,84
d. Evaluasi Kinerja	10	5.13	5.91	6.21	6.21	-
e. Capaian Kinerja	20	13.66	13.74	13.82	13.92	-
Nilai Hasil Evaluasi	100	77,50	74,89	76,55	77,67	78,10
Predikat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	BB	BB
Persentase Kenaikan / Penurunan		0.2%	-3.4%	2.2%	3.7%	0,6%

Sumber: Surat Kementerian PAN dan RB Nomor: B/798/AA.05/2022 Tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level Perangkat Daerah.

3) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mendapat predikat BB dengan skor 77,82. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

2.3.6. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Perencanaan

Pemerintah daerah telah menyusun dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan periodesasinya. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan RKPD, maka perangkat daerah juga menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen perencanaan yang disusun melalui proses penyelarasan dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan perencanaan di bawahnya. Terdapat beberapa capaian kinerja pada unsur Perencanaan yang telah baik namun

masih terdapat yang belum optimal. Beberapa kinerja yang belum optimal ditunjukkan oleh indikator Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota, Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur, dan Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data. Indikator kinerja unsur Perencanaan dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.115
Capaian Indikator Kinerja Unsur Perencanaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	82,3	43,33	79,30		
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur (%)		83	75,00		
3	Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data (%)		80	81,48		
4	Persentase prioritas pembangunan daerah yang mencapai target (%)				43,09	93,75
5	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran (%)				96,97	99,61

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023

B. Keuangan

Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022 adalah 54,07 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel II.116
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Tahun	PAD (Ribu Rupiah)	Total Pendapatan (Ribu Rupiah)	DOF (Persen)
2018	5.800.270.286,00	10.669.542.802,00	54,36
2019	6.555.852.805,00	11.775.086.446,00	55,68
2020	4.116.573.388,00	8.763.476.903,00	46,97
2021	6.111.918.272,28	10.220.142.967,27	59,80
2022	8.997.262.537,26	16.804.693.776,01	53,54
Rata-rata	6.316.375.457,71	11.646.588.578,86	54,07

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2023

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2012 sampai 2021. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan aset-aset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, pada tahun 2012 hanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 8 Kabupaten/Kota masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Kabupaten Mahakam Ulu masih belum mendapatkan status opini dari BPK dan pada tahun 2020 seluruh kabupaten/kota telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

C. Penelitian dan Pengembangan

Walaupun nilai capaian kinerja kelitbangan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah mencapai target bahkan melampaui target yang dimuat dalam Renstra PD, namun masih perlu dilakukan perbaikan karena indikator tersebut belum mengukur kebermanfaatannya. Selanjutnya, pada tahun 2021 telah dilakukan perbaikan terhadap indikator kinerja sasaran yang lebih berorientasi pada pemanfaatan hasil kelitbangan, sehingga dibuatlah pemetaan pemanfaatan terhadap hasil kelitbangan.

Tabel II.117
Capaian Kinerja Kelitbangan Tahun 2018-2021

No	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (%)			26	57
2	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN (%)			9	27

Sumber: LkjIP BALITBANGDA Kaltim Tahun 2021

Perolehan angka realisasi tahun 2020 sebesar 26% diperoleh dari perhitungan ($23/88 \times 100 = 26\%$), sedangkan realisasi tahun 2021 diperoleh dari perhitungan ($50/88 \times 100 = 57\%$). dari realisasi tersebut kemudian dapat diketahui peningkatan realisasi dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kemudian untuk melihat sampai sejauh mana peningkatan/penurunan persentase capaian indikator kinerja sasaran, dibandingkanlah realisasi antara tahun 2021 dengan 2020, dan diperolehlah angka peningkatan sebesar 119%. ($57/26 \times 100$). Peningkatan tersebut disebabkan akumulasi dari jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal lainnya yang mendukung peningkatan kinerja tersebut adalah inovasi yang telah

dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Kepala Badan. Keberhasilan tersebut juga tak lepas dari kerja keras dan peran dari ASN Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tetap semangat dalam melakukan kegiatan kelitbangan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19.

Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN mengalami kenaikan sebesar 200% dari tahun 2020 ke 2021. Pada tahun 2020 jumlah kelitbangan yang telah dimanfaatkan sebanyak 1 judul kelitbangan dari target RENSTA 1 judul kelitbangan, sedangkan tahun 2021 terlaksana sebanyak 2 pemanfaatan judul kelitbangan dari target RENSTRA 2 judul kelitbangan. Kemudian untuk melihat sampai sejauh mana peningkatan/penurunan persentase capaian indikator kinerja sasaran, dibandingkanlah realisasi antara tahun 2021 dengan 2020, dan diperoleh angka peningkatan sebesar 200%.

2.3.7. Pengawasan

1. Tingkat Maturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP)

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 dengan kategori terdefinisi (Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif).

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas Terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktik secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah

sampel sebanyak 11 Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPSDM, BPKAD, Dinas Perindagkop UKM, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial. Pada tahun 2021 ini sebenarnya penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang harus dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan, namun belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dan Bimtek SPIP kepada perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai *pilot project* Maturitas SPIP Terintegrasi. Pada tahun 2022 telah dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada perangkat daerah yang pemangku penanggung jawab atas pencapaian RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana dari hasil *Quality Assurance* tersebut hasil sama dengan seperti pada tahun 2021 yang pada level 3 atau pada tingkat maturitas Terdefinisi. Penilaian Maturitas pada Tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan atas peraturan Perka BPKP menggunakan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu Penilaian Maturitas New SPIP Terintegrasi yang bertujuan agar penilaian Maturitas SPIP lebih berkaitan dengan Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan SPIP.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain:

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap:
 - (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/ rekonsiliasi, (6) Pengamanan Aset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.
2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.

3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan *Whistle Blowing System* (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
5. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan identifikasi dan Evaluasi atas pelaksanaan Benturan Kepentingan.
6. Pemprov Kaltim belum mempunyai Sistem Pengendalian Froud (*Fraud Control System*) dan Implementasinya.

Tabel II.118
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	2	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Provinsi KALTIM, 2023

2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam laporan tersebut ditemukan temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh obrik/entitas. Selama lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2021 sempat sedikit mengalami penurunan akibat ada rekomendasi yang belum atau sulit dilaksanakan. Secara umum, peningkatan ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan APIP semakin banyak yang ditindaklanjuti.

Target Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada tahun 2022 memang belum 100% sebab jumlah rekomendasi setiap tahun yang selalu bertambah sesuai laporan hasil pemeriksaan, masih terdapat rekomendasi temuan yang sudah lama dan berlarut-larut atau sulit untuk ditindaklanjuti. Selain itu, faktor lainnya adalah masih kurangnya kesadaran dan respons dari obrik untuk penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa ditindaklanjuti selama 60 hari setelah menerima LHP, masih kurangnya pemahaman obrik terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya, serta belum ada *reward and punishment*.

Tabel II.119
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

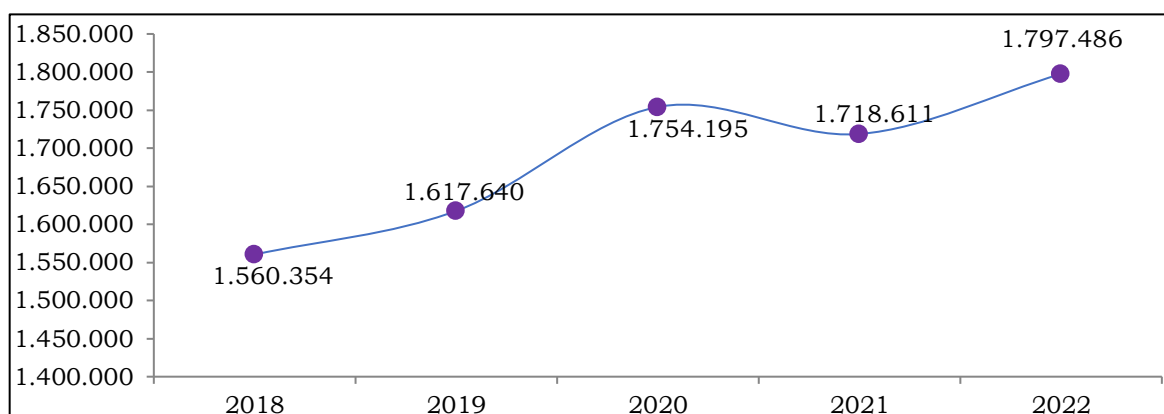
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (%)	75	80	81	80	85

Sumber: LkjIP Inspektorat Provinsi KALTIM Tahun 2019-2022

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama 5 (lima) tahun terakhir, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik akan tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang mencapai Rp. 1.718.611,- per bulan. Namun di tahun 2022, pengeluaran konsumsi rumah tangga kembali mengalami meningkat mencapai Rp. 1.797.486,-. Penyebab naiknya pengeluaran rata-rata per kapita adalah meningkatnya pengeluaran konsumsi makanan di tahun 2022 yang mencapai Rp 813.448 (42,85 persen) dimana pengeluaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 736.465 (45,06 persen).



Gambar II.82
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Rupiah)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Pangan)

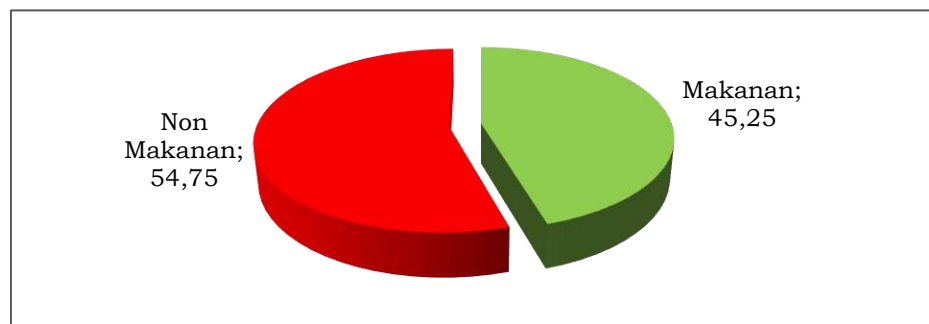
Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah

tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	857.449	893.217	963.725	982.146	984.038
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.560.354	1.617.640	1.754.195	1.718.611	1.797.486
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	54,95	55,22	54,94	57,15	54,75

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023



Gambar II.83

Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

C. Nilai Tukar Petani

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, NTP gabungan tahun 2019 – 2022 selalu berada di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayarkan petani di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II.120

Rata-Rata Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	123,77	107,91	116,96	128,25	139,73
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	128,75	102,41	104,76	106,05	110,87
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	96,14	105,38	111,65	120,94	126,03

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Peningkatan NTP tahun 2022 disebabkan meningkatnya NTP pada hampir seluruh sub sektor, kecuali sub sektor tanaman pangan dan perikanan yang mengalami penurunan. Selanjutnya, ada tiga sub sektor yang mengalami peningkatan NTP, yaitu sub sektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Penurunan NTP sub sektor Tanaman Pangan disebabkan menurunnya indeks harga yang diterima petani (It) sejak bulan Februari dan terus menurun hingga bulan Mei tahun 2022 dan mulai sedikit meningkat pada bulan Juni tahun 2022. Bahkan pada bulan Mei tahun 2022 angka indeks harga yang diterima petani dibawah 100. Artinya pada bulan Mei tersebut, harga produk pertanian tanaman pangan yang diterima petani nilainya dibawah harga tahun dasar 2018. Sedangkan penyebab menurunnya nilai NTP tahun 2022 sub sektor perikanan adalah karena sejak bulan Juli hingga Oktober, indeks harga yang diterima petani perikanan lebih rendah daripada yang harus dibayarkan. Sehingga menyebabkan NTP bulan Juli hingga Oktober tahun 2022 berada dibawah 100 yang artinya pada bulan-bulan tersebut petani perikanan merugi.

Diantara kelima sub sektor dalam pembentukan NTP, petani pada sub sektor perkebunan rakyat adalah petani yang paling sejahtera dibandingkan dengan sub sektor yang lain karena rata-rata NTP tiap tahun sudah diatas 150 artinya bahwa nilai yang diterima dari hasil produksi perkebunannya sudah 50 persen lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal untuk proses produksi perkebunannya. Untuk sub sektor yang lain masih belum aman karena nilai NTP masih berfluktuasi disekitaran angka 100.

Tabel II.121
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Sub Sektor Tahun 2021-2022 (2012=100)

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2021	2022	
	NTP Gabungan	120,94	126,03	4,21
1.	Tanaman Pangan	95,28	91,65	-3,81
2.	Hortikultura	106,07	112,35	5,92
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	151,10	158,33	4,78
4.	Peternakan	104,28	109,92	5,41
5.	Perikanan	103,01	97,98	-4,88

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Ternyata fenomena yang terjadi di Kalimantan Timur, juga terjadi di wilayah lain di pulau Kalimantan, bahwa petani sub sektor perkebunan rakyat lebih sejahtera dibandingkan dengan sub sektor yang lain. Sementara sub sektor tanaman pangan dan perikanan merupakan sub sektor yang masih rentan berfluktuasi nilai NTP-nya berada dibawah 100.

Nilai Tukar Petani di regional Kalimantan berada di atas 100 dan berada di atas nasional sebesar 104,64. Namun jika diurutkan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata NTP tertinggi kedua sebesar 124,20, dibawah Kalimantan Barat sebesar 136,95.

Tabel II.122
Nilai Tukar Petani (NTP) Regional Kalimantan dan Nasional
Menurut Sub Sektor Tahun 2022

No	Uraian	Kaltim	Kalbar	Kalteng	Kalsel	Kaltara	Nasional
	NTP Gabungan	126,03	141,34	121,60	107,33	109,00	107,33
1.	Tanaman Pangan	92,34	92,59	94,63	98,79	96,78	98,82
2.	Hortikultura	112,32	102,01	111,82	105,54	101,41	108,74
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	162,54	167,77	139,17	123,02	154,16	126,22
4.	Peternakan	108,77	100,53	107,74	102,38	104,55	101,24
5.	Perikanan	97,98	102,64	94,46	100,60	104,29	105,24

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

D. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Pada tahun 2017-2021, proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan namun rasio daya serap tenaga kerja justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan lapangan kerja yang belum sesuai dengan kualitas dan *skill* tenaga kerja lokal yang tersedia. Sejalan dengan itu, peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga kerja yang lebih sedikit. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan peluang dan kesempatan kerja lebih kepada masyarakat lokal melalui peningkatan investasi yang memberikan timbal balik positif bagi masyarakat. Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.123
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

No	Uraian	PMDN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	12.935	20.837	19.952	21.596	24.829
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	520	2.227	3.924	9.291	4.938
3	Rasio daya serap tenaga kerja	24,88	9,36	5,08	2,32	5,03
No	Uraian	PMA				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	12.500	15.166	5.868	5.650	11.609
2	Jumlah proyek seluruh PMA	513	903	778	1.034	742
3	Rasio daya serap tenaga kerja	24,37	16,80	7,54	5,46	15,65

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2023

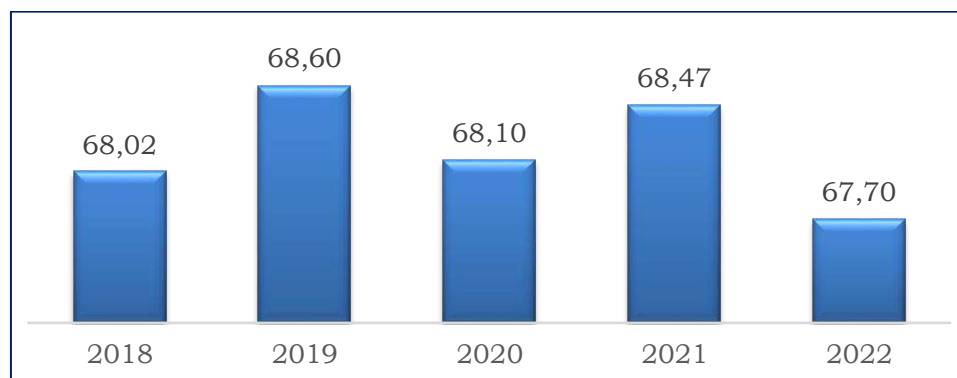
Berdasarkan tabel di atas, sektor usaha tenaga kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2022 pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) paling banyak diserap oleh sektor pertambangan sebesar 41,03 persen dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 28,88 persen. Hal ini terjadi dikarenakan nilai realisasi investasi dan jumlah proyek terbesar pada PMDN adalah sektor pertambangan. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) paling banyak diserap oleh sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan menyerap 50,59 persen tenaga kerja, sedangkan sektor pertambangan menyerap tenaga kerja sebanyak 26,13 persen. Sama halnya seperti pada PMDN, pada PMA penyerapan tenaga kerja sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan terbanyak juga dipengaruhi dengan nilai investasi dan jumlah proyek yang tinggi pada sektor tersebut. Kemudian dengan berkembangnya investasi, efek yang akan diperoleh yakni terhadap upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

E. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*Business Process*) dan sumber daya manusia aparatur. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah

langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan perbaikan guna menunjang reformasi birokrasi yang baik dan mengarah ke tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2020 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di angka 68,10 dengan predikat B (Cukup Baik), sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,54% berada di angka 68,47 dengan predikat B (cukup baik).



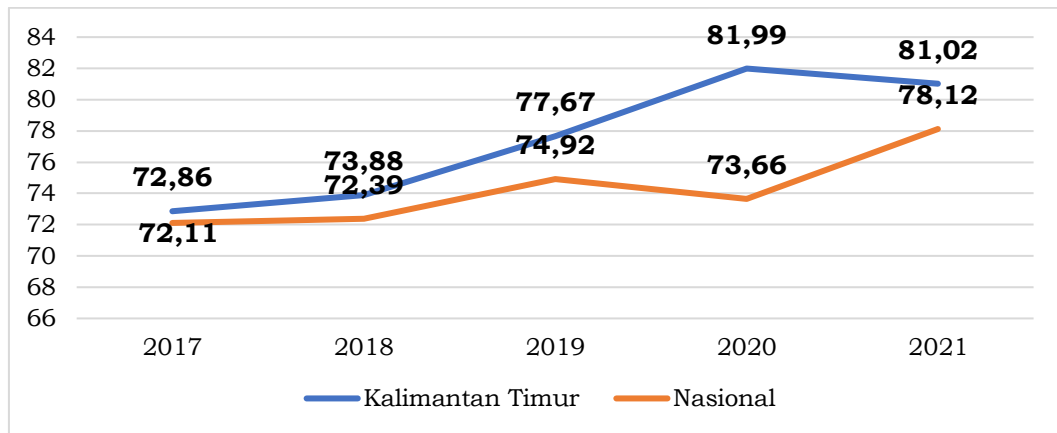
Gambar II.84

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber: Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi KALTIM, 2023)

F. Indeks Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 81,02 persen pada tahun 2021 dan di level nasional berada pada peringkat ke-5. Nilai indeks ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan metode dalam perhitungan indeks demokrasi mengalami perubahan. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur masuk dalam kategori "*high performing democracy*". Walau mengalami penurunan di tahun 2021, namun IDI Kalimantan Timur masih tetap berada di atas IDI nasional yang mencapai 78,12.



Gambar II.85
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021

(Sumber: BPS RI, 2022)

Perkembangan IDI Kalimantan Timur dari 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Capaian IDI terendah pada tahun 2017 sebesar 72,86 sedangkan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 81,99. Fluktuasi angka IDI mencerminkan dinamika situasi demokrasi di wilayah Kalimantan Timur.

Pada tahun 2021 Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan metode baru dimana pada metode lama fokus pada demokrasi politik yang hanya mengukur demokrasi politik yang memiliki porsi besar pada institusional demokrasi seperti Lembaga pemilu, DPRD, birokrasi, dll sedangkan pada metode baru fokus pada demokrasi yang lebih luas dimana mengurangi porsi ukuran institusional demokrasi dan melibatkan aspek ekonomi politik. Selain itu pada metode lama terdapat 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator sedangkan pada metode baru hanya ada 3 aspek dan 22 indikator.

Berdasarkan capaian IDI Tahun 2021 di Kalimantan Timur, masih terdapat 2 indikator yang nilainya masih dibawah 60, yaitu:

1. Indikator Anti Monopoli Sumber Daya Ekonomi

Indikator ini diperoleh dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dari data KPPU, ada peningkatan data dari 4,51 di tahun 2020 menjadi 4,57 di tahun 2021. Kondisi ini didukung dengan peningkatan dimensi regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

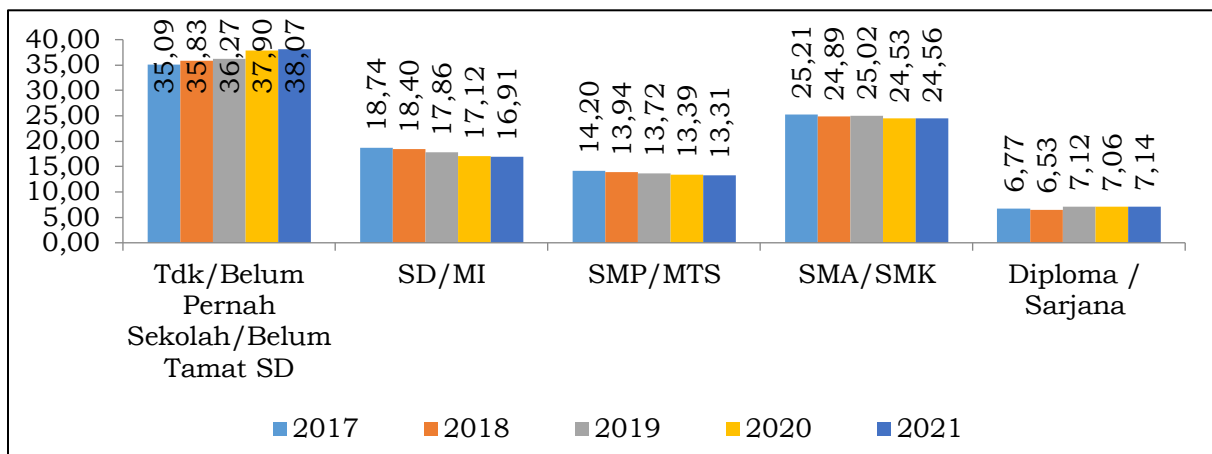
2. Indikator Lembaga Kinerja Legislatif

Diperoleh dari persentase perda yang disahkan terhadap target Propemperda. Data dari sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur diperoleh ada 8 perda yang disahkan dari 15 target yang masuk di Propemperda pada tahun 2021.

G. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Berdasarkan data, diketahui bahwa penduduk Kalimantan Timur yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku diploma/sarjana pada tahun 2021 hanya sebesar 7,14 persen, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK (24,56 persen), SLTP/MTs (13,31 persen) dan SD/MI (16,91 persen). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 38,07 persen, persentase ini meningkat dibandingkan persentase pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II.86

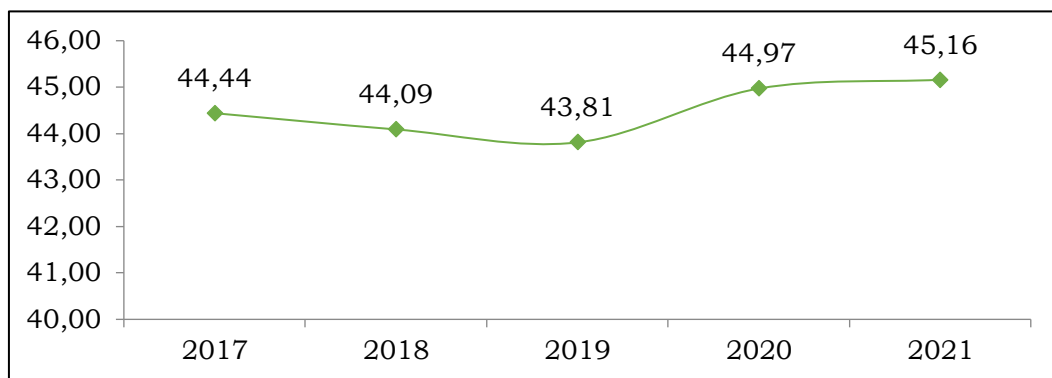
Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

H. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Di

Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 45,16, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45-46 orang penduduk usia non produktif. Bila disandingkan dengan tingkat kemiskinan dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan dipengaruhi oleh rasio ketergantungan, dimana pengeluaran per kapita usia produktif harus menanggung biaya hidup kelompok usia non produktif. Upaya mengurangi angka ketergantungan usia non produktif dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan kelompok usia produktif serta menciptakan kesempatan lapangan kerja yang melibatkan usia non produktif.



Gambar II.87

Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

2.5. Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2019-2023

Evaluasi hasil RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang dilakukan pada tahun 2022 memberikan informasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran sampai dengan triwulan IV 2022. Secara umum sebagian besar capaian indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi. Indikator Tujuan yang memiliki nilai capaian yang sangat tinggi, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara (305,50%). Capaian ini disebabkan adanya faktor lonjakan peningkatan perdagangan ekspor dan harga komoditas lemak dan minyak hewan/nabati di pasar internasional. Selanjutnya, terdapat 4 indikator tujuan yang masih membutuhkan upaya dalam mencapai kinerja yang ideal (100%) yaitu: Indikator Tingkat Kemiskinan (94,83%); Indeks Gini (95,53%); Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (97,91%); dan Indeks Reformasi Birokrasi (95,76%).

Beberapa faktor penyebab masih adanya indikator yang membutuhkan upaya pencapaian, yaitu:

- a. Tingkat kemiskinan, Indeks Gini, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) belum mencapai kinerja ideal.
- b. Capaian kinerja tingkat kemiskinan dan indeks gini dipengaruhi adanya peningkatan garis kemiskinan dari tahun 2021 (Rp. 689.035,00) ke tahun 2022 (Rp. 728.208,00), namun persentase penduduk miskin di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,31%, dimana tahun 2021 sebanyak 241.770 ribu jiwa menjadi 236.250 ribu jiwa. Selain itu adanya pemulihan ekonomi pasca pandemik mengakibatkan adanya pengaruh positif pada beberapa lapangan usaha dan pemerataan pengeluaran.
- c. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dipengaruhi adanya salah satu daya ungkit capaian IRB yaitu nilai integritas kinerja yang masih rendah dan masih ditemukannya pola administrasi pembangunan antar Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang tidak berjalan optimal.

Tabel II.124
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	2022		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian
[MISI] 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas				
[TUJUAN] 1 Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,25	77,44	100,25%
[SASARAN] 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	13,84	98,72%
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,04	9,92	98,80%
[SASARAN] 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,85	0,88	103,53%
[SASARAN] 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,6	74,62	100,03%
[SASARAN] 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	65,64	66,64	101,52%
[TUJUAN] 2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6	6,31	94,83%
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,75	5,71	115,41%
[SASARAN] 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,6825	0,732	107,25%

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	2022		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian
[SASARAN] 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	35	25,08	71,66%
[MISI] 2 Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan				
[TUJUAN] 3 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	4,48	128,00%
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	172	238,7	138,78%
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	2	6,11	305,50%
	Nilai Tukar Petani	113	126,03	111,53%
[SASARAN] 3.1 Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	11.038	15.909	144,13%
[SASARAN] 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	1,72	5,05	293,60%
[SASARAN] 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	9,64	8,24	85,48%
[SASARAN] 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,65	0,43	66,15%
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,37	0,27	72,97%
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,2	4,22	81,15%
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,7	1,28	75,29%
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,07	0,81	75,70%
[SASARAN] 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	35	36,17	103,34%
[SASARAN] 3.6 Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	13	15,13	116,38%
[SASARAN] 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	9,67	8,58	88,73%
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	15,23	14,38	94,42%

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	2022		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian
[MISI] 3 Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan				
[TUJUAN] 4 Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,313	0,327	104,47%
[SASARAN] 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	6.000.000	8.513.323	141,89%
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	337.000.000	513.031.229	152,23%
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan)	5	5	100,00%
	Capaian akses air minum layak (%)	68,53	78	113,82%
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.278,5	14.278,5	100,00%
	Luas kawasan kumuh (Ha)	1.187,82	1.185,14	99,77%
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	374	318,9	117,27%
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	76,74	78,57	102,38%
	Rasio elektrifikasi (%)	93	93,09	100,10%
[MISI] 4 Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan				
[TUJUAN] 5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,05	74,46	97,91%
[SASARAN] 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	28,5	70,68	248,00%
[SASARAN] 5.2 Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	151,49	146,67	96,82%
[MISI] 5 Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik				
[TUJUAN] 6 Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,50)	B (67,70)	94,69%
[SASARAN] 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	84,41	102,32%
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25	2,11	64,92%
[SASARAN] 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77	78,1	101,43%
[SASARAN] 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	100,00%

Sumber: Evaluasi Hasil RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Berdasarkan evaluasi pada tahun 2022, terdapat 27 Indikator Sasaran yang memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi. Selain itu terdapat 1 Indikator Sasaran yang memiliki capaian kinerja yang masih sedang, yaitu Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%) (71,66%) dan Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%) (66.15%). Selain itu, masih terdapat beberapa indikator yang tidak relevan digunakan untuk sistem perencanaan yang masa depan di Kaltim, seperti Jumlah Penumpang dan Barang yang terlayani, luas genangan banjir di kota, luasan kumuh, dan Indeks Pemberdayaan Gender.

Beberapa faktor penyebab masih adanya indikator sasaran yang membutuhkan upaya pencapaian, yaitu:

- a. Indikator sasaran Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan dan Indeks Pemberdayaan Gender, sebenarnya belum relevan ataupun belum berkorelasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan, terutama terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia.
- b. Indikator Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%), terbilang rendah bukan karena kinerja dari sektor pertanian yang menurun, tetapi dikarenakan sektor pertambangan yang sedang tinggi-tingginya.

Selain informasi capaian indikator tujuan dan sasaran yang telah diuraikan di atas, evaluasi hasil RPJMD juga memberikan gambaran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2022. Evaluasi menunjukkan dari 10 IKU pada tahun 2022 yang mencapai target sebanyak 6 indikator. Indikator yang belum mencapai target adalah Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, IKLH dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel II.125
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi			2022		Target 2023
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,61	76,24	76,88	77,25	77,44	77,75
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,94	6,10	6,54	6,00	6,31	5,90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,94	6,87	6,83	6,75	5,71	6,50
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	-2,87	2,48	3,5±1	4,48	3,5±1
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	175,25	160,11	182,54	172,00	238,70	175,00

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi			2022		Target 2023
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Batubara (%)	5,08	-0,50	2,69	2,00	6,11	2,50
7	Nilai Tukar Petani	105,38	111,65	120,94	119	126,03	120
8	Indeks Gini	0,330	0,328	0,334	0,313	0,327	0,308
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,81	75,25	75,06	76,05	74,46	76,15
10	Indeks Reformasi Birokrasi	B (70,00)	B (70,50)	68,10	B (71,50)	B (67,70)	B (72,00)

Sumber: Evaluasi Hasil RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

2.6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengatur tentang amanat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Indonesia. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Perangkat daerah pelaksana 6 (enam) urusan wajib pemerintahan daerah telah melaksanakan SPM. Adapun realisasi pelaksanaan SPM tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Berdasarkan indikator dan target pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya, realisasi pada tahun 2021 dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kalimantan Timur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada jenis Pelayanan Dasar, sebagai berikut:

Tabel II.126
Realisasi Target dan Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Dasar
Bidang Urusan Pendidikan Disdikbud Prov Kaltim Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pendidikan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Capaian
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	161.066	174.487	92,31%
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam Penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	2.597	3.192	81,36%

Berdasarkan tabel diatas, ditahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki capaian pada setiap jenis pelayanan dasar. Pada pendidikan menengah jumlah penduduk usia sekolah sebanyak 161.066 dan jumlah penduduk yang bersekolah sebanyak 174.487 sehingga mendapatkan capaian sebesar 92,31%. Sedangkan pendidikan khusus jumlah penduduk usia sekolah sebanyak 3.192 dan jumlah penduduk bersekolah sebanyak 2.597 sehingga mendapatkan capaian sebesar 81,36%.

Berdasarkan indikator dan target pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya, realisasi pada tahun 2022 dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan di Kalimantan Timur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada Mutu Pendidikannya.

Tabel II.127
Realisasi Target dan Indikator Pencapaian SPM Mutu Pendidikan
Bidang Urusan Pendidikan Disdikbud Prov Kaltim Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pendidikan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1	Pendidikan Menengah Atas	1. Buku teks pelajaran	78413	78413	100%
		2. Perlengkapan belajar	78413	78413	100%
		3. Jumlah rombongan Belajar di satuan pendidikan	2592	2592	100%
		4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	78413	64877	82.74 %
		5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	5182	5035	97.16 %
		6. Kualitas tenaga	227	224	98.68 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pendidikan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
		kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV			
		7. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1612	1435	89.02 %
		8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	231	221	95.67 %
2	Pendidikan Menengah Kejuruan	1. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	5494	5236	95.30 %
		2. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	217	213	98.16 %
		3. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2969	2969	100%
		4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	80119	52238	65.20 %
		5. Perlengkapan belajar	80119	80119	100%
		6. Buku teks pelajaran	80119	80119	100%
		7. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1584	1373	86.68 %
		8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	223	215	96.41 %
3	Pendidikan Khusus	1. Perlengkapan belajar	2479	2479	100%
		2. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	38	29	76.32 %
		3. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	518	518	100%
		4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	2479	1621	65.39 %
		5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	406	360	88.67 %
		6. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	22	21	95.45 %
		7. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	146	122	83.56 %
		8. Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	82	82	100 %

Berdasarkan tabel diatas, ditahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki capaian pada setiap jenis Mutu Pendidikan yang masing-masing jenis pelayanan dasar diantaranya memiliki 8 indikator. Pada Pendidikan menengah atas jika diakumulasikan

dari target dan capaiannya 95,41%. Pada Pendidikan Menengah Kejuruan capaiannya sebesar 92,72% dan pada Pendidikan Khusus sebesar 78,97%.

2. SPM Kesehatan

Indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi tidak dapat terealisasi dikarenakan tidak adanya bencana/potensi bencana yang terjadi.

Tabel II.128
Realisasi Bidang Urusan Kesehatan

NO.	INDIKATOR SPM	SASARAN	CAPAIAN	%
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	833.578	Tidak Terjadi Bencana/Potensi Bencana Provinsi	-
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi (Pandemi COVID-19)	130.959	130.959	100

3. SPM Pekerjaan Umum

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota

Penyediaan air minum curah kewenangan provinsi akan diimplementasikan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Terdapat lima potensi SPAM Regional yang sedang diupayakan pembangunannya (tabel II.51). Dalam jangka waktu menengah, pembangunan akan diarahkan ke SPAM Regional sistem Kutai Kartanegara – Bontang yang akan mendapat suplai air baku dari Bendungan Marangkayu. Dokumen perencanaan yang menjadi kriteria kesiapan pembangunan fisik untuk prasarana air minum yang diprioritaskan tersebut telah tuntas disusun pada tahun 2022. Proses pengadaan lahan akan dilakukan tahun 2023 dan pekerjaan fisik dimulai tahun 2024.

Tabel II.129
Potensi Penyelenggaraan SPAM Regional

No	Potensi Spam Regional	Area cakupan	Sumber Air Baku	
			Nama	Kapasitas
1	KUKAR- Bontang	2 Kabupaten/Kota (5 Kecamatan – 22 kelurahan)	Bendungan Marangkayu	450 l/det
2	KUTIM-Bontang	2 Kabupaten/Kota	Waduk Ex Tambang	Up to 250 l/det

No	Potensi Spam Regional	Area cakupan	Sumber Air Baku	
			Nama	Kapasitas
		(4 kec – 21 kelurahan)	Indominco & S. Mayang	
3	KUTIM-Bontang	2 Kabupaten/Kota (4 kec – 21 kelurahan)	Bendali Sukarahmat	Up to 240 1/det
4	PPU – Balikpapan	IKN, 2 Kab/Kota (8 Kec)	Waduk Sepaku Semoi, Waduk Sepaku	Up to 1.270 1/det
5	KUKAR – Balikpapan	IKN, 2 Kab/Kota (8 Kec)	Waduk Batu Lepek	5.000 1/det
6	Paser – PPU	2 Kab/Kota (2 Kec)	Bendung Telake	210 1/det

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota

Kinerja layanan pengolahan air limbah domestik skala provinsi saat ini masih terbatas pada tahap awal/inisiasi. Telah tersusun dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD) regional skala provinsi. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat enam zonasi layanan potensial, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara. Diperkirakan SPALD regional yang direncanakan dapat memberi layanan akses aman sanitasi untuk 766.571 jiwa pada tahun 2041 (tabel II. 53). Tahun 2023, akan dilakukan studi kelayakan untuk zonasi SPAL regional di Kota Samarinda – Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam jangka waktu tiga tahun (2024 – 2026), seluruh dokumen perencanaan dan dokumen persyaratan lingkungan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fisik ditargetkan untuk tuntas.

Tabel II.130

Target Layanan Akses Aman Sanitasi (Air Limbah Regional) Kaltim

Zona-area		Tahun 2020		Renc. Tahap 1 (s.d 2023)		Renc. Tahap 2 (s.d 2028)		Renc. Tahap 3 (s.d 2041)	
		%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa
Zona 1	Bontang, Kutim, Kukar	1.8	1429	15	15709	50	58553	60	96009
Zona 2A	Samarinda-Kukar (Sambutan-Anggana)	1.4	815	15	12828	50	48724	60	83136
Zona 2B	Samarinda-Kukar (Palaran-Sanga-sanga)	0.7	366	15	11585	50	44656	60	78145

Zona-area		Tahun 2020		Renc. Tahap 1 (s.d 2023)		Renc. Tahap 2 (s.d 2028)		Renc. Tahap 3 (s.d 2041)	
		%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa
Zona 2C	Samarinda-Kukar (Samarinda Seberang-Loa Janan-Loa Janan Hilir)	2.51	3330	15	27968	50	106600	60	182989
Zona 3	Balikpapan-Kukar-PPU (Balikpapan Barat-Loa Janan-Samboja-Sepaku)	2.33	2977	15	25606	50	94369	60	151627
Zona 4	Balikpapan-Kukar (Balikpapan Utara- Samboja)	4.38	6649	15	28541	50	106458	60	174665
TOTAL RENCANA LAYANAN			15,566		122,237		459,360		766,571

Sumber: Dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kaltim, 2020

Penanganan yang dilakukan hingga saat ini belum secara langsung memperlihatkan manfaat/dampak yang nyata terkait pencapaian SPM air limbah skala provinsi. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis sektor air limbah serta pemberian pendampingan untuk implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

4. SPM Perumahan Rakyat

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi Kalimantan Timur belum dapat dilakukan mengingat kewenangan provinsi adalah penyediaan rumah untuk korban bencana alam skala provinsi serta warga yang terkena relokasi program pemerintah. Hasil identifikasi awal disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.131
Risiko Bencana dan Permukiman Pada Area Berisiko

Risiko Bencana	Total Area (Ha)	Permukiman pada area Berisiko (Ha)
Risiko tanah longsor	3,179,299.92	76.59
Tinggi	2,431,916.85	48.63
Sedang	739,261.71	9.30

Risiko Bencana	Total Area (Ha)	Permukiman pada area Berisiko (Ha)
Rendah	8,121.36	18.67
Risiko kebakaran hutan	11,337,251.96	13,396.50
Tinggi	4,436,219.74	6,569.90
Sedang	2,438,406.17	6,557.48
Rendah	4,462,626.05	269.12
Risiko banjir	5,278,811.89	90,741.89
Tinggi	39,703.97	2,510.46
Sedang	1,556,180.47	61,564.28
Rendah	3,682,927.45	26,667.15

Sumber: Analisis Spasial Peta Potensi Bencana Kaltim & sebaran permukiman di Kaltim 2021

2. Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

Berdasarkan laporan SPM dalam LPPD Tahun 2021, capaian SPM Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 22%.

Pencapaian dua jenis pelayanan dasar yang merupakan SPM bidang perumahan rakyat diatas belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya data yang akurat dan mutakhir terkait jumlah rumah serta penduduk yang perlu penanganan skala provinsi. Upaya yang dilakukan pada tahun 2022 adalah dengan melakukan pendataan awal SPM. Selain itu, tengah dilakukan dokumen Rencana Aksi SPM yang saat ini dalam proses perumusan dan akan disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan sinkronisasi untuk pencapaian SPM perumahan rakyat sesuai kewenangan provinsi. Diantaranya adalah koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta identifikasi proyek-proyek strategis yang berpotensi memerlukan relokasi penduduk. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa terdapat lingkungan hunian di Kaltim yang masuk dalam area risiko bencana, baik tinggi, sedang, maupun rendah.

5. SPM Trantibumlinmas

Pada Tahun 2022 Realisasi Jumlah Penegakan Perda dan Pergub adalah sebesar Rp. 406.493.499,- atau sebesar 93,53% sedangkan untuk realisasi pelayanan ganti rugi (kerugian materiil dan pengobatan) tidak direalisasikan karena tidak ada warga yang memperoleh layanan dampak atau akibat dari Penegakan Perda dan Pergub.

6. SPM Sosial

Realisasi penerapan dan capaian SPM Bidang Sosial tahun 2021 yang belum mencapai 100% namun berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dasar, khususnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar untuk Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti. Belum optimalnya pelayanan kebutuhan pelayanan dasar untuk Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti dikarenakan pada tahun ini belum tersedia fasilitas terkait hal tersebut.

2.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengatur proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Indonesia. PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Proyek strategis nasional di Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- a. Jalan Tol Samarinda-Bontang
- b. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda melalui paket Pembangunan Kolam Retensi dan Saluran pada Akses Jalan Tol Balikpapan- Samarinda Seksi V sampai dengan Bulan Juni Minggu ke empat tahun 2022 dengan progres fisik sebesar 55,15%.
- c. Pelabuhan KEK Maloy Telah terbangun fasilitas eksisting Pelabuhan Internasional Maloy yaitu Dermaga *multipurpose*; *Trestle* dan pelebaran; *Causeway* walaupun masih terkendala Belum Memiliki Amdal Kawasan Pelabuhan KEK MBTK dan Belum Memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) I Dokumen Pengelolaan Lingkungan hidup (DPLH). Karena berdasarkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor S.541/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.4/12/ 2021, setiap kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan diperintahkan untuk segera menyusun dokumen lingkungan hidup berupa DELH bagi kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki AMDAL atau DPLH bagi kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki UKL-UPL.

- d. Bendungan Marangkayu masih terjadi Pengalihan aset ke Kementerian PUPR karena Lahan yang telah dibebaskan Pemkab Kukar Tahun 2007 belum mempunyai dokumen hasil pengadaan lahan seluas 49,57 Ha dan Lahan yang telah dibebaskan Pemprov Tahun 2011 belum ada kejelasan tahapan pengalihan asetnya seluas 22,47 Ha.
- e. Bendungan Sepaku Semoi terdiri dari Area Rumah Dinas dan *Workshop*, *Open Space*, Kantor Pengelola (UPB), Cafeteria dan Area Saung, *Camping Area*, *Helipad* dan Gardu Pandang sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 Progres Fisik mencapai 80,06% dengan Realisasi Keuangan 100%.
- f. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Sistem Marangkayu (Intake, Jaringan transmisi, & IPA)
- g. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Telake
- h. Kilang Minyak Bontang (tidak terlaksana)
- i. *Upgrading* Kilang-Kilang Eksisting I *Refinery Development Master Plan* (RDMP) sampai dengan Bulan Juni Minggu ke tiga tahun 2022 dengan progres fisik sebesar 51,29% untuk Meningkatkan Penyerapan TKDN yang saat ini sudah 29% dari target sebesar 30%-35%, serta Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan mempertahankan total jam kerja aman.
- j. Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia Deepwater Development Project I IDDI) (data di SKK Migas)
- k. Pembangunan Fasilitas *Coal to Methanol* di Kutai Timur.

2.8. Kerjasama Daerah

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) adalah Usaha Bersama yang dilakukan Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Sementara Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga

adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Daftar Rencana Kerja Sama Daerah Provinsi Kalimantan Timur berisi:

- a. Rencana kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah di Dalam Negeri dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- b. Rencana kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun rencana kerja sama tersebut disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.132
Daftar Rencana Kerja Sama Dengan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2027

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	HASIL (OUTCOME)	JENIS KERJA SAMA	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN	KETERANGAN
1.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Pendidikan)	Urusan Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Pelatihan Pendidikan, Pengembangan Potensi Kepelautan Sesuai dengan Tingkatannya	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur	Kerja Sama di Bidang Pendidikan	2022-2024	Pendanaan	
2.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Urusan Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Pemenuhan Pelayanan Publik	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Publik yang Optimal	Kerja Sama antara Pemerintah Prov. Kaltim dengan Kab/Kota se-Kaltim	- Pendidikan - Kesehatan - Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perindagkop dan UKM - Penanaman Modal dan PTSP - Penelitian dan Pengembangan Daerah - Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pariwisata - Perkebunan - Hal lain yang disetujui bersama	Meningkatnya Nilai Kebermanfaatan Kerja Sama Daerah	Kerja Sama Pembangunan Daerah	2022-2027	Komitmen Perangkat Daerah Untuk Merencanakan, Mengawal, dan Melaksanakan Rencana Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Daerah Dengan Kab/Kota di Prov. Kalimantan Timur	
3.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Urusan Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Pemenuhan Pelayanan Publik	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Pelatihan Pendidikan, Pengembangan Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur	Kerja Sama di Bidang Komunikasi dan Informatika	2022-2025	Kerja Sama Peningkatan Sarana dan Prasarana, Penyelenggaraan Pelatihan Guna Meningkatkan Kompetensi di Bidang Komunikasi dan Informatika	
4.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Dinas PUPR PERA)	Urusan Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Pemenuhan Pelayanan Publik	Peningkatan Akses dan Sarana Prasarana Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur	Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Daerah di Provinsi Kalimantan Timur	Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	2022-2023	Pendanaan	

6.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Biro Umum)	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	VIP Room Balikpapan dan VIP Room Samarinda	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Umum	Kerja Sama Penggunaan	2022-2027	Pencapaian tujuan keamanan, keselamatan dan pelayanan penerbangan yang aman, lancar, efisien di Gedung Terminal VIP Room Bandar Udara SAMS Balikpapan dan VIP Room Bandar Udara APT Pranoto Samarinda	Pembaharuan perjanjian tahun 2017-2019
7.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Biro Umum)	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	Hotel Royal Swift Balikpapan	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Umum	Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)	2016-2046	Kerja sama pemanfaatan BMD dalam bentuk Guest House yang berlokasi di Balikpapan dengan tata kelola pihak ketiga	Addendum Perjanjian
8.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Perkebunan)	Unsur Pemerintahan Pilihan	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Outlet Produk Hasil Perkebunan Kaltim (Toko Kebun Kaltim)	Pendampingan manajemen korporasi petani dan fasilitasi promosi dan pemasaran produk komoditas perkebunan	Kerja Sama	2023	Audiensi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, redaksi MoU/Kerja Sama	
9.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Kesehatan)	Kesehatan	Pemenuhan Layanan Kesehatan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Pelayanan serta Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Jejaring Rujukan Pelayanan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penelitian	Terpenuhi pelayanan rujukan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penelitian di Bidang Kesehatan	Kerja Sama di Bidang Kesehatan	2022-2027	Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi dengan Rumah Sakit Pengampu	
10.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Kesehatan)	RS Mata Prov. Kaltim	Pemenuhan kebutuhan Dokter Spesialis Mata	Kerja Sama antara Pemerintah Prov. Kaltim dengan Universitas Kedokteran	Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Dokter Spesialis Mata	Terpenuhi kebutuhan dokter spesialis mata di RS Mata Prov. Kaltim	Penyediaan SDM	2023	Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi dengan Universitas Kedokteran Terkait penyediaan tenaga dokter Spesialis Mata	
11.	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pelatihan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur	Swakelola Tipe II	2023	Fasilitator/ Narasumber/ Administrasi	
12.	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pelatihan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur	Swakelola Tipe II	2023	Fasilitator/ Narasumber/ Administrasi	
13.	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pelatihan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur	Swakelola Tipe II	2023	Fasilitator/ Narasumber/ Administrasi	
14.	Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi)	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pelatihan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur	Swakelola Tipe II	2023	Fasilitator/ Narasumber/ Administrasi	
15.	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pelatihan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur	Swakelola Tipe II	2023	Pendanaan	

16.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Urusan Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Pemenuhan Pelayanan Publik	Peningkatan Akses dan Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Permasalahan Sosial, Infrastruktur yang Mampu Mendorong Ekonomi dan Pelayanan Publik yang Optimal di Wilayah Perbatasan	Pembangunan/Rehabilitasi Sapras Pendidikan, Kesehatan, Infratraktur di Wilayah Perbatasan	- Pendidikan - Kesehatan - Perhubungan - Kebencanaan - Sosial - Perindagkop - Kelautan dan Perikanan - Pariwisata - Tanaman Pangan dan Holtikultura - Perkebunan - Peternakan - Pekerjaan Umum - Sumber Daya Air - Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Kebermanfaatan Sama Daerah	Nilai Kerja Sama Pembangunan Daerah	2022-2027	Komitmen Perangkat Daerah Untuk Merencanakan, Mengawal, dan Melaksanakan Rencana Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Daerah Antara Kalimantan Timur - Kalimantan Selatan
17.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Urusan Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Pemenuhan Pelayanan Publik	Peningkatan Akses dan Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Permasalahan Sosial, Infrastruktur yang Mampu Mendorong Ekonomi dan Pelayanan Publik yang Optimal di Wilayah Perbatasan	Pembangunan/Rehabilitasi Sapras Pendidikan, Kesehatan, Infratraktur di Wilayah Perbatasan	- Pendidikan - Kesehatan - Perhubungan - Kebencanaan - Sosial - Perindagkop - Kelautan dan Perikanan - Pariwisata - Tanaman Pangan dan Holtikultura - Perkebunan - Peternakan - Pekerjaan Umum - Sumber Daya Air - Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Kebermanfaatan Sama Daerah	Nilai Kerja Sama Pembangunan Daerah	2023-2027	Komitmen Perangkat Daerah Untuk Merencanakan, Mengawal, dan Melaksanakan Rencana Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Daerah Antara Kalimantan Timur - Kalimantan Utara
18.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Urusan Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Pemenuhan Pelayanan Publik	Peningkatan Akses dan Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Permasalahan Sosial, Infrastruktur yang Mampu Mendorong Ekonomi dan Pelayanan Publik yang Optimal di Wilayah Perbatasan	Pembangunan/Rehabilitasi Sapras Pendidikan, Kesehatan, Infratraktur di Wilayah Perbatasan	- Pendidikan - Kesehatan - Perhubungan - Kebencanaan - Sosial - Perindagkop - Pariwisata - Tanaman Pangan dan Holtikultura - Perkebunan - Peternakan - Pekerjaan Umum - Sumber Daya Air - Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Kebermanfaatan Sama Daerah	Nilai Kerja Sama Pembangunan Daerah	2023-2027	Komitmen Perangkat Daerah Untuk Merencanakan, Mengawal, dan Melaksanakan Rencana Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Daerah Antara Kalimantan Timur - Kalimantan Barat
19.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Urusan Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Pemenuhan Pelayanan Publik	Peningkatan Akses dan Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Permasalahan Sosial, Infrastruktur yang Mampu Mendorong Ekonomi dan Pelayanan Publik yang Optimal	Pembangunan/Rehabilitasi Sapras Pendidikan, Kesehatan, Infratraktur di Wilayah Perbatasan	- Pendidikan - Kesehatan - Perhubungan - Kebencanaan - Sosial - Perindagkop - Pariwisata - Tanaman Pangan dan Holtikultura - Perkebunan - Peternakan - Pekerjaan Umum - Sumber Daya Air	Meningkatnya Kebermanfaatan Sama Daerah	Nilai Kerja Sama Pembangunan Daerah	2023-2027	Komitmen Perangkat Daerah Untuk Merencanakan, Mengawal, dan Melaksanakan Rencana Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Daerah Antara Kalimantan Timur - Kalimantan Tengah

20.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Usuran Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Penuhuan Pelayanan Publik	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Publik yang Optimal	Kerja Sama Misi Dagang Antar Pelaku Usaha	- Perindagkop dan UKM - Tanaman Pangan dan Holtikultura - Kehutanan - Pemerintahan Desa - Komunikasi dan Informasi - Perencanaan Daerah - Kepegawaian - Pariwisata - Peternakan - Kelautan dan Perikanan - Perkebunan	Meningkatnya Kebermanfaatan Sama Daerah	Nilai Kerja	Kerja Sama Pembangunan Daerah	2023-2027	Komitmen Perangkat Daerah Untuk Merencanakan, Mengawal, dan Melaksanakan Rencana Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Daerah Antara Kalimantan Timur - Jawa Timur
21.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Usuran Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Penuhuan Pelayanan Publik	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Publik yang Optimal	Kerja Sama Misi Dagang Antar Pelaku Usaha	- Tanaman Pangan dan Holtikultura - Pariwisata - Penanaman Modal dan PTSP - Perkebunan - Peternakan - Perindagkop - Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Kebermanfaatan Sama Daerah	Nilai Kerja	Kerja Sama Pembangunan Daerah	2023-2027	Komitmen Perangkat Daerah Untuk Merencanakan, Mengawal, dan Melaksanakan Rencana Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Daerah Antara Kalimantan Timur - Jawa Tengah
22.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Usuran Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Penuhuan Pelayanan Publik	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Publik yang Optimal	Kerja Sama Misi Dagang Antar Pelaku Usaha	- Tanaman Pangan dan Holtikultura - Pariwisata - Penanaman Modal dan PTSP - Perkebunan - Peternakan - Perindagkop	Meningkatnya Kebermanfaatan Sama Daerah	Nilai Kerja	Kerja Sama Pembangunan Daerah	2023-2027	Komitmen Perangkat Daerah Untuk Merencanakan, Mengawal, dan Melaksanakan Rencana Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Daerah Antara Kalimantan Timur - Nusa Tenggara Timur
23.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Usuran Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Penuhuan Pelayanan Publik	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Publik yang Optimal	Kerja Sama Misi Dagang Antar Pelaku Usaha	- Tanaman Pangan dan Holtikultura - Pariwisata - Penanaman Modal dan PTSP - Perkebunan - Peternakan - Perindagkop	Meningkatnya Kebermanfaatan Sama Daerah	Nilai Kerja	Kerja Sama Pembangunan Daerah	2023-2027	Komitmen Perangkat Daerah Untuk Merencanakan, Mengawal, dan Melaksanakan Rencana Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Daerah Antara Kalimantan Timur - Nusa Tenggara Barat
24.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Usuran Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Penuhuan Pelayanan Publik	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Publik yang Optimal	Kerja Sama Misi Dagang Antar Pelaku Usaha	- Sosial - Tanaman Pangan dan Holtikultura - Pariwisata - Penanaman Modal dan PTSP - Perkebunan - Peternakan - Perindagkop - Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Kebermanfaatan Sama Daerah	Nilai Kerja	Kerja Sama Pembangunan Daerah	2023-2027	Komitmen Perangkat Daerah Untuk Merencanakan, Mengawal, dan Melaksanakan Rencana Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Daerah Antara Kalimantan Timur - Sulawesi Selatan
25.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Usuran Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Penuhuan Pelayanan Publik	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Publik yang Optimal	Kerja Sama Misi Dagang Antar Pelaku Usaha	- Kesehatan - Perindagkop - Penanaman Modal dan PTSP - Penelitian dan Pengembangan Daerah - Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pariwisata - Kelautan dan Perikanan - Perkebunan - Hal lain yang disetujui bersama	Meningkatnya Kebermanfaatan Sama Daerah	Nilai Kerja	Kerja Sama Pembangunan Daerah	2023-2027	Komitmen Perangkat Daerah Untuk Merencanakan, Mengawal, dan Melaksanakan Rencana Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Daerah Antara Kalimantan Timur - Sulawesi Barat
26.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Usuran Pemerintahan	Sisterhood Province	Kerja Sama Relasi Persahabatan	- Tanaman Pangan dan Holtikultura - Kelautan dan Perikanan - Perindagkop - Pendidikan - Seni dan Budaya - Teknologi dan Informasi - Pariwisata - Hal lain yang mungkin disetujui bersama	Meningkatnya Kebermanfaatan Sama Daerah Dengan Luar Negeri	Nilai Kerja	Kerja Sama Pembangunan Daerah	2023-2027	Komitmen Perangkat Daerah Untuk Merencanakan, Mengawal, dan Melaksanakan Rencana Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Daerah Antara Kalimantan Timur - Davao City

27.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Urusan Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kerja Sama antara Pemerintah Prov. Kaltim dengan Universitas Adelaide Australia	Pelatihan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Pertukaran Informasi Ilmu Kesehatan, Pertukaran Tenaga Medis dan hal lainnya yang disetujui bersama	Meningkatnya Nilai Kebermanfaatan Kerja Sama di Bidang Ilmu Kesehatan	Kerja Sama Luar Negeri	2023-2028	Fasilitator/ Narasumber/ Administrasi	Pembaharuan perjanjian kerja sama
28.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Urusan Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Tri Dharma Perguruan Tinggi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur	Kerja Sama di Bidang Pendidikan	2023-2027	Pendanaan	Target 3 Universitas di Dalam Provinsi Kaltim
29.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Urusan Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Tri Dharma Perguruan Tinggi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur	Kerja Sama di Bidang Pendidikan	2023-2027	Pendanaan	Target 5 Universitas di Luar Provinsi Kaltim
30.	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Urusan Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Tri Dharma Perguruan Tinggi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur	Kerja Sama di Bidang Pendidikan	2023-2027	Pendanaan	Target 3 Universitas di Luar Negeri

2.9. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

Dalam konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah.

Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak.

Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya.

Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun, hingga saat ini tujuan tersebut

belum secara nyata diwujudkan oleh PD/BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD dirasa masih belum optimal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa BUMD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat 9 (sembilan) Perusahaan Daerah / Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. PT. BPD Kaltim Kaltara, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Mulai resmi beroperasi pada tanggal 14 Oktober 1965, diresmikan oleh Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur Bpk. A. Moeis Hasan, dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3/PD/64 tanggal 19 September 1964 yang mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusan No. 9/10/8-45 tanggal 01 April 1965, dan Ijin Usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/ Bank Indonesia No. Kep. 95/PBS/65 tanggal 21 September 1965.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03/PD/64 sebagai anggaran dasar Bank mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2010. Dalam rangka perubahan badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Misi awal pendiriannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah adalah sebagai Agen Pembangunan Daerah, dengan maksud untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan

usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Sesuai anggaran dasar, Bank didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, PT BPD Kaltim Kaltara mempunyai tugas sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah, pemegang dan/atau penyimpanan uang daerah, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Sesuai surat Bank Indonesia No. 5/48/KEP.DGS/2003 tanggal 13 November 2003, PT BPD Kaltim Kaltara telah meningkatkan status operasionalnya menjadi Bank Umum Devisa, dan berdasarkan Ijin Prinsip dari Bank Indonesia No. 8/5/DS/Smr tanggal 27 November 2006 dan Ijin Operasional No. 8/7/DS/Smr tanggal 22 Desember 2006, maka sejak tanggal 27 Desember 2006, secara resmi telah dioperasikan Unit Usaha Syariah.

Di tahun 2017 pada usia 52 tahun, merupakan momentum penting bagi reposisi kegiatan bisnis Bank yaitu dengan berubahnya bentuk badan hukum Bank dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dan perubahan nama Bank dengan mengakomodir nama Kalimantan Utara dalam identitas Bank sehingga bertransformasi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara disingkat PT. BPD Kaltim Kaltara dengan sebutan Bankaltimlara.

- 2. Perusda Melati Bakti Satya (MBS)**, merupakan perusahaan yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan didirikan tanggal 5 Januari 1996 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang menjalankan usaha-usaha di bidang pariwisata, transportasi dan jasa umum lainnya dalam arti yang seluas-luasnya dengan modal dasar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang seluruhnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan,

yang terdiri dari 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per lembar.

Tanggal 21 Juni tahun 2004 menjadi Perda Nomor 5 Tahun 2004 yang menjalankan usaha-usaha Transportasi, Pariwisata dan Jasa Umum lainnya dengan modal dasar perusahaan adalah sebesar Rp. 32.500.000.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang seluruhnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang terdiri dari 32.500 (Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta) per lembar saham yang dibelanjakan seluruhnya dalam bentuk pesawat dan *sparepart* pendukungnya.

Tanggal 15 Desember 2008 menjadi Perda Nomor 18 Tahun 2008 yang menjalankan usaha-usaha Transportasi, Pariwisata dan Jasa Umum lainnya dengan perubahan modal dasar menjadi Rp. 3.000.000.000.000,- (Tiga Triliun Rupiah) dengan modal disetor Rp. 201.267.977.199,- (Dua Ratus Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

3. Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS), dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian daerah. Selain memberikan kontribusi pendapatan daerah dari sektor pertambangan batu bara, pemerolehan laba atau keuntungan perusahaan juga bisa memberi kemanfaatan umum terhadap masyarakat.

BKS berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimana kepemilikan saham dipegang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Perusda ini resmi terbentuk pada tahun 2000 tepatnya tanggal 31 Agustus berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2000 dan diharapkan menjadi korporasi pertambangan yang profesional, terpercaya serta berdaya saing pada bidang usaha pertambangan batu bara, memanfaatkan sumber daya mineral dan batubara serta pengelolaan jasa-jasa penunjang pertambangan umum lainnya secara optimal agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi daerah, selain itu berfungsi sebagai instrumen Pemerintah Provinsi yang mampu menunjang kebijakan dan

program pemerintah di bidang ekonomi, mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang handal serta memiliki Kemampuan menjalin kerja sama kemitraan yang efektif dan efisien dengan pihak ketiga dalam menjalankan bisnis perusahaan.

- 4. PT. Ketenagalistrikan Kaltim**, bergerak pada bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik, PT. Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda), untuk selanjutnya disebut PT. Listrik Kaltim, didirikan berdasarkan Akta Notaris Ruddyantho Tantry, SH. Nomor 08 Tanggal 03 Oktober 2017, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0044438.AH.01.01 Tahun 2017, Tanggal 09 Oktober 2017, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Ketenagalistrikan Kalimantan Timur.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusda menjadi Perseroda sebagaimana Akta diatas didasari oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2016, yang ditetapkan pada Tanggal 30 Desember 2016, tentang Perusahaan Perseroan Daerah Ketenagalistrikan Kalimantan Timur. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Disamping mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi sebuah Perseroan Terbatas (PT), PT. Listrik Kaltim juga mengalami perubahan Modal Dasar dari Rp. 126 Milyar menjadi Rp. 500 Milyar. Adapun modal yang telah disetor oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 126 Milyar, dari jumlah Rp. 126 Milyar, telah digunakan untuk membeli Saham pada PT. Cahaya Fajar Kaltim (PT. CFK) sebanyak 96 Juta lembar @ Rp. 1.000,- pada tahun 2003 – 2004, atau setara dengan nilai Rp. 96 Milyar, serta Rp. 30 Milyar telah dipergunakan sebagai Modal Kerja bagi PT. Listrik Kaltim. PT. CFK saat ini mengoperasikan 3 (tiga) Unit PLTU dengan Total Kapasitas 110 MW yang daya listriknya dibeli oleh PT PLN (Persero) dengan kontrak selama 30 Tahun yang akan berakhir pada tahun 2039, dan daya listrik yang diproduksi tersebut didistribusikan ke Sektor Mahakam (Samarinda, Balikpapan, Tenggarong dan Bontang).

Meski mengalami Perubahan Bentuk Hukum dan Perubahan Modal Dasar, namun tidak merubah fungsinya sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- 5. Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera (SKS)**, bergerak pada bidang usaha Budidaya Kehutanan, Penangkaran Satwa Liar, Pariwisata Alam, Taman Buru/Kebun Buru, Persuteraan Alam, Jasa Konstruksi Kehutanan, dan Industri Hasil Hutan. Selain itu Sylva Kaltim Sejahtera (SKS) saat ini mengelola sumber daya hutan secara lestari, melalui pengelolaan hutan yang partisipasi, transparan dan akuntabel pada areal IUPHHK patungan untuk membantu pemerintah provinsi meningkatkan pendapatan asli daerah, melalui kegiatan pendapatan dari perdagangan hasil hutan termasuk penyediaan jasa dalam pengelolaan hutan dan pemasaran hasil hutan ikutan (termasuk emisi karbon, jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati) serta ikut membantu pengawasan dan pengendalian usaha kehutanan melalui kegiatan pengelolaan hutan bersama sama dengan BUMD pusat dan BUMD daerah.

Selanjutnya Sylva Kaltim Sejahtera (SKS) telah membantu meningkatkan produktivitas hutan produksi untuk mendukung ketersediaan bahan baku dan menjamin distribusi nilai tambah hasil hutan melalui pengembangan dan pemasaran industri pengelolaan kayu dan non kayu; meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan dalam wujud penyediaan lapangan kerja lapangan usaha dan industri UKM melalui kegiatan pengelolaan, pemungutan, dan atau pengusahaan hutan yang berkelanjutan dan partisipatif; meningkatkan investasi di bidang kehutanan dengan mendukung pemerintah provinsi dalam meningkatkan hubungan kerja sama terutama dengan luar negeri melalui kerja sama usaha baik dalam negeri maupun luar negeri; dan Pengembangan institusi perusda dengan penguatan kelembagaan perusda melalui upaya peningkatan kinerja, tertib administrasi, kelengkapan sarana prasarana dan kerja sama dengan perusda kabupaten.

- 6. PT. Agro Kaltim Utama (AKU)**, bergerak dibidang usaha Jasa Perdagangan Dalam Sektor Pertanian dan Perkebunan serta Produk turunannya dalam arti seluas-luasnya. PT. Agro Kaltim Utama (AKU) telah berupaya Meningkatkan Modal Perusahaan dengan memberikan

kesempatan kepada perusahaan untuk membangun perkebunan dan usaha yang sejalan dengannya selain itu PT. Agro Kaltim Utama (AKU) memberikan kepastian hukum dalam melakukan usaha yang bersifat internasional, Meningkatkan daya saing perusahaan untuk mengantisipasi perkembangan dunia usaha maupun global, Memperluas wilayah dan produk usaha, Meningkatkan peran perusahaan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dalam era globalisasi dan memberikan Kontribusi pada pendapatan asli daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

- 7. PT. Migas Mandiri Pratama (MMP)**, adalah BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bergerak pada bidang usaha Transportasi Migas, Agen LPG, Penyedia Jasa Perkapalan, Pengelolaan PI 10% Blok Mahakam, Pertashop, Project ManPower Supply di Pertamina RDMP Balikpapan. Selain itu PT. Migas Mandiri Pratama (MMP) berupaya melakukan Optimalisasi Potensi Energi dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Energi Daerah untuk memberikan kontribusi PAD Kaltim dengan berupaya memperkuat daya dukung BUMD melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Dibentuknya PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur.

Selanjutnya keberadaan Perseroan diperkuat dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tanggal 30 November 2009 Nomor 100 oleh Achmad Dahlan, SH (Notaris & P.P.A.T.) yang berkedudukan di Samarinda, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03248.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 30 April 2010.

- 8. PT. Jamkrida Kaltim**, bergerak pada bidang usaha Penjaminan Kredit sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat ini PT. Jamkrida Kaltim telah Mengelola Perusahaan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkesinambungan dengan Meningkatkan kemampuan dan memperlancar kegiatan

koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui penjaminan kredit guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Selain itu PT. Jamkrida Kaltim telah meningkatkan kinerja perusahaan agar mendapatkan keuntungan guna lebih maksimal memberikan dukungan kepada koperasi dan pelaku usaha mikro kecil menengah serta memberikan kontribusi kepada pemegang saham dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

9. PT. Asuransi Bangun Askrida, adalah perusahaan asuransi swasta nasional, yang didirikan pada tanggal 2 Desember 1989 sesuai dengan KEP.192/KM.B/1990, dd. 14 Maret 1990. Pertama kali berdiri perusahaan ini dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD), lalu pada tahun 1996 sebuah keputusan penting dibuat oleh Menteri Dalam Negeri yang bertujuan untuk memperluas kepemilikan perusahaan asuransi ini, dengan mengikutsertakan 33 instansi pemerintahan daerah (provinsi), yang karenanya telah membuat profil perusahaan menjadi lebih kuat khususnya dalam hal partisipasi Askrida dalam mengembangkan industri asuransi di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2012, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyertaan modal kepada PT. Asuransi Bangun Askrida dengan harapan dapat memberikan kontribusi kepada Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur.

Adapun kinerja BUMD terhadap Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.133
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2018 - 2022

Perusda / BUMD	Realisasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Perusda Melati Bhakti Satya	2.803.524.000	2.166.529.068	2.357.034.937	3.040.432.476	3.040.432.476
2. Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera	0,00	8.927.533	9.417.145	67.431.984	0,00
3. Perusda Perkebunan Agro Kaltim Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perusda / BUMD	Realisasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
4. Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera	19.874.278.176	15.876.167.941	13.916.946.395	15.371.128.120	24.548.091.054
5. Perusda Bank Pembangunan Daerah Kaltim	171.433.371.747,79	162.365.356.114,19	92.928.510.744,2 0	114.315.000.000	114.313.867.589,63
6. Perusda Kelistrikan	1.640.127.953	1.142.784.711	0,00	0,00	150.000.000
7. PT. Migas Mandiri Pratama	0,00	208.061.223.331	0,00	65.593.687.598	166.440.385.772
8. PT. Asuransi Bangun Askrida	3.482.743.148	2.758.962.912	1.649.280.912	1.641.392.123	1.768.889.630
9. PT. Jamkrida	58.453.940	0,00	127.446.215	0,00	0,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga/BUMD	199.292.498.965	392.379.951.610	110.988.636.348	200.029.072.301	307.221.234.045,63

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan secara umum mengalami fluktuatif dari tahun 2018 hingga 2021 yang disebabkan terdapat beberapa BUMD yang tidak dapat mencapai target penerimaan dan tidak ada realisasinya disebabkan tidak tercapainya dividen yang diharapkan. Dalam perjalanannya Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah cukup memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian masih diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja. Adapun besaran Dividen yang disetorkan oleh 6 (enam) Perusda/BUMD Kaltim pada tahun 2022 sebesar Rp. 307.221.234.045,63 atau 3,45 % dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah provinsi Kalimantan Timur merupakan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup kegiatan perencanaan dan penganggaran, penatausahaan serta pertanggung-jawaban keuangan daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan daerah untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah melalui Pengeluaran Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dan rangka pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara umum peran pendapatan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam menunjang efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pembangunan, pemerintah menetapkan APBD dengan merumuskan strategi kebijakan pendapatan dan belanja dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan dan belanja yang disesuaikan dengan kondisi makro ekonomi daerah. Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kunci dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 Ayat (3) bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Untuk menentukan kerangka pendanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan hambatan yang akan dihadapi diperlukan analisis pengelolaan keuangan daerah. Dalam melakukan analisis perlu memahami struktur APBD yang terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang disertai dengan jenis objek masing-masing komponen tersebut.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Komponen APBD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018-2020 terdapat perbedaan karena terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyempurnakan aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Komponen APBD pada tahun 2018-2020 terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-

lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sedangkan perbedaan komponen APBD Provinsi tahun 2018-2020 dengan APBD Provinsi tahun 2021-2022 terletak pada: 1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Namun dalam penyajian pendapatan dan belanja daerah tahun 2018-2020 pada bab ini telah disesuaikan penyajiannya sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum realisasi kinerja APBD Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan realisasi pendapatan yang berfluktuatif dengan rata-rata realisasi mencapai 110 persen. Sedangkan realisasi belanja daerah menunjukkan penurunan pada setiap tahunnya dan rata-rata realisasi pada tahun 2018-2022 mencapai 89 persen. Untuk realisasi penerimaan pembiayaan, tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan rata-rata capaian mencapai 102 persen, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun 2019 tidak direalisasikan dan target tahun 2020 tidak tercapai. Kinerja pelaksanaan APBD pada realisasi belanja daerah yang cenderung mengalami penurunan, perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan anggaran yang lebih matang untuk meningkatkan realisasi belanja. Lebih lanjut dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel III.1
Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan
Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persen	Bertambah/Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Daerah				
2018	9.591.235.184.518	10.671.715.200.487	111,27	1.080.480.015.969
2019	11.137.939.446.363	11.775.086.836.200	105,72	637.147.389.837
2020	8.584.526.835.525	9.987.385.879.199	116,34	1.402.859.043.674
2021	9.589.762.859.000	10.220.142.967.274	106,57	630.380.108.274
2022	12.469.541.473.625	16.804.693.776.013	134,77	4.335.152.302.388
Belanja Daerah				
2018	10.128.810.000.000	9.345.057.063.691	92,26	(783.752.936.309)
2019	12.900.000.000.000	11.387.618.509.351	88,28	(1.512.381.490.649)
2020	10.706.850.002.651	9.328.504.462.478	87,13	(1.378.345.540.173)
2021	12.260.598.307.059	10.723.529.422.431	87,46	(1.537.068.884.628)
2022	14.679.878.053.600	12.393.745.833.368	84,43	-2.286.132.220.232
Penerimaan Pembiayaan				
2018	541.264.815.482	541.264.815.482	100,00	-
2019	1.862.060.553.637	1.861.926.227.625	99,99	(134.326.012)
2020	2.249.394.164.475	2.249.383.814.348	100,00	(10.350.127)
2021	2.674.485.448.059	2.953.994.981.532	110,45	279.509.533.473
2022	2.446.958.526.374	2.446.993.522.588	100,00	34.996.214
Pengeluaran Pembiayaan				
2018	3.690.000.000	3.690.000.000	100,00	-
2019	100.000.000.000	-	-	(100.000.000.000)
2020	150.000.000.000	100.000.000.000	66,67	(50.000.000.000)
2021	3.650.000.000	3.650.000.000	100,00	-
2022	236.621.946.400	236.600.000.000	99,99	-21.946.400

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2018-2022, realisasi pendapatan mengindikasikan tingkat efektivitas terhadap pencapaian rencana pendapatan masih cukup baik walaupun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan kebijakan

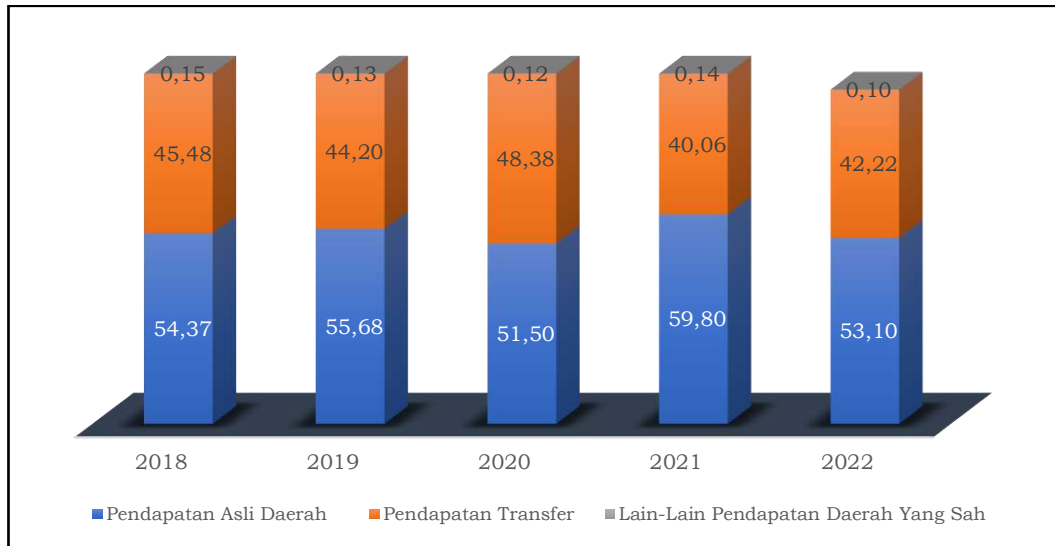
nasional terkait dana perimbangan. Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel III.2
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.802	6.556	5.144	6.112	8.997	13,3
4.1.01	Pajak Daerah	4.717	4.985	3.900	4.775	7.624	16,5
4.1.02	Retribusi Daerah	21	26	10	14	20	11
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	199	392	111	215	310	40,8
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	865	1.152	1.122	1.109	1.043	-0,1
4.2	Pendapatan Transfer	4.854	5.204	4.832	4.094	7.790	18,2
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.830	5.186	4.832	4.094	7.790	18,3
4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.830	5.176	4.760	4.057	7.753	18,9
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	2.991	3.207	3.545	2.592	6.329	33,8
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	768	816	831	828	824	1,8
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.071	1.153	383	637	600	0,3
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	10	72	37	37	190,6
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16	15	12	14	17	3,2
4.3.01	Pendapatan Hibah	6	3	3	14	17	84,8
4.3.02	Pendapatan Lainnya	10	12	9	-	-	-
	Pendapatan Daerah	10.672	11.775	9.987	10.220	16.804	14,6

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Analisis Pendapatan Daerah dilakukan untuk menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah dimasa yang akan datang. Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 2018 hingga 2022 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 14,6 persen. Capaian realisasi terendah pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp9,98 triliun, capaian ini dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Pendapatan tertinggi tercatat pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp16,44 triliun, seiring dengan pulihnya perekonomian daerah.

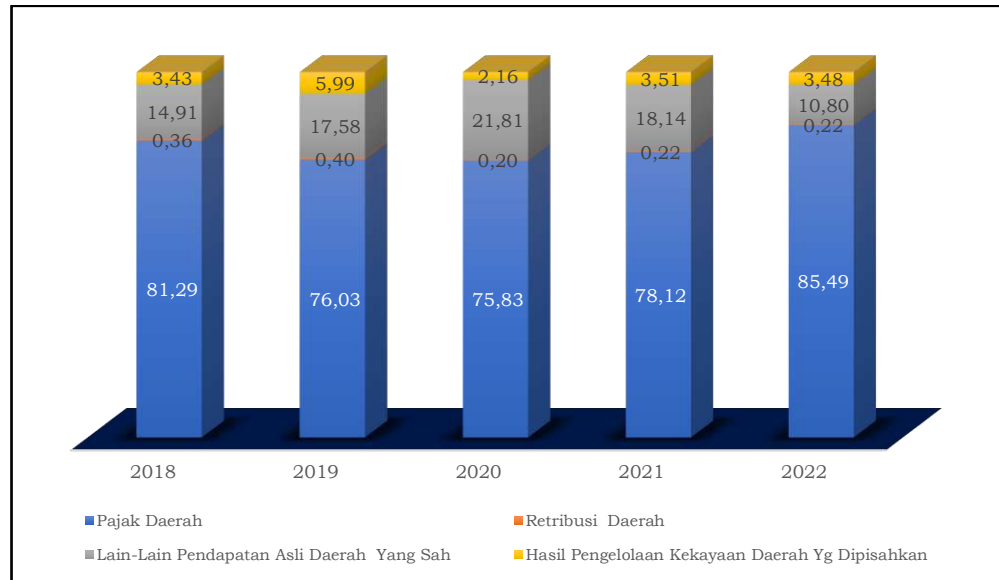


Gambar III.1
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

Jika dilihat dari tren persentase realisasi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer mengalami fluktuasi dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2022 dan kontribusi PAD mengalami fluktuasi namun tetap menjadi mayoritas komponen pembentuk pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur sangat baik dan mengarah pada kemandirian pendapatan daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen utama pendapatan daerah pada Provinsi Kalimantan Timur. PAD terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah dengan besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 77,85 persen. Secara absolut, realisasi pendapatan pajak daerah setiap tahunnya berfluktuasi dengan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar Rp3,9 triliun dikarenakan dampak pandemi Covid-19 dan lesunya aktivitas perekonomian ekstraktif yang berpengaruh terhadap pengurangan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

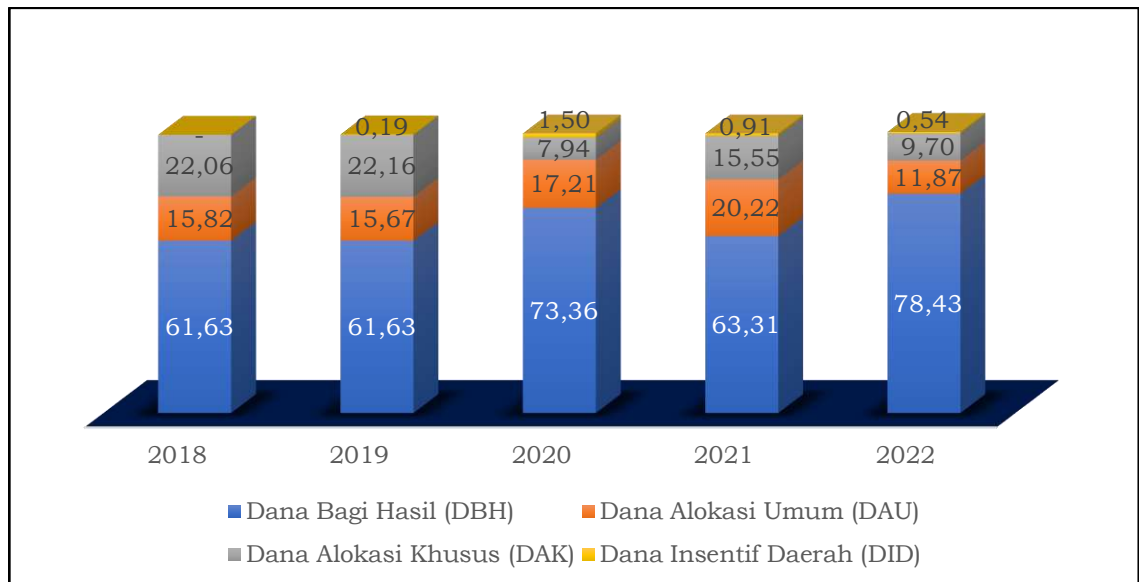


Gambar III.2
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (Gambar III.2) terlihat bahwa pendapatan dari Pajak Daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pajak daerah masih didominasi oleh 3 komponen pembentuk utama yakni pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Adapun Retribusi Daerah memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD Provinsi Kalimantan Timur.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan komponen pendapatan daerah terbesar kedua setelah PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian berfluktuasi pada kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022. Kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir mencapai 44 persen. Penurunan realisasi DBH pada tahun 2021 menjadi Rp4,09 triliun sangat erat kaitannya dengan melemahnya perekonomian daerah yang terjadi di tahun 2020 terutama pada sektor lapangan usaha utama Kalimantan Timur yakni pertambangan penggalan dan industri pengolahan. Perbaikan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2021 memberikan dampak pada meningkatnya DBH terutama yang bersumber dari DBH Mineral dan Batubara seiring dengan tingginya permintaan global serta membaiknya harga batubara acuan.



Gambar III.3
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

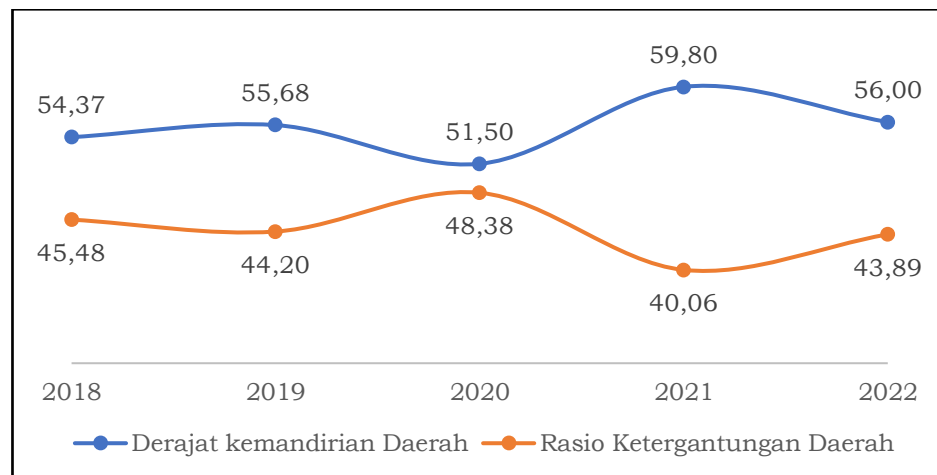
Berdasarkan proporsi komponen pembentuk Pendapatan Transfer yang dimuat pada gambar di atas, terlihat bahwa tren realisasi pendapatan transfer terjadi penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) terjadi semenjak tahun 2020 dan berbanding terbalik dengan kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) yang cenderung meningkat di setiap tahun. Komponen yang memiliki peran sangat tinggi terhadap realisasi pendapatan transfer adalah DBH yang dengan sumbangan terbesar berasal dari DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara. Sedangkan yang memiliki peran terendah terhadap pendapatan transfer adalah Dana Insentif Daerah (DID)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah juga didukung oleh komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rata-rata kontribusi pada kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 sebesar 0,1 persen dengan rata-rata pertumbuhan 2,54 persen. Capaian komponen ini juga berfluktuasi semenjak tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2021 – 2022. Sumber pendapatan pada komponen ini didominasi oleh Pendapatan Lainnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 73 persen dan sisanya bersumber dari Pendapatan Hibah.

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian

Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang rendah.



Gambar III.4
Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

Perkembangan derajat kemandirian Provinsi Kalimantan timur selama 5 tahun menunjukkan tren berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat, semula derajat kemandirian pada tahun 2018 sebesar 54,37 persen hingga sebesar 9,36 persen pada tahun 2022 dengan capaian tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar 59,80 persen. Sedangkan rasio ketergantungan daerah Provinsi Kalimantan Timur juga berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dari yang semula sebesar 45,48 persen pada tahun 2018 kemudian turun menjadi 43,89 persen pada tahun 2022 dan puncaknya pada tahun 2020 sebesar 48,38 persen. Kondisi pada tahun 2021 dan tahun 2022 menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur relatif baik, yang dapat mengarah pada terwujudnya kemandirian daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yakni urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Pengalokasian belanja daerah wajib memprioritaskan belanja pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Analisis Belanja Daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Melalui analisis ini dapat terlihat sejauh mana Pemerintah Daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Selain untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan belanja pada periode tahun 2018-2022, analisis belanja daerah juga digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Belanja daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 masih menggunakan struktur sesuai Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 yang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Namun penyajiannya akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Perkembangan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan realisasi fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang semula pada tahun 2018 sebesar Rp9,36 triliun menjadi sebesar Rp12,39 triliun pada tahun 2022 dengan belanja daerah terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp9,33 triliun. Realisasi belanja pada tahun 2020 paling rendah dikarenakan terjadi penurunan pada belanja hibah, belanja modal dan belanja transfer yang dipengaruhi oleh belanja yang tidak direalisasikan optimal karena dampak pandemi COVID-19.

Tabel III.3
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.01	BELANJA OPERASI	4.418.399	5.279.509	4.624.450	4.983.150	6.001.780	8,8
5.01.01	Belanja Pegawai	1.509.100	1.697.114	1.668.091	2.105.589	2.334.586	12,0
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.874.300	2.767.688	2.779.848	2.634.942	3.184.224	15,9
5.01.03	Belanja Hibah	1.029.946	806.274	163.933	228.665	432.032	6,8
5.01.04	Belanja Bantuan Sosial	5.052	8.433	12.578	13.955	50.939	98,0
5.02	BELANJA MODAL	1.829.260	1.207.816	1.066.606	1.514.465	1.980.010	6,8
5.02.01	Tanah	1.311	4	24	25.313	85.070	26.501,8
5.02.02	Peralatan dan Mesin	223.326	328.324	418.050	300.194	755.306	49,4
5.02.03	Bangunan dan Gedung	101.556	299.304	247.161	537.517	421.589	68,3
5.02.04	Jalan, jaringan dan irigasi	1.489.316	549.190	374.809	638.223	702.084	(3,6)
5.02.05	Aset tetap lainnya	13.750	30.994	26.561	13.218	15.961	20,4
5.02.06	Aset lainnya	-	-	-	-	-	
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	394	904	226.176	221.409	6.689	6.237,5
5.04	BELANJA TRANSFER	3.097.004	4.899.390	3.411.273	4.004.505	4.405.267	13,8
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.406.281	2.892.136	1.863.238	2.455.934	3.542.722	15,2
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	690.723	2.007.254	1.548.035	1.548.570	862.545	30,9
	Jumlah Belanja Daerah	9.345.057	11.387.619	9.328.504	10.723.529	12.393.746	8,6

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun namun mengalami perbaikan pada tahun 2022 yang meningkat mencapai 15,6 persen. Realisasi belanja terendah pada tahun 2022 terdapat pada komponen belanja tidak terduga (BTT) sebesar 1,2 persen dan belanja modal sebesar 74,75 persen. Rendahnya realisasi BTT ini dikarenakan tidak ada belanja untuk penanganan bencana yang terjadi pada tahun 2022 seperti yang dialokasikan pada tahun sebelumnya yang diperuntukkan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19.



Gambar III.5
Proporsi Komponen Belanja Daerah Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (persen)

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2018-2022 tergambar dalam tabel di bawah.

Tabel III.4
Target dan Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi (Miliar Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Penerimaan Pembiayaan						
1.	Penggunaan SiLPA	1.625,43	2.206,09	2.249,38	2.953,99	2.446,99	18,08
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan		1.625,43	2.206,09	2.249,38	2.953,99	2.446,99	18,08
B	Pengeluaran Pembiayaan						
1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2.	Penyertaan Modal Investasi Pemda	3,69	-	100,00	3,65	236,60	1.571,45
3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
4.	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-
5.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran		3,69	-	100,00	3,65	236,60	1.571,45
Pembiayaan Netto		1.621,74	2.206,09	2.149,38	2.950,34	2.210,39	15,51
SILPA		1.862,06	2.249,39	2.953,99	2.446,96	6.621,34	51,39

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen yaitu *pertama* penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, *kedua* adalah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, penerimaan pembiayaan daerah hanya diperoleh melalui SiLPA. Pengalokasian SiLPA cenderung meningkat dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2,45 triliun dan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp1,62 triliun.

Pengeluaran pembiayaan ditujukan untuk menambah penyertaan modal ke BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada penyertaan modal BUMD yang bertujuan peningkatan pendapatan daerah, pertumbuhan dan perkembangan

perekonomian daerah yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah dilakukannya penyusunan perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

3.1.2. Neraca Daerah

Salah satu instrumen analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah adalah Neraca Daerah. Neraca Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dijelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama periode Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,21 persen. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset yaitu Aset lancar yang pertumbuhannya yaitu sebesar 28,44 persen, Investasi Jangka Panjang sebesar 5,56 persen, Aset Tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,86 persen, dan Aset lainnya sebesar -17,02 persen.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami puncak peningkatan pada tahun 2020 namun di tahun 2021-2022 menurun, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut

sebesar -8,00 persen. Peningkatan kewajiban ini berasal dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, dengan posisi tertinggi pada tahun 2022 mencapai Rp36.965.235.426.502.

Tabel III.5
Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2018-2022

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Aset	33.931.464.699.549	33.873.059.601.255	34.958.123.211.320	33.527.012.177.542	38.192.578.636.232	3,21
1.1	Aset Lancar	4.711.582.578.883	3.613.788.154.289	4.404.786.818.401	3.849.951.495.437	8.769.685.792.184	28,44
1.2	Investasi Jangka Panjang	3.163.853.338.255	3.405.946.252.521	3.508.090.971.515	3.689.224.624.205	3.925.824.624.206	5,56
1.3	Aset Tetap	23.940.372.213.635	24.512.546.855.263	24.424.856.141.865	24.200.299.838.868	24.761.745.150.488	0,86
1.4	Aset Lainnya	2.115.656.568.776	2.340.778.339.182	2.620.389.279.539	1.787.536.219.032	735.323.069.355	(17,02)
2	Kewajiban	1.918.335.078.859	1.997.838.824.220	2.423.038.082.113	1.631.635.729.556	1.227.343.209.730	(8,00)
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	637.394.054.235	302.167.251.216	451.905.062.835	483.723.538.906	1.133.330.341.822	34,57
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	1.280.941.024.624	1.695.671.573.004	1.971.133.019.278	1.147.912.190.650	94.012.867.909	(21,24)
3	Ekuitas	32.013.129.620.690	31.875.220.777.035	32.535.085.129.207	31.895.376.447.986	36.965.235.426.502	3,89
3.1	Jumlah Ekuitas	32.013.129.620.691	31.875.220.777.035	32.535.085.129.207	31.895.376.447.986	36.965.235.426.502	3,89

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, Tahun 2023

Pertumbuhan berbagai komponen neraca daerah tersebut, kemudian dianalisis secara lebih mendalam melalui perhitungan tiga rasio. Secara rinci disajikan sebagai berikut:

A. Rasio Likuiditas

Analisis neraca daerah yang *pertama* adalah menggunakan rasio likuiditas. Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, serta rasio *quick* yang merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek. Adapun jumlah persediaan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel III.6
Jumlah Persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Persediaan (Rp.)
2018	2.476.747.485.202
2019	1.076.273.198.749
2020	1.329.801.349.854
2021	1.304.395.659.354
2022	1.636.323.326.408
Rata-rata pertumbuhan (%)	-2,36

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas melalui perhitungan rasio lancar dan rasio cepat, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik, meskipun dengan nilai yang tidak cukup besar. Rasio lancar memiliki rata-rata rasio sebesar 8,96, sedangkan rasio lancar memiliki rata-rata 6,05. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kewajiban jangka pendek yang selalu ada setiap tahun dan memiliki rata-rata pertumbuhan cukup sebesar 34,57 persen. Adapun kondisi rasio cepat yang lebih kecil dibanding dengan rasio lancar karena dipengaruhi oleh adanya pengurangan aset lancar oleh persediaan. Kondisi tidak signifikannya nilai rasio lancar maupun cepat perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kapasitas keuangan daerah, serta adanya kebijakan pengambilan kewajiban jangka pendek perlu memiliki langkah cermat.

Tabel III.7
Rasio Likuiditas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
1	Rasio Lancar	7,39	11,96	9,75	7,96	7,74	8,96
	(<i>Current Ratio</i>)						
2	Rasio Cepat	3,51	8,40	6,80	5,26	6,29	6,05
	(<i>Quick Ratio</i>)						

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

B. Rasio Solvabilitas

Analisis neraca daerah yang kedua dilakukan melalui perhitungan rasio solvabilitas. Solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dilakukan melalui perhitungan rasio total hutang terhadap total aset, serta rasio hutang terhadap modal. Perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.8
Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0,06	0,06	0,07	0,05	0,03	0,05
2	Rasio hutang terhadap modal	0,06	0,06	0,07	0,05	0,03	0,06

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki kondisi yang *solvable*. Perhitungan rasio solvabilitas berbeda dengan rasio likuiditas, dimana semakin kecil rasio solvabilitas maka kondisinya semakin baik atau *solvable*. Rasio total utang terhadap aset dan rasio utang terhadap modal memiliki kondisi yang fluktuatif dan cenderung menurun selama 2018 hingga 2022, hal ini menandakan bahwa kewajiban/hutang Pemerintah Provinsi terus mengalami penurunan.

C. Rasio Aktivitas

Analisis neraca daerah yang *ketiga* menggunakan perhitungan rasio aktivitas, yaitu melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas terdiri dari rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama atau hari yang diperlukan untuk melunasi piutang. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang dihitung dari 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Guna memperoleh nilai perputaran piutang maka pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, sedangkan rata-rata piutang diperoleh dari penjumlahan saldo awal piutang dengan saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Adapun nilai piutang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 hingga 2022 adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel III.9
Jumlah Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Piutang (Rp)
2018	372.006.311.051
2019	285.372.793.813
2020	88.568.656.755
2021	96.690.250.711
2022	88.888.864.636
Rata-rata pertumbuhan (%)	-22,79

Sumber: BPKAD Prov. KALTIM, 2023

Rasio aktivitas juga dihitung melalui rata-rata umur persediaan, yaitu berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan, karena dana persediaan dapat digunakan untuk pelayanan publik jika diperlukan. Rata-rata umur persediaan dihitung melalui 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran persediaan. Untuk memperoleh nilai perputaran persediaan, maka nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi dengan rata-rata nilai persediaan, dimana rata-rata nilai persediaan diperoleh melalui penjumlahan antara saldo awal dan akhir persediaan kemudian dibagi dua.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi. Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat, dan APBD yang sebagian besar hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan biaya operasional lainnya, maka kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD). IKFD dihitung melalui perhitungan nilai 1 (satu) dikurang perbandingan antara Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan dalam APBD. Berdasarkan kriteria penilaian tersebut, nilai IKFD Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2022 berfluktuatif masih berada dalam kategori mandiri karena berada diantara 0,50 – 0,75. Rata-rata IKFD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 adalah 0,5510 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan Pemerintah Daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel III.10
Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp.)	Total Pendapatan (Rp.)	IKFD
2018	4.853.761.786.447,00	10.671.715.200.487,20	0,5452
2019	5.204.311.550.792,00	11.775.086.836.200,40	0,5580
2020	4.831.866.273.077,00	9.987.385.879.199,02	0,5162

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp.)	Total Pendapatan (Rp.)	IKFD
2021	4.094.319.639.990,00	10.220.142.967.274,00	0,5994
2022	7.790.284.158.755,00	16.804.693.776.012,70	0,5364
Rata-rata	5.354.908.681.812,20	11.891.804.931.834,70	0,5510

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2023

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

realisasi dari kebijakan belanja Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2018-2022 dengan disajikannya analisis proporsi realisasi terhadap anggaran diuraikan pada subbab ini.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Realisasi rata-rata pertumbuhan Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2019-2022 sebesar 86,59 persen, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja operasi sebesar 86,32 persen dan Belanja modal sebesar 75,03 persen. Belanja Tidak Terduga sebesar 25,6 serta Belanja Transfer sebesar 96,86 persen.

Tabel III.11
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2022 (Juta Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2019			2020			2021			2022			Rata-rata Pertumbuhan
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	
5.01	BELANJA OPERASI	5.940.391	5.279.509	88,9	5.365.251	4.624.450	86,2	5.762.438	4.983.150	86,5	7.046.915	6.001.780	48,4	8,8
5.01.01	Belanja Pegawai	1.959.661	1.697.114	86,6	1.922.926	1.668.091	86,7	2.329.088	2.105.589	90,4	3.061.714	2.334.586	38,9	12,0
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	3.155.831	2.767.688	87,7	3.203.205	2.779.848	86,8	3.134.163	2.634.942	84,1	3.519.335	3.184.224	53,1	15,9
5.01.03	Belanja Hibah	815.124	806.274	98,9	223.050	163.933	73,5	280.469	228.665	81,5	413.142	432.032	7,2	6,8
5.01.04	Belanja Bantuan Sosial	9.775	8.433	86,3	16.071	12.578	78,3	18.718	13.955	74,6	52.725	50.939	0,8	98,0
5.02	BELANJA MODAL	1.825.021	1.207.816	66,2	1.331.587	1.066.606	80,1	1.880.880	1.514.465	80,5	2.648.734	1.980.010	16,0	6,8
5.02.01	Tanah	354	4	1,1	24	24	98,3	39.039	25.313	64,8	118.295	85.070	4,3	26.064,0
5.02.02	Peralatan dan Mesin	572.042	328.324	57,4	556.723	418.050	75,1	334.116	300.194	89,8	1.002.333	755.306	38,1	49,4
5.02.03	Bangunan dan Gedung	409.409	299.304	73,1	280.503	247.161	88,1	733.597	537.517	73,3	673.863	421.589	21,3	68,3
5.02.04	Jalan, jaringan dan irigasi	809.526	549.190	67,8	465.161	374.809	80,6	760.265	638.223	83,9	835.585	702.084	35,5	(3,6)
5.02.05	Aset tetap lainnya	33.690	30.994	92,0	29.175	26.561	91,0	13.864	13.218	95,3	18.657	15.961	0,8	20,4
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000	904	3,6	500.000	226.176	45,2	394.152	221.409	56,2	559.096	6.689	0,1	6.239,4
5.04	BELANJA TRANSFER	5.109.588	4.899.390	95,9	3.510.011	3.411.273	97,2	4.223.128	4.004.505	94,8	4.425.133	4.405.267	35,5	13,8
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	3.087.792	2.892.136	93,7	1.911.308	1.863.238	97,5	2.514.486	2.455.934	97,7	3.562.288	3.542.722	80,4	15,2
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.021.796	2.007.254	99,3	15.987.030	1.548.035	9,7	1.708.642	1.548.570	90,6	862.845	862.545	19,6	30,9
	Jumlah Belanja Daerah	12.900.000	11.387.619	88,3	10.706.850	9.328.504	87,1	12.260.598	10.723.529	87,5	14.679.878	12.393.746	83,5	8,6

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2023

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah. Juga berkenaan yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah mengalami Kalimantan meningkat. Proporsi selama periode tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya didalam APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Tabel 3.12 di bawah menyajikan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022.

Tabel III.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+ Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)/(d)*100%
1	2018	1.509.100.469.805	6.251.742.604.352	24,14
2	2019	1.697.114.398.082	6.488.228.331.290	26,16
3	2020	1.668.090.859.233	5.917.231.922.644	28,19
4	2021	2.105.588.712.918	6.722.674.890.921	31,32
5	2022	2.334.585.774.591	12.630.345.833.368	18,48

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan terdiri atas analisis sumber defisit riil dan analisis SiLPA. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA). pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Secara umum berikut dimuat analisis terhadap pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022:

1. Analisis Sumber Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, melihat penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran sehingga diperoleh SiLPA. Perkembangan defisit riil anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel III.13
Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah)

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi Pendapatan Daerah	10.671.715.200.487	11.775.086.836.200	9.987.385.879.199	10.220.142.967.274	16.804.693.776.013
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	9.345.057.063.691	11.287.763.575.489	9.811.126.773.547	10.723.529.422.431	12.393.745.833.368
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.690.000.000	100.000.000.000	150.000.000.000	3.650.000.000	236.600.000.000
A	Defisit riil	1.320.795.738.155	387.323.260.711	26.259.105.652	-507.036.455.157	4.174.347.942.645
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	541.264.815.482	1.862.060.553.637	2.249.383.814.348	2.953.994.981.532	2.446.993.522.588
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	541.264.815.482	1.862.060.553.637	2.249.383.814.348	2.953.994.981.532	2.446.993.522.588
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	1.862.060.553.637	2.249.383.814.348	2.275.642.920.000	2.446.958.526.375	6.621.341.465.233

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Secara riil kinerja pembiayaan daerah mempunyai peran penting pada tahun 2021 ketika APBD mengalami defisit, yakni menjadi penutup defisit belanja daerah. Penutup defisit tersebut terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Kondisi berbeda pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2022 yaitu ketika terjadi surplus riil, maka penerimaan pembiayaan justru semakin menambah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA).

2. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Apabila diperlukan maka dapat melakukan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya. Analisis SiLPA digunakan untuk melihat sumber perolehan SiLPA dan proporsi kontribusi yang diberikan. Perolehan SiLPA selama tahun 2018-2022 sebagian besar diperoleh penghematan belanja yang tidak terserap. Hal tersebut mengidentifikasi dua hal yaitu efektivitas dalam penghematan anggaran atau belum optimalnya penganggaran belanja daerah.

Tabel III.14
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	URAIAN	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	1.862.060.553.637,09	100	2.249.394.164.474,85	100	2.953.994.981.531,55	100	2.446.958.526.374,47	100	6.621.341.465.233	100
1	Pelampauan penerimaan PAD	671.213.410.729,68	36,05	761.138.459.645,48	33,84	962.908.164.357,40	32,60	714.975.704.413	29,22	1.923.288.927.943	29,05
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	428.839.322.047,00	23,03	-126.521.549.808,00	-5,62	561.995.865.128,00	19,02	(85.773.651.139)	-3,51	2.407.460.294.444	36,36
3	Pelampauan lain-lain pendapatan yang sah	3.239.511.626,40	0,17	2.530.090.000,00	0,11	755.762.000,00	0,03	1.178.055.000	0,05	4.403.080.000	0,07
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	783.752.936.309,01	42,09	1.512.381.490.649,37	67,24	1.378.345.540.172,75	46,66	1.537.068.884.628	62,82	2.286.132.220.232	34,53
5	Pelampauan pembiayaan netto	-24.984.627.075,00	-1,34	99.865.673.988,00	4,44	49.989.649.873,40	1,69	279.509.533.473	11,42	56.942.614	0,00

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari *pertama*, strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun ke depan. Hal ini merupakan kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan *kedua*, pada komponen keuangan daerah tersebut, baik itu pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, akan disertai proyeksi masing-masing jumlahnya untuk tiga tahun mendatang.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari strategi dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah strategi dan kebijakan mengenai beberapa komponen tersebut.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 30, terdapat 3 (tiga) sumber pendapatan daerah yang memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah yakni pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan nasional, dalam merumuskan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 akan mempertimbangkan kondisi dan asumsi dasar ekonomi makro nasional jangka menengah tahun 2024-2026 seperti pada tabel berikut.

Tabel III.15
Tabel Ekonomi Global dan Nasional

Indikator (1)	Tahun 2024 (2)	Tahun 2025 (3)	Tahun 2026 (4)
Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)	5,4-6,3	5,5-6,5	5,5-6,6
Inflasi (% ,yoy)	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.400- 14.800	14.400- 14.800	14.500- 14.900
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,24-7,90	6,25-8,10	6,27-8,29
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	70-90	70-90	70-90
<i>Lifting</i> Minyak Mentah (ribu barel per hari)	644-723	682-786	695-835
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.051-1.155	1.131-1.289	1.230-1.428

Sejalan dengan perbaikan perekonomian global dan nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memproyeksikan perkiraan pendapatan dan belanja daerah mempertimbangkan asumsi makro ekonomi yang pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan tumbuh pada tahun 2024 pada kisaran 4-5 % (yoy), pada tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 4-5 % (yoy) serta pada tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran 4-5 % (yoy). Selanjutnya inflasi pada 2024-2026 diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2023 namun berada di kisaran target $1 \pm 3\%$ (yoy).

Pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Penyusunan pendapatan dan belanja daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara akuntabel.

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Dalam tiga tahun ke depan sumber pendanaan pembangunan Kalimantan Timur masih mengandalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi serta bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih mengandalkan pada Pajak Daerah yang akan berkontribusi pada kisaran 87-88 persen yang diperoleh terutama melalui pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak

kendaraan bermotor. Selain itu pula, Lain-Lain PAD yang Sah juga diperkirakan akan terus meningkat pada kisaran 11-12 persen seiring dengan peningkatan kualitas dan cakupan layanan yang oleh rumah sakit pemerintah.

Pendapatan daerah Kalimantan Timur diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan dalam tahun 2024-2026 sebesar 9,17 persen. Proyeksi didasarkan pada perhitungan analisis data realisasi pendapatan daerah tahun 2018-2022, penetapan APBD tahun 2023. Peningkatan pendapatan daerah tersebut diupayakan berasal dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dengan pengoptimalan kinerja pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD.

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 hingga tahun 2026 serta pelaksanaan ketentuan Undang-undang No. 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan diberlakukan 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya UU HKPD, yaitu pada tanggal 5 Januari 2025. Melalui PERDA baru tersebut terdapat perubahan tarif PKB dan BBNKB dan kebijakan opsen sebagai pengganti bagi hasil Pemerintah Kabupaten/Kota serta penambahan objek pajak baru, yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Komponen Pendapatan Asli Daerah selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri. Strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi meliputi:
 - a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - c. Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. Melakukan kajian secara holistik untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
 - e. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
 - f. Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Prov. Kaltim, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
 - h. Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - i. Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
 - j. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - k. Melakukan *cleansing database* kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - l. Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
 - m. Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;
2. Komponen Pendapatan Transfer bagi Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). Oleh karena itu strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi dalam pengelolaan pendapatan transfer.

- b. Peningkatan jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ketika terjadi penurunan melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
 - c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam.
3. Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya. terutama dalam rangka bagi hasil pajak/retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
 - b. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat. terutama dalam hal dana transfer.

Tabel III.16
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Povinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2026 (Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2022	Target 2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi			
					2024	2025	2026	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
4	Pendapatan Daerah	16.804.693.776.013	14.621.856.687.106	-12,99	18.850.000.000.000	19.450.000.000.000	21.300.000.000.000	6,35
4.1	Pendapatan Asli Daerah	8.997.262.537.258	8.045.500.965.106	-10,58	9.510.000.000.000	10.335.000.000.000	11.235.000.000.000	8,69
4.1.01	Pajak Daerah	7.623.597.479.496	7.010.000.000.000	-8,05	8.300.000.000.000	9.050.000.000.000	9.860.000.000.000	8,99
4.1.02	Retribusi Daerah	19.980.889.916	20.052.388.240	0,36	14.080.152.940	15.035.442.940	16.226.520.210	7,35
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	310.262.666.522	232.740.891.298	-24,99	244.444.456.051	264.373.519.869	295.304.934.416	9,93
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.043.421.501.324	782.707.685.568	-24,99	951.475.391.009	1.005.591.037.191	1.063.468.545.374	5,72
4.2	Pendapatan Transfer	7.790.284.158.755	6.562.497.042.000	-15,76	9.311.932.777.866	9.086.929.921.314	10.036.927.064.173	4,02
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.790.284.158.755	6.562.497.042.000	-15,76	9.311.932.777.866	9.086.929.921.314	10.036.927.064.173	4,02
4.2.01.01	Dana Perimbangan	7.753.114.697.755	6.562.497.042.000	-15,36	9.301.932.777.866	9.076.929.921.314	10.026.927.064.173	4,02
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	6.329.446.113.503	5.021.968.600.000	-20,66	7.758.263.118.029	7.515.969.662.519	8.448.393.716.128	4,64
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	824.108.986.889	857.919.020.000	4,10	872.370.733.844	887.065.887.952	902.008.583.095	1,68

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2022	Target 2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi			
					2024	2025	2026	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	233.206.951.954	190.152.584.000	-18,46	192.713.322.771	195.308.546.390	197.938.719.256	1,35
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	366.352.645.409	492.456.838.000	34,42	478.585.603.223	478.585.824.454	478.586.045.693	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	37.169.461.000		-100,00	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.147.080.000	13.858.680.000	-19,18	28.067.222.134	28.070.078.686	28.072.935.828	0,01
4.03.01	Hibah	17.147.080.000	13.858.680.000	-19,18	28.067.222.134	28.070.078.686	28.072.935.828	0,01

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM & Bapenda Provinsi KALTIM, 2023

B. Rencana Belanja Daerah

Perhitungan belanja daerah harus dilakukan memperhatikan kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan daerah, karena pengalokasian belanja menjadi penentu berlangsungnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan melalui strategi perencanaan berbasis kinerja yang berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan. Disamping itu alokasi belanja daerah disusun dengan strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun proyeksi belanja daerah tahun 2022-2026 untuk mewujudkan tujuan pembangunan dimuat pada tabel di bawah.

Tabel III.17
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2026 (Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Target 2023	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
				2024	2025	2026	
BELANJA DAERAH	12.393.745.833.368	17.031.194.223.080	37,42	18.850.000.000.000	19.550.000.000.000	21.500.000.000.000	6,84
BELANJA OPERASI	6.001.780.302.943	7.414.552.277.521	23,54	7.494.703.938.134	7.403.443.212.922	7.620.621.396.411	0,86
Belanja Pegawai	2.334.585.774.591	2.796.363.758.450	19,78	2.706.860.688.397	2.824.334.148.475	2.894.942.502.187	3,42
Belanja Barang dan Jasa	3.184.224.252.607	4.207.685.257.571	32,14	4.000.643.249.737	4.189.109.064.447	4.300.678.894.224	3,69
Belanja Hibah	432.031.575.745	395.879.061.500	-8,37	767.200.000.000	350.000.000.000	375.000.000.000	-23,62
Belanja Bantuan Sosial	50.938.700.000	14.624.200.000	-71,29	20.000.000.000	40.000.000.000	50.000.000.000	62,50
BELANJA MODAL	1.980.010.052.268	4.097.300.945.741	106,93	4.673.473.395.866	6.565.358.618.108	7.845.501.480.348	29,99
BELANJA TIDAK TERDUGA	6.688.799.413	129.340.999.818	1.833,70	793.322.666.000	129.698.168.970	129.877.123.241	-41,76
BELANJA TRANSFER	4.405.266.678.744	5.390.000.000.000	22,35	5.888.500.000.000	5.451.500.000.000	5.904.000.000.000	0,44

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM. 2023

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya atau pembiayaan daerah adalah untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Tabel III.18
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2026 (Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Target 2023	Rata-rata pertumbuhan (%)	Proyeksi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
					2024	2025	2026	
6	Pembiayaan							
6.1	Penerimaan Pembiayaan							
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.446.958.526.374	2.578.143.312.894	5,36	500.000.000.000	600.000.000.000	700.000.000.000	18,33
6.2	Pengeluaran Pembiayaan							
6.2.02	Penyertaan modal daerah	236.600.000.000	168.805.776.920	-28,65	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	0,00

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, Tahun 2023

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

- 1) Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Perhitungan Proyeksi SiLPA tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan proyeksi realisasi besaran SiLPA periode tahun 2022 dan berdasarkan APBD serta APBD 2023.

Tabel III.19
Realisasi, Target dan Proyeksi SiLPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2026

Tahun	SiLPA (Rp)
2022	876.592.908.438
2023	2.578.143.312.894
2024	500.000.000.000
2025	600.000.000.000
2026	700.000.000.000

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, Tahun 2023

- 2) Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Perhitungan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat dikarenakan adanya pengertian belanja wajib dan belanja mengikat yang berbeda pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka proyeksi belanja yang wajib dan mengikat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 memiliki nilai yang lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan diproyeksikan kembali meningkat pada tahun 2025 dan 2026. Sedangkan untuk pembiayaan direncanakan sama untuk tahun 2024-2026 yang dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada penyertaan modal BUMD yang bertujuan peningkatan pendapatan daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.

Tabel III.20
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022-2026

No	Uraian	Target				Proyeksi					
		2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
A	Belanja Mengikat	3.076.713.870.381	26,75	2.796.363.758.450	16,42	2.706.860.688.397	14,36	2.824.334.148.475	14,45	2.894.942.502.187	13,46
1	Belanja Pegawai	3.076.713.870.381	26,75	2.796.363.758.450	16,42	2.706.860.688.397	14,36	2.824.334.148.475	14,45	2.894.942.502.187	13,46
B	Belanja Wajib	6.700.970.412.644	58,26	8.148.698.413.234	47,85	7.536.085.507.600	39,98	7.656.070.559.753	39,16	8.174.614.307.380	38,02
1	Pendidikan	2.886.349.164.653	25,09	3.372.478.018.684	19,80	2.361.411.131.655	12,53	2.773.362.061.971	14,19	3.268.168.599.553	15,20
2	Kesehatan	1.909.862.294.684	16,60	1.609.918.858.436	9,45	1.833.203.179.815	9,73	1.550.696.937.681	7,93	1.486.301.001.807	6,91
3	Infrastruktur	1.841.078.583.927	16,01	3.075.268.987.142	18,06	3.252.150.711.821	17,25	3.230.954.479.616	16,53	3.311.728.341.606	15,40
4	Peningkatan Kapasitas SDM	52.270.625.316	0,45	46.263.493.532	0,27	47.368.947.316	0,25	50.797.355.197	0,26	54.451.576.343	0,25
5	Penguatan APIP	11.409.744.064	0,10	44.769.055.440	0,26	41.951.536.994	0,22	50.259.725.288	0,26	53.964.788.069	0,25
C	Pengeluaran Pembiayaan	236.600.000.000	2,06	168.805.776.920	0,99	500.000.000.000	2,65	500.000.000.000	2,56	500.000.000.000	2,33
1	Penyertaan Modal Daerah	236.600.000.000	2,06	168.805.776.920	0,99	500.000.000.000	2,65	500.000.000.000	2,56	500.000.000.000	2,33

Sumber: Hasil proyeksi, Tahun 2023

3) Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas Riil merupakan perhitungan kemampuan keuangan daerah provinsi Kalimantan timur tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, perhitungan tersebut berdasarkan perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan sebagai penerimaan, serta pengeluaran yang terdiri atas Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel III.21
Realisasi, Target dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022–2026 (Rupiah)

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2022	Target 2023	Proyeksi		
				2024	2025	2026
4	Pendapatan Daerah	16.804.693.776.013	14.621.856.687.106	18.850.000.000.000	19.450.000.000.000	21.300.000.000.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	8.997.262.537.258	8.045.500.965.106	9.510.000.000.000	10.335.000.000.000	11.235.000.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	7.623.597.479.496	7.010.000.000.000	8.300.000.000.000	9.050.000.000.000	9.860.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	19.980.889.916	20.052.388.240	14.080.152.940	15.035.442.940	16.226.520.210
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	310.262.666.522	232.740.891.298	244.444.456.051	264.373.519.869	295.304.934.416
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.043.421.501.324	782.707.685.568	951.475.391.009	1.005.591.037.191	1.063.468.545.374
4.2	Pendapatan Transfer	7.790.284.158.755	6.562.497.042.000	9.311.932.777.866	9.086.929.921.314	10.036.927.064.173
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.790.284.158.755	6.562.497.042.000	9.311.932.777.866	9.086.929.921.314	10.036.927.064.173
4.2.01.01	Dana Perimbangan	7.753.114.697.755	6.562.497.042.000	9.301.932.777.866	9.076.929.921.314	10.026.927.064.173
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	6.329.446.113.503	5.021.968.600.000	7.758.263.118.029	7.515.969.662.519	8.448.393.716.128
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	824.108.986.889	857.919.020.000	872.370.733.844	887.065.887.952	902.008.583.095
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	233.206.951.954	190.152.584.000	192.713.322.771	195.308.546.390	197.938.719.256
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	366.352.645.409	492.456.838.000	478.585.603.223	478.585.824.454	478.586.045.693
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	37.169.461.000	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.147.080.000	13.858.680.000	28.067.222.134	28.070.078.686	28.072.935.828
4.03.01	Hibah	17.147.080.000	13.858.680.000	28.067.222.134	28.070.078.686	28.072.935.828
6.1	Penerimaan Pembiayaan	2.446.993.522.588	2.578.143.312.894	500.000.000.000	600.000.000.000	700.000.000.000

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2022	Target 2023	Proyeksi		
				2024	2025	2026
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.446.993.522.588	2.578.143.312.894	500.000.000.000	600.000.000.000	700.000.000.000
	Total Penerimaan Daerah	19.251.687.298.600	17.200.000.000.000	19.350.000.000.000	20.050.000.000.000	22.000.000.000.000
5	BELANJA DAERAH	12.393.745.833.368	17.031.194.223.080	18.850.000.000.000	19.550.000.000.000	21.500.000.000.000
5.01	BELANJA OPERASI	6.001.780.302.943	7.414.552.277.521	7.494.703.938.134	7.403.443.212.922	7.620.621.396.411
5.01.01	Belanja Pegawai	2.334.585.774.591	2.796.363.758.450	2.706.860.688.397	2.824.334.148.475	2.894.942.502.187
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	3.184.224.252.607	4.207.685.257.571	4.000.643.249.737	4.189.109.064.447	4.300.678.894.224
5.01.05	Belanja Hibah	432.031.575.745	395.879.061.500	767.200.000.000	350.000.000.000	375.000.000.000
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	50.938.700.000	14.624.200.000	20.000.000.000	40.000.000.000	50.000.000.000
5.02	BELANJA MODAL	1.980.010.052.268	4.097.300.945.741	4.673.473.395.866	6.565.358.618.108	7.845.501.480.348
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.688.799.413	129.340.999.818	793.322.666.000	129.698.168.970	129.877.123.241
5.04	BELANJA TRANSFER	4.405.266.678.744	5.390.000.000.000	5.888.500.000.000	5.451.500.000.000	5.904.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	236.600.000.000	168.805.776.920	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo					
6.2.02	Penyertaan modal daerah	236.600.000.000	168.805.776.920	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan					
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah					
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	Total Pengeluaran Daerah	12.630.345.833.368	17.200.000.000.000	19.350.000.000.000	20.050.000.000.000	22.000.000.000.000

Sumber: Hasil proyeksi, Tahun 2023

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan

Kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir baik yang disajikan pada Bab II dokumen RPD ini maupun evaluasi hasil RPJMD Provinsi Kalimantan Timur memberi masukan untuk perumusan permasalahan daerah. Permasalahan pembangunan Kalimantan Timur dapat dibagi 2 (dua) kelompok yaitu permasalahan terkait pencapaian indikator makro daerah dan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Rumusan permasalahan menjadi salah satu bagian yang dipertimbangkan dalam perumusan isu strategis daerah maupun pengambilan kebijakan di masa datang.

4.1.1. Permasalahan Terkait Indikator Makro Daerah

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan indikator makro daerah dirumuskan berdasarkan capaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD periode lalu atau kebijakan untuk mencapai target/kondisi yang lebih baik. Permasalahan disajikan dengan pengelompokan masalah pokok, masalah, dan akar masalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 4.1
Permasalahan Terkait Indikator Makro Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas daya saing sumber daya manusia	Belum meratanya taraf pendidikan masyarakat	Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan yang memadai secara merata
			Belum terpenuhinya kebutuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
			Belum optimalnya pemberian kemudahan akses perolehan layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu
		Belum meratanya derajat kesehatan masyarakat	Belum terpenuhinya kebutuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan secara merata
			Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas kesehatan rujukan untuk masyarakat secara merata

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>Belum optimalnya akses layanan kesehatan masyarakat di wilayah tertinggal dan perbatasan</p> <p>Belum terpenuhinya kebutuhan asupan gizi untuk seluruh bayi dan balita secara merata</p> <p>Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat</p>
		<p>Masih relatif tingginya angka pengangguran</p>	<p>Masih rendahnya kompetensi/ keterampilan angkatan kerja</p> <p>Ketidaksesuaian kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja</p> <p>Belum optimalnya pemenuhan layanan pendidikan vokasi/kejuruan untuk masyarakat siap kerja</p>
		<p>Masih relatif rendahnya daya saing perempuan dalam pembangunan</p>	<p>Belum optimalnya penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan</p> <p>Belum optimalnya kinerja lembaga pemberdayaan perempuan daerah</p>
<p>2.</p>	<p>Belum berkualitasnya pertumbuhan ekonomi daerah</p>	<p>Belum optimalnya diversifikasi ekonomi pada sektor non migas dan batubara</p>	<p>Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian dalam arti luas</p> <p>Masih rendahnya nilai tambah komoditas unggulan perkebunan serta komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>Belum optimalnya hilirisasi komoditas produk-produk unggulan daerah</p> <p>Masih rendahnya ekspor sektor non migas dan batu bara</p> <p>Kurangnya minat investor untuk berinvestasi pada sektor non migas dan batubara</p> <p>Masih rendahnya upaya pengembangan destinasi pariwisata</p>
		<p>Masih relatif tingginya angka kemiskinan</p>	<p>Masih tingginya ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat</p> <p>Belum terbukanya lapangan usaha produktif dan akses pemasaran bagi masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan</p> <p>Masih terbatasnya akses kemandirian ekonomi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>Masih terdapat hunian dengan kondisi tidak layak huni</p> <p>Belum optimalnya peran BUMDES dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa</p> <p>Belum optimalnya pengendalian stabilitas harga barang pokok dan penting</p>
		<p>Belum terpenuhinya pemerataan dan pemenuhan infrastruktur</p>	<p>Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas jalan dalam mendukung pendistribusian barang dan jasa</p> <p>Belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana perhubungan secara merata</p> <p>Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air</p> <p>Belum meratanya pemenuhan infrastruktur air minum</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>Masih terdapat kawasan permukiman yang masuk kategori kumuh</p> <p>Belum meratanya pemenuhan layanan ketersediaan listrik 24 jam</p>
<p>3.</p>	<p>Meningkatnya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup</p>	<p>Penurunan kualitas air, air laut, udara, dan lahan</p> <p>Meningkatnya laju kerusakan hutan akibat aktivitas ekonomi dan bencana</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan</p>	<p>Belum optimalnya pengendalian terhadap penyebab kerusakan dan sumber pencemaran lingkungan</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan</p> <p>Belum optimalnya perlindungan hutan dan pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) dan konservasi provinsi</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan Rehabilitasi hutan dan lahan serta belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> <p>Belum optimalnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur ketenagalistrikan terutama di wilayah perdesaan</p> <p>Belum tersedianya sarana pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			terbarukan dengan daya yang optimal
4.	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel dan berorientasi layanan publik yang didukung oleh ASN berAKHLAK	Belum optimalnya pemenuhan dan penerapan standar pelayanan Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi Belum optimalnya implementasi sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian Masih kurangnya ASN yang memiliki kompetensi Belum optimalnya pelaksanaan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian intern pemerintah

Sumber: Hasil analisis, 2023

4.1.2. Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur dengan berbagai indikator yang menggambarkan kinerja. Berdasarkan realisasi kinerja dari berbagai indikator tersebut maka diketahui indikator apa saja dari masing-masing urusan yang sudah tercapai atau belum tercapai. Kinerja yang belum tercapai atau masih membutuhkan upaya untuk mencapai dan/atau mempertahankan kinerja menjadi masukan untuk merumuskan permasalahan pembangunan.

Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang dipilah berdasarkan masalah pokok, masalah, dan akar masalah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.2
Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pendidikan		
Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pada SPM di bidang Pendidikan Menengah dan Khusus serta kebudayaan	Belum optimalnya pencapaian APM, APK dan APS SMA/SMK/Khusus di beberapa wilayah Kalimantan Timur	Belum terpenuhinya sarana, prasarana untuk wilayah yang telah diperhitungkan dengan banyak jumlah penduduk usia sekolah menengah dan pendidikan khusus di wilayah tersebut
		Belum terpenuhi salah satu indikator pemenuhan standar pelayanan minimal untuk sekolah menengah yaitu pemenuhan ruang kelas untuk sekolah yang kekurangan ruang kelas baru sehingga ketimpangan antara jumlah rombel dan ruang kelas dapat terpenuhi
Kesehatan		
Status gizi dan kesehatan ibu dan anak belum optimal	Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi	Masih rendahnya kualitas skrining pada ibu hamil maupun bayi baru lahir yang masih belum sesuai standar
		Belum optimalnya Sistem Rujukan, sehingga proses koordinasi antar tenaga kesehatan terhambat
		Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan Antenatal dan Neonatal
	Masih rendahnya pemantauan pertumbuhan terkait <i>stunting</i> , <i>wasting</i> dan <i>underweight</i>	Masih kurang optimalnya alkes deteksi dini <i>Stunting</i> di Posyandu
		Kurangnya pemanfaatan Buku Konsultasi Ibu dan Anak (KIA) sebagai pemantauan pertumbuhan
	Belum optimalnya implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga pola makan dengan gizi seimbang dan olahraga
Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar	Belum optimalnya ketersediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan	Masih sulitnya/terjadinya keterlambatan pendistribusian obat dan vaksin ke daerah
		Keterbatasan penyediaan obat program dan vaksin oleh Pusat
		Terdapat banyak vaksin yang <i>expired date</i>
Masih tingginya beban penyakit menular dan penyakit tidak menular	Belum optimalnya penemuan kasus penyakit menular	Masih kurangnya alat kesehatan dan logistik untuk pemeriksaan diagnostik (TCM dan Mikroskop)
		Belum maksimalnya sistem pencatatan dan pelaporan penyakit menular
		Belum optimalnya aplikasi pelaporan dengan sistem informasi pelayanan faskes
Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan	Belum optimalnya pendayagunaan dan pemerataan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	Belum optimalnya sistem Perencanaan Kebutuhan (Renbut) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan formasi (kebutuhan) tenaga kesehatan
		Masih rendahnya insentif tenaga kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya dokter yang ditugaskan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)
	Belum terpenuhinya tenaga 4 Spesialis Dasar dan 3 Penunjang pada RSUD milik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Belum optimalnya sistem pengembalian/pendayagunaan Dokter Spesialis yang telah selesai pendidikan (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
		Kurangnya pendayagunaan dokter spesialis yang berlokasi di Kaltim
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar	Konektivitas dan aksesibilitas kawasan strategis provinsi belum terhubung dengan baik	Kualitas jaringan jalan provinsi belum optimal yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kerusakan jalan
		Masih banyak kendaraan yang melebihi kapasitas jalan
		Kelengkapan fasilitas jalan belum memadai
		Kelas jalan belum sesuai dengan peruntukan
		Sistem jaringan jalan belum tertata dengan baik
		Belum optimalnya sinkronisasi fungsi jalan
		Belum lengkapnya bukti sah kepemilikan lahan
	Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air	Belum optimalnya infrastruktur penyedia air baku
	Belum optimalnya dan masih rendahnya pengendalian daya rusak air	Masalah sosial dan lahan
		Belum optimalnya sistem pengendali banjir
		Masih rendahnya ketersediaan sistem pengendali banjir
		Pendangkalan dan penyempitan sungai serta bangunan pengendali yang tidak berfungsi optimal
		Penanganan pantai kritis belum optimal
	Penyelenggaraan penataan ruang belum optimal	Belum optimalnya sinkronisasi dokumen perencanaan penataan ruang
		RTR belum sepenuhnya menjadi acuan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
		Terdapat beberapa dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan
Masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pemanfaatan ruang		
Belum optimalnya penyediaan infrastruktur air minum skala regional	Kaltim belum memiliki lembaga pengelola SPAM Regional	
	Masih ada kabupaten/kota yang kekurangan sumber suplai air baku untuk air minum yang handal, baik dari sisi kuantitas, kontinuitas, dan kualitas	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi serta yang mendukung kawasan strategis provinsi	Masih terdapat permukiman di kawasan strategis provinsi yang belum terpenuhi kebutuhan infrastruktur dasarnya
	Belum tersedianya infrastruktur pengelola air limbah domestik skala regional	<p>Kaltim belum memiliki infrastruktur pengelola air limbah lintas Kabupaten/Kota</p> <p>Belum tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan pada lokasi yang berpotensi dibangun infrastruktur pengelola limbah skala regional</p> <p>Pengelolaan air limbah domestik dan sanitasi masih sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten/Kota</p>
	Belum tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah skala regional	<p>Belum tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan pada lokasi yang berpotensi dibangun infrastruktur pengelola sampah skala regional</p> <p>Belum tumbuhnya kesadaran penduduk untuk melakukan efisiensi serta pengurangan volume sampah domestik</p>
	Belum optimalnya kondisi bangunan gedung yang menjadi kepentingan strategis provinsi	<p>Masih terdapat gedung yang menjadi kepentingan strategis provinsi yang mengalami penurunan fungsi dan kelayakan</p> <p>Kebutuhan akan bangunan gedung yang mendukung kepentingan strategis provinsi belum terpenuhi secara optimal</p>
	Belum optimalnya kondisi bangunan cagar budaya level provinsi	Terdapat bangunan serta lingkungan cagar budaya yang kondisinya belum memadai dari sisi fisik dan tata bangunan dan lingkungan
	Belum optimalnya pemenuhan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Masih tingginya angka tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang belum tersertifikasi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Beberapa lokasi permukiman masih termasuk dalam kategori kumuh	<p>Beberapa permukiman kumuh kewenangan provinsi belum memiliki sarana prasarana yang memenuhi standar teknis dan kelaikan fungsi</p> <p>Penanganan kumuh belum menyasar aspek yang menjadi faktor penyebab kekumuhan</p> <p>Penanganan kekumuhan masih fokus pada aspek fisik dan tata lingkungan</p> <p>Masih terdapat bangunan rumah yang tidak memenuhi standar teknis dan kelaikan fungsi</p> <p>Belum tersedia data komprehensif terkait lokasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pemenuhan SPM bidang perumahan level provinsi masih belum optimal	Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan/ kelengkapan data dan administrasi untuk pemenuhan SPM bidang perumahan level provinsi Belum optimalnya koordinasi lintas sektor terkait pemenuhan SPM bidang perumahan level provinsi Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan untuk masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi maupun untuk kebutuhan korban bencana level provinsi
	Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk permukiman masih belum optimal	Belum tersedianya perencanaan komprehensif terkait kebutuhan penyediaan PSU permukiman Terdapat permukiman yang mengalami penurunan fungsi akibat belum tersedianya PSU yang memadai
Trantibumlinmas		
Belum optimalnya pelayanan trantibumlinmas	Belum maksimalnya penegakan perda dan perkara di lapangan	Kurangnya tenaga anggota personil baik PPNS maupun anggota di lapangan dan ketersediaannya sarana dan prasarana Kurangnya minat ASN Sarjana S1 untuk menjadi PPNS PPNS masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya Kurangnya peningkatan kapasitas SDM baik PPNS, anggota personil Satpol PP dan Satlinmas Kurangnya keterlibatan Perangkat Daerah pemangku perda dan perkara didalam pelaksanaan aksi penegakan perda dan perkara
Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan tingginya tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan (GALKARHUTLA)	Belum maksimalnya sistem kerja penanggulangan bencana	Rendahnya tata kerja, kelola BPBD dan fasilitasi hubungan kerja sama antar Lembaga, Mitra dan Masyarakat
	Belum maksimalnya sistem penanganan dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Rendahnya penanggulangan pada tingkat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, pelayanan kedaruratan dan logistik serta pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pelayanan pengendalian operasi penanggulangan bencana Rendahnya kualitas SDM aparatur Minimnya sapras penanggulangan bencana Rendahnya sistem pengawasan dalam penanggulangan bencana
Sosial		
Belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belum optimalnya fungsi rehabilitasi sosial dalam pemulihan dan pengembangan diri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti
	Belum optimalnya pemberdayaan sosial	Belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial	Belum maksimalnya proses verifikasi dan validasi data ditingkat kab/kota, sehingga bantuan sering tidak tepat sasaran Belum maksimalnya keberdayaan berusaha bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah tergraduasi baik berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
	Belum optimalnya penanganan fakir miskin	Belum maksimalnya akselerasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang ditangani provinsi, kab dan kota Belum optimalnya penanganan fakir miskin khususnya wilayah pesisir dan pulau terluar disebabkan karena faktor geografis/luas wilayah Belum optimalnya proses pendampingan Program Penanganan Kemiskinan di tingkat Kab/Kota
Tenaga Kerja		
Masih rendahnya kesempatan kerja dan penempatan kerja bagi para pencari kerja	Belum maksimalnya informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja	Kurang dukungan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Belum optimalnya dukungan layanan yang mempertemukan pencari kerja dengan pasar kerja
Belum optimalnya kualitas hubungan industrial	Belum optimalnya penerapan tata kelola kerja (perusahaan) yang layak	Masih kurangnya pemahaman baik oleh pekerja maupun perusahaan terkait dengan syarat kerja Masih kurangnya pemahaman pekerja dalam memahami aturan ketenagakerjaan Belum optimalnya pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan industrial terkait syarat-syarat kerja
Belum optimalnya penerapan norma ketenagakerjaan dan norma K3 di tempat kerja	Belum optimalnya ketaatan perusahaan pada norma ketenagakerjaan dan norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja	Sulitnya jangkauan akses geografis wilayah Kaltim Kurang kooperatifnya peran perusahaan dalam pelaksanaan pemeriksaan
Belum optimalnya pengembangan di kawasan transmigrasi	Belum ada fokus lintas sektor dalam mendukung pengembangan kawasan transmigrasi	Masih kurangnya dukungan pelatihan, ketersediaan sarana dan prasarana pada kawasan transmigrasi.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belum optimalnya kesetaraan gender	Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sumbangan pendapatan per kapita	Kurang sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kurang pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi
Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kurang pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk	Masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kekerasan dalam rumah tangga	Masih adanya stigma bahwa kasus kekerasan merupakan privasi
	Kuranginya sosialisasi kepada masyarakat terhadap perlindungan perempuan	Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian terkait perlindungan Perempuan Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan
Belum optimalnya KIE pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga	Masih kurangnya advokasi dan sosialisasi di kabupaten/kota	Masih rendahnya pemahaman terhadap ketahanan keluarga Masih tingginya kesenjangan antar pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
	Masih rendahnya fleksibilitas peran dalam keluarga	Masih rendahnya pemahaman terhadap pengendalian penduduk dan KB Masih kurangnya pelatihan kepekaan dan kepedulian terhadap anggota keluarga
Belum maksimalnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kab/Kota	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan	Belum maksimalnya sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan masyarakat Masih rendahnya laporan penduduk pendatang dari luar daerah Belum terstandarnya layanan <i>online</i> di kab/kota
	Belum optimalnya pengurusan dokumen	Belum optimalnya sarana peralatan Disdukcapil dalam mendukung aplikasi terbaru Masih minimnya pelayanan Adminduk dalam pelayanan di Kab/Kota
Perhubungan		
Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur perhubungan	Tingkat kecelakaan lalu lintas masih tinggi	Masih tingginya tingkat kerusakan jalan Belum terdapat fasilitas keselamatan jalan di beberapa ruas jalan Regulasi terkait kewenangan pemasangan fasilitas jalan masih belum optimal diterapkan Koordinasi antar <i>stakeholders</i> belum maksimal Geometrik jalan yang belum sesuai Keterampilan pengemudi yang belum memadai Kondisi kendaraan yang tidak layak
	Belum optimalnya distribusi barang dan penumpang	Prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan belum memadai Sarana dan prasarana transportasi belum optimal Regulasi terkait pembangunan dan pengelolaan prasarana transportasi belum terlaksana dengan baik Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal masih rendah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Lingkungan Hidup		
Terjadinya penurunan kualitas air, air laut, udara dan lahan	Belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Belum optimalnya upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Belum optimalnya upaya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
	Belum optimalnya perencanaan lingkungan hidup	Belum optimalnya pendampingan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota
		Belum tersusunnya penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPD/RPJMD
	Belum optimalnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Belum optimalnya upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) di luar kawasan hutan dan taman keanekaragaman hayati
	Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan limbah B3 skala provinsi
	Belum optimalnya pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Masih rendahnya pemahaman masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
	Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Belum optimalnya hasil dari Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Banyaknya pengaduan lingkungan hidup	Banyaknya pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya penanganan sampah darat dan laut	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Belum optimalnya pengelolaan desa secara menyeluruh	Belum optimalnya pembangunan potensi kawasan perdesaan	Belum meratanya kualitas pembangunan wilayah perdesaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya peningkatan kapasitas BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa	Masih terbatasnya pengembangan ekonomi perdesaan melalui BUMDes
	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan belum berjalan dengan baik	Masih rendahnya Kompetensi SDM desa dan anggota BPD rata-rata masih rendah, jumlah perangkat sebagian desa belum terpenuhi, prasarana dan sarana pemdes dan kelurahan belum memadai
	Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas kemasyarakatan desa	Masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat
	Belum optimalnya pembangunan potensi kawasan perdesaan	Masih terbatasnya potensi desa pada pembangunan kawasan perdesaan, masih terbatasnya pengembangan lembaga masyarakat seperti BKAD dan BUMDES
		Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
Komunikasi dan Informatika		
Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal	Belum semua layanan (publik dan pemerintah) terdigitalisasi	Kurangnya SDM bidang TIK
	Masih banyak PD yang mengadakan infrastruktur TIK masing-masing	Kurangnya kapasitas peningkatan infrastruktur TIK
	belum maksimalnya penerapan SPBE di PD	Belum diaktifkannya forum SPBE
	Belum terintegrasi aplikasi pada beberapa PD	Belum terinventarisasi aplikasi layanan PD
Tata kelola keamanan informasi yang belum optimal	Tingkat keamanan informasi masih rendah	Kurangnya SDM urusan Persandian
Belum optimalnya layanan informasi publik	Kurangnya penyebaran informasi program dan kebijakan Pemprov Kaltim ke seluruh wilayah Kaltim	Kurangnya penyebaran informasi program dan kebijakan Pemprov Kaltim ke seluruh wilayah Kaltim
Penyediaan data statistik sektoral dilingkungan pemda yang belum berkualitas	Data statistik sektoral yang tersedia kurang lengkap dan akurat	Kurangnya kemampuan dan keterampilan SDM pengelola data pada masing-masing produsen data
Koperasi dan UKM		
Rendahnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya kualitas usaha koperasi	Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi
		Rendahnya kualitas SDM koperasi
		Lemahnya sistem pengawasan koperasi
	Rendahnya produktivitas UKM	Minimnya pelaku UKM dalam pemanfaatan pemasaran digital
		Menurunnya aktivitas ekonomi UKM semasa pandemi COVID-19

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Rendahnya daya saing produk UKM Kurangnya informasi permodalan UKM dalam menjalankan usahanya
Penanaman Modal		
Belum optimalnya realisasi nilai investasi pada sektor sekunder dan tersier	Belum optimalnya kondusivitas investasi industri non migas dan non batubara	Belum terintegrasinya promosi investasi yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota
		Belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya SDM
		Masih kurangnya ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi
		Belum optimalnya komitmen perizinan
		Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal
Kepemudaan dan Olahraga		
Masih rendahnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Belum berkembangnya daya saing generasi pemuda	Masih kurangnya peluang usaha sesuai dengan tuntutan zaman bagi pemuda Kaltim dalam mendukung IKN
		Perilaku generasi muda yang menjurus kepada pengguna/pengedar NAPZA dan Kriminal Remaja
		Masih kurangnya kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan (kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan) pemuda
	Masih rendahnya prestasi olahraga	Masih lemahnya kualitas SDM yang menangani keolahragaan sehingga beberapa prestasi atlet pada <i>event</i> Olahraga seperti PON dan <i>Seagames</i> cenderung menurun dari tahun ke tahun
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya olahraga bagi kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup
		Pembina, pengurus, pelatih dan insan olahraga kurang profesional, baik ditingkat provinsi, kab/kota serta klub cabor
Perpustakaan		
Masih rendahnya pelayanan perpustakaan	Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca masyarakat	Masih kurangnya minat baca bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas di Badan Perpustakaan
		Sarpras yang telah dibangun masih kurang optimal terhadap penyelenggaraan minat baca/literasi
		Belum optimalnya aplikasi secara digital yang diterapkan oleh Badan Perpustakaan
Kelautan dan Perikanan		
Lambatnya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Masih rendahnya produksi perikanan budidaya	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perbenihan dan produksi perikanan budidaya
		Penanggulangan hama dan penyakit ikan belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pengembangan komoditas budidaya unggulan belum maksimal Ketergantungan induk unggulan dari daerah lain Masih rendahnya produksi perikanan tangkap Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil Penyaluran BBM subsidi untuk nelayan masih belum optimal dikarenakan masih banyaknya kapal perikanan tangkap yang belum memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap Belum optimalnya pengembangan nilai tambah dan pemasaran produk kelautan dan perikanan Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern Masih banyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil perikanan yang belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Minimnya kerja sama bidang usaha perikanan Inovasi peningkatan produk hasil perikanan belum berkembang Belum terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Belum optimalnya pengelolaan Kawasan Konservasi Kelautan Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
Pariwisata		
Masih rendahnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata Belum maksimalnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Sarana dan prasarana serta amenities pendukung pariwisata belum dibangun/dikembangkan secara maksimal Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata tiap destinasi Belum maksimalnya kerja sama dan sinergitas antara <i>stakeholder</i> pariwisata (mitra kerja, kab/kota, dll) Belum optimalnya pengembangan sub sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata Belum optimalnya dukungan dan pembinaan multi sektor kepada para pelaku ekonomi kreatif Belum fokus pada nilai kekhasan daerah dalam pengembangan potensi ekraf
Pangan		
Belum optimal pemenuhan pangan dalam mendukung IKN	Tingkat ketersediaan dan diversifikasi pangan masih belum optimal	Stabilisasi pasokan pangan masih belum optimal Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang masih kurang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)		
Lambatnya transformasi Ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Rendahnya produktivitas tanaman pangan (padi) dan hortikultura	Ketersediaan lahan pertanian yang berkurang
		Kurangnya infrastruktur pendukung pertanian
		Tingginya biaya produksi TPH
		Masih kurangnya ketersediaan benih unggul tanaman pangan dan hortikultura
		Belum optimalnya penanganan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura
		Minat kaum milenial menjadi petani semakin berkurang
Pertanian (Peternakan)		
Lambatnya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Populasi dan produktivitas ternak masih rendah	Ketersediaan bibit ternak lokal masih kurang
		Penerapan <i>Good Breeding Practice</i> dan <i>Good Farming Practice</i> belum optimal
		Keterbatasan prasarana pendukung usaha peternakan
		Ketersediaan pakan ternak berkualitas masih kurang
		Masih munculnya penyakit hewan menular strategis dan zoonosis
	Terbatasnya kawasan peternakan	
	Daya saing produk peternakan masih rendah	Hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah
Manajemen pemasaran produk peternakan belum optimal		
Pertanian (Perkebunan)		
Lambatnya transformasi ekonomi di sektor perkebunan menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Rendahnya produktivitas kebun rakyat	Infrastruktur di areal perkebunan yang tidak memadai
		Tingginya biaya produksi komoditas perkebunan tidak efisien
		Masih terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu bersertifikat dalam daerah dan sumber benih untuk mendorong pembangunan kebun
		Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi budidaya pekebun
	Permasalahan pemasaran dan lambat pembangunan industri hilir komoditas perkebunan	Tidak kontinu dan tidak padunya proses fasilitasi dan pendampingan kegiatan hulu hilir usaha perkebunan
		Rendahnya kualitas olahan hasil perkebunan
		Akses pemasaran yang masih konvensional
Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan penurunan emisi dalam	Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS	
	Pengelolaan ANKT di area perkebunan belum diterapkan secara konsisten	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pembangunan perkebunan	Pemanfaatan limbah kelapa sawit (Biomassa dan POME) untuk pengembangan Bioenergi masih terbatas
Energi dan Sumber Daya Mineral		
Belum meratanya infrastruktur ketenagalistrikan	Infrastruktur jaringan PLN hanya terpusat pada wilayah padat penduduknya	<p>Kendala dalam pemerataan infrastruktur penyaluran tenaga listrik</p> <p>Kendala masyarakat tidak mampu dalam membiayai</p> <p>Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan kerja sama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.</p> <p>Masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik PLN karena jauhnya jangkauan dari jaringan PLN, sehingga perlu dibangun infrastruktur listrik dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan yang PLTS terpusat sehingga masyarakat dapat menikmati listrik 24 jam</p> <p>Masih adanya pelaku usaha ketenagalistrikan yang belum memahami perizinan usaha ketenagalistrikan dan kurangnya kesadaran tentang keselamatan ketenagalistrikan (K2)</p>
Belum optimalnya peningkatan pembangkit listrik dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	<p>Belum optimalnya pencapaian bauran EBT sektor kelistrikan</p> <p>Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi</p>	<p>Belum optimalnya cakupan pelayanan listrik pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan</p> <p>Masih rendahnya pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil</p> <p>Belum optimalnya pembinaan, perusahaan dan pengendalian perusahaan pemanfaatan ketenagalistrikan</p> <p>Belum ditetapkannya regulasi daerah tentang rencana umum energi daerah</p> <p>Masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan, dan belum menjadi prioritas pemerintah dibandingkan energi fosil</p> <p>Masih rendahnya persentase konsumsi energi di Kaltim dari sumber energi baru terbarukan</p>
Belum tersedianya hasil evaluasi zona konservasi air tanah pada cekungan air	Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang belum optimal	<p>Masih terjadinya kekurangan air bersih di wilayah Kaltim</p> <p>Belum ditetapkannya cekungan air tanah, yang disebabkan keterbatasan kajian identifikasi potensi air tanah</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
tanah dalam daerah provinsi		<p>Belum ditetapkan zona konservasi air tanah, dipengaruhi oleh kajian pendataan zona konservasi air tanah yang terbatas</p> <p>Belum tersedianya <i>database</i> dan sistem informasi hidrogeologi</p> <p>Masih terdapat pengguna air tanah yang belum memiliki ijin pemanfaatan air tanah, dan pemegang ijin pemanfaatan air tanah yang belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan</p> <p>Belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) dalam rangka peningkatan pendapatan bersumber dari pemanfaatan air tanah</p>
Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Masih banyak perusahaan pertambangan yang belum menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik, sesuai dengan perundangan yang berlaku, baik secara administratif maupun teknis	<p>Belum optimalnya inventarisasi atas pengumpulan, penetapan, pengelolaan data dan informasi WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil</p> <p>Belum optimalnya kegiatan penerbitan IUP dan perpanjangan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, serta pengelolaan WIUP Pertambangan Mineral Logam dan Batubara untuk membantu kegiatan pengawasan dari Kementerian ESDM maupun kepolisian</p> <p>Belum terwujudnya perusahaan pertambangan yang melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik untuk kegiatan pertambangan mineral logam dan batubara dan kegiatan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>Belum optimalnya kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagai acuan penetapan harga patokan MBLB</p>
Kehutanan		
Belum terwujudnya diversifikasi ekonomi sub sektor kehutanan	Belum optimalnya pemanfaatan hutan yang berkelanjutan	<p>Belum optimalnya pemanfaatan hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</p> <p>Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/Tahun</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</p>
Belum terwujudnya penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	Belum optimalnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan	Penyusunan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi yang belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yang masih belum optimal</p> <p>Terhambatnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan</p> <p>Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bibit tanaman melalui sertifikasi sumber benih</p> <p>Belum optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat</p>
	Belum optimalnya pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) dan konservasi provinsi	Belum optimalnya pengelolaan Tahura provinsi
		Belum optimalnya perlindungan tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi
		Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan multi-pihak kawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
	Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penyusunan rencana pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu multi pihak yang belum terintegrasi
	Belum optimalnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan	Masih kurangnya kuantitas dan kapasitas penyuluh kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
Perdagangan		
Belum optimalnya ekspor non migas dan batubara	Ekspor Kaltim masih didominasi oleh produk Primer (migas dan batubara)	Terbatasnya ekspor komoditi dan produk non migas non batubara
		Belum optimalnya pemanfaatan/ peluang ekspor langsung di Kalimantan Timur
	Rendahnya daya saing produk yang dipasarkan	Terbatasnya jangkauan pemasaran komoditi dan produk ekspor
		Minimnya produksi dan sarana distribusi bahan pokok
		Belum optimalnya fasilitas sistem distribusi perdagangan
		Belum optimalnya kerja sama perdagangan
Perindustrian		
Belum optimalnya pembangunan industri berbasis komoditi unggulan	Belum maksimalnya daya saing dan daya tarik investasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri	Kurang siapnya ketersediaan lahan industri
		Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri dan penunjang
		Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, dan komitmen antar organisasi
		Kinerja kelembagaan dalam membangun dan mengelola kawasan belum optimal
		Belum optimalnya penerapan dan pengawasan standar produk

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia industri	<p>Kurangnya kerjasama lembaga pendidikan/pelatihan dan pelaku industri dalam pemenuhan tenaga kerja industri yang dibutuhkan</p> <p>Masih rendahnya kapasitas keterampilan dan penguasaan teknologi</p> <p>Belum optimalnya inovasi dan kreativitas</p>	
	Belum kuatnya struktur industri di daerah	<p>Integrasi industri hulu dan hilir antar sektor belum optimal</p> <p>Belum terbangunnya basis data sektor industri</p> <p>Belum optimalnya pemberdayaan industri melalui dukungan pengembangan kompetensi pengembangan ekosistem bisnis dan penyediaan fasilitas</p>	
	Sekretariat Daerah		
	Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi simplikasi dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintah	Belum optimalnya kinerja aparatur dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan	<p>Kurangnya pemahaman secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya</p> <p>Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Biro Pemerintahan dan Biro Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Data yang tersedia belum lengkap, akurat dan valid</p> <p>Belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan</p> <p>Belum optimalnya koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran di Perangkat Daerah</p>
		Belum optimalnya target penawaran kerja sama	Kurangnya pemahaman penawaran kerja sama secara mendalam
		Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum secara kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum	Kurangnya pemahaman secara mendalam oleh ASN maupun Perangkat Daerah dalam menelaah ketentuan perundang-undangan dan produk-produk Hukum
Belum optimalnya pengendalian pembangunan		Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.	
Belum optimalnya penerapan kebijakan dan prinsip serta ketaatan kode etik pengadaan barang dan jasa		Kurangnya penerapan prinsip, kode etik, dan kebijakan pengadaan barang dan jasa	
Belum optimalnya Penerapan SAKIP		Masih kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja sebagai budaya kerja	
		Belum optimalnya monitoring dan evaluasi guna perbaikan kinerja	
Belum optimalnya kualitas layanan administrasi Pimpinan		Belum optimalnya penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Belum optimalnya penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Sekretariat DPRD		
Belum optimalnya pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Belum optimalnya standar layanan yang diberikan kepada DPRD	Kurang koordinasi baik dari internal maupun eksternal sehingga berpengaruh terhadap kinerja DPRD
		Belum optimalnya pelayanan yang diberikan terhadap kegiatan DPRD
		Kuranginya pemahaman terkait prosedur administrasi keuangan
	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Minimnya pemahaman terhadap teknologi informasi sehingga belum banyak mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD
		Lamban dalam memberikan informasi ter-update/perubahan kepada Anggota DPRD terkait regulasi maupun jadwal kegiatan kedewanan
		tidak adanya teknologi informasi internal terkait verifikasi SPJ kegiatan Anggota DPRD yang sudah selesai
	Belum optimal pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum tersedianya <i>nursery room</i> dan <i>play ground</i>
	Fasilitas peralatan kerja di ruangan anggota DPRD sering rusak	
	Fasilitas ruang kerja Anggota DPRD yang sudah puluhan tahun terkadang mengalami kerusakan	
Perencanaan		
Belum optimalnya capaian sasaran pembangunan daerah	Belum optimalnya pelaksanaan proses perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah, serta sinergi pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan belum optimal
		Belum optimalnya pemanfaatan data dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		Adanya perbedaan periode dokumen rencana pembangunan jangka menengah antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menyulitkan untuk sinergi prioritas dan target pembangunan.
		Perbedaan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota sebab pada sebagian kabupaten/kota masih belum melakukan penyesuaian terhadap RPJMD dan RKPDP Provinsi dikarenakan belum menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (bupati/walikota) sehingga sinergi perencanaan dari provinsi terhadap kabupaten/kota belum terlaksana secara optimal.
Keuangan		

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Laporan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang mencapai WTP	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Belum optimalnya identifikasi, Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah
		Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah
		Sering terjadinya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat
Belum optimalnya pendapatan asli daerah	Belum optimalnya pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Belum optimalnya penyusunan perencanaan pendapatan daerah
		Belum optimalnya validasi atas pajak daerah yang bersifat <i>Self Assessment</i>
	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan penatausahaan Penerima Pendapatan Asli Daerah berbasis digitalisasi	Masih tingginya piutang pajak daerah
		Belum optimalnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis elektronifikasi
		<i>Database</i> berbasis digital yang belum aktual
Kepegawaian		
Implementasi penyelenggaraan Sistem Merit yang belum berjalan secara optimal	Belum terpenuhinya ASN sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Belum tersedianya perhitungan kebutuhan ASN sesuai dengan ketentuan
	Belum terukurnya penilaian kinerja ASN sesuai kaidah dan belum optimalnya	Sebagian besar ASN yang telah diukur kompetensinya belum memenuhi standar kompetensi jabatan
		Instrumen pengukuran kinerja masih dalam tahap penyiapan
		Penilaian SKP masih sebatas formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian
		Pejabat penilai kinerja secara berjenjang belum sepenuhnya memahami tata cara melakukan penilaian kinerja secara objektif
	Pelaksanaan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> belum optimal	
Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN	Belum semua ASN diukur kompetensinya	
		Belum tersedianya dokumen analisis kebutuhan diklat
Pendidikan dan Pelatihan		
Masih rendahnya profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia/ aparatur	Belum optimalnya upaya pengembangan kompetensi SDM/Aparatur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas	Masih rendahnya aparatur yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi yang meliputi kompetensi manajerial, teknis, dan sosio-kultural.
Penelitian dan Pengembangan		
Hasil kelitbangan belum optimal dimanfaatkan oleh	Belum adanya regulasi yang mengatur	Kepedulian dan perhatian terhadap hasil kelitbangan masih rendah
		Pembinaan kab/kota belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
perangkat daerah maupun masyarakat	pemanfaatan hasil kelitbangan	Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan naskah kebijakan yang dihasilkan sebagai dasar kebijakan Pemprov Kaltim
	Hasil Kelitbangan belum aplikatif	Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam riset
		Skema pendanaan riset yang belum memadai
		Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang riset
		Kurangnya kemitraan (praktisi) dalam penelitian
		Monitoring dan evaluasi hasil kelitbangan belum dilaksanakan secara periodik
		Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan publikasi ilmiah/buku/naskah akademik/di nasional dan internasional/prosiding
Belum berkembangnya inovasi daerah	Produk-produk inovasi yang dihasilkan masih belum memenuhi kebutuhan penyelesaian permasalahan pembangunan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang inovasi dan teknologi
		Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan produk inovasi dari perangkat daerah Pemprov Kaltim dan para pihak yang dibina masih kurang
		Kemampuan inovator dalam menghasilkan produk inovasi dari perangkat daerah Pemprov Kaltim dan para pihak yang dibina masih kurang
		Kemampuan SDM IPTEK dalam menghasilkan perekayasaan IPTEK untuk daerah masih kurang
	Regulasi pengembangan inovasi belum dilaksanakan secara optimal	Standar penilaian terkait indeks inovasi daerah dari pusat yang meningkat dan berubah-ubah
Komitmen pengembangan inovasi masih rendah	Pemahaman terkait inovasi masih kurang	
Pengawasan		
Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah	SPIP belum sepenuhnya diimplementasikan	Pedoman pelaksanaan SPIP terintegrasi, sehingga harus disosialisasikan kembali
		Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal
	Kapabilitas APIP masih pada Level 3	Belum optimalnya penerapan kebijakan dan standar operasional pengendalian internal
		Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<p>Belum optimalnya program yang terkait implementasi Reformasi Birokrasi melalui penguatan pengawasan</p>	<p>Penguatan monitoring dan evaluasi SPIP, Zona Integritas menuju WBK/WBBM, penanganan laporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan, PMRB, Survei Penilaian Integritas, <i>Wistle Blowing</i> Sistem, <i>Probity Audit</i>, LHPKN dan LHKASN</p> <p>Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan belum optimal</p> <p>Peran Inspektorat Daerah selaku <i>Quality Assurance</i> (QA) dan <i>Advisory</i> belum optimal</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</p>
	<p>Belum terbangunnya sistem pengawasan melalui pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan membangun sinergitas dengan pihak terkait dalam upaya mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>Belum optimalnya pemeriksaan berkala dan tujuan tertentu, review atas dokumen perencanaan dan keuangan serta lainnya, evaluasi, monitoring hasil pengawasan dan kegiatan tertentu, pemutakhiran data hasil pengawasan.</p> <p>Inspektorat Daerah belum memiliki sistem deteksi dini (<i>early warning</i>) yang handal dalam mencegah korupsi baik untuk deteksi <i>fraud</i>, maupun penyimpangan lainnya</p> <p>Belum optimalnya prioritas program yang dapat membangun sistem pengawasan internal yang efektif dan menghasilkan kegiatan penjaminan (<i>assurance</i>) dan layanan konsultasi yang berkualitas</p>
	<p>Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparat pengawasan maupun tenaga fungsional umum lainnya yang belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangan APIP</p>	<p>Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan dan cakupan pengawasan</p> <p>Jumlah SDM Pengawasan / Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD belum sebanding dengan tugas pengawasan baik tugas rutin maupun <i>mandatory</i></p>
	<p>Masih belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh perangkat daerah</p>	<p>Masih terdapat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum selesai dan berlarut-larut penyelesaiannya, dan belum adanya penyelesaian melalui majelis TP/TGR, serta kurangnya komitmen perangkat daerah</p>
<p>Pemerintahan Umum</p>		
<p>Terganggunya stabilitas IPOLEKSOSBUD di Kalimantan Timur</p>	<p>Belum optimalnya kesadaran berdemokrasi masyarakat</p>	<p>Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berdemokrasi</p> <p>Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi</p>
	<p>Belum optimalnya kesadaran masyarakat</p>	<p>Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	mengenai wawasan kebangsaan	Masih lemahnya semangat kebersamaan dan turunnya kepedulian sosial
		Masih meningkatnya simbolisme agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan
		Masih meningkatnya tindak kekerasan dan disharmoni sosial dalam masyarakat
	Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai seni dan budaya bangsa	Kurangnya pemahaman nilai-nilai seni dan Budaya di masyarakat
	Meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba
	Meningkatnya penganut agama yang menyimpang	Kurangnya edukasi moderasi beragama
	Peningkatan penggunaan produk impor atau penurunan penggunaan produk dalam negeri	Kurangnya edukasi cinta produk dalam negeri
	Banyaknya ormas yang tidak sesuai AD/ART	Kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus-pengurus ormas untuk menjalankan tupoksinya
	Tingginya potensi konflik sosial di wilayah Kalimantan Timur	Ego sektoral kedaerahan menyebabkan mudahnya masyarakat terprovokasi
Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konflik sosial		
Geografis Kalimantan Timur yang multikultural		

Sumber: Hasil analisis, 2023

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Telaahan Isu Internasional

a. Komitmen Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*), mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Perubahan iklim tidak terjadi secara tiba-tiba namun dalam jangka waktu panjang antara 50 s.d. 100 tahun.

Indonesia berkomitmen dalam melaksanakan upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim (*climate change*). Berbagai aksi, strategi, dan

inovasi dilakukan oleh Indonesia melalui berbagai diplomasi kepada dunia internasional. Selain diplomasi yang dilakukan melalui aksi di meja perundingan konferensi, aksi nyata juga dilakukan Indonesia melalui *soft diplomacy* yang salah satunya melalui UNFCCC.

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara pihak dari UNFCCC telah meratifikasi Paris *Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Untuk menjalankan amanah dari peraturan tersebut, Indonesia telah menyampaikan komitmen nasional untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim melalui *the First NDC (Nationally Determined Contribution)* pada bulan November 2016. Komitmen tersebut merupakan wujud kepedulian Indonesia terhadap masalah pemanasan global dan perubahan iklim yang akan mengancam keberlanjutan kehidupan manusia.

Nationally Determined Contribution Indonesia memuat elemen adaptasi, mitigasi, informasi untuk memfasilitasi *Clarity, Transparency and Understanding*, Kerangka Transparansi dan Kerja sama Internasional. Dalam elemen mitigasi, Pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan pembangunan rendah emisi GRK dan berketahanan iklim dengan target penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 31,89% melalui upaya-upaya dengan kemampuan sendiri dan sampai dengan 43,20% melalui upaya-upaya dengan dukungan internasional. Target penurunan emisi GRK tersebut akan dicapai dari sektor kehutanan, energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk dan pertanian.

b. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19

Pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi yang berangsur membaik memerlukan dukungan dan arah kebijakan yang dapat mengurangi tekanan fiskal, sekaligus kesiapan ruang fiskal untuk menghadapi krisis, guncangan, dan bencana di masa depan. Sebelum perang Rusia-Ukraina 2022, banyak negara merencanakan penarikan stimulus fiskal selama pandemi mengingat pemulihan ekonomi diproyeksi akan terus menguat secara bertahap. Kekhawatiran terhadap peningkatan beban utang publik di negara berpenghasilan rendah dan berkembang pun menjadi pendorong percepatan rencana konsolidasi fiskal dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal. Di saat yang sama, para pembuat kebijakan dihadapkan dengan dilema antara upaya kesinambungan pemulihan ekonomi dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan

kemuraman ekonomi global vis a vis menahan tekanan inflasi global yang terus meningkat.

Respons ekonomi terhadap pandemi dan kondisi awal masing-masing negara yang berbeda akan menentukan arah pemulihan ekonomi masing-masing negara. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan juga perlu menggunakan pendekatan yang inovatif dan relevan dengan kondisi sebuah negara. Di dalam negeri, kebijakan fiskal terus melakukan peran strategisnya dalam penguatan pemulihan dan memberi arah pembangunan perekonomian Indonesia ke depan. Di saat yang sama, Pemerintah Indonesia terus memperkuat arah konsolidasi fiskal dengan menekan kembali angka defisit APBN di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), termasuk melalui reformasi fiskal di tengah tren kenaikan harga komoditas global. Di samping itu, berbagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian secara lebih kuat dan inklusif terus dilakukan. Langkah-langkah tersebut vital dalam jangka panjang dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan meningkatkan potensi perekonomian Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi. Penguatan kembali sisi suplai terus dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi melalui penguatan sektor manufaktur, pengembangan ekonomi digital, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Isu strategis lainnya adalah pentingnya Indonesia bernavigasi dalam dinamika ekonomi global di tengah pelemahan pertumbuhan global, tekanan inflasi yang tinggi, percepatan pengetatan kebijakan moneter, volatilitas di pasar keuangan dan komoditas, serta gangguan pasokan. Pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik diperkirakan akan meningkat pada tahun 2023 karena proyeksi pemulihan parsial di Tiongkok. Namun, pertumbuhan di kawasan lainnya terutama di Eropa diperkirakan akan melambat karena permintaan yang belum sepenuhnya pulih di tengah tingginya tekanan inflasi. Kondisi geopolitik di tingkat global maupun regional diharapkan membaik ketika memasuki tahun 2023. Ke depan, dukungan kebijakan fiskal dibutuhkan untuk memperkuat pemulihan ekonomi dari guncangan dan transisi menuju model pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif dengan tetap memperhatikan aspek keadilan pada kelompok miskin dan rentan.

Penciptaan sumber pertumbuhan baru di Indonesia dapat diupayakan melalui pengembangan ekosistem digital dan pemberdayaan industri digital. Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan sektor

digital diantaranya peningkatan akses internet, pasar yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara, serta tingginya pengguna moda *e-commerce* dalam bisnis. Digitalisasi menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia, walaupun dalam pengembangannya juga disertai tantangan di antaranya perlunya peningkatan keterampilan pekerja menuju *high skilled labor* yang menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah pembiayaan penetrasi digital di Indonesia yang memerlukan dukungan tidak hanya dari pembiayaan publik melalui APBN namun juga dari sektor swasta. Pengembangan dan pendalaman sektor keuangan, termasuk dana pensiun, dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan pengembangan ekonomi digital dalam jangka panjang.

c. Transisi Energi

Secara umum, transisi energi dimaknai sebagai jalan menuju transformasi sektor energi global dari berbasis fosil menjadi nol-karbon. Transisi energi pada prinsipnya ditandai oleh adanya pergeseran sektor energi global dari sistem produksi dan konsumsi energi berbasis fosil yang meliputi minyak, gas alam, dan batu bara ke sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, serta air.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan Konservasi Energi yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009, serta menyusun Kebijakan Energi Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional, telah ditetapkan indikator porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan transisi energi, dimana pada Tahun 2025 ditargetkan paling sedikit sebesar 23% dan pada Tahun 2050 paling sedikit sebesar 31%.

Sebagai operasionalisasi dari kebijakan energi nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang pada prinsipnya memuat upaya-upaya untuk mewujudkan target-target pembangunan nasional di sektor energi. Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah

ditindaklanjuti oleh 29 provinsi yang telah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

d. Potensi Krisis Ekonomi Global

1) Gangguan Rantai Pasok dan Bencana Iklim yang Mengakibatkan Kerawanan Pangan

Permasalahan pangan sudah menjadi isu global yang patut diwaspadai. Perubahan iklim menjadi penyebab utama dari kerawanan pangan global. Naiknya suhu, curah hujan yang tidak dapat diprediksi, frekuensi cuaca ekstrem, dan naiknya serangan hama dan serangga adalah bentuk perubahan drastis iklim yang berdampak terhadap produksi pangan. Perubahan iklim menjadi ancaman nyata yang telah mengurangi 21% produktivitas pertanian global sejak tahun 1961. Berbanding terbalik dengan produktivitas pertanian global, jumlah penduduk dunia justru mengalami peningkatan sebanyak 80 juta penduduk setiap tahunnya. Artinya jumlah pertumbuhan penduduk dunia tidak diiringi oleh pertumbuhan produktivitas pangan. Jutaan orang terancam kelaparan. Secara global pada tahun 2021 terdapat 828 juta orang terkena dampak kelaparan, atau 46 juta orang lebih banyak dari tahun 2020 dan 150 juta lebih banyak dibanding tahun 2019.

Per Oktober 2022, sudah ada 21 negara yang menerapkan pelarangan ekspor produk pangan demi mengamankan kebutuhan domestik negaranya. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan *supply* dan *demand* di pasar global yang juga memicu naiknya harga pangan pada tahun 2022 ini. Tak hanya itu, dampak ekonomis dari perang Rusia-Ukraina telah terasa. Kenaikan harga komoditas sejak Maret 2022 lalu berdampak pada naiknya harga pupuk yang memperparah kondisi harga pangan global. Lebih lanjut, data dari FAO menunjukkan harga pangan minyak sayur dan sereal mengalami kenaikan tertingginya sebesar 35,65% dan 24,33% dibandingkan tahun 2021. Dunia sedang tidak baik-baik saja, perlunya solusi bersama antar negara untuk menyelesaikan masalah kerawanan pangan yang sudah mendunia ini.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan angka kemiskinan global. Menurut laporan dari World Bank, tingkat

kemiskinan global menjadi sekitar 9,3% pada tahun 2020, naik dari 8,4% pada tahun 2019. Data dari *Agricultural Market Information System* (AMIS) yang dirilis Oktober 2022, harga energi yang tinggi, kondisi cuaca buruk di negara-negara produsen utama, dan risiko geopolitik telah menyebabkan inflasi harga pangan domestik yang tinggi, dengan sebagian besar negara mengalami peningkatan harga pangan antara 10% sampai 30% dibandingkan tahun 2021.

2) Stagflasi ekonomi dan Inflasi Tinggi akibat masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina

Krisis Ukraina kini kian memburuk sejak Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Konflik Ukraina yang telah menyita perhatian dunia ini, tidak hanya menyajikan konflik militer antara Rusia dan Ukraina yang telah menimbulkan dampak pada hancurnya kota-kota dan infrastruktur di Ukraina serta krisis kemanusiaan, tetapi juga telah menimbulkan dampak pada perekonomian global.

International Monetary Fund (IMF) mengingatkan negara-negara di dunia untuk mewaspadaai dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian. IMF mengingatkan, dampak terhadap ekonomi global akan makin parah jika konflik antara Rusia dan Ukraina terus meningkat. Salah satu dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat terjadinya konflik ini adalah harga energi dan komoditas, termasuk gandum dan biji-bijian, telah melonjak. Hal ini menambah tekanan inflasi sebagai dampak dari terganggunya rantai pasok.

Angka inflasi yang tinggi ini tentunya akan sangat berdampak terhadap keluarga rumah tangga miskin yang sebagian besar penghasilannya hanya untuk belanja kebutuhan pokok dan bahan bakar. Selain itu, serangan Rusia juga disinyalir akan memperlambat perekonomian Eropa karena harga energi yang naik tinggi. Harga gas alam yang tinggi sebagai sumber energi telah meningkatkan tarif dasar listrik negara-negara Eropa.

Dengan kata lain, sektor konsumsi yang berkaitan dengan hajat hidup warga menjadi semakin tertekan. Perang tersebut telah membuat gas menjadi momok serius bagi warga berpenghasilan rendah. Bahkan secara global, pasar keuangan tengah mengalami masa *shock therapy* karena bank-bank sentral siap melawan kenaikan

inflasi dengan cara menaikkan suku bunga. Tentunya dengan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi tersebut diprediksi akan memperlambat belanja dan risiko tekanan bagi ekonomi secara umum.

Kekhawatiran lain juga muncul sebagai dampak diterapkannya sanksi Barat terhadap Rusia. Negara-negara Barat diketahui telah menjatuhkan sanksi ekonomi berlapis terhadap Rusia. Salah satu yang cukup memukul adalah dikeluarkannya Rusia dari *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).

Lalu, risiko bagi ekonomi Asia juga akan muncul jika harga minyak terus naik, karena ketegangan geopolitik akan membebani prospek ekonomi Asia melalui berlanjutnya kenaikan harga minyak, bahan pokok, kondisi keuangan dan kepercayaan perusahaan, serta aktivitas perdagangan. Ketegangan geopolitik yang berlanjut akan menghasilkan dorongan stagflasi bagi ekonomi Asia, di mana permintaan akan melemah, tetapi harga-harga lebih tinggi. Harga minyak yang lebih tinggi seolah akan bertindak sebagai pajak atas pendapatan rumah tangga sehingga menghambat pertumbuhan konsumsi.

Kombinasi dari perlambatan aktivitas ekonomi dan lonjakan inflasi merupakan kombinasi berbahaya dalam bentuk stagflasi. Berbagai negara di penjuru dunia menunjukkan perkembangan ekonomi dan inflasi yang menunjukkan indikasi semakin kuat bahwa risiko stagflasi semakin dekat. Stagflasi dapat dipahami sebagai situasi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan inflasi. Untuk menemukan kombinasi kebijakan moneter dalam situasi seperti ini sangat sulit untuk ditangani, karena upaya untuk memperbaiki salah satu faktor dapat memperburuk faktor lainnya.

Kekhawatiran akan stagflasi global menuntut para pemangku kebijakan untuk melahirkan *extraordinary strategy* dalam memitigasi risiko stagflasi tersebut. Kebijakan menaikkan suku bunga guna meredam gejolak inflasi dalam jangka pendek juga menimbulkan risiko bagi sektor riil berupa *cost of fund* yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyelaraskan antara pengendalian inflasi dengan mendorong investasi agar dapat terbebas dari jerat stagflasi.

4.2.2. Telaahan Isu Nasional

a. Penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Visi Indonesia tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 9 (sembilan) misi, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
- 7) Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir untuk pemenuhan target sasaran RPJMN 2020-2024. Target-target pembangunan atau sasaran-

sasaran pembangunan pada tahun 2024 akan diarahkan mendekati target yang sudah disusun di dalam kerangka RPJMN 2019-2024. Adapun tema yang diusung dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Penekanannya di dalam RKP 2024 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024. Skenario yang disusun Bappenas, sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RKP 2024 adalah sebesar 5,3 hingga 5,7 persen. Sementara untuk tingkat kemiskinan diharapkan dapat ditekan di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5 hingga 5,7 persen, rasio gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia (IPM) di kisaran 73-74, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 27,27, nilai tukar petani (NTP) 105 hingga 108, dan nilai tukar nelayan (NTN) hingga 110.

b. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)

Pulau Kalimantan dan secara khusus Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu faktor kunci pencapaian visi IKN. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara telah menyebutkan bahwa Daerah Mitra merupakan kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan *superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala OIKN. Hal ini mengartikan bahwa seluruh wilayah di Pulau Kalimantan memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai daerah mitra yang akan menjadi partner IKN mewujudkan visi IKN serta Visi Indonesia 2045. Hingga saat ini, terdapat beberapa wilayah/area di Kalimantan Timur yang telah disebutkan spesifik peranannya dalam agenda pembangunan IKN. Wilayah-wilayah tersebut dapat diasumsikan sebagai daerah mitra.

Pembangunan IKN memiliki 8 prinsip pembangunan dan 24 indikator kinerja kunci (KPI). Peranan Kalimantan Timur dan regional Kalimantan (secara spesifik pembangunan makro) adalah dalam upaya pencapaian KPI prinsip 8, yakni:

- 1) 0% kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035;

Penurunan angka kemiskinan harus berdampak secara regional. Luapan penduduk miskin yang tidak tertampung atau tidak mampu mengakses IKN (padahal yang bersangkutan bekerja di IKN) ke wilayah sekitar perlu dihindari/diantisipasi. Jika kemiskinan menyebar ke wilayah sekitar IKN maka berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan rasio gini di wilayah sekitar.

- 2) PDB per kapita setara dengan negara berpendapatan tinggi;
Peningkatan *output* ekonomi harus berdampak secara regional. Jika tidak berdampak regional maka berpotensi meningkatkan rasio gini wilayah sekitar. Perpres Nomor 63 Tahun 2022 telah menentukan beberapa lokus spesifik di Kalimantan Timur yang akan menjadi penggerak *superhub* IKN (Kawasan Industri Kariangau, Kawasan Industri Buluminung, dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan)

- 3) Rasio gini regional terendah di Indonesia pada tahun 2045;
Agar target ini tercapai maka keamanan ekonomi tidak boleh hanya terjadi di kawasan IKN, tapi juga di wilayah Mitra IKN. Distribusi kesejahteraan harus tersebar di seluruh regional Kalimantan

Terdapat keselarasan antara visi pembangunan IKN, terutama Kalimantan Timur sebagai bagian dari *superhub* ekonomi, dengan visi transformasi ekonomi Kaltim yang beralih pada sektor berbasis hilirisasi industri. Oleh karena itu, peluang untuk mewujudkan percepatan transformasi ekonomi sangat terbuka. Kalimantan Timur perlu menangkap peluang visi IKN untuk menggerakkan dan membangkitkan perekonomian di regional Kalimantan dan Kawasan Indonesia Timur. Selain itu, lokus-lokus wilayah potensial yang dapat mendukung Bergeraknya *superhub* IKN perlu diusulkan untuk ditetapkan menjadi Daerah Mitra Kalimantan Timur juga harus memperkuat kerja sama regional antar regional Kalimantan untuk mendukung pembangunan IKN. Integrasi pembangunan Kalimantan Timur untuk tumbuh bersama pencapaian kinerja kunci IKN dapat dilakukan melalui :

- a) Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan akses ke IKN dari wilayah sekitarnya;
- b) Peningkatan kualitas SDM agar Kaltim mampu tumbuh berkualitas. Selain itu SDM Kaltim juga diharapkan dapat berkontribusi dan berkolaborasi dalam menggerakkan ekonomi regional dan Kawasan Indonesia Timur;

- c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim untuk mendukung target rasio gini terendah di regional Kalimantan;
- d) Dukungan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan IKN, seperti dukungan kebijakan, regulasi, kerja sama, dan fasilitasi.

c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Pelaksanaan TPB di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk: a. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; c. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan d. terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, meliputi:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Pengelolaan air bersih dan sanitasi layak
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
9. Infrastruktur tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara
11. Kota dan permukiman berkelanjutan
12. Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

13. Penanganan perubahan iklim dan penanggulangan kebencanaan
14. Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem lautan
15. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Dalam rangka pelaksanaan TPD di Indonesia, maka Pemerintah dan provinsi di Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diamanatkan untuk menyusun Rencana Aksi Nasional (untuk pusat) dan Rencana Aksi Daerah (untuk provinsi) TPB. Rencana Aksi Daerah TPB (RAD TPB) adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional.

d. Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, merupakan amanat ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pilkada diselenggarakan secara serentak dalam beberapa tahap. Pilkada serentak tahap pertama telah dimulai pada 2015. Pilkada akan digelar serentak secara nasional pada tahun 2024 mendatang.

Pada 2024 mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif, serta pemilihan kepala daerah. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, Pilkada digelar pada 27 November 2024. Melalui gelaran Pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia.

e. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga serta melibatkan masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat; b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Strategi kebijakan perlu dilaksanakan secara tepat sasaran dan difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk mempercepat pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024.

Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dibebankan pada: a. APBN; b. APBD; c. APBD Desa; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Percepatan Penanganan Stunting

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting. Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2027 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan

panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Percepatan Penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Dalam rangka percepatan penurunan stunting, ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: a. menurunkan prevalensi Stunting; b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c. menjamin pemenuhan asupan gizi; d. memperbaiki pola asuh; e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun. Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% pada tahun 2024.

g. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi meliputi 8 (delapan) area perubahan, meliputi:

1) Manajemen Perubahan

Mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.

3) Penataan dan Penguatan Organisasi

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*).

4) Penataan Tata Laksana

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja.

5) Penataan Sumber Daya Manusia

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.

7) Penguatan Pengawasan

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas.

h. Pembangunan Ekonomi Biru (*Blue Economy Development*)

Dalam rangka pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19, Indonesia perlu memiliki pendekatan baru dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. *Blue Economy* merupakan konsep yang tepat mengingat masih banyaknya potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan dan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 65 persen total luas negara Indonesia berupa laut.

Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru ini merupakan penjabaran dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025, khususnya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.

Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru juga mendukung inisiatif global dalam pencapaian Agenda 2030 *on Sustainability Development Goals*, khususnya Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan serta mendukung Tujuan 7: Akses Energi yang Terjangkau, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua, Tujuan 8: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua, Tujuan 9: Infrastruktur, Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Inovasi, dan Tujuan 17: Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

4.2.3. Telaahan Kebijakan Provinsi

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Pembangunan periode 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari tahap ke-5 RPJPD (204-2025).

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 adalah "**Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan**".

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Timur tersebut, misi pembangunan Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Sasaran pokok pembangunan Kalimantan Timur yang akan dicapai dalam 20 tahun mendatang sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia ditandai oleh hal-hal berikut:
 - a) Terlaksananya sistem jaminan sosial bagi masyarakat Kalimantan Timur yang terpadu, efisien dan efektif.
 - b) Meningkatnya derajat dan mutu pendidikan masyarakat Kalimantan Timur.
 - c) Meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat Kalimantan Timur.
 - d) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG).
 - e) Berkembangnya karakter masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - f) Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam seluruh bidang pembangunan.
 - g) Makin kuatnya nilai-nilai keutamaan, berakhlak mulia, bermoral, beriman dan bertaqwa yang dianut oleh masyarakat Kalimantan Timur.
 - h) Makin mantapnya budaya masyarakat Kalimantan Timur yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.
2. Terwujudnya struktur ekonomi yang andal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya ditandai oleh hal-hal berikut:
 - a) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pada tahun 2025 pendapatan per kapita Kalimantan Timur semakin meningkat, pengangguran menurun dan penduduk miskin berkurang.
 - b) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur dari pengembangan sektor industri pengolahan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur dari pengembangan sektor pertanian modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

- d) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur dari pengembangan sektor jasa yang lebih bermutu dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berdaya saing.
 - e) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur dari pengembangan sektor pertambangan yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional ditandai oleh hal-hal berikut:
- a) Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan di Kalimantan Timur yang andal, terpadu dan merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota.
 - b) Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan termasuk terpenuhinya pasokan listrik bagi hampir seluruh rumah tangga dan wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan.
 - c) Terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur guna terciptanya masyarakat informasi Kalimantan Timur.
 - d) Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
4. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum ditandai oleh hal-hal berikut:
- a) Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang profesional, kompeten, bersih, andal, berwibawa dan bertanggungjawab.
 - b) Menguatnya peranan masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.
 - c) Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
 - d) Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah Kalimantan Timur yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan masyarakat, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan.

5. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi ditandai oleh hal-hal berikut:
- a) Terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan yang makin merata ke seluruh wilayah Kalimantan Timur termasuk wilayah pedalaman, perdesaan dan perbatasan.
 - b) Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
 - c) Terwujudnya kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur yang didukung oleh pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara serasi, seimbang, dan lestari.
 - d) Terpeliharanya keragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam dan lingkungan Kalimantan Timur.
 - e) Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat Kalimantan Timur dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pencapaian pembangunan yang telah dicapai dalam empat periode, maka RPJM ke-5 (2024-2025) ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kalimantan Timur yang ditandai oleh kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, struktur ekonomi yang mapan antar sektor dan antar wilayah dengan partisipasi masyarakat yang luas dan dominan, pelayanan dasar telah melayani masyarakat dengan mapan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dengan penegakan hukum yang sangat baik, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kaidah lingkungan hidup.

Dalam tahap ke-5 ini ditunjukkan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah tinggi dengan tingkat perkembangan diatas rata-rata nasional dan sudah mampu bersaing dalam lingkup ASEAN serta beberapa bagian telah bersaing dengan sangat sehat dalam skala Asia-Pasifik. Kualitas SDM sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan ketrampilan yang memadai dan dapat dipenuhi oleh wilayah setempat; perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang sangat rendah; prasarana dan sarana menjangkau

ke segenap pelosok wilayah dan wilayah unggulan dan strategis telah memiliki prasarana yang unggul; pemerintahan berjalan dengan efisien, efektif, transparan dengan akuntabilitas yang tinggi serta penegakan hukum dilaksanakan dengan tegas sesuai aturan; serta penataan ruang menjadi acuan utama.

b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Tujuan penataan ruang provinsi adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi, disusun kebijakan penataan ruang wilayah provinsi.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat;
- b. pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batubara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional;
- c. perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau;
- d. perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi; dan
- e. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah, disusun strategi penataan ruang wilayah provinsi, yaitu:

1. Strategi pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor

unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat, meliputi:

- a. perwujudan struktur ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi;
 - b. perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang berwawasan lingkungan;
 - c. pengembangan kawasan strategis industri turunan migas dan batubara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing investasi; dan
 - d. membatasi izin pembukaan kawasan eksplorasi baru dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting.
2. Strategi pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batubara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional, meliputi:
- a) perwujudan struktur ruang yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian untuk lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b) perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian dan pariwisata, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan wilayah dan nasional, serta mendukung transformasi ekonomi;
 - c) pengembangan kawasan strategis agroindustri sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah; dan
 - d) pengembangan sumber dan teknologi pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan energi wilayah dan nasional.
3. Strategi perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penurunan emisi dan jejak karbon dari sektor-sektor ekonomi produktif dalam perwujudan pemanfaatan ruang;
 - b. penguatan prinsip kerja sama dalam konservasi hutan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta kesejahteraan

masyarakat yang ada di wilayah kawasan lindung dan wilayah *Heart of Borneo* (HoB); dan

- c. penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi ekonomi hijau.
4. Strategi perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi meliputi:
 - a. pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, khususnya pada wilayah yang belum dan/atau tidak berkembang agar terjadi hubungan yang sinergis;
 - b. pemerataan pengembangan wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - c. pengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat; dan
 - d. pengembangan keterkaitan pusat kegiatan di kawasan perbatasan antar negara untuk mencegah kebocoran ekonomi dan menjaga kedaulatan NKRI.
 5. Strategi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a. pengendalian pembangunan melalui upaya tindakan antisipatif dan kuratif yang konsisten dalam pengelolaan kegiatan budidaya yang berpotensi dan/atau telah terindikasi mengganggu kelestarian lingkungan;
 - b. peningkatan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bencana;
 - c. penetapan kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakteristik, kesesuaian dan daya dukung lingkungan yang turut mempertimbangkan produktivitas ekonomi dan kepentingan sosial budaya; dan

- d. peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan pada pusat kegiatan di wilayah perbatasan negara melalui penetapan zona penyangga yang berfungsi untuk pengamanan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya secara selektif.

c. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Prinsip pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim telah diterapkan di Kalimantan Timur sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dan dunia usaha. Komitmen daerah antara lain diwujudkan melalui:

1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sementara Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi seluruh ekoregion darat dan laut. Target RPPLH untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun. Arahannya Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam Provinsi Kaltim Tahun 2020-2049 yaitu:

- a. Periode 10 Tahun ke I (Tahun 2020 s/d 2029) Menahan Laju Penurunan Daya Dukung dan Daya Tampung.
- b. Periode 10 Tahun ke II (Tahun 2030 s/d 2039) Memperbaiki Kualitas Jasa Lingkungan Hidup.
- c. Periode 10 Tahun ke III (Tahun 2040 s/d 2049) Upaya Pengembangan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan dalam Segala Aspek Pembangunan, Meningkatkan Ketahanan Lingkungan

terhadap Perubahan Iklim, Efisiensi Konsumsi dan Pemanfaatan SDA.

Arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lintas kab/kota sebagai berikut:

a) Target RPPLH Kalimantan Timur untuk 5 (lima) sungai yang lintas Kabupaten/Kota selama 30 Tahun ke depan adalah mempertahankan masing-masing kelas sungai sesuai yang telah ditetapkan dalam Perda Kaltim Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu: Kelas I untuk Sungai Mahakam, Sungai Bontang dan Sungai Kedang Kepala, serta Kelas II untuk Sungai Santan dan Sungai Karang Mumus.

b) Arahan RPPLH berdasarkan Status Penyedia Air Lintas Kabupaten/Kota

Jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air di masing-masing WS memiliki kategori dari sangat rendah ke sangat tinggi, dimana WS Mahakam memiliki luasan wilayah paling besar yaitu 8.526.182,01 Ha atau 63,23% dari luas seluruh WS yang ada yaitu sebesar 13.482.972,57 Ha.

c) Arahan RPPLH Berdasarkan Status Penyedia Pangan Lintas Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Pasal 5 Perda Kaltim No. 01 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, disampaikan bahwa lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan luas paling kurang 1.916.643 Ha. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

Jasa lingkungan hidup sebagai penyedia pangan di masing-masing WS memiliki kategori dari sangat rendah ke sangat tinggi, dimana WS Mahakam memiliki luasan wilayah paling besar yaitu 8.526.182,01 Ha atau 63,23% dari luas seluruh WS yang ada yaitu sebesar 13.482.972,57 Ha. Di WS Mahakam ini terdapat beberapa kabupaten kota sebagaimana telah disampaikan sesuai Tabel 5.1 diatas. Untuk WS Mahakam sendiri memiliki luas paling besar pada kategori sedang yaitu seluas 5.200.690,48 Ha, disusul pada kategori

tinggi seluas 2.168.689,28 Ha dengan luasan untuk kategori sangat tinggi hanya mencapai luasan 179.731.20 Ha.

- d) Arahan RPPLH untuk Kabupaten di Wilayah Kalimantan Timur yang Secara Ekologis Lintas DAS dengan Provinsi Lain

Dari 10 Kab./Kota, khusus untuk Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu, dikarenakan berdasarkan Peta Indikatif Jasa Ekosistem Penyedia Air dan Penyedia Pangan, apabila ditinjau dari batas Wilayah Sungai Berau-Kelay dan batas Wilayah Sungai Mahakam secara ekologis adalah lintas DAS dengan Provinsi Kalimantan Utara, seperti yang ditunjukkan gambar 5.7 s/d 5.10, maka harus dilakukan kerja sama antar daerah dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan yang diatur dalam PP. 46 Tahun 2017.

d. RAD GRK Kalimantan Timur Tahun 2010-2030

Ekonomi Kalimantan Timur dalam proses transformasi untuk mengantisipasi menyusutnya deposit minyak, gas, dan batubara. Kontribusi nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi di bidang pertanian dalam arti luas dan pengolahannya terhadap PDRB akan terus meningkat walaupun mungkin belum dapat menggeser posisi batubara sebagai penyumbang utama PDRB sampai dengan tahun 2030. Melihat perkiraan deposit dan harga batubara sampai tahun 2030, produksi batubara diperkirakan masih di sekitar 230 juta ton per tahun dimana sekitar 180 juta ton diantaranya diproduksi oleh penambang skala besar. Kegiatan produksi listrik diperkirakan akan meningkat rata-rata sekitar 10% per tahun sampai dengan tahun 2030 yang akan didominasi oleh PLTU batubara. Andalan utama bidang pertanian dalam arti luas adalah perkebunan. Peningkatan produksi akan bersumber dari peningkatan produktivitas dan penambahan luas tanam dari sekitar 1,3 juta ha tahun 2016 menjadi sekitar 2 juta ha pada tahun 2030 yang akan tetap didominasi oleh kebun kelapa sawit. Di kegiatan kehutanan, luas penanaman hutan tanaman masih dapat dimaksimalkan sampai 431.185 ha dari lahan non hutan dalam area konsesi eksisting, dengan tetap mempertahankan hutan primer, hutan mangrove dan hutan rawa.

Pembakaran bahan bakar hidrokarbon pada kegiatan batubara dan produksi listrik serta kegiatan pembalakan dan alih guna lahan untuk perkebunan diperkirakan akan menjadi sumber sumber-sumber utama emisi

GRK sampai dengan tahun 2030. Keempat sumber tersebut akan berkontribusi sekitar 70% untuk periode 2010-2030. Pertumbuhan luasan dan produksi kebun kelapa sawit akan memicu penggunaan pupuk nitrogen dan produksi biogas dari limbah cair sawit (POME) yang masing-masing akan berkontribusi sekitar 4% dan 6% dari total emisi GRK pada periode yang sama.

Kalimantan Timur berpeluang menurunkan emisi GRK sampai dengan 20% (setara 194 juta ton CO₂ eq) dibandingkan tingkat BAU sambil tetap meningkatkan nilai tambah kegiatan-kegiatan ekonomi kunci daerah. Fokus kegiatan mitigasi adalah sebagai berikut

- a. Konservasi energi pada kegiatan tambang batubara lewat efisiensi dan penggunaan biodiesel
- b. Peningkatan penggunaan energi terbarukan pada produksi listrik di perdesaan
- c. Pengembangan kebun ramah iklim
- d. Perlindungan hutan alam dan gambut di hutan produksi, lindung dan konservasi, penerapan pembalakan berdampak minimal (RIL-C), pengembangan hutan tanaman dan wanatani di lahan bercadangan karbon rendah
- e. Perbaikan ketepatan penggunaan pupuk N di perkebunan dan sawah
- f. Pengurangan emisi gas metana POME setara *metane capture*.

Enam aksi mitigasi tersebut dapat berkontribusi sekitar 94% dari total potensi penurunan 194 juta ton CO₂ -eq pada 2010-2030. Kegiatan-kegiatan mitigasi tersebut akan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Konservasi energi dapat meningkatkan PDB sebagaimana dilaporkan hasil kajian terhadap 28 negara OECD (*Climate Institute* 2013). Peningkatan penggunaan energi terbarukan untuk listrik perdesaan, termasuk lewat pemanfaatan biogas POME, menciptakan nilai tambah baru pada ekonomi daerah lewat pemanfaatan limbah dan sumber-sumber energi yang sebelumnya tidak dimanfaatkan seperti tenaga surya dan air. Perlindungan hutan alam dan lahan gambut tidak akan mengganggu kegiatan produksi karena diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan pembukaan kebun dan hutan tanaman baru pada lahan-lahan dengan cadangan karbon rendah. Penerapan pembalakan dengan dampak minimal (RIL-C) akan meningkatkan produktivitas hutan alam dalam jangka menengah dan panjang. RIL-C mengurangi kerusakan hutan akibat pembalakan sehingga dapat mempercepat pemulihan hutan. Hutan yang pulih lebih cepat membuat

waktu daur yang lebih singkat yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas.

e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penyelenggaraan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi indikator pencapaian keberhasilan pembangunan ramah iklim sampai tahun 2030. Pelaku usaha yang usahanya membidangi sektor berbasis lahan, sektor berbasis energi, sektor berbasis industri dan sektor berbasis limbah wajib melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Adaptasi perubahan iklim di daerah meliputi:

a. Ketahanan Ekonomi

Kegiatan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan untuk: a. mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan sistem data dan informasi pangan, penguatan manajemen usaha tani dan kelembagaan tani, serta perbaikan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian; dan b. mewujudkan kemandirian energi melalui perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada daerah aliran sungai yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air, serta optimalisasi pemanfaatan limbah organik dan biomassa serta pengembangan sumber energi dari bahan bakar nabati.

b. Ketahanan Sistem Kehidupan

Kegiatan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan untuk penguatan sektor: a. kesehatan; b. pemukiman; dan c. infrastruktur.

c. Ketahanan Ekosistem Dan Wilayah Khusus

Kegiatan adaptasi perubahan iklim meliputi: a. pengelolaan ekosistem dan daerah aliran sungai melalui pengelolaan berkelanjutan kawasan lahan basah; b. penguatan kawasan Perkotaan melalui percepatan pencapaian kota tangguh dan sekolah tangguh bencana dan pengintegrasian upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana penataan ruang perkotaan; dan c. pengelolaan pesisir dan pulau kecil melalui pengimplementasian sistem pengelolaan pesisir terpadu, membangun kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan tinggi muka air laut, dan pengembangan sarana penangkapan yang tahan terhadap perubahan cuaca serta pengelolaan bencana pesisir serta pulau kecil.

Adaptasi perubahan iklim harus didukung dari sektor ketahanan pangan, kemandirian energi, infrastruktur, kesehatan, pemukiman, dan pengelolaan pesisir serta pulau-pulau kecil. Adaptasi perubahan iklim dilaksanakan oleh dinas bersama dengan perangkat daerah terkait dan lembaga lainnya.

Mitigasi perubahan iklim di Daerah meliputi bidang: a. tataguna lahan, alih guna lahan, dan hutan; b. pertanian; c. energi; dan d. limbah. Mitigasi perubahan iklim dilaksanakan oleh dinas bersama dengan Perangkat Daerah terkait dan lembaga lainnya.

Kegiatan mitigasi antara lain: a menurunkan laju alih guna hutan alam di dalam maupun di luar kawasan hutan, termasuk di dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya; b. melakukan dan mempromosikan rehabilitasi lahan kritis dengan tanaman pangan dan tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi serta menghasilkan jasa lingkungan yang penting untuk mendukung sistem kehidupan lokal, daerah, dan global; c. mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan; d. menerapkan teknologi pembalakan berdampak minimal pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam; dan e. memfasilitasi perhutanan sosial dan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

f. *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)*

Salah satu upaya menjaga agar suhu bumi tetap tidak meningkat lebih dari 1,5°C - 2°C adalah melalui upaya pencegahan penghilangan kawasan berhutan (deforestasi) dan penurunan kualitas tutupan hutan (degradasi hutan). *Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF)* sebagai mekanisme insentif berdasarkan kinerja penurunan emisi, menjadi salah satu bagian dari program REDD+. Program ini dilaksanakan pada seluruh wilayah provinsi Kalimantan Timur, yang dilakukan secara bersama oleh KLHK beserta UPT-nya, Pemprov Kaltim beserta perangkat daerah berbasis lahan, Pemkab/Pemkot dan perangkat daerah sesuai kewenangannya, Pemerintah Desa, Swasta, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi non Pemerintah, serta mitra pembangunan lainnya.

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota bersama masyarakat Kaltim telah berkomitmen untuk bersama-sama dalam menyukseskan program FCPF-CF. FCPF-CF adalah fasilitas insentif penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari Bank Dunia dengan skema pembayaran berbasis kinerja. Program *FCPF-Carbon Fund* dilaksanakan

mulai tahun 2020 hingga tahun 2024, dengan proses pengukuran capaian pada tahun 2022 dan 2024, serta pemberian insentif pada tahun 2023 dan 2025.

Dalam data *Forest Reference Emission Level (FREL)* dan data emisi selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2019 sampai 2020, diperoleh data pengurangan emisi sebesar 30.850.799 ton CO₂-e. Hal ini jauh melampaui jumlah minimum yang dibayarkan seperti termuat dalam *Emission Reductions Payment Agreement (ERPA)* Kaltim yang berkomitmen dengan World Bank, sebesar 22 juta ton CO₂-e. Hal ini menunjukkan Kaltim surplus pengurangan emisi. Dengan pencapaian tersebut, maka pada tahun 2024 Kalimantan Timur berpotensi menerima sekitar USD 110 juta.

g. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan TPB sesuai komitmen nasional. Pelaksanaan TPB dipantau dan dievaluasi secara periodik sehingga diperoleh informasi ketercapaian indikator TPB. Adapun pelaksanaan TPB tahun 2022 disajikan secara rinci sebagai berikut:

TPB 1: Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan, terutama terhadap persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi (indikator 1.2.2*), di mana terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dan masih berada di atas target yang ditetapkan. Demikian halnya dengan indikator Tujuan 1 lainnya masih belum mencapai target, walaupun trennya menunjukkan akan tercapai. Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target untuk kepesertaan sistem jaminan sosial bidang ketenagakerjaan formal (1.3.1.(b)), yaitu mencapai 84,39% dari target 80% kepesertaan. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengentaskan kemiskinan, menunjukkan capaian yang membaik, walaupun belum mencapai target. Peningkatan capaian ditunjukkan dalam hal mengentaskan kemiskinan ekstrem (indikator 1.1.1*) dengan capaian 1,5% menuju target 0%. Dalam upaya melindungi perlindungan sosial bagi penduduk, Provinsi Kalimantan Timur juga menunjukkan kondisi yang membaik, yang ditunjukkan dengan peningkatan penerima program perlindungan sosial (1.3.1*) yang mencapai 68,16% dari target 80%, serta peningkatan kepesertaan sistem jaminan sosial, baik bidang kesehatan (1.3.1.(a) yang mencapai 82% dari target 100%), maupun bidang ketenagakerjaan, dan untuk bidang ketenagakerjaan informal (1.3.1.(b)), dan 15,71% dari target 80%. Sementara, akses terhadap

layanan dasar (1.4.1*) telah mencapai 62% dari target 80% dan kepemilikan hak atas tanah (1.4.2*) yang didasari oleh dokumen hukum dengan capaian 40,70% dari target 100%. Berkaitan upaya membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana, dari kejadian bencana tahun 2022, yaitu bencana banjir di Kota Bontang, terdapat korban terdampak bencana (1.5.1*) sejumlah 160,17 per 100.000 penduduk, namun tidak terjadi kerugian akibat bencana (1.5.2*). Upaya untuk membangun ketangguhan kabupaten/kota melalui adopsi dan penerapan strategi pengurangan risiko bencana (1.5.4*) telah dilakukan oleh 4 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota (40%).

TPB 2: Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 menargetkan “Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan”. Masyarakat membutuhkan akses pangan yang lebih baik serta promosi pertanian berkelanjutan yang lebih luas. Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani skala kecil menjadi prioritas untuk memastikan setiap orang memperoleh konsumsi pangan yang cukup dan berkualitas untuk menjalani hidup sehat. Pada tahun 2022 Tujuan 2, Kalimantan Timur telah mencapai target pada 4 (empat) indikator, yaitu Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (2.2.1*), Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani (2.3.1.(a).), Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi (2.5.1*), dan Indikator anomali harga pangan (2.c.1*). Sementara, 2 (dua) indikator masih memerlukan perhatian khusus, yaitu: Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (2.1.1*), dan Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (2.4.1.(a)). Sementara 2 (dua) indikator masih belum diperoleh data, yaitu: Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani (2.3.1*), dan rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil (2.3.2*). Tahun 2022 penurunan stunting telah tercapai, mencapai 14,9% di bawah target 27,4%, Di Kalimantan Timur terdapat 4 Kabupaten dan Kota yang memiliki angka stunting paling rendah persentase rerata Provinsi yakni Kutai Barat (15,8%), Kota Balikpapan (17,6%), Mahakam Ulu (20,3%) dan Samarinda (21,6%).

Sedangkan untuk 6 Kabupaten/kota lainnya Kutai Timur (27,5%), PPU (27,3%), Kukar (26,4%), Bontang (26,3%), Berau (25,7%) dan Paser (23,6%), yang memiliki persentase stuntingnya masih berada di atas rerata Provinsi. Pencapaian juga didapat dari indikator nilai tambah pertanian per tenaga kerja tahun 2022 yang mencapai 175,58 juta rupiah dari target 59,8 juta rupiah, serta telah terdapat 17 unit sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi dari target 15 unit, dan anomali harga pangan berada pada angka 0,14 dari target 0,50. Sementara upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of undernourishment*) masih perlu perhatian, di mana realisasi masih di atas target yaitu 12,56% dari 5,01%. Demikian halnya dengan upaya untuk meningkatkan proporsi luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang juga masih berada pada 0,25% dari target 39,87%. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan di tahun 2022 akan tercapai dengan realisasi 4,29% dari target 4,12%. Masih terdapat 274 desa di Kalimantan Timur masih termasuk dalam kategori rawan pangan.

TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 di Kalimantan Timur menunjukkan 17 dari 29 indikator telah tercapai, yaitu: Angka Kematian Ibu (AKI) (3.1.1*), Angka Kematian Balita (AKBa) (3.2.1*(a)), Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (3.2.1*(b)), Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup (3.2.2*), Kejadian Malaria per 1000 orang (3.3.3*), Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk (3.3.4*), Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis) (3.3.5*), Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta) (3.3.5*), Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta(3.3.5.(a)), Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi (3.3.5.(b)), Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (3.4.1.(a)), Prevalensi tekanan darah tinggi (3.4.1.(b)), Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi (3.5.1.(b)), Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis (3.5.1.(a)), Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern (3.7.1*), Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur

yang sama (3.7.2*), Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan (3.b.3*). Satu indikator masih menghadapi banyak tantangan, terutama terhadap persentase merokok pada penduduk usia ≥ 15 tahun (indikator 3.a.1*), di mana masih berada jauh di atas target yang ditetapkan yaitu 22,21% dari target 8,7%, serta satu indikator belum tersedia data, yaitu proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan (3.8.2*). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan usaha-usaha dalam mengurangi rasio kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, termasuk perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih (3.1.2*) dan perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas Kesehatan (3.1.2*), yang menunjukkan perbaikan. Dalam mengurangi jumlah kematian akibat penyakit yang timbul akibat obesitas di Kalimantan Timur, menunjukkan tercapai, yakni sebesar 28.69% dari target 21.8%. Dalam menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan 7 integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program Nasional, menunjukkan kondisi akan tercapai, yakni *Total Fertility Rate* (TFR) (3.7.2.(a)) sebanyak 2,67 per 1.000 orang dari target 2,4 orang per 1.000 orang, cakupan pelayanan kesehatan esensial (3.8.1*) sebesar 3.261.781 dari target 5.103.399 dan *Unmet need* pelayanan kesehatan (3.8.1.(a)) sebesar 2,61 % dari target 0%. Dalam memerangi penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, maka penting sekali melakukan pendataan Proporsi Target populasi yang telah memperoleh vaksin program Nasional (3.b.1*) untuk memastikan agar vaksin dapat dilakukan dan diakses secara merata oleh pemerintah Kalimantan Timur. Masyarakat Kalimantan Timur yang telah mendapatkan vaksin sebanyak 79,75% dari target 90%.

TPB 4: Pendidikan Berkualitas

Aktivitas membaca dan kemampuan numerisasi merupakan edukasi pendidikan bagi anak-anak sejak masuk usia sekolah. Pada tahun 2022 kemahiran membaca dan matematika anak-anak dan remaja di Provinsi Kalimantan Timur terbilang baik (4.1.1.(a)). Usia 5 tahun mencapai 54,12% dari target yang telah ditetapkan (55%), dan usia 8 tahun melebihi target diangka 55,16%. Selain itu juga upaya Provinsi Kalimantan Timur untuk

mendukung capaian lulusan jenjang pendidikan anak menunjukkan tren positif mencapai angka 100 untuk tingkat SD/ sederajat dan SMP/sederajat. Untuk tingkat SMA/sederajat masih dikisaran 70%. Kemahiran dibidang membaca juga didukung dengan angka melek aksara di Kalimantan Timur. Angka melek aksara pada usia 15 tahun ke atas di Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 98,95 persen lebih baik dibandingkan tahun 2021 diangka 98,90 persen (4.6.1). Akan tetapi angka melek aksara mengalami penurunan setiap tahunnya (2018-2022), walaupun demikian angka penurunan tersebut tidak terlalu signifikan dan masih mendekati angka 100 persen sesuai target yang ditetapkan, artinya penduduk usia 15 tahun keatas di Kalimantan Timur memiliki kemampuan membaca dan menulis. 8 Adapun angka untuk anak tidak sekolah pada jenjang SD/sederajat di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 sangat baik mendekati angka nol persen pada kisaran 0,40% walaupun angkanya relatif turun sedikit setiap tahunnya. Yang paling tinggi anak tidak sekolah pada jenjang SMA/ sederajat sebesar 12,97%. Angka ini menunjukkan ada 13% anak usia sekolah pada jenjang SMA/sederajat yang tidak terdaftar pada satuan jenjang pendidikan tersebut (4.1.2.(a)). Selain itu juga, untuk melihat angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menggunakan angka partisipasi kasar (APK). Nilai APK bisa lebih dari angka 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak diluar batas sekolah. Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kondisi baik pada angka partisipasi sekolah di tingkat pendidikan SD atau sederajat mencapai 103,52%, sedangkan pada tingkat jenjang pendidikan Perguruan Tinggi masih rendah dibandingkan jenjang pendidikan lainnya seperti SD, SMP atau SMA. Walaupun dibidang rendah, angka partisipasi pada jenjang Perguruan Tinggi dibidang cukup baik dikarenakan melebihi target pada tahun 2022 mencapai 40,35%. Secara umum Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMALB/SMK dengan target 94% dan realisasi 96,77% dengan capaian kinerjanya 111,38%. Rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang Perguruan Tinggi salah satunya disebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kaltim untuk meringankan biaya pendidikan khususnya bagi siswa miskin dan berprestasi adalah dengan adanya beasiswa KALTIM TUNTAS (<https://beasiswa.kaltimprov.go.id/>).

Mengukur kesenjangan antar kelompok untuk mengakses pendidikan bisa dilihat dari Rasio Angka Pendidikan Murni (APM). Provinsi Kalimantan Timur terbilang sangat baik angka APM pada jenjang SD atau sederajat yang mendekati angka 100. Akan tetapi pada jenjang pendidikan di atasnya SMP, SMA dan Perguruan Tinggi jauh mendekati angka 100. Tahun 2022, APM di Kaltim pada jenjang SD 99,93%, SMP 81,30%, SMA 69,30% dan Perguruan Tinggi 30%. setiap tahunnya. Persentase kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pemuda dan dewasa yang memiliki keterampilan TIK di Provinsi Kalimantan Timur (4.4.1). Upaya lain yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah sumber daya manusia melalui standarisasi kompetensi guru yang ada. Pada tahun 2022 capaian standar kompetensi guru di Kaltim sebagai pengajar terbilang baik sekitar 95,74 persen dan hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Harapannya indikator ini mampu meningkatkan pembangunan manusia yang ada di Kaltim lebih baik lagi dan mampu bersaing pada era saat ini yang mengalami perubahan sosial begitu cepat dibarengi dengan teknologi yang modern (4.c.1).

TPB 5: Kesehatan Gender

Tujuan 5 adalah Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. Meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan dalam mengembangkan bakat dan potensinya, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Pembangun yang adil dan berkelanjutan harus menjamin akses perempuan dan anak perempuan terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan yang layak, bermasyarakat serta memiliki hak membuat keputusan dalam bidang politik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat mendukung kebijakan responsif gender melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Partisipasi penuh perempuan untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan perlu diakomodasi dikarenakan partisipasi perempuan di Indonesia masih di bawah 30 persen. Untuk di Kalimantan Timur, partisipasi perempuan yang aktif dan terlibat dalam politik maupun posisi manajerial mengalami kemajuan. Dalam bidang politik, proporsi perempuan di tingkat parlemen pusat pada tahun 2022 mencapai 23,2 persen naik sekitar 2,83 persen dari tahun 2021. Demikian pula proporsi perempuan dalam manajerial pada tahun 2022 mencapai 33 persen. Kesetaraan gender bukan hanya berbicara

peran aktif dalam keterlibatan posisi manajerial dan politik saja, namun juga kemampuan untuk memanfaatkan teknologi pada era revolusi industri 4.0. Penguasaan masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi melalui akses terhadap jaringan seluler. Pada tahun 2022, proporsi individu yang memiliki telepon genggam di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan efek pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan lebih banyak dirumah dan berinteraksi menggunakan media sosial atau secara daring. Pada tahun 2020 mencapai 76,71%, 2021 sebanyak 81,10% dan 2022 sebanyak 82,37%.

TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Dari 11 12 indikator, 8 indikator telah mencapai target, 2 indikator perlu perhatian khusus, dan 1 indikator masih belum tersedia data. Indikator yang telah tercapai adalah: 88,5% rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (6.1.1.*), 34% rumah tangga yang Untuk praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (6.2.1*), 0,19% rumah tangga akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) (d) (6.2.1.*), 0,19% rumah tangga akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja (e) (6.2.1.*), proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya pada air permukaan (6.4.2.(a)) sebesar 5,04% dan air tanah (6.4.2.(b)) sebesar 74%,Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dengan skor 82 (6.5.1.*), dan perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu (6.6.1.*) sebesar 54,3% dari target 53,8%. Meskipun indikator 6.2.1* telah berada di bawah target, yaitu 34% dari 60% rumah tangga yang Untuk praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka, namun secara tren menunjukkan angka yang meningkat dari tahun sebelumnya (30%). Sedangkan indikator yang masih memerlukan perhatian khusus adalah rumah tangga yang menggunakan sanitasi yang dikelola secara aman (b) (6.2.1*) dan limbah industri cair yang diolah secara aman (6.3.1.(a)).

TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan 7 di Kalimantan Timur menunjukkan 4 indikator yang dimana 2 indikator telah tercapai yaitu Rasio Elektrifikasi (7.1.1*), Konsumsi Listrik Per Kapita (7.1.1.(a)) dan 2 indikator yang masih perlu perhatian khusus yaitu Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (7.1.2(a)), Rasio

penggunaan gas rumah tangga (7.1.2.(b)). Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah berhasil karena memenuhi capaian dari target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari Rasio Elektrifikasi (7.1.1*) dimana terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dan melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 92,29 dari target 92,00 dan (Indikator 7.1.1(a*)) dengan capaian 1.103 dari target 1.100. Demikian halnya dengan indikator Tujuan 7 lainnya dimana masih ada indikator belum mencapai target yang ditetapkan yaitu (Indikator (7.1.2.(a)) yaitu mencapai 62.735 dari target 89,062 dan (Indikator 7.1.2.(b)) yaitu mencapai 4,96 dari target 7,0026.

TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pemulihan pasca terjadinya Covid-19. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita (indikator 8.1.1.*) sebesar 3,53% hingga triwulan III tahun 2022. Capaian ini melampaui target yang diestimasikan sebesar 2,51%. Indikator lain yang menunjukkan pemulihan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur ditunjukkan dengan tercapainya nilai PDRB per kapita (indikator 8.1.1.(a)) yang kembali meningkat pada tahun 2021 mencapai Rp 182,54 juta. Bahkan, nilai PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Semakin membaiknya perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, juga mendorong tingginya persentase proporsi lapangan kerja informal (indikator 8.3.1.*) pada tahun 2021 yaitu sebesar 46,49%, dimana angka ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam RAD yaitu 27,50%. Sementara, indikator lainnya seperti tingkat pengangguran terbuka (indikator 8.5.2.*) telah mencapai 5,71% dari target 5,1% dan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (indikator 8.6.1*) telah mencapai 21,56% dari target 15,4%. Berikutnya mengenai jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa di Provinsi Kalimantan Timur (indikator 8.10.1*), yaitu pada tahun 2022 tercatat 111 unit dari target 100 unit. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyediakan pekerjaan layak dan menumbuhkan ekonomi, menunjukkan capaian membaik walaupun belum mencapai target. Peningkatan capaian ditunjukkan melalui laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (indikator 8.2.1.*) pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur yang tumbuh positif 0,84% dari target 2,05% setelah pada tahun sebelumnya sempat tumbuh negatif. Indikator lainnya yaitu penurunan tingkat setengah pengangguran

(indikator 8.5.2.(a)) sebesar 4,81% dari target 2,7% dan upah rata-rata per jam pekerja (indikator 8.5.1.*) yang mencapai 23,94 ribu rupiah dari target 35,82 ribu rupiah. Capaian tujuan pemulihan ekonomi lainnya pasca pandemi Covid-19, diketahui jumlah kunjungan wisatawan nusantara (indikator 8.9.1.(b)) tahun 2021 yang datang ke Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,7 juta orang dari target 6,5 juta orang.

TPB 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tersedianya infrastruktur yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari kondisi mantap jalan nasional (indikator 9.1.1(a.)), di mana pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 75,8% dari target 68,04%. Peningkatan konektivitas infrastruktur lainnya dapat dilihat melalui jumlah bandara (indikator 9.1.2.(a)) yang telah dibangun Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan 2022 sebanyak 9 unit dari target 10 unit. Selain itu, dukungan pembangunan infrastruktur transportasi laut dan sungai juga dapat dilihat dari banyaknya jumlah pelabuhan penyeberangan (indikator 9.1.2.(b)) yang dibangun sebanyak 6 unit dari target 6 unit. Peningkatan infrastruktur transportasi laut juga diketahui melalui jumlah pelabuhan strategis (indikator 9.1.2.(c)) yang telah dibangun sebanyak 14 unit dari target 14 unit. Seiring pembangunan dan bertambahnya jumlah infrastruktur yang berkualitas, memberikan efek kepada peningkatan jumlah penumpang dan barang yang keluar masuk di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti jumlah penumpang berdasarkan moda transportasi (indikator 9.1.2.*(a)) yang telah mencapai 8 juta orang dari target 6 juta orang. Sementara, terkait jumlah barang berdasarkan moda transportasi (indikator 9.1.2.*(b)) telah mencapai 328 juta kilogram/koli dari target 337 juta kilogram/koli. Pemulihan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pasca Covid-19, turut berimbas pada peningkatan industri manufaktur. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mencapai 19,86% dari target 8,96%. Sedangkan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (indikator 9.2.1.(a)) mencapai 2,29% dari target 5,4%. Angka pertumbuhan ini berangsur positif mengingat adanya perbaikan kinerja industri manufaktur pasca Covid-19. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menurunkan gas rumah kaca yang bersumber dari industri menunjukkan capaian yang membaik, walaupun belum mencapai target. Indikator mengenai rasio emisi CO₂/emisi gas rumah kaca dengan

nilai tambah sektor industri manufaktur (indikator 9.4.1.*) mencapai 43,23% dari target 48,94%.

TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan

Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai Tujuan 10 menunjukkan hasil yang membaik, walaupun ada indikator belum mencapai target. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini (indikator 10.1.1.*) pada tahun 2022 menunjukkan capaian 0,327% dari target 0,308%. Sementara itu, persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional (indikator 10.1.1.(a)) telah mencapai 6,31% dari target 5,78%. Indikator lainnya mengenai proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, diketahui menunjukkan capaian 1,13% dari target 1,50%. Dalam upaya meningkatkan status kemandirian daerah dan desa, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah berhasil karena memenuhi capaian dari target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari jumlah desa tertinggal (indikator 10.1.1.(b)) dengan capaian 40 unit dari target 40 unit, jumlah desa mandiri (indikator 10.1.1.(c)) dengan capaian 19 unit dari target 19 unit dan jumlah daerah tertinggal (indikator 10.1.1.(d)) yang telah mencapai 4 unit dari target 4 unit. Berkaitan dengan upaya menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kebijakan yang diskriminatif, indeks kebebasan (indikator 10.3.1.(a)) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah mencapai angka 10 dari rasio target 9,3. Sama halnya dengan jumlah kebijakan yang diskriminatif (indikator 10.3.1.(d)) dimana telah mencapai 10 dari yang ditargetkan 10 paket. Sementara itu, terkait proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (indikator 10.4.1.(b)) menunjukkan capaian 53,95% dari target 80%.

TPB 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Dari 15 indikator, 7 indikator telah mencapai dan melampaui target, 3 indikator akan tercapai, 2 indikator memerlukan perhatian khusus dan 3 indikator belum tersedia data. Indikator yang telah mencapai atau melampaui target adalah: persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (11.1.1.(a)), proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik (11.2.1.(a)), rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk 11.3.1.(a), Indeks

Kualitas Udara (11.6.2.(b)), proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS (11.a.1.(a)), persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal (11.c.1.(a)), dan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB 11.5.2.(a). Indikator yang memerlukan perhatian khusus adalah orang yang terdampak bencana (11.5.1*) dan persentase pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana, di mana baru 4 kabupaten/kota yang memiliki kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan 12 adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yaitu melalui penurunan sisa makanan sepanjang produksi 12.3.1.(a) yang telah mencapai target dan didukung pula oleh keseriusan untuk mengembangkan potensi pariwisata di wilayah pesisir (12.b.1.(a)) yang menjadi peluang ekonomi sehingga perlu dikembangkan dengan memperkenalkan produk lokal yang ramah lingkungan serta budaya masyarakat yang berada di masing-masing destinasi wisata. Pengendalian kualitas lingkungan juga tetap dilakukan terutama untuk mengurangi limbah B3 (12.4.2.*(a)) untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan, di mana salah satu strategi yang dilakukan Kalimantan timur adalah penetapan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1.(a)) yang di dalamnya juga berupaya untuk memberi perhatian khusus dalam penanganan limbah B3 (12.4.2.*(a)) terutama di sektor pertambangan batubara dan pabrik kelapa sawit. 4 (empat) indikator dalam Tujuan 12 telah tercapai, yaitu Persentase Sisa Makanan (12.3.1.(a)) dengan angka 45,42% dari target 40%, Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang (12.5.1.(a)) sebesar 987.718,64 ton, Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1.(a)) sebanyak 107 perusahaan, dan Jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development* (12.b.1.(a)) sebanyak 3 unit. Namun demikian, masih terdapat 2 (dua) indikator yang memerlukan perhatian khusus, yaitu indikator 12.4.2.*(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita dan indikator 12.4.2.*(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengelolaannya.

TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim

Pencapaian tujuan 13 dengan memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi (13.1.1.*) masih perlu ditindaklanjuti, hal ini disebabkan jumlah korban masih tinggi yaitu 14000 jiwa. Keseriusan 17 pemerintah daerah mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan (13.1.3*) perlu diperkuat dalam rangka memperkuat aksi adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi dampak ekonomi akibat bencana. Kalimantan Timur telah berkomitmen untuk Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), pada indikator 13.2.2.(a). potensi penurunan emisi GRK 36,4 Juta tCO₂e dan emisi GRK 51,46 Juta tCO₂e (13.2.2.*). Potensi penurunan emisi GRK diakibatkan oleh sekuestrasi dari sektor lahan.

TPB 14: Ekosistem Lautan

Kalimantan Timur dalam Tujuan 14 berperan dalam Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan. Tingkat penerapan kerangka hukum (14.b.1.*) sudah tercapai untuk menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar dengan capaian 4 di mana jumlah nelayan yang terlindungi (14.b.1.(b)) sudah pada capaian target 3.450 pada tahun 2022, kemudian untuk mendukung hal tersebut juga didasarkan oleh kepatuhan pelaku usaha (14.6.1.(a)) yang menunjukkan capaian 36,4% di atas *baseline* 33,6%.

TPB 15: Ekosistem Daratan

Kalimantan Timur memiliki Kawasan Hutan dengan luas 8,3 juta hektare (65,5%). Salah upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan luasan tutupan lahan dari deforestasi dan degradasi hutan melalui penetapan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dengan luas 101.500 hektare yang berada di APL. Kalimantan Timur juga memiliki 14 Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) merupakan ekosistem di luar kawasan konservasi yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, yang mencakup ekosistem alami dan buatan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. Melihat dampak KEE terhadap konservasi cukup signifikan 18 maka sejak tahun 2022 pengelolaan KEE difokuskan pada 2 KEE yaitu KEE Wehea - Kelay di Kabupaten Kutai Timur

hingga Kabupaten Berau, kemudian KEE Mesangat - Suwi di Kabupaten Kutai Timur yang telah beroperasi penuh hingga saat ini, sedangkan 12 KEE telah dipetakan untuk tindak lanjut program pengembangan pada 2022.

TPB 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar, pada proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dalam pencapaiannya akan mencapai target yang ditetapkan yaitu 58.95% dengan target sebesar 55.42%. (indikator 16.1.4*) walaupun pada Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir melampaui dari target yang ditetapkan (indikator 16.1.1 (a)) dan menjadi 2 kali lipat lebih tinggi dari periode tahun sebelumnya sedangkan untuk kematian yang disebabkan oleh kondisi konflik dapat mencapai tujuan dan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 0% (Indikator 16.1.2a), untuk proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir menurun cukup signifikan dari periode tahun sebelumnya walaupun pada kenyataannya masih melebihi dari target yang sudah ditetapkan (Indikator 16.1.3). Dalam hal menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak, Pemerintah Kalimantan Timur memastikan kesejahteraan anak sebagai prioritas perencanaan pembangunan berkelanjutan. Sementara pada proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir perlu mendapatkan perhatian khusus karena melebihi target yang ditetapkan (indikator 16.2.1 (a)) termasuk dengan prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami satu bentuk kekerasan atau lebih sepanjang hidup dengan capaian target 3% dari *baseline* 5% (indikator 16.2.1 (b)) dan untuk proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi mencapai 0 dengan target 30. Terkait dengan Misi 5 Pemerintah Kalimantan Timur dalam RPJMD 2019- 2023 yaitu Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik, pada indikator 16.6.1(a) persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Wajar Tanpa 19 Pengecualian (WTP) mencapai target 100% termasuk juga dengan indikator 16.6.1.(b) mengenai persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B telah mencapai 89.19% dengan target 79% sedangkan pada

persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B akan mencapai target 75% dari capaian 68.1% (indikator 16.6.1.(c)). Untuk jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik berjumlah 4 dan ini telah mencapai target yang ditetapkan (Indikator 16.6.2.(a)) Terkait misi 1 Pemerintah Kalimantan Timur dalam RPJMD 2019-2023 yaitu berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia terutama perempuan dan penyandang disabilitas, peran serta perempuan semakin ditingkatkan, untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga Kalimantan Timur. Dilihat dari persentase keterwakilan perempuan di (a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat tercapai 23,2% dari target 20,5% dan (b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi tercapai 20% dari target 9,09% dan akan tercapai untuk (c) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 16,42% dari target 30% (Indikator 16.7.1.(a) dan demikian pula pada persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) akan mencapai target dengan hasil capaian 10,79% dari target 18% (Indikator 16.7.1.(b)). Masih terkait dengan Misi I Kaltim, sesuai dengan tujuan dan sasaran I pada dokumen RPJMD untuk Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur merupakan publikasi yang memberikan gambaran kondisi demokrasi Indonesia melalui 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Pada capaian Kaltim untuk Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi sangat baik sesuai dengan target yang ditetapkan (Indikator 16.7.2.(a)) begitu juga dengan Indeks Aspek Kebebasan sebesar 96,13 dari target 92,49 (Indikator 16.7.2.(b)) artinya hampir tidak ada hambatan di dalam kebebasan, berbeda dengan Indeks Kesetaraan walaupun masih belum mencapai target dengan capaian 74,56 dari target 90 (Indikator 16.7.2.(c)) tetapi Pemerintah Kaltim terus berupaya untuk memberdayakan semua unsur terutama perempuan hal ini perlu mendapatkan dukungan terutama pejabat publik dan Lembaga-Lembaga Demokrasi untuk menjaga capaian agar semakin baik kedepannya. Serta merawat kinerja demokrasi dan meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan praktik-praktik demokrasi di Kalimantan Timur. Persentase anak balita yang memiliki akta kelahiran terus meningkat meski peningkatannya cukup lambat, yaitu dari 84.83% di tahun 2019 menjadi 85.78% di tahun 2020 kemudian menurun menjadi 83.08% di tahun 2021 sedangkan target yang ditetapkan yaitu 98% (Indikator 16.9.1). Sedangkan Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun

pada 40% berpendapatan bawah mencapai 90.4% dari target 99% (Indikator 16.9.1.(a)) dan persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun mencapai 93.16% dari 99% target yang ditetapkan (Indikator 16.9.1.(b)). Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kelahiran kepada instansi pelaksana setempat. Dengan adanya akta kelahiran tersebut merupakan pengakuan anak dihadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak tidak terjadi. Di Kalimantan Timur jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional (Indikator 16.b.1.(a)) telah mencapai target yang ditetapkan. Pada indikator ini melihat adanya hukum dan kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan sebagai acuan untuk pembatalan maupun reformasi kebijakan. Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media (6.10.1.(a.)) mencapai target dari 2 yang ditargetkan hanya 1 yang tercatat, sedangkan jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif akan mencapai target (16.10.2.(a)).

TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pemulihan ekonomi sepanjang tahun 2021 berdampak positif terhadap kinerja fiskal Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tercatat bahwa total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya (indikator 17.1.1.*) mencapai 121,57% dari yang ditargetkan 100%. Selain itu, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (17.1.1.(a.)) mencapai 2,74% dari target 0,74%. Sedangkan proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik (indikator 17.1.2.*) telah mencapai 46,45% dari target sebesar 49,56%. Positifnya kinerja fiskal Kalimantan Timur turut memberikan dampak kepada pertumbuhan ekspor produk nonmigas (indikator 17.11.1.(a)) yang menyumbang sebesar 87,12% dari target 90%. Ekspor non migas Kalimantan Timur didominasi oleh komoditas batu bara. Sempat tumbuh negatif pada tahun 2019 dan 2020, ekspor produk non migas Kalimantan Timur mampu *rebound* tumbuh positif 87,12% di tahun 2021. Selain karena pengaruh *low base effect*, level pertumbuhan yang tinggi ini juga disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasokan batu bara sebagai sumber energi bagi industri dan pembangkit listrik oleh negara-negara mitra 21 dagang Kalimantan Timur memasuki masa normal baru pandemi Covid-

19, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian global. Untuk mencapai pembangunan yang progresif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan kerja sama baik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat sipil dan pihak-pihak yang mempunyai pengalaman serta strategi pembangunan. Hal ini tercermin dalam Dokumen Daftar Rencana Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (DRK KPBU) yang diterbitkan setiap tahun (indikator 17.17.1.(a)), dalam hal ini terdapat 1 unit dokumen yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dokumen ini berkenaan dengan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah Manggar di Kota Balikpapan. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait indikator lainnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki data terkait jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (indikator 17.17.1.(b)) dan jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi (indikator 17.17.1.(c)). Indikator lain yang juga penting namun belum memiliki data mengenai proporsi *Official Development Assistance* (ODA) terhadap PDB dan PNB (indikator 17.2.1.(a)). Capaian selanjutnya mengenai dukungan Tujuan 17 yaitu tersedianya data untuk melakukan pengukuran atas pembangunan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020 (indikator 17.19.2.(a)) yang telah terlaksana di Kalimantan Timur sebanyak 1 kali. Sedangkan dukungan data lainnya melalui registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*) (indikator 17.19.2.(b)) telah dikumpulkan dan tersedia di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Upaya lain dalam mendukung Tujuan 17 yaitu persentase pengguna internet (indikator 17.8.1.*) di Provinsi Kalimantan Timur. Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur mencatat bahwa proporsi individu pengguna internet pada tahun 2022 telah mencapai 80,56% dari target 80%. Angka ini bahkan melebihi dari capaian tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar 60-70% individu yang menggunakan internet. Capaian ini juga menandakan bahwa hampir semua penduduk Kalimantan Timur telah memiliki akses pada jaringan internet.

h. Ekonomi Biru (*Blue Carbon*)

Ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.

Ada berbagai sektor yang termasuk di dalamnya, seperti perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, hingga mitigasi perubahan iklim. Dengan perkembangan kondisi saat ini maka *Green Economy* (pembangunan dari teresterial) sudah dirasakan tidak memadai sehingga perlu ada perkembangan ke arah *Blue Economy* (pengembangan kemaritiman).

Dengan pengembangan Ekonomi Biru selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan laut, dapat juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur karena distribusi pertumbuhan ekonomi kemaritiman belum optimal, misalnya dari perikanan, industri dan jasa maritim, pariwisata dan perhubungan. Kalimantan Timur dapat melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi biru melalui multi sektor baik dari sektor kelautan perikanan, serta pariwisata yang tetap menjamin keberlangsungan usaha dan lingkungan hidup. Dengan konsep Ekonomi Biru ini berarti menciptakan sistem ekonomi yang *zero waste* atau nir limbah dan *zero emission*, dan saat yang sama menciptakan lapangan kerja, memberikan dampak positif pada sosial, dan tidak memerlukan biaya tinggi.

Konsep *Blue Economy* berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi yang dilaksanakan saat ini tidak berdampak negatif dan tetap berkelanjutan.

Pada sektor perikanan, nelayan menjadi target utama dalam penerapan konsep ekonomi biru. Pengelolaan *supply chain* sumber daya laut menjadi wawasan dan pengetahuan yang perlu mereka pahami untuk mempertahankan kebermanfaatan ekosistem laut. Pada sektor ini dilakukan dengan mendorong: (a) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota, (b) Pembangunan budidaya laut, pesisir laut, dan pesisir darat yang berkelanjutan, (c) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (d) Pembersihan sampah plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut. Sehingga akan lebih produktif dan berwawasan lingkungan yang diharapkan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada Sektor Pariwisata, adalah pendekatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam mengembangkan industri pariwisata, dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Wilayah ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, kawasan wisata alam laut dan kawasan

suaka margasatwa laut menjadi target dalam penetapan konsep ekonomi biru. Konsep pembangunan/pengembangan di Pariwisata adalah berbasis masyarakat yaitu CBT (*Community Based Tourism*) yang merupakan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan pariwisata dalam rangka pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan mata pencaharian sekaligus sebagai pelestarian ekosistem disekitarnya.

Konsep ekonomi biru pada sektor pariwisata ini mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Konservasi lingkungan: Industri pariwisata dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan, seperti polusi, kerusakan alam, dan pemanasan global. Oleh karena itu, sektor pariwisata bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif ini dengan mengembangkan praktik-praktik pariwisata berkelanjutan, seperti pengelolaan limbah yang baik, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian sumber daya alam.
2. Pemberdayaan masyarakat: bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat lokal dalam industri pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam sektor pariwisata, serta memberikan kesempatan kerja yang adil dan berkelanjutan.
3. Pertumbuhan ekonomi: sektor pariwisata juga menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan dari pariwisata, dan mempromosikan investasi yang berkelanjutan.

Dengan menerapkan konsep ekonomi biru pada sektor pariwisata, diharapkan dapat menciptakan industri pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Demikian masih banyak upaya strategis yang dapat dijalankan untuk sektor-sektor lainnya, terutama pada sektor pembangunan perekonomian berbasis lahan, yang menyumbang emisi terbesar dari Kalimantan Timur.

4.2.4. Telaahan Daerah Sekitar

Pembangunan di Kalimantan Timur memperhatikan kebijakan pembangunan daerah sekitar, terutama daerah yang berbatasan langsung.

Penyusun RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat dilakukan telaahan sebab saat ini juga sedang menyusun RPD. Penyajian visi, misi dan sasaran ketiga provinsi sekitar disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.3
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No.	Uraian RPJMD Daerah Sekitar
I	RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026
	(Perda Nomor 5 Tahun 2021)
	Visi: “TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA”
	Misi:
1	Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2	Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.
3	Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktivitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan.
4	Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5	Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktivitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan.
6	Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota.
7	Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara.
8	Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah.
9	Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan.
10	Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
11	Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12	Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota.
13	Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
14	Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kubudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.
	Sasaran:
1	Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah
2	Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana

No.	Uraian RPJMD Daerah Sekitar
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Masyarakat
6	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat
7	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon
8	Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan
9	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar
11	Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata
12	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama
13	Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Listrik Dan Energi Baru Terbarukan
14	Meningkatnya Pengarus- Utamaan Gender
15	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan
16	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM
17	Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi
18	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat
19	Meningkatnya Kemandirian Desa
20	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan Dob Yang Diusulkan
II	RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
	(Perda Nomor 6 Tahun 2021)
	Visi: “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”
	Misi:
1	Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2	Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
4	Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5	Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender
	Sasaran:
1	Meningkatnya Ketercukupan Energi
2	Meningkatnya Konektivitas Wilayah
3	Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat
4	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
6	Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat
7	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
8	Menurunnya Kemiskinan Di Pedesaan dan Perkotaan
9	Memenuhi Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi
10	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah Serta Antisipasi Penanganan Terhadap Bencana Kerawanan Pangan dan Pandemi
11	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel
13	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan
14	Meningkatnya Kualitas Beribadah
15	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan
16	Meningkatnya pemberdayaan perempuan
III	RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

No.	Uraian RPJMD Daerah Sekitar
	(Perda Nomor 2 Tahun 2022)
	Visi: “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”
	Misi:
1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
2	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
3	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
5	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana
	Sasaran:
1	Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama
2	Meningkatnya Akses Pendidikan
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
4	Meningkatnya Pengeluaran Perkapita
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesetaraan Gender
6	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial
7	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pemuda
8	Menurunnya Pernikahan Anak
9	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan
10	Meningkatnya Prestasi Olahraga
11	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, dan Pariwisata
12	Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah
13	Meningkatnya Pendapatan masyarakat
14	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
15	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar
16	Meningkatnya Konektivitas antar kawasan
17	Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan
18	Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN
19	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah
20	Meningkatnya Pelayanan Publik
21	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi
22	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
23	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca
24	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana

Sumber: Perda RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, Perda RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dan Perda RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

4.2.5. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran kondisi daerah yang membutuhkan perhatian dan upaya penanganan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan bersama dengan beberapa hal lain menjadi *input* untuk perumusan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur untuk pembangunan periode tahun 2024-2026. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu strategis, yaitu:

- d. Permasalahan pembangunan
- e. Isu internasional
- f. Isu atau kebijakan nasional
- g. Isu atau kebijakan Provinsi Kalimantan Timur
- h. Telaahan RPJMD/RPD daerah sekitar

Isu strategis dapat digambarkan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis pembangunan di Kalimantan Timur tahun 2024-2026 meliputi:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Pemerataan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Membangun sumber daya manusia di wilayah Kalimantan Timur adalah bagaimana memperkuat kualitas sumber daya manusia yang mampu mendukung proses transformasi ekonomi wilayah Kalimantan Timur menuju ekonomi berkelanjutan serta didukung pengetahuan dan inovasi. Posisi strategis Kalimantan Timur sebagai daerah asal IKN dan menjadi mitra pembangunan IKN memberikan peluang sekaligus tantangan bagi SDM di Kalimantan Timur. Merespons kondisi tersebut, pembangunan daerah untuk 3 (tiga) tahun kedepan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan SDM, antara lain sistem pendidikan dan sistem kesehatan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Perbaikan sistem pendidikan, utamanya revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi perlu terus menjadi perhatian. Selain itu, penataan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga pengajar juga perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Sementara itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan diarahkan selain untuk peningkatan layanan yang menjangkau masyarakat sampai ke pelosok, juga diharapkan lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan.

b. Peningkatan Daya saing tenaga kerja

Perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, penambahan penduduk dan persaingan ekonomi menuntut SDM Kalimantan Timur yang terampil dan unggul agar memiliki daya saing yang tinggi. Penguatan SDM menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja. Kolaborasi antara pemerintah dan industri perlu didorong mulai dari perancangan program dan desain kurikulum, standar pelatihan hingga penyelenggaraan pelatihan kerja, sehingga kebijakan *link and match* dapat benar-benar berjalan. Dengan demikian, dapat dihasilkan tenaga kerja yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja. Lebih lanjut, dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, diharapkan tenaga kerja di Kalimantan Timur dapat mengembangkan usaha dan mandiri, bahkan diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru.

c. Peningkatan daya saing perempuan

Ketimpangan gender di Kalimantan Timur masih terjadi. Hal ini tergambar dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih rendah. Secara khusus bila membahas peran perempuan dalam pembangunan, maka indikator IDG Kalimantan Timur masih rendah bila dibandingkan daerah lain di Pulau Kalimantan dan berada di bawah IDG nasional. Hal ini menunjukkan Kaltim masih terjadi ketimpangan/ketidaksetaraan gender pada partisipasi perempuan dalam pembangunan. Untuk itu perlu perhatian yang besar untuk peningkatan kualitas hidup perempuan sehingga dapat berdaya dan produktif.

2. Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

a. Diversifikasi ekonomi

Tantangan pembangunan ekonomi wilayah Kalimantan Timur ke depan adalah membangun keterkaitan hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan yang dapat menjadi basis perekonomian Kalimantan Timur masa mendatang. Transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Kalimantan Timur.

Transformasi dari ekonomi berbasis SDA tak terbaharukan menjadi ekonomi berbasis SDA terbaharukan merupakan tantangan utama yang perlu disiapkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam jangka menengah dan panjang. Proses menipisnya stok SDA tak terbaharukan merupakan hukum alam yang tidak dapat dicegah, sehingga transformasi menjadi suatu keharusan guna menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah Kalimantan Timur. Sektor non migas memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi dari sektor migas. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor-sektor non pertambangan yang saat ini belum dimaksimalkan memiliki perilaku pertumbuhan alami yang menjanjikan.

Kalimantan Timur berfokus pada pertambangan batubara yang merupakan sektor primer sebesar 76%, yang seharusnya sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa) harus lebih ditingkatkan dengan adanya inovasi hasil sektor tersebut. Diperlukan otoritas pengawasan pada tingkat daerah untuk mengurangi degradasi lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan. Pemerintah bersama dengan pelaku pembangunan lainnya perlu melakukan kolaborasi sektor perkebunan dan peternakan untuk memperkuat produktivitas daerah. Berbagai upaya untuk pengembangan sektor-sektor unggulan non migas dan tambang perlu ditempuh, seperti pendekatan industri teknologi bersih melalui penerapan transformasi digital dan industrialisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan secara berkelanjutan; pembangunan rendah karbon melalui ekonomi sirkular; industri hijau; peningkatan ekowisata dan pariwisata dan penggunaan bahan kimia dan produk kimia dan energi rendah karbon.

a. Peningkatan Keberdayaan ekonomi masyarakat

Masalah kesejahteraan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan dengan masalah kemiskinan dengan akar masalah yang sebagian berbeda-beda pada setiap daerah kabupaten/kota. Penanganan kemiskinan

terutama kemiskinan ekstrem menjadi perhatian pemerintah Kalimantan Timur. Berbagai upaya telah dilakukan dan masih terus dilaksanakan, antara lain upaya untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk kemandirian, meningkatkan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, serta penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak.

Pemerintah daerah juga terus berusaha untuk meningkatkan dan menguatkan partisipasi UMKM dan koperasi. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan kerja. Pengembangan usaha UMKM dan koperasi diarahkan juga untuk mengolah produk-produk lokal hasil pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, serta unggulan lainnya diluar non migas dan tambang.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur

Pengembangan perekonomian daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal. Pembangunan Kalimantan Timur beberapa tahun diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu layanan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, telekomunikasi dan listrik diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu, infrastruktur juga diarahkan ke kawasan-kawasan strategis yang mampu membangkitkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur.

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur

Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang berdekatan dengan Ibukota Negara Nusantara memiliki posisi strategis sebagai penggerak perekonomian negara. Perlu ketersediaan infrastruktur dasar termasuk infrastruktur yang mendukung perekonomian, yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan IKN.

Masalah utama yang ditemui adalah ketersediaan infrastruktur yang belum merata. Selain itu, kondisi infrastruktur yang sebagian tidak dalam kondisi baik, menyebabkan pelayanan tidak optimal. Terjadi kerusakan pada beberapa ruas jalan yang disebabkan faktor *Over Dimension* dan *Over Load* di beberapa ruas jalan sehingga perlu penanganan serius dengan membuat jaringan jalan khusus untuk moda transportasi pertambangan dan perkebunan sawit dan penegakan hukum terkait penggunaan jalan.

4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup

a. Peningkatan kualitas air, air laut, udara dan tutupan lahan

Pembangunan Kalimantan Timur selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ditengah upaya pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha membangun Kalimantan Timur, komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup juga terus dilakukan.

Upaya menjaga kualitas lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh kualitas air, air laut, udara, dan lahan diharapkan dapat mempertahankan

kualitas lingkungan hidup. Beberapa potensi yang mempengaruhi upaya menjaga kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur antara lain industri petrokimia, migas, batubara, pengolahan kayu, perkebunan, permukiman, pertambangan, peternakan, jumlah kendaraan, limbah padat, sarana transportasi, beban limbah cair dan limbah B3 dari sarana penginapan dan rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar dan timbunan sampah.

b. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau ditopang oleh pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim merupakan suatu keharusan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Provinsi Kalimantan timur bersama berbagai pihak termasuk masyarakat untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon. Program Pengurangan Emisi GRK: Program Pengurangan Emisi (*Emission Reduction/ER* program) dari deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur yang telah berlangsung sejak 2019-2024, dirancang bersama oleh Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Program ini merupakan program berbasis kinerja dibawah skema Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (*Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund/FCPF-Carbon Fund*) yang dikelola oleh Bank Dunia. FCPF merupakan kemitraan global pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan organisasi Masyarakat Adat yang berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang. ER Program di Kalimantan Timur merupakan salah satu contoh penerapan nilai ekonomi karbon untuk skema RBP (pembayaran berbasis kinerja).

Kedepan, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan penekanan yang besar pada penurunan emisi GRK dan intensitas emisi. Penurunan emisi GRK secara khusus diprioritaskan pada sektor kehutanan dan lahan, sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Penurunan emisi deforestasi dan degradasi hutan, pembangunan hutan tanaman, *sustainable management of forest*, dan rehabilitasi hutan merupakan beberapa aksi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon, sekaligus mendukung pencapaian target NDC. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak baik Pemerintah

Pusat, Pemerintah daerah, akademisi, pihak swasta, mitra pemerintah maupun penggiat dan aktivis lingkungan hidup untuk dapat mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Kalimantan Timur.

c. Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Potensi EBT seperti panas bumi, air, bioenergi, sinar matahari dan angin/ bayu sangat melimpah di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia seluas 120 juta hektar memiliki potensi sumber biomassa, energi air, dan panas bumi yang sangat besar. Dari data proyeksi penyediaan energi yang dimuat dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur, bauran energi primer Provinsi Kalimantan Timur dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu batubara, minyak bumi, gas bumi, dan EBT.

Beberapa penyebab harga EBT belum kompetitif yaitu adanya subsidi untuk BBM dan listrik serta masih mahalnya biaya dari sebagian besar teknologi EBT. Akibatnya hingga tahun 2015 EBT masih kalah bersaing dengan energi fosil. Hal ini menyebabkan pengembangan dan pemanfaatan EBT belum optimal dan mengakibatkan ketergantungan yang besar pada energi fosil. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan EBT adalah dengan mengalihkan subsidi yang semula dialokasikan untuk energi fosil menjadi subsidi untuk EBT.

Pencapaian target program RUED Kalimantan Timur diprioritaskan untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi. Bauran energi dari EBT ditargetkan mendekati sebesar 12,39% tahun 2025 dan sebesar 28,72% tahun 2050. Pencapaian bauran EBT meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dan swasta.

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penerapan reformasi birokrasi. Dalam dokumen tersebut, terdapat tiga sasaran reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur, yaitu: 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel; 2. Birokrasi yang Kapabel; dan 3. Pelayanan Publik yang Prima.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek yakni kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur. Bagi Pemerintah Daerah, reformasi birokrasi merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi di daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk penataan organisasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Penerapan *e-Government* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur saat ini sudah sebagian besar berbasis TIK. Adanya beberapa sistem informasi dan integrasi mampu menghasilkan Nilai Indeks SPBE yang meningkat dari tahun ke tahun. Adanya keterbukaan informasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) merupakan langkah awal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyampaikan jenis-jenis pelayanan dan kinerja Perangkat daerahnya.

Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur telah berkomitmen untuk mempercepat pembentukan MPP secara bertahap. Dengan adanya MPP maka pelayanan bagi masyarakat dari pemerintah pusat dan daerah akan terintegrasi dalam satu tempat sehingga memberikan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan. Selain itu, juga dapat berimplikasi dalam meningkatkan daya saing dengan memberikan kemudahan berusaha.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Selanjutnya, tujuan akan dijabarkan kedalam sasaran pembangunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPD berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 khususnya tahap terakhir (kelima). Selain itu, tujuan dan sasaran yang dihasilkan juga memperhatikan penyelarasan indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, evaluasi hasil RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, isu-isu yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.

Selain hal-hal sebagaimana dimuat pada paragraf sebelumnya, penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur juga memperhatikan isu pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Sebagai daerah asal wilayah IKN dan menjadi mitra pembangunan IKN, maka pada tahap awal pembangunan IKN yang sedang berlangsung saat ini, Provinsi Kalimantan Timur ini menangkap momentum tersebut dengan slogan pembangunan periode tahun 2024-2026 adalah **“MEMBANGUN KALTIM UNTUK NUSANTARA”**.

Slogan ini memberi semangat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk membangun daerah dengan memposisikan bahwa Kaltim adalah bagian dari proses pembangunan IKN. Membangun Kaltim untuk Nusantara bermakna bahwa pembangunan tiga tahun ke depan disinergikan dengan pembangunan IKN. Pembangunan IKN akan memberi pengaruh besar bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, demikian juga sebaliknya sehingga dapat terwujud percepatan pembangunan kedua wilayah.

Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Timur sebagai Daerah Mitra direncanakan menjadi penggerak pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan serta Kawasan Timur Indonesia. Salah satu fokus pembangunan Kalimantan Timur dari aspek penataan ruang yakni mendukung

pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua, melalui dukungan pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan, yang aman, modern, dan produktif, serta simbol identitas bangsa Indonesia, dan mengembangkan jaringan konektivitas antara IKN dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Slogan Membangun Kaltim untuk Nusantara pada tahap perencanaan pembangunan diterjemahkan ke dalam 4 (empat) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran strategis. Lebih lengkap mengenai tujuan dan sasaran strategis dalam RPD Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing yang dimaksud adalah SDM yang memiliki IPM tinggi dan terus meningkat serta tidak ada kabupaten/kota dengan IPM tertinggal (dibawah rata-rata nasional). Perwujudan daya saing SDM dilakukan dengan pemerataan taraf pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, penurunan pengangguran, dan pemberdayaan gender.

Sasaran strategis pada tujuan ke-1 meliputi:

- 1.1. Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat; yang dimaksud adalah terpenuhinya akses pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah dan masyarakat putus sekolah pada jenjang pendidikan wajib 12 tahun, serta mendukung akses dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi kepada masyarakat.
- 1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; yang dimaksud adalah pemerataan akses, sarana dan layanan fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui peningkatan kualitas dan perluasan layanan fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan mendukung Rumah Sakit Swasta serta pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa. Selain itu, pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk penurunan stunting sebagai dukungan terhadap komitmen nasional.
- 1.3. Menurunnya tingkat pengangguran; yang dimaksud adalah menurunnya TPT sebagai dampak diserapnya tenaga kerja lulusan SMK/ sederajat keatas juga menjadi ukuran keberhasilan peningkatan daya saing SDM.

1.4. Meningkatnya daya saing perempuan; yang dimaksud adalah meningkatnya daya saing perempuan di bidang ekonomi, keterwakilan di parlemen dan tenaga profesional melalui implementasi pengarusutamaan gender pada program/kegiatan di seluruh perangkat daerah.

2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuh stabil dan resilien dengan tidak mengandalkan pada sektor ekstraktif, sehingga dilakukan diversifikasi ekonomi (horizontal dan vertikal) pada sektor ekonomi unggulan untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh pada kisaran 4,50-5,30%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus mampu menyejahterakan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi juga harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang.

Sasaran strategis pada tujuan ke-2 meliputi:

2.1. Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi; yang dimaksud diversifikasi ekonomi secara horizontal adalah mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan (diluar sektor non-migas dan batubara) seperti sektor pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pangan, tanaman pangan, dan hortikultura, sektor industri dan sektor pariwisata). Sedangkan yang dimaksud diversifikasi ekonomi secara vertikal adalah mendorong penganekaragaman pengolahan komoditas-komoditas unggulan untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi (tidak hanya dipasarkan dalam bentuk produk mentah).

2.2. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin; yang dimaksud adalah meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat miskin menuju diatas garis kemiskinan. Memastikan kebutuhan dasar masyarakat miskin dapat terpenuhi melalui intervensi program/kegiatan pemerintah dalam mendorong usaha ekonomi kerakyatan untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan ekstrem didaerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemberian bantuan kepada masyarakat miskin,

meningkatkan usaha berbasis kerakyatan, serta pemberdayaan masyarakat miskin dalam BUMDes, UKM dan ekonomi kreatif.

- 2.3. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar; yang dimaksud adalah pembangunan fisik yang menunjang aktivitas ekonomi (termasuk infrastruktur dasar), antara lain *public utilities*, telekomunikasi, air minum, sanitasi (air limbah domestik dan persampahan), pekerjaan umum (jalan, bendungan, irigasi, drainase, dan sektor transportasi, jalan raya, kereta api, pelabuhan, lapangan terbang) dan ketenagalistrikan.

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan ini diarahkan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air, air laut, udara, lahan, bersinergi dengan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

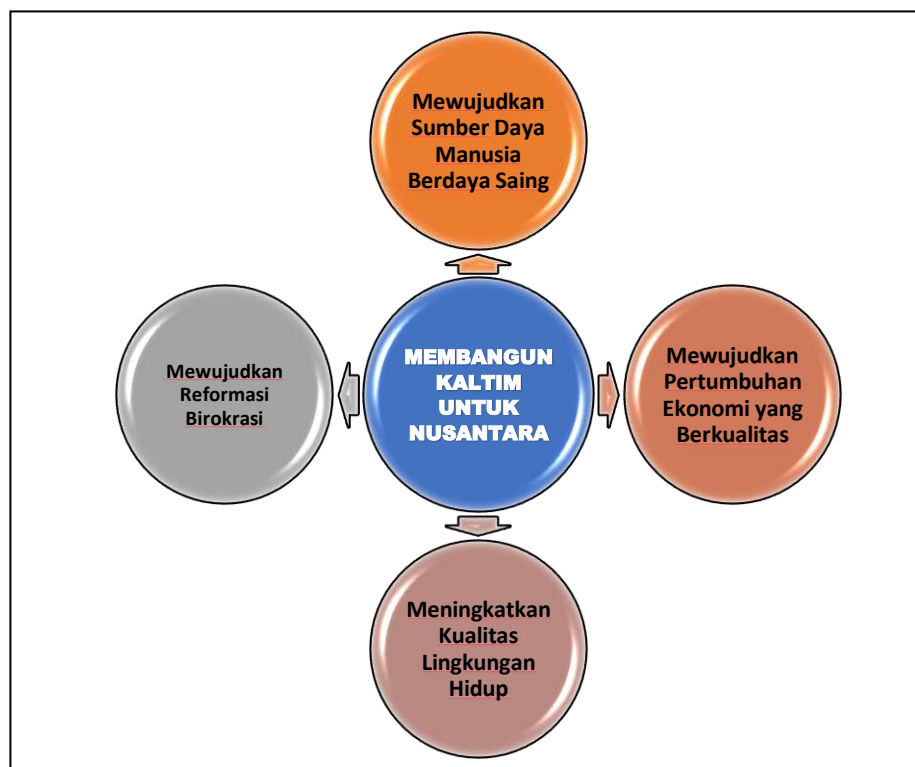
Sasaran strategis pada tujuan ke-3 meliputi:

- 3.1. Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan; yang dimaksud adalah terjaganya kualitas air, air laut, udara, dan lahan yang secara dominan dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
- 3.2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan; yang dimaksud adalah melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih difokuskan pada pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan serta pengendalian pemanfaatan lahan.
- 3.3. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan; yang dimaksud adalah upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan energi fosil serta meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi sebagai upaya mendukung transisi energi.

4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Tujuan ini dimaksudkan untuk penerapan *core value* ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik yang berjalan dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu memberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya bagi masyarakat.

Sasaran strategis pada tujuan ke-4 adalah Terwujudnya Birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK; yang dimaksud adalah pengembangan profesionalisme aparatur dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan layanan publik berbasis elektronik, serta penerapan birokrasi yang transparan dan berintegritas.



Gambar 5.1.

Membangun Kaltim Untuk Nusantara Melalui Tujuan RPD

(Sumber: Hasil analisis, 2023)

Penjabaran masing-masing tujuan ke sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan target per tahun disajikan pada tabel di bawah.

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target				
			2021	2022	2023 (target)	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,06	74,46	74,90	75,00	75,10	75,20	75,20
	2	Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU)	Persen	41,96	70,73	29,33	31,05	31,89	32,03	32,03
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	1	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,92	53,02	53,42	53,52	53,62	53,72	53,72
	2	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	85,4	81,45	81,85	81,95	82,05	82,15	82,15
	3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,84	87,59	88,07	88,17	88,27	88,37	88,37
	4	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	82,21	81,85	82,25	82,35	82,45	82,55	82,55
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan		Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU)	Persen	185,98	81,28	22,24	23,32	24,40	25,48	25,48
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan		Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persen	6,53	7,27	8,40	10,39	12,39	14,68	14,68
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,47 (B)	67,70 (B)	68,81 (B)	69,00 (B)	69,50 (B)	70,01 (BB)	70,01 (BB)
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,57	84,41	84,60	85,00	85,50	86,00	86,00
	2	Sistem Merit	Poin	256,00	263,50	267,00	270	275	280	280
	3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,22	2,11	2,55	2,90	3,00	3,10	3,10
	4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	77,82 (BB)	78,10 (BB)	78,25 (BB)	78,50 (BB)	79,30 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)
	5	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	3	3	3 Skor 3,476	3 Skor 3,726	4 Skor 4,000	4 Skor 4,000

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Rumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang disajikan pada tabel di atas mempedomani dan memperhatikan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Pembangunan jangka panjang memuat 5 (lima) misi dengan sasaran pokoknya masing-masing. Selain kelima misi RPJPD, 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 juga menjadi pertimbangan penentuan tujuan RPD yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu sumber daya manusia, perekonomian termasuk infrastruktur sebagai pendukung, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.

Tabel 5.2
Keterkaitan RPJPD Kalimantan Timur 2005-2025, RPJMN 2020-2024, dan RPD Kalimantan Timur 2024-2026

Misi RPJPD Kaltim 2005-2025 (Perda 15 Tahun 2008)	Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)	Isu Strategis RPD Kaltim 2024-2026
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia
	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif didukung dengan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur
Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional	Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel

Sumber: Hasil analisis, 2023

Pelaksanaan pembangunan periode Tahun 2024-2026 memiliki rentang waktu yang terbatas, sehingga perlu dilakukan secara fokus dan terpadu. Untuk itu pemerintah provinsi menetapkan prioritas pembangunan daerah provinsi. Prioritas Pembangunan Daerah adalah

fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis RPD periode 2024-2026, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan (PP) Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya.
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan.
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik.
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran RPD akan dicapai, dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi yang dipilih akan diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program prioritas. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD.

Strategi yang dipilih dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran saling berkaitan, maka satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai sasaran RPD yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing			
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1	Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
		2	Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
		3	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan
		4	Optimalisasi <i>Boarding School</i>
		5	Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu
		6	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		7	Peningkatan literasi dan numerasi
		8	Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu kesehatan	1	Percepatan perbaikan gizi masyarakat
		2	Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
		3	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
		4	Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		5	Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya
		6	Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		7	Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan
		8	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Peningkatan mutu dan daya saing tenaga kerja	1	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
		2	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri
		3	Penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja
	Perluasan kesempatan kerja	1	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan	Penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan	1	Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan
		2	Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik
		3	Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas			
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	Pengembangan ekspor komoditas non migas dan batubara	1	Peningkatan Daya Saing UKM
		2	Peningkatan Pemasaran Produk UKM
		3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Industri
		4	Pengembangan Hilirisasi Komoditi Hulu Agro, Aneka dan Pangan
		5	Peningkatan Kapasitas SDM yang Berdaya Saing
		6	Pengembangan Destinasi Pariwisata Prov. Kaltim
		7	Peningkatan Pemasaran Pariwisata Daerah
		8	Peningkatan Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi Pariwisata Daerah
	Peningkatan daya saing investasi di sektor non migas dan batubara	1	Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis <i>Online Single System</i> (OSS)
		2	Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		3	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industri
	Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pemantauan pasokan pangan dan cadangan Pangan	1	Menjamin ketersediaan pangan melalui analisis dan informasi pasokan pangan yang akurat dan <i>update</i>
		2	Meningkatkan sumber pangan dan gizi yang berkualitas melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	1	Pemetaan Rawan Pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi
		2	Penyaluran bantuan pangan pada daerah rawan pangan / terdampak bencana
	Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal	1	Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan yang beragam , bergizi, seimbang, aman (B2SA) berbasis pangan lokal
	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan	1	Revitalisasi lahan perkebunan yang tidak produktif
		2	Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
		3	Memperbanyak penggunaan benih perkebunan unggul bersertifikat
		4	Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produk Perkebunan
	Peningkatan produksi dan produktivitas ternak	1	Optimalisasi reproduksi ternak
		2	Meningkatkan produksi dan produktivitas pakan ternak
		3	Meningkatkan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan ternak
		4	Pengembangan dan Penguatan kelembagaan peternakan
	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan
		2	Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan
	Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1	Revitalisasi lahan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2	Memperbanyak penggunaan benih TPH unggul bersertifikat
		3	Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian
	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan	1	Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu
	Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin	Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan	1
		2	Peningkatan keberfungsian sosial PMKS
		3	Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
		4	Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		5	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi
		6	Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa
		7	Perbaiki rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin/rentan miskin
	Peningkatan lapangan usaha produktif bagi masyarakat miskin	1	Pemberian bantuan sarana pertanian dan perikanan bagi masyarakat miskin terutama di daerah tertinggal dan perbatasan
		2	Pelatihan dan penyuluhan pertanian dan perikanan bagi masyarakat miskin
		3	Pemberian Akses Legal Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan Hutan
		4	Pelatihan dan stimulus permodalan untuk gabungan kelompok usaha mikro/kelompok usaha bersama (KUBE)
		5	Subsidi ongkos angkut pemasaran produk untuk daerah tertinggal dan perbatasan
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
		2	Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Optimalisasi penyelenggaraan jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1
2			Pembangunan ruas jalan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi
Peningkatan infrastruktur sumber daya air		1	Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan pendayagunaan air
		2	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air
Optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang		1	Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang
		2	Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
		3	Pengimplementasian kebijakan satu peta
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur air minum		1	Pembangunan sistem penyediaan air minum skala regional
Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh		1	Revitalisasi, penanganan, dan penyediaan infrastruktur di permukiman kumuh kewenangan provinsi
Peningkatan layanan infrastruktur perhubungan		1	Peningkatan pelayanan terminal tipe B
		2	Penyediaan perlengkapan keselamatan jalan
Peningkatan pemerataan ketersediaan listrik 24 jam		1	Peningkatan ketersediaan jaringan tegangan rendah dan distribusi listrik

Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Optimalisasi pengendalian penyebab kerusakan dan sumber pencemaran lingkungan	1	Menjaga kualitas lingkungan melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		2	Menjaga kualitas lingkungan melalui penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		3	Menjaga kualitas lingkungan melalui pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan	1	Peningkatan pengelolaan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan
		Optimalisasi perlindungan hutan dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting (KBEP) dan konservasi provinsi	1
	2	Meningkatkan upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar	
	3	Optimalisasi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat	
	4	Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan	
	Optimalisasi penyelenggaraan Rehabilitasi hutan dan lahan serta belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	Optimalisasi Pengelolaan DAS terpadu multipihak
		2	Optimalisasi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan
Optimalisasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan	1	Pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat berbasis perhutanan sosial	
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Peningkatan cakupan desa yang memanfaatkan energi baru terbarukan	1	Percepatan pembangunan pembangkit listrik pada Desa belum berlistrik PLN dengan menggunakan energi baru terbarukan
	Peningkatan ketersediaan daya listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan	1	Peningkatan penyediaan sarana pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik	Peningkatan pemenuhan dan penerapan standar pelayanan publik	1	Penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan
		2	Pelaksanaan layanan publik sesuai standar, operasional dan prosedur
		3	Perbaikan budaya kerja di lingkungan pemerintahan
	Optimalisasi pengelolaan	1	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
yang Didukung ASN BerAKHLAK	administrasi pemerintah dan layanan publik berbasis teknologi informasi	2	Peningkatan pengelolaan <i>e-Government</i>
		3	Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
		1	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan
	Optimalisasi penerapan sistem Merit	2	Peningkatan kualitas penilaian dan evaluasi kinerja ASN
		1	Peningkatan pelatihan ASN berbasis kompetensi
	Pengembangan kompetensi ASN	2	Peningkatan sertifikasi kompetensi ASN
		1	Peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2	Peningkatan kualitas perencanaan dan penjenjangan kinerja
		3	Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja
		1	Peningkatan kapabilitas APIP
	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian intern pemerintah	2	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		3	Peningkatan pembangunan zona integritas

Sumber: Hasil analisis, 2023

Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Secara khusus, tema pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang dimuat dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yaitu Terwujudnya Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan.



Gambar 6.1.
Fokus/Tema Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

(Sumber: Hasil analisis, 2023)

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sampai dengan 2026 menggambarkan fokus pelaksanaan pembangunan dengan tetap menerapkan prinsip inklusifitas. Pembangunan difokuskan pada upaya-upaya strategis dan taktis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD. Dengan dicapainya tujuan dan sasaran pembangunan, maka diharapkan dapat tidak saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan daya saing Kalimantan Timur, namun juga mampu mendukung pembangunan IKN.

6.2. Arahan Pembangunan Kewilayahan

6.2.1. Pengembangan Wilayah sesuai Arahan Tata Ruang dalam RTRW

Hasil analisis terhadap tata ruang Provinsi Kalimantan Timur yang akan menjadi substansi penyempurnaan rencana tata ruang wilayah (RTRW), menjadi masukan dalam arahan pembangunan kewilayahan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Hal ini mengingat adanya perkembangan wilayah yang menyebabkan perlu peninjauan kembali tata ruang Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi dasar untuk penyusunan RTRW yang baru.

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN. Kebijakan Penataan Ruang meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pengembangan industri, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan minyak dan gas;
- b. pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua;
- c. pengembangan jaringan prasarana Wilayah untuk pemerataan, peningkatan kualitas, dan pelayanan seluruh Wilayah Provinsi;
- d. pelestarian kawasan berfungsi lindung;
- e. pelestarian kawasan berfungsi konservasi yang berkelanjutan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
- f. pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau bagi kesejahteraan Masyarakat;
- g. pengembangan kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- h. pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai potensi lestari dan berbasis ekonomi biru;

- i. pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya;
- j. pengembangan Kawasan Budi Daya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- k. pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pengembangan industri, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan minyak dan gas, meliputi

- a. mengembangkan PKN, PKW, dan PKL sebagai pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, pariwisata, pelayanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, serta perdagangan dan jasa;
- b. mengembangkan PKSNI sebagai pusat pelayanan utama kawasan perbatasan negara;
- c. mengembangkan Kawasan Permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana;
- d. permukiman berbasis air sebagai pusat kegiatan Masyarakat lokal dengan dukungan infrastruktur Kawasan Permukiman yang handal; dan
- e. mengembangkan Kawasan Permukiman nelayan yang terintegrasi dengan pariwisata yang ramah lingkungan.

Strategi pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua, meliputi:

- a. mendukung pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan, yang aman, modern, dan produktif, serta simbol identitas bangsa Indonesia; dan
- b. mengembangkan jaringan konektivitas antara IKN dengan Wilayah Provinsi.

Strategi pengembangan jaringan prasarana Wilayah untuk pemerataan, peningkatan kualitas, dan pelayanan seluruh Wilayah Provinsi, meliputi:

- a. mengembangkan jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antar sistem pusat permukiman, Industri Hijau, pertanian, perikanan, dan pertambangan;
- b. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara;

- c. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman, Industri Hijau, pertanian, perikanan, dan pertambangan;
- d. mengembangkan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan membuka keterisolasian;
- e. mengembangkan pelabuhan dan bandar udara yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan perdagangan ekspor dan/atau antarpulau;
- f. mengembangkan alur-pelayaran di Perairan Pesisir untuk mendukung pelayaran nasional dan internasional;
- g. mengembangkan jaringan energi minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan industri pengolahan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
- h. mengembangkan jaringan kelistrikan melalui energi baru dan terbarukan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
- i. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna meningkatkan daya saing investasi di Wilayah darat dan Perairan Pesisir;
- j. mengembangkan prasarana sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi Wilayah; dan
- k. mengembangkan jaringan prasarana SPAM, SPAL, sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Strategi pelestarian kawasan berfungsi lindung, meliputi:

- a. mengembangkan, mencegah, mengendalikan, dan/atau memulihkan kawasan hutan lindung yang bervegetasi dari deforestasi;
- b. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alam dan ekosistem kawasan;
- c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perlindungan setempat;
- d. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan adat;
- e. mempertahankan dan melestarikan Kawasan Lindung geologi;
- f. melestarikan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya;
- g. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan ekosistem mangrove.

Strategi pelestarian kawasan berfungsi konservasi yang berkelanjutan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir, meliputi:

- a. mempertahankan dan melestarikan kawasan konservasi di Wilayah darat;
- b. mempertahankan dan melestarikan kawasan konservasi di Perairan Pesisir dan Pulau Kecil;
- c. melindungi dan melestarikan alur migrasi biota Laut; dan
- d. memadukan dan menyelaraskan rencana Pola Ruang di Wilayah darat dan Perairan Pesisir yang berfungsi konservasi.

Strategi pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau bagi kesejahteraan masyarakat, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu hulu agro perkebunan yang hijau, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi
- b. mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu kimia dasar berbasis minyak, gas, dan batubara yang hijau, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi;
- c. mengembangkan kawasan peruntukan industri hulu agro, industri aneka, dan industri pangan dari kegiatan kehutanan, perikanan, dan kelautan;
- d. mensinergikan kawasan peruntukan industri dengan Kawasan Budi Daya lainnya, Kawasan Lindung, dan alur migrasi biota Laut; dan
- e. mengelola pencemaran di kawasan peruntukan industri.

Strategi pengembangan kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan untuk mendukung kemandirian pangan;
- b. mengembangkan kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa dalam, karet, kakao, lada, dan komoditas khas daerah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- c. mengembangkan kawasan perkebunan lainnya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai potensi lestari dan berbasis ekonomi biru, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan industri pengolahan kelautan perikanan;
- b. mengembangkan kawasan perikanan tangkap;
- c. mengembangkan kawasan perikanan budi daya; dan
- d. mengembangkan prasarana sarana kawasan kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan kawasan lainnya.

Strategi pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. mengembangkan kawasan pertambangan mineral dan/atau batubara dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan/atau batubara; dan
- d. mensinergikan kawasan pertambangan dengan Kawasan Budi Daya lainnya, Kawasan Lindung, dan alur migrasi biota Laut.

Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi:

- a. mempertahankan dan mengembangkan kawasan hutan produksi;
- b. mengembangkan kawasan pariwisata yang kreatif di Wilayah darat, Perairan Pesisir, dan Pulau Kecil; dan
- c. mengembangkan KSP.

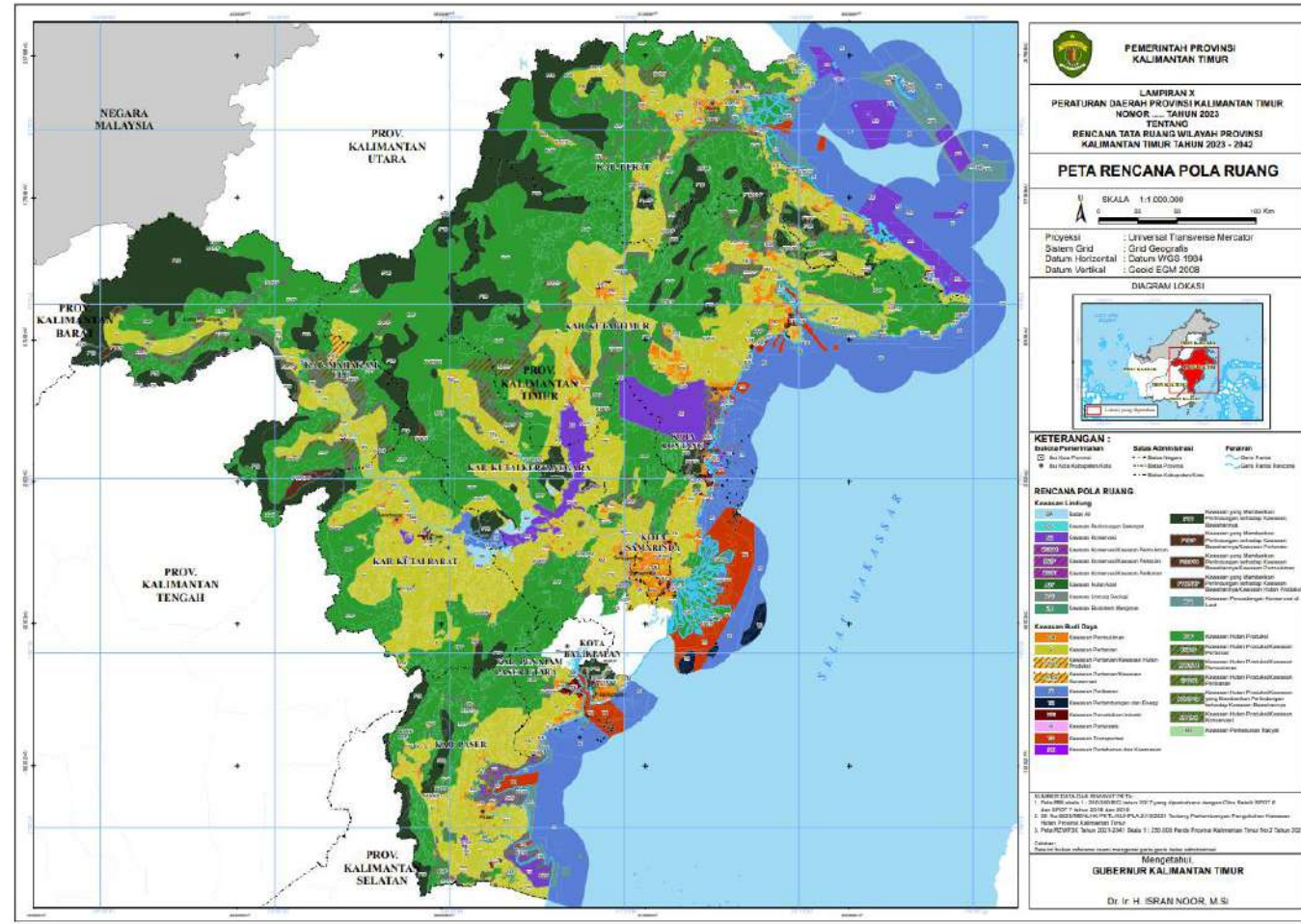
Strategi pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, meliputi:

- a. mengembangkan jalur evakuasi bencana, Ruang evakuasi bencana, dan penanda peringatan bencana; dan
- b. memberdayakan kesadaran Masyarakat terhadap risiko bencana.

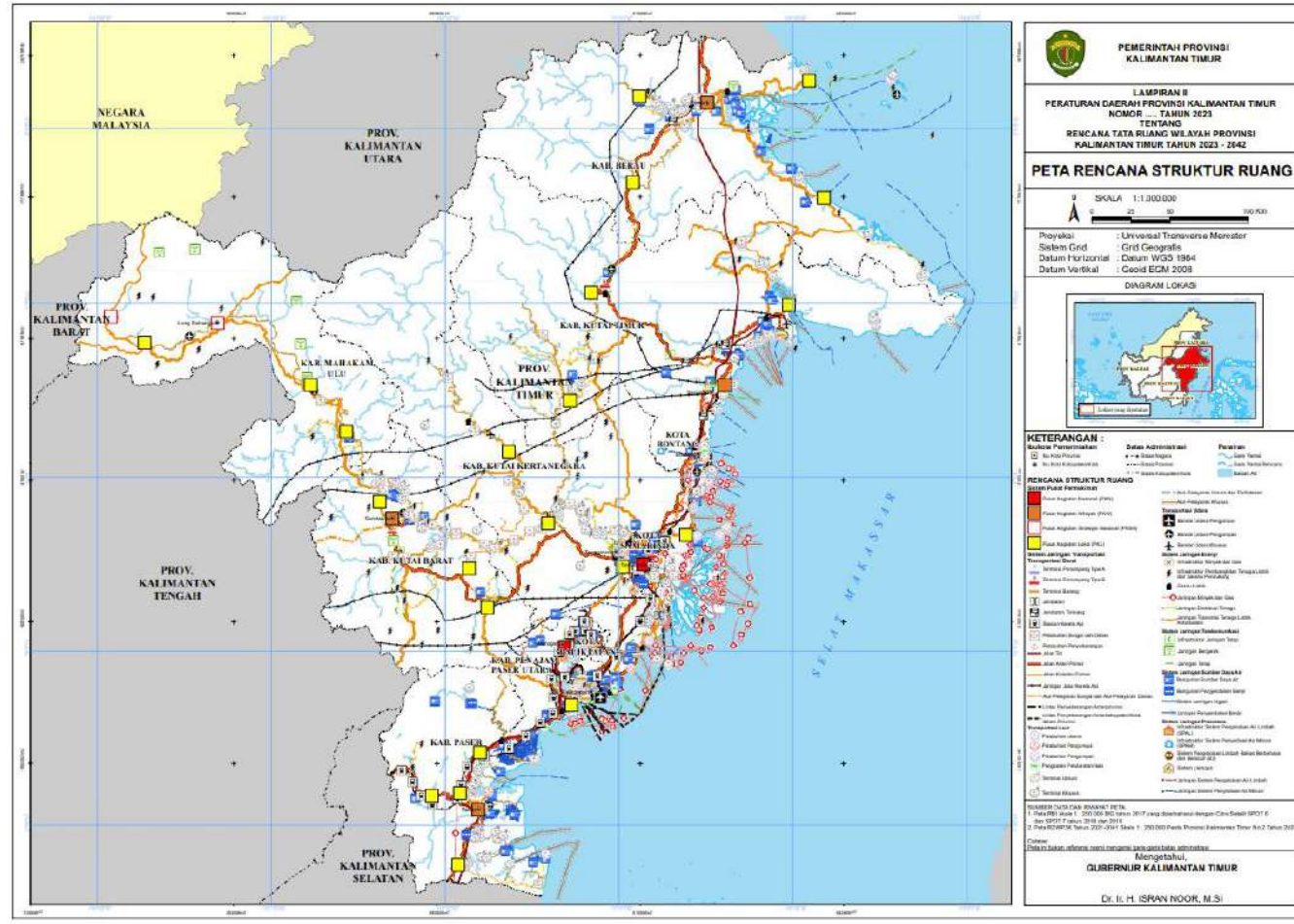
Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:

- a. mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsinya;
- c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai penyangga; dan
- d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

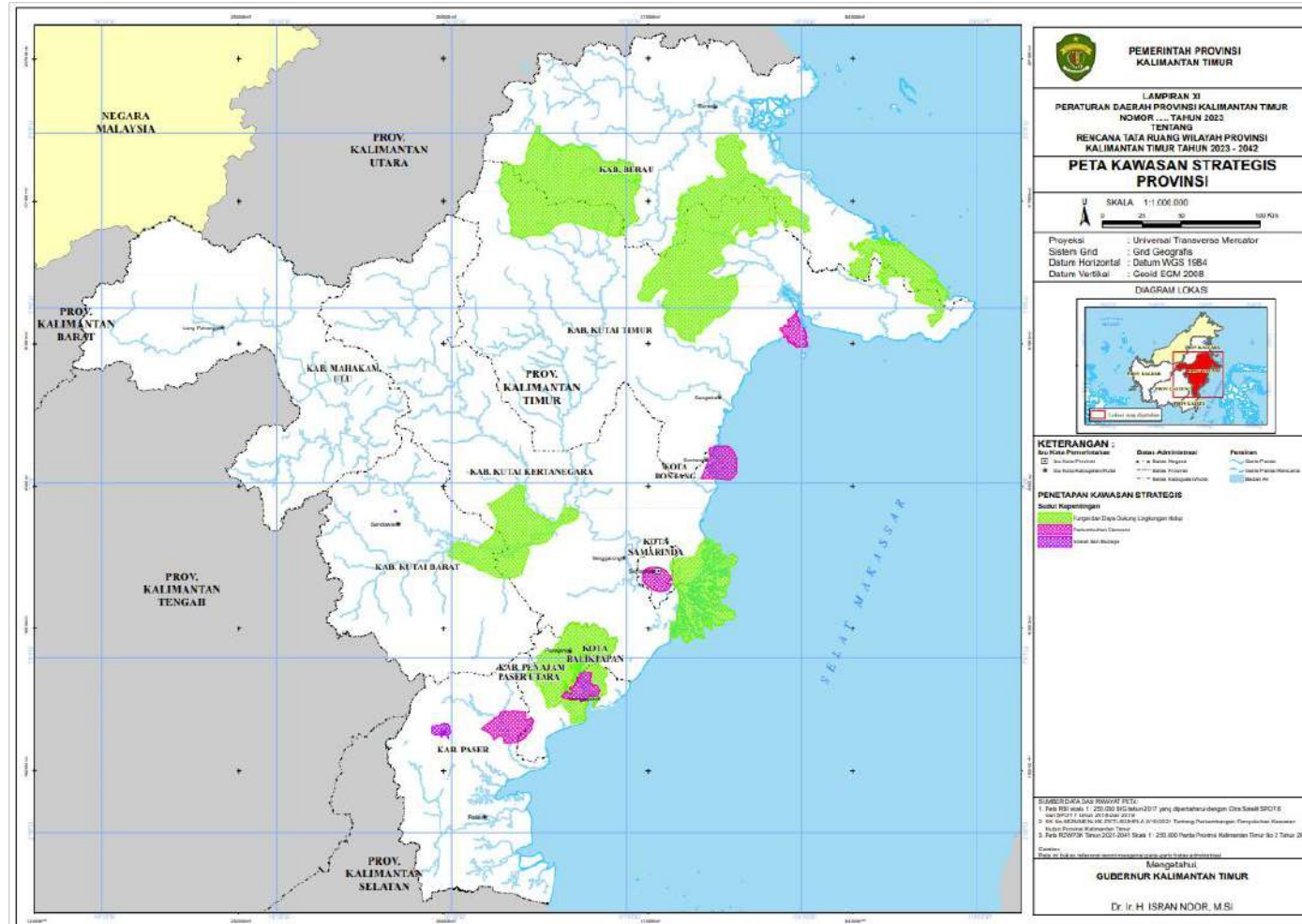
Adapun arahan rencana pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis provinsi disajikan pada Gambar 6.2, Gambar 6.3, dan Gambar 6.4.



Gambar 6.2.
Pet Arahan Pengembangan Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Revisi RTRW Provinsi KALTIM Tahun 2022-2042)



Gambar 6.3.
Peta Arahlan Pengembangan Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Revisi RTRW Provinsi KALTIM Tahun 2022-2042)



Gambar 6.4.
Peta Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Revisi RTRW Provinsi KALTIM Tahun 2022-2042)

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dari aspek tata ruang diarahkan untuk mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN. Dalam rangka perwujudan tujuan tersebut, maka ditetapkan arahan pembangunan kewilayahan per kabupaten/kota. Arah kebijakan kewilayahan lebih lanjut dirinci kedalam fokus pembangunan yang akan menjadi pedoman masing-masing kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan. Arahan tersebut disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 6.2

Indikasi Arah Kebijakan Kewilayahan Dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
1	Paser	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)
			Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)
			Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
			Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah
			Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Pengembangan kawasan pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata Kawasan Gunung Embun
		Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan	Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani (komoditi kelapa sawit)
Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan			
Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)		

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)
		Peningkatan produktivitas TPH	Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang)
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
		Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan	Pemanfaatan limbah sawit menjadi bioenergi
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Pengembangan pengolahan CPO	Pembangunan Rumah Produksi CPO
		Peningkatan layanan infrastruktur	Rekonstruksi jalan provinsi
			Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
			Evaluasi Rencana Tata Ruang
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera serta revitalisasi/penanganan kawasan kumuh
			Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum skala regional
			Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian
			Pemanfaatan energi baru dan terbarukan
		Pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
			Pengendalian KARHUTLA
			Rehabilitasi diluar kawasan hutan
			Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS
			Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER
			Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i>
			Pemantauan dan penanganan sampah laut
			Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup
2	Kutai Barat	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
			Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)
			Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
			Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah
			Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan
		Peningkatan kapasitas perempuan	Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi	Destinasi ekowisata berkelas dunia yang mendorong ekonomi kerakyatan (Pengembangan Danau Kaskade Mahakam)
		Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas Perkebunan Rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Peningkatan layanan infrastruktur	Pembangunan Jalan menuju perbatasan
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera
			Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh
			Pembangunan jaringan distribusi listrik
			Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa
			Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang
			Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS terpusat
			Revitalisasi PLTS

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
			Pembangunan PJUTS Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Pengendalian KARHUTLA Rehabilitasi diluar kawasan hutan Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i> Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup
3	Kutai Kartanegara	Peningkatan layanan pendidikan Peningkatan layanan kesehatan Peningkatan kompetensi tenaga kerja Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan Peningkatan produksi sektor peternakan Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial Destinasi ekowisata berkelas dunia yang mendorong ekonomi kerakyatan (Pengembangan Danau Kaskade Mahakam) Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Peningkatan produktivitas TPH	Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang)
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
		Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan	Pemanfaatan limbah sawit menjadi bioenergi
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan koperasi dan UKM
		Pengembangan pengolahan gula aren	Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren
		Peningkatan layanan infrastruktur	Pemeliharaan Jalan Provinsi
			Rekonstruksi Jalan Provinsi
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera
			Peningkatan layanan suplai air minum skala regional
			Penyiapan <i>readiness criteria</i> pengelolaan air limbah domestik skala regional
			Revitalisasi/penanganan kawasan Kumuh
			Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian
			Pembangunan jaringan distribusi listrik
			Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
			Pengendalian banjir
			Pemanfaatan energi baru dan terbarukan
		Pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS
			Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
			Pengendalian KARHUTLA
			Rehabilitasi diluar kawasan hutan
			Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER
			Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i>
			Pemantauan dan penanganan sampah laut
			Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
4	Kutai Timur	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)
			Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)
			Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
			Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah
			Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi (KSPP) 2	Pengembangan Destinasi, SDM dan Promosi Sangkulirang - Mangkalihat
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)
		Peningkatan produktivitas TPH	Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang)
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
		Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan	Pemanfaatan limbah sawit menjadi bioenergi
		Pengembangan hilirisasi industri	Dukungan Pengembangan KEK MBTK
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Pengembangan Produk Gaharu	Pembangunan Rumah Produksi Gaharu
			Rekonstruksi Jalan Provinsi

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Peningkatan layanan infrastruktur	Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mendukung perekonomian Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum skala regional Pembangunan jaringan distribusi listrik Pembangunan infrastruktur dalam KEK MBTK Pengendalian banjir Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang Koordinasi dan penyiapan <i>readiness criteria</i> pengelolaan air limbah domestik skala regional Pembangunan jaringan distribusi listrik Pembangunan pengamanan pantai Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PJUTS
		Pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Pengendalian KARHUTLA Rehabilitasi diluar kawasan hutan Pengelolaan KBEP Karst Mangkalihat Ulu Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i> Pemantauan dan penanganan sampah laut Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup
5	Berau	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah
			Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi (KSPP) 1	Pengembangan Destinasi, SDM dan Promosi Derawan - Biduk"
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Pengembangan Produk Rotan	Pembangunan Rumah Produksi Rotan
		Peningkatan layanan infrastruktur	Rekonstruksi Jalan Provinsi
			Pemeliharaan Jalan Provinsi
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera
			Pembangunan pengaman pantai
			Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
			Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh
			Pembangunan jaringan distribusi listrik
			Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang
			Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Terpusat Revitalisasi PLTS Pembangunan instalasi biogas Pembangunan PJUTS
		Pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Pengendalian KARHUTLA Rehabilitasi diluar kawasan hutan Pengelolaan KBEP Karst Mangkalihat Pesisir Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i> Pemantauan dan penanganan sampah laut Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup
6	PPU	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Pengembangan kawasan pariwisata penyangga IKN	Pengembangan destinasi pariwisata pendukung IKN

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
		Pengembangan hilirisasi industri	Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Buluminung
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Peningkatan layanan infrastruktur	Rekonstruksi Jalan Provinsi
			Pemeliharaan Jalan Provinsi
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera
			Pembangunan pengaman pantai
			Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang
			Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum & air limbah skala regional
			Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian
			Pemanfaatan energi baru dan terbarukan
		Pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS
			Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
			Pengendalian KARHUTLA
			Rehabilitasi diluar kawasan hutan
			Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER
			Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i>
			Pemantauan dan penanganan sampah laut
			Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
7	Mahakam Ulu	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)
			Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)
			Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
			Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB
			Optimalisasi <i>Boarding School</i>
			Pemberian tambahan insentif bagi seluruh tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di daerah pedalaman dan 3T (GTK)
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah
			Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Peningkatan layanan infrastruktur	Pembangunan Jalan Perbatasan
			Pembangunan Jembatan Perbatasan
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera
			Pembangunan jaringan distribusi listrik
			Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa
			Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PJUTS
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Terpusat		
Pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)		
	Pengendalian KARHUTLA		
	Rehabilitasi diluar kawasan hutan		

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
			Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, dan udara <i>ambien passive sampler</i> Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup
8	Balikpapan	Peningkatan layanan pendidikan Peningkatan layanan kesehatan Peningkatan kompetensi tenaga kerja Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin Pengembangan hilirisasi industri Pengembangan kawasan pariwisata penyangga IKN Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan Peningkatan produktivitas perikanan budidaya Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM Peningkatan layanan infrastruktur	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial Dukungan pengembangan Kawasan Industri Kariangau Pengembangan destinasi pariwisata pendukung IKN Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Rumput Laut dan Kepiting) Pelatihan Koperasi dan UKM Rekonstruksi Jalan Provinsi Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
			Revitalisasi/penanganan kawasan Kumuh Pembangunan pengaman pantai Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang Koordinasi dan upaya peningkatan suplai air curah untuk air minum skala regional Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Atap 89,5 Kwp (tahun 2024 : 32 kWp; Tahun 2025 : 57,5 kWp) Pembangunan PJUTS
		Pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Pengendalian KARHUTLA Rehabilitasi diluar kawasan hutan Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut udara <i>ambien passive sampler</i> Pelaksanaan uji emisi kendaraan roda 4 Pemantauan dan penanganan sampah laut Melaksanakan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup
9	Samarinda	Peningkatan layanan pendidikan Peningkatan layanan kesehatan Peningkatan kompetensi tenaga kerja Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan

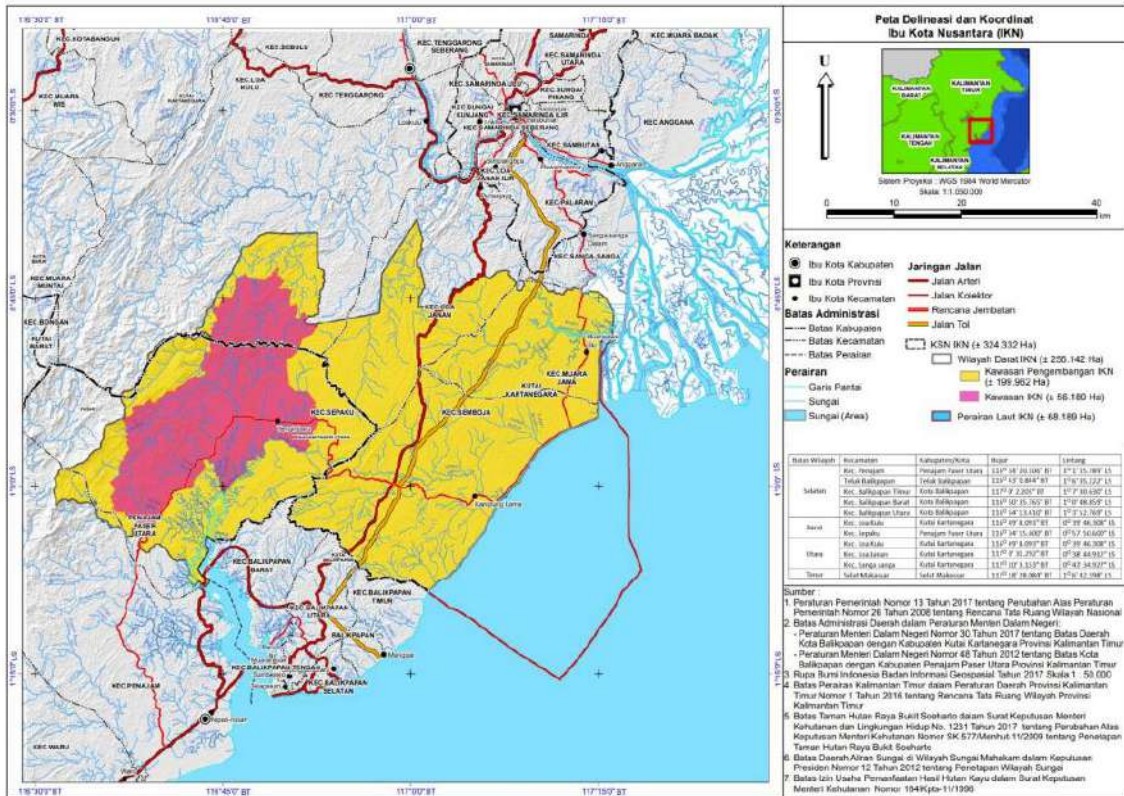
No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi dan Promosi Kampung Ketupat
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan
		Peningkatan sistem distribusi perdagangan	Pengembangan pusat distribusi barang bahan pokok (<i>food station</i>)
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Peningkatan layanan infrastruktur	Revitalisasi Terminal Tipe B
			Pembangunan Jalan yang mendukung perekonomian
			Rekonstruksi Jalan Provinsi
			Pemeliharaan jalan Provinsi
			Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera
			Revitalisasi/penanganan kawasan Kumuh
			Pengendalian banjir
			Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang
			Penyiapan <i>readiness criteria</i> sistem pengelolaan limbah domestik terpusat skala regional
			Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Atap
			Pembangunan PJUTS
		Pengelolaan lingkungan hidup	Rehabilitasi diluar kawasan hutan
			Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER
			Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, udara <i>ambien passive sampler</i>
			Pelaksanaan uji emisi kendaraan roda 4
			Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup
10	Bontang	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
			Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)
			Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
			Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah
			Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLKI Bontang	Pembangunan dan Pengembangan <i>Workshop</i> Las Bawah Air
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
		Peningkatan layanan infrastruktur	Pemeliharaan Jalan Provinsi
			Pemberian bantuan stimulan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera
			Revitalisasi/ penanganan Kawasan Kumuh
			Peningkatan akses layanan air minum/peningkatan suplai air curah untuk air minum skala regional
			Pengendalian banjir
			Penyediaan air baku
			Penyiapan <i>readiness criteria</i> untuk penyediaan sistem pengolahan limbah terpusat skala regional
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Atap 119,5 kWp (tahun 2025 : 62 kWp; tahun 2026 : 57,5 kWp)
			Pembangunan PJUTS
		Pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
			Pengendalian KARHUTLA

No	Kabupaten /Kota	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan
			Rehabilitasi diluar kawasan hutan
			Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER
			Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i>
			Pemantauan dan penanganan sampah laut
			Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup

6.2.2. Pengembangan Wilayah Terintegrasi dengan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi pusat pertumbuhan baru untuk Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia dengan memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Wilayah Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 256.142 hektare. Sementara Wilayah Kawasan Ibu Kota Nusantara memiliki luas kurang lebih 56.180 hektare, terletak pada dua kabupaten eksisting, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.



Gambar 6.5.
Peta Wilayah Ibu Kota Nusantara
 (Sumber: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022)

Pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata akan diungkit dengan pembangunan IKN sebagai *superhub* ekonomi, yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk transformasi ekonomi di IKN dan Provinsi Kalimantan Timur serta Daerah Mitra di Pulau Kalimantan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui kerja sama IKN dengan Provinsi Kalimantan Timur. Kerangka implementasi kerja sama pembangunan IKN yang diarahkan oleh Pemerintah untuk Provinsi Kalimantan Timur, meliputi:

1. Sektor Ekonomi dan Industri
 - a. Kawasan Industri Kariangau (Kota Balikpapan).
 - b. Kawasan Industri Buluminung (Kabupaten Penajam Paser Utara).
 - c. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kabupaten Kutai Timur).

Kerja sama: Perencanaan pembangunan fasilitas dan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, pelibatan masyarakat dan promosi investasi.

2. Logistik dan Konektivitas

- a. Logistik dan konektivitas antar pusat kegiatan di wilayah IKN.
- b. Simpul dan jaringan di luar wilayah IKN (Kota Balikpapan dan Samarinda).
- c. Akses jalur nasional dan internasional.

Kerja sama: Penguatan sistem logistik dan konektivitas pengembangan IKN sebagai *superhub* ekonomi, penguatan simpul dan jaringan tingkat regional (pintu masuk dan hub ke IKN).

3. SDM dan Ketenagakerjaan

Sarana pendidikan dan kejuruan (wilayah IKN dan daerah mitra).

Kerja sama: Penambahan sarana pendidikan dan kejuruan, pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kuantitas tenaga kerja, penguatan pendidikan tinggi di daerah mitra untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai klaster ekonomi yang akan dikembangkan.

4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Hutan lindung Sungai Wain
- b. Kawasan Ekosistem riparian Sungai Wain
- c. Kawasan Ekosistem Teluk Balikpapan
- d. Sungai Mahakam
- e. Koridor Sawa

Kerja sama: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah mitra, pembagian peran dalam pemulihan ekosistem terdegradasi serta pertahanan dan peningkatan fungsi ekosistem diluar wilayah IKN, pemeliharaan kawasan ekosistem esensial.

5. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Wisata alam, religi buatan dan kuliner (Kota Samarinda)
- b. Wisata alam Pesut Mahakam (Kabupaten Kutai Kartanegara)
- c. Ekowisata pertanian hulu (Kabupaten Penajam Paser Utara)

Kerja sama: Pengembangan potensi pariwisata dan dapat didukung dengan konektivitas transportasi massal yang memadai.

6. Energi dan Ketenagalistrikan

a. *Smart grid* (daerah mitra)

b. Pembangkit listrik (Pulau Kalimantan)

c. Jaringan transmisi dan distribusi pipa gas bumi Trans Kalimantan

d. Produksi gas hidrogen (diluar wilayah IKN)

Kerja sama: Peningkatan kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan dan produksi gas serta pembangunan sistem *smart grid* yang akan melalui area di daerah mitra.

7. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bidang pertanian dan perikanan (Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara).

Kerja sama: Pemanfaatan dan peningkatan kualitas jaringan jalan dan irigasi, sarana produksi perikanan, dan peralatan pendukung lainnya untuk mendukung sektor pertanian hulu dan kebutuhan pangan.

8. Pengelolaan SDA

Wilayah intake Sungai Mahakam (Kota Samarinda dan Balikpapan)

Bendungan Batu Lepek (Provinsi Kalimantan Timur)

Kerja sama: Penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan menopang aktivitas ekonomi lewat pengembangan pengelolaan sumber daya air terpadu.

6.3. Program Prioritas Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih untuk mencapai sasaran pembangunan, akan menjadi panduan dalam menentukan program prioritas. Program prioritas adalah program perangkat daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis. Program-program yang dipilih diharapkan akan berkontribusi besar bagi pencapaian target sasaran.

Sebuah sasaran strategis didukung oleh lebih dari satu program dan dapat lintas urusan (*crosscutting*). Mengingat bahwa sasaran RPD merupakan kondisi yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan pada akhir periode pembangunan daerah di tahun 2026, maka sasaran pada umumnya dicapai melalui beberapa program. Kinerja sebuah program dapat menunjang lebih dari satu sasaran RPD, untuk itu penyajian program prioritas pada tabel di bawah memperlihatkan bahwa sebuah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat mendukung beberapa sasaran. Program prioritas pada setiap sasaran disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 6.3 merupakan bagian dari penjenjangan kinerja, dimana tujuan dan sasaran daerah dipengaruhi pencapaiannya oleh program prioritas. Sebuah program dipilih menjadi program prioritas melalui pertimbangan bahwa kinerja yang akan dihasilkan dari program tersebut menjadi faktor penentu dari keberhasilan pencapaian sasaran.

Tabel 6.3
Program Prioritas Pembangunan RPD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024-2026

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing									
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%	42.936.908.696	100%	45.083.754.131	100%	47.337.941.837	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%	1.937.403.464.623	100%	2.032.173.637.855	100%	2.133.782.319.747	
		Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48%	2.316.628.833	91,67%	2.432.460.275	94,27%	2.554.083.289	
		Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49%	2.416.628.833	90,91%	2.537.460.275	94,33%	2.664.333.289	
		Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87%	1.916.628.833	96,81%	2.012.460.275	97,59%	2.113.083.289	
		Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69%	16.985.973.650	71,14%	17.835.272.333	74,61%	18.727.035.949	
		Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34%	20.985.973.650	62,26%	22.035.272.333	64,31%	23.137.035.949	
		Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,00%	82.272.046.085	87,00%	86.385.648.389	90,00%	90.704.930.809	
		Tingkat penyerapan lulusan SMK	94,00%	38.068.917.750	95,21%	39.972.363.638	96,42%	41.970.981.819	
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase tenaga pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100%	9.596.846.500	100%	10.076.688.825	100%	10.580.523.266	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,8 rasio	181.814.368.000	10,7 rasio	182.863.010.000	10,6 rasio	184.398.142.000	Dinas Kesehatan

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang dimagangkan dan bekerja	65%	2.243.647.800	66,50%	2.592.783.800	67%	3.307.283.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	57,64 %	21.500.000.000	60,13 %	24.993.000.000	62,62 %	25.055.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sasaran 4: Meningkatkan daya saing perempuan									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 Orang	12.459.543.000	300 Orang	2.055.000.000	300 Orang	1.985.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas									
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 Ton	5.558.990.000	900 Ton	5.558.990.000	950 Ton	5.558.990.000	Dinas Kehutanan
		Produksi Hasil Hutan Kayu	4.420.000 m3/tahun	25.324.422.000	4.450.000 m3/tahun	25.324.422.000	4.475.000 m3/tahun	27.324.422.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM potensial ekspor	20 UKM	2.197.850.000	40 UKM	14.944.139.692	60 UKM	18.375.756.486	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang masuk pasar digital	5%	968.165.000	10%	1.192.752.000	15%	1.271.328.850	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 Jenis	1.570.000.000	70 Jenis	1.895.509.000	73 Jenis	2.085.059.900	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara	5,20%	2.820.000.000	5,56%	13.020.000.000	5,92%	12.920.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
12	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan daya tarik wisata	30%	10.673.000.000	63,33%	9.300.000.000	100%	9.845.000.000	Dinas Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan yang tepat waktu	100%	2.750.000.000	100%	3.436.262.000	100%	4.269.090.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan investasi di kalimantan timur pada sektor non migas dan non batubara	11 Minat	2.600.000.000	12 Minat	3.100.000.000	13 Minat	3.300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang investasi non migas dan non batubara yang siap ditawarkan	2 Dokumen IPRO	2.700.000.000	2 Dokumen IPRO	3.100.000.000	2 Dokumen IPRO	3.300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)	50702 Ha	600.000.000	49000 Ha	650.000.000	50000 Ha	700.000.000	Dinas Perkebunan
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana perkebunan	25,36 %	19.552.056.400	25,41 %	20.287.620.260	25,46 %	17.158.809.300	Dinas Perkebunan
18	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	11,15 %	1.904.358.500	23,03 %	1.418.825.100	34,55 %	1.826.689.300	Dinas Perkebunan

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	26,5 %	3.121.820.700	52,99 %	2.951.404.040	79,49 %	3.299.406.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	97.6 Skor	1.100.000.000	97.75 Skor	1.220.000.000	97.8 Skor	1.250.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	86.3 Skor	2.175.000.000	86.5 Skor	2.200.000.000	86.7 Skor	2.230.000.000	
20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	0%	300.000.000	0%	215.000.000	0%	220.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya	1 Kecamatan	2.100.000.000	1 Kecamatan	2.100.000.000	1 Kecamatan	2.100.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan	41,39 %	1.750.000.000	41,76 %	1.750.000.000	41,81 %	1.780.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tingkat pemenuhan prasarana pertanian hortikultura	34%	1.450.000.000	43%	1.450.000.000	52%	1.455.000.000	
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	35,5%	11.950.000.000	35,7%	12.020.000.000	35,9%	12.062.700.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	39,29 %	6.050.000.000	41,57 %	6.125.000.000	48,84 %	6.195.750.000	
23	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	77%	2.849.500.000	80%	2.865.000.000	80%	2.915.500.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,54 Skor	1.234.580.074	99,72 Skor	1.557.817.195	99,80 Skor	1.397.535.532	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan agribisnis	96,21 Skor	3.086.450.185	97,29 Skor	3.894.542.987	97,30 Skor	3.493.838.829	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 Skor	22.963.189.378	88,00 Skor	28.975.399.825	87,46 Skor	25.994.160.891	

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
26	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	95,11 Skor	3.703.740.222	95,81 Skor	4.673.451.585	97,75 Skor	4.192.606.595	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	91,79 Skor	6.666.732.400	92,41 Skor	8.412.212.852	92,45 Skor	7.546.691.872	
27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,74 Skor	4.321.030.259	99,73 Skor	5.452.360.182	99,78 Skor	4.891.374.361	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	190000 Ton	9.700.000.000	195000 Ton	8.250.000.000	200000 Ton	8.500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	200000 Ton	8.209.895.361	201000 Ton	8.103.195.000	202000 Ton	10.500.774.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
30	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	1.723.064.000	11 Produk Olahan	1.463.064.000	15 Produk Olahan	1.510.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah keluarga miskin yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12936 Orang	18.375.516.000	12936 Orang	20.165.409.860	12936 Orang	21.001.947.346	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
32	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara optimal	25%	6.156.522.300	35%	7.052.650.000	45%	9.112.915.088	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
33	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi	108.01 Ha	29.301.156.000	156.59 Ha	20.000.000.000	203.75 Ha	20.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
34	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	Disparitas harga barang pokok dan barang penting	16%	995.000.000	14%	1.055.500.000	12%	1.148.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Jumlah kecelakaan di ruas jalan provinsi	175 Kejadian	6.000.000.000	165 Kejadian	6.000.000.000	155 Kejadian	6.000.000.000	Dinas Perhubungan
		Persentase layanan lalu lintas jalan provinsi dan AKDP	82,00%	7.704.000.000	86,00%	56.859.000.000	90,00%	3.964.000.000	
		Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1000 keberangkatan	0,006 Angka	3.892.000.000	0,005 Angka	3.892.000.000	0,004 Angka	3.892.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan ruas jalan baru	1 Ruas Jalan	317.400.000.000	2 Ruas Jalan	714.500.000.000	4 Ruas Jalan	1.225.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Rasio kemantapan jalan provinsi	82,09%	981.873.693.683	86,23%	1.774.282.349.267	93,53%	1.969.258.161.410	
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9460 Ha	110.150.000.000	9730 Ha	52.900.000.000	10030 Ha	60.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Panjang pantai kritis yang ditangani	2,80 Km	95.474.500.000	0,33 Km	27.000.000.000	0,63 Km	35.193.992.882	
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	94 liter/detik	78.900.000.000	60 liter/detik	55.000.000.000	50 liter/detik	41.100.000.000	
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	70 Ha	52.541.977.680	140 Ha	30.483.652.400	210 Ha	46.606.670.785	
38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	11,15%	49.650.000.000	12,76%	33.566.347.600	14,89%	41.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kesiapan infrastruktur air curah lintas kabupaten/kota	57,65 %	165.500.000.000	83,40 %	193.651.696.848	100%	211.144.621.588	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
40	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	57,64 %	21.500.000.000	60,13 %	24.993.000.000	62,62 %	25.055.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
40	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20%	13.500.000.000	83,90%	15.000.000.000	84,94%	20.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
41	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi	108.01 Ha	150.698.844.000	156.59 Ha	96.350.000.000	203.75 Ha	142.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
42	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase kelurahan/desa yang teraliri listrik 24 jam	92,97%	5.000.000.000	97,78%	33.000.000.000	100,00 %	35.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup									
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
43	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤5 (tercemar ringan)	6.562.247.305	≤5 (tercemar ringan)	6.662.247.305	≤5 (tercemar ringan)	10.178.109.750	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Standar Pencemar Udara	48 (Baik)	2.500.000.000	47 (Baik)	2.700.000.000	46 (Baik)	2.900.000.000	
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
44	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	0,47%	89.670.958.000	0,71%	92.830.132.000	0,95%	102.670.958.000	Dinas Kehutanan
		Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1,00%	135.892.372.000	1,00%	114.300.629.000	1,00%	125.760.723.000	
45	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	545.726 Ha	18.556.035.000	665.193 Ha	18.556.035.000	865.193 Ha	18.556.035.000	Dinas Kehutanan
46	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104 Ha	4.289.275.000	196.336 Ha	4.289.275.000	358.190 Ha	4.289.275.000	Dinas Kehutanan
47	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 Ha	35.367.302.000	20.000 Ha	35.367.302.000	20.000 Ha	41.167.302.000	Dinas Kehutanan

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok	35.296.415.000	20 Kelompok	35.296.415.000	20 Kelompok	35.296.415.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
48	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100%	5.499.080.100	100%	5.292.006.770	100%	8.268.601.000	Dinas Perkebunan
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
49	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa belum berlistrik PLN	34,10%	50.743.953.000	38,73%	66.300.000.000	42,20%	69.100.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	250,00 kWp		300,00 kWp		400,00 kWp		
50	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	243.246,516 Ton CO2e/Tahun	6.500.000.000	484.906,515 Ton CO2e/Tahun	23.080.900.000	726.566,514 Ton CO2e/Tahun	15.485.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	43,76%		45,76%		47,76%		
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	33,56%		35,78%		38,00%		
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi									
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK									
KEPEGAWAIAN									
51	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 indeks	21.160.000.000	90,5 indeks	21.783.000.000	91 indeks	22.465.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
52	PROGRAM PENGEMBANGAN	ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	86%	2.497.802.000	87%	2.997.802.000	88%	3.497.802.000	Badan Pengembangan

No	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	SUMBER DAYA MANUSIA	ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial	86%	8.268.078.000	87%	10.302.198.000	88%	10.502.198.000	Sumber Daya Manusia
		SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	86%	4.200.000.000	87%	5.150.000.000	88%	5.650.000.000	
		SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah	86%	2.234.120.000	87%	1.000.000.000	88%	1.000.000.000	
		SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	87%	7.450.200.000	88%	8.050.000.000	89%	8.500.000.000	
SEKRETARIAT DAERAH									
53	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	72 Indeks	1.450.000.000	73 Indeks	1.510.000.000	74 Indeks	1.550.000.000	Biro Organisasi
		Indeks Kematangan Organisasi	44 Indeks	750.000.000	45 Indeks	780.000.000	47 Indeks	800.000.000	
		Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1 Perangkat Daerah	900.000.000	1 Perangkat Daerah	920.000.000	3 Perangkat Daerah	950.000.000	
		Persentase Perangkat Daerah Klaster Pendukung yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal BB (Sangat Baik)	40%	1.200.000.000	60%	1.220.000.000	100%	1.250.000.000	
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	86%	1.100.000.000	87%	1.119.761.000	89%	1.150.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
54	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	80%	23.600.000.000	82%	25.400.000.000	85%	23.600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
INSPEKTORAT DAERAH									
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota	100%	16.862.522.000	100%	18.270.000.000	100%	23.270.000.000	Inspektorat

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan menggambarkan proyeksi keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk periode tahun 2024-2026. Pelaksanaan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 membutuhkan pendanaan yang diarahkan untuk mencapai kinerja pembangunan yang telah ditargetkan. Kerangka pendanaan pembangunan pada subbab ini merupakan hasil proyeksi pada Bab III RPD dan disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2022	Target 2023	Proyeksi		
				2024	2025	2026
4	Pendapatan Daerah	16.804.693.776.013	14.621.856.687.106	18.850.000.000.000	19.450.000.000.000	21.300.000.000.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	8.997.262.537.258	8.045.500.965.106	9.510.000.000.000	10.335.000.000.000	11.235.000.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	7.623.597.479.496	7.010.000.000.000	8.300.000.000.000	9.050.000.000.000	9.860.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	19.980.889.916	20.052.388.240	14.080.152.940	15.035.442.940	16.226.520.210
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	310.262.666.522	232.740.891.298	244.444.456.051	264.373.519.869	295.304.934.416
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.043.421.501.324	782.707.685.568	951.475.391.009	1.005.591.037.191	1.063.468.545.374
4.2	Pendapatan Transfer	7.790.284.158.755	6.562.497.042.000	9.311.932.777.866	9.086.929.921.314	10.036.927.064.173
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.790.284.158.755	6.562.497.042.000	9.311.932.777.866	9.086.929.921.314	10.036.927.064.173
4.2.01.01	Dana Perimbangan	7.753.114.697.755	6.562.497.042.000	9.301.932.777.866	9.076.929.921.314	10.026.927.064.173
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	6.329.446.113.503	5.021.968.600.000	7.758.263.118.029	7.515.969.662.519	8.448.393.716.128
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	824.108.986.889	857.919.020.000	872.370.733.844	887.065.887.952	902.008.583.095
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	233.206.951.954	190.152.584.000	192.713.322.771	195.308.546.390	197.938.719.256
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	366.352.645.409	492.456.838.000	478.585.603.223	478.585.824.454	478.586.045.693
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	37.169.461.000	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.147.080.000	13.858.680.000	28.067.222.134	28.070.078.686	28.072.935.828
4.03.01	Hibah	17.147.080.000	13.858.680.000	28.067.222.134	28.070.078.686	28.072.935.828
6.1	Penerimaan Pembiayaan	2.446.993.522.588	2.578.143.312.894	500.000.000.000	600.000.000.000	700.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.446.993.522.588	2.578.143.312.894	500.000.000.000	600.000.000.000	700.000.000.000
	Total Penerimaan Daerah	19.251.687.298.600	17.200.000.000.000	19.350.000.000.000	20.050.000.000.000	22.000.000.000.000

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2022	Target 2023	Proyeksi		
				2024	2025	2026
5	BELANJA DAERAH	12.393.745.833.368	17.031.194.223.080	18.850.000.000.000	19.550.000.000.000	21.500.000.000.000
5.01	BELANJA OPERASI	6.001.780.302.943	7.414.552.277.521	7.494.703.938.134	7.403.443.212.922	7.620.621.396.411
5.01.01	Belanja Pegawai	2.334.585.774.591	2.796.363.758.450	2.706.860.688.397	2.824.334.148.475	2.894.942.502.187
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	3.184.224.252.607	4.207.685.257.571	4.000.643.249.737	4.189.109.064.447	4.300.678.894.224
5.01.05	Belanja Hibah	432.031.575.745	395.879.061.500	767.200.000.000	350.000.000.000	375.000.000.000
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	50.938.700.000	14.624.200.000	20.000.000.000	40.000.000.000	50.000.000.000
5.02	BELANJA MODAL	1.980.010.052.268	4.097.300.945.741	4.673.473.395.866	6.565.358.618.108	7.845.501.480.348
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.688.799.413	129.340.999.818	793.322.666.000	129.698.168.970	129.877.123.241
5.04	BELANJA TRANSFER	4.405.266.678.744	5.390.000.000.000	5.888.500.000.000	5.451.500.000.000	5.904.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	236.600.000.000	168.805.776.920	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo					
6.2.02	Penyertaan modal daerah	236.600.000.000	168.805.776.920	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan					
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah					
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	Total Pengeluaran Daerah	12.630.345.833.368	17.200.000.000.000	19.350.000.000.000	20.050.000.000.000	22.000.000.000.000

Sumber: hasil proyeksi, 2022

7.2. Program Perangkat Daerah

Rencana pembangunan Kalimantan Timur periode tahun 2024 sampai dengan 2026 dilaksanakan dengan berbagai program sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Program perangkat daerah adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan serta sub kegiatan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sampai dengan 2026 ditujukan untuk menjawab permasalahan pembangunan, isu strategis, serta potensi dan tantangan.

Program perangkat daerah dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disajikan pada Lampiran. Program tersebut disajikan berdasarkan urusan, dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal, target dan pagu tahun 2024-2026, serta perangkat daerah penanggung jawab. Kebutuhan anggaran untuk mendanai program perangkat daerah diperoleh dari proyeksi Belanja Daerah sebagaimana dimuat pada Tabel 7.1. di atas.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	80%	100%	42.936.908.696	100%	45.083.754.131	100%	47.337.941.837	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	83,30%	100%	1.937.403.464.623	100%	2.032.173.637.855	100%	2.133.782.319.747	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	85,21%	88,48%	2.316.628.833	91,67%	2.432.460.275	94,27%	2.554.083.289	94,27%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	84,07%	87,49%	2.416.628.833	90,91%	2.537.460.275	94,33%	2.664.333.289	94,33%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	92,53%	94,87%	1.916.628.833	96,81%	2.012.460.275	97,59%	2.113.083.289	97,59%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	64,23%	67,69%	16.985.973.650	71,14%	17.835.272.333	74,61%	18.727.035.949	74,61%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	58,84%	60,34%	20.985.973.650	62,26%	22.035.272.333	64,31%	23.137.035.949	64,31%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	82,50%	79,00%	82.272.046.085	87,00%	86.385.648.389	90,00%	90.704.930.809	90,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,30%	94,00%	38.068.917.750	95,21%	39.972.363.638	96,42%	41.970.981.819	96,42%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	86%	100%	11.721.560.000	100%	12.307.638.000	100%	12.923.019.900	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	98,4%	100%	9.596.846.500	100%	10.076.688.825	100%	10.580.523.266	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,9 rasio	10,8 rasio	181.814.368.000	10,7 rasio	182.863.010.000	10,6 rasio	184.398.142.000	10,6 rasio	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (RS Mata)	98%	98%	6.420.000.000	98%	7.008.078.500	98%	7.689.919.230	98%	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang disediakan dan dipelihara (UPTD Labkes)	80%	80%	573.608.520	85%	826.457.520	90%	1.016.457.520	90%	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88%	88%	49.530.932.850	89%	78.468.424.445	90%	321.961.617.906	90%	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88%	88%	18.276.680.488	88,5%	29.088.674.488	89%	93.813.103.488	89%	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88%	93,73%	19.238.670.704	93,78%	32.963.960.251	93,83%	73.943.091.241	93,83%	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75%	75%	6.837.948.665	80%	6.837.948.665	100%	7.928.948.665	100%	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	63%	65%	2.665.830.000	68%	4.236.736.000	70%	4.831.456.000	70%	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	49,3%	80%	7.425.500.000	85%	7.525.500.000	90%	7.625.500.000	90%	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	80,49%	92,5%	1.162.080.000	93%	1.303.080.000	93,5%	2.292.240.000	93,5%	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	50%	60%	500.000.000	60%	500.000.000	60%	500.000.000	60%	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (UPTD Bapelkes)	50%	80%	500.000.000	85%	600.000.000	90%	600.000.000	90%	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (UPTD RS Korpri)	50%	80%	3.060.000.000	85%	3.564.000.000	90%	4.554.000.000	90%	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (UPTD RS Mata)	50%	40%	80.000.000	50%	181.600.000	60%	183.232.000	60%	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100%	100%	1.092.012.000	100%	1.092.012.000	100%	1.092.012.000	100%	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	40%	60%	2.022.120.000	80%	2.022.120.000	100%	2.022.120.000	100%	Dinas Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi	8940 Ha	9460 Ha	110.150.000.000	9730 Ha	52.900.000.000	10030 Ha	60.300.000.000	10030 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pantai kritis yang ditangani	0,45 Km	2,80 Km	95.474.500.000	0,33 Km	27.000.000.000	0,63 Km	35.193.992.882	4,71 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	239 liter/detik	94 liter/detik	78.900.000.000	60 liter/detik	55.000.000.000	50 liter/detik	41.100.000.000	443 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	87,4 Ha	70 Ha	52.541.977.680	140 Ha	30.483.652.400	210 Ha	46.606.670.785	210 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	39.15 %	57.65 %	165.500.000.000	83.40 %	193.651.696.848	100%	211.144.621.588	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	10.00 %	17.50 %	1.000.000.000	25.00 %	1.000.000.000	40.00 %	1.500.000.000	40.00 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	17.50 %	32.50 %	3.500.000.000	42.00 %	3.500.000.000	46.00 %	8.882.011.690	46.00 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	7,82%	11,15%	49.650.000.000	12,76%	33.566.347.600	14,89%	41.750.000.000	14,89%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	0%	50%	30.000.000.000	75%	40.000.000.000	100%	40.000.000.000	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	11.56 %	59.77 %	810.170.761.131	83.58 %	754.299.012.060	100%	462.168.596.320	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Kawasan yang Ditata	16.67 %	50%	40.000.000.000	66.67 %	20.000.000.000	100%	25.000.000.000	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru	0 Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	317.400.000.000	2 Ruas Jalan	714.500.000.000	4 Ruas Jalan	1.225.000.000.000	4 Ruas Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	77,52%	82,09%	981.873.693.683	86,23%	1.774.282.349.267	93,53%	1.969.258.161.410	93,53%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi	23.09 %	45.21 %	475.296.800	71.11 %	675.296.800	99.40 %	675.296.800	99.40 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	55.16 %	57.64 %	21.500.000.000	60.13 %	24.993.000.000	62.62 %	25.055.000.000	62.62 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	78,57%	83,20%	13.500.000.000	83,90%	15.000.000.000	84,94%	20.000.000.000	84,94%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	11.46 Ha	108.01 Ha	29.301.156.000	156.59 Ha	20.000.000.000	203.75 Ha	20.000.000.000	203.75 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan	25%	33.32 %	2.099.123.830	47.89 %	26.000.000.000	62.46 %	30.000.000.000	62.46 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	11.46 Ha	108.01 Ha	150.698.844.000	156.59 Ha	96.350.000.000	203.75 Ha	142.000.000.000	203.75 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan PSU Permukiman	17.06 %	22.40 %	51.000.000.000	52.57 %	40.000.000.000	100%	40.000.000.000	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	4.643.810.900	100%	4.568.811.200	100%	4.793.810.900	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemulihan Pasca Bencana	100%	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pra Bencana	100%	100%	2.500.000.000	100%	2.620.000.000	100%	2.620.000.000	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	296 Jumlah	296 Jumlah	601.450.000	222 Jumlah	625.450.000	192 Jumlah	650.450.000	192 Jumlah	Satuan Polisi Pamong Praja
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	18%	36%	1.402.683.180	64%	2.264.821.498	100%	3.126.303.649	100%	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	100%	100%	1.726.377.346	100%	1.864.487.534	100%	2.013.646.537	100%	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	2,63%	5,31%	21.216.722.409	5,4%	23.338.394.650	5,8%	25.672.234.115	16,51%	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100%	100%	2.650.957.000	100%	2.650.957.000	100%	3.027.127.750	100%	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100%	100%	2.563.000.000	100%	2.819.300.000	100%	3.101.230.000	100%	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100%	100%	576.609.000	100%	734.011.000	100%	797.411.000	100%	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100%	100%	3.281.612.070	100%	3.609.773.277	100%	4.341.878.275	100%	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100%	100%	867.217.170	100%	1.754.038.887	100%	2.754.038.887	100%	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	440 Orang	12936 Orang	18.375.516.000	12936 Orang	20.165.409.860	12936 Orang	21.001.947.346	12936 Orang	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%	11.986.306.500	100%	13.112.807.150	100%	13.703.430.865	100%	Dinas Sosial
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	1 Lokasi	637.332.310	1 Lokasi	1.337.715.541	1 Lokasi	1.707.487.095	1 Lokasi	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten Kota yang difasilitasi menyusun rencana tenaga kerja	10%	30%	1.000.000.000	70%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang)	31%	75%	20.957.116.050	77%	12.669.922.050	77%	14.064.815.050	77%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)	61,72%	75%	22.993.000.000	76,50%	23.770.000.000	78%	22.540.000.000	78%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	62%	65%	2.243.647.800	66,50%	2.592.783.800	67%	3.307.283.000	67%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	31%	27,10%	2.525.764.900	27,60%	2.607.752.900	28,10%	2.755.000.000	28,10%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	n/a %	65%	2.762.600.050	72%	2.762.600.500	80%	2.346.029.900	80%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi	2,51%	17,64%	3.500.000.000	18,23%	3.500.000.000	19,41%	3.050.000.000	19,41%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	n/a Orang	400 Orang	12.459.543.000	300 Orang	2.055.000.000	300 Orang	1.985.000.000	300 Orang	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	24,96%	23,46%	1.556.925.600	23,24%	3.025.000.000	23,00%	2.000.000.000	23,00%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian data gender dan anak	70%	75%	1.068.365.000	80%	1.050.000.000	85%	1.100.000.000	85%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kab/Kota Layak Anak (KLA)	90%	90%	1.117.500.000	90%	1.800.000.000	100%	1.100.000.000	100%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	4,36%	4,07%	2.056.962.400	3,88%	2.800.000.000	3,69%	2.600.000.000	3,69%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	96.8 Skor	97.6 Skor	1.100.000.000	97.75 Skor	1.220.000.000	97.8 Skor	1.250.000.000	97.8 Skor	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85.9 Skor	86.3 Skor	2.175.000.000	86.5 Skor	2.200.000.000	86.7 Skor	2.230.000.000	86.7 Skor	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangnya	1 Kecamatan	1 Kecamatan	2.100.000.000	1 Kecamatan	2.100.000.000	1 Kecamatan	2.100.000.000	3 Kecamatan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	0%	0%	300.000.000	0%	215.000.000	0%	220.000.000	0%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	84%	85%	1.325.000.000	86%	1.335.000.000	87%	1.340.350.000	87%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)	100%	100%	2.000.000.000	100%	2.400.000.000	100%	3.250.000.000	100%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	3,06 Indeks	≤5 (tercemar ringan) Indeks	6.562.247.305	≤5 (tercemar ringan) Indeks	6.662.247.305	≤5 (tercemar ringan) Indeks	10.178.109.750	≤5 (tercemar ringan) Indeks	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Standar Pencemar Udara	49 Indeks	48 (Baik) Indeks	2.500.000.000	47 (Baik) Indeks	2.700.000.000	46 (Baik) Indeks	2.900.000.000	46 (Baik) Indeks	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	532,134 Ha	532 Ha	850.000.000	627 Ha	1.150.000.000	1159 Ha	2.300.000.000	1159 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah dari total limbah B3 yang dihasilkan (%)	51,01%	51,5%	700.000.000	52%	800.000.000	52,5%	1.100.000.000	52,5%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	36,4%	40%	2.730.000.000	55%	2.850.000.000	75%	3.300.000.000	75%	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	100 Kelompok	110 Kelompok	2.000.000.000	120 Kelompok	2.000.000.000	130 Kelompok	2.000.000.000	130 Kelompok	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan (%)	84%	84,42%	850.000.000	84,42%	850.000.000	84,42%	1.100.000.000	84,42%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)	100%	100%	2.050.000.000	100%	2.050.000.000	100%	2.150.000.000	100%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola (%)	87,02%	88%	2.449.999.695	89%	2.549.999.695	90%	2.549.999.695	90%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	69,86%	70%	800.000.000	80%	805.000.000	90%	830.000.000	90%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	100%	458.118.000	100%	810.000.000	100%	815.000.000	100%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 Kali	2 Kali	450.000.000	2 Kali	805.000.000	2 Kali	850.000.000	2 Kali	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang difasilitasi penataan desanya	1,31%	1,31%	530.000.000	2,14%	683.000.000	5,11%	851.300.000	5,11%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase status desa yang menjadi maju	1,78%	2,38%	2.916.912.000	2,97%	3.265.000.000	3,57%	4.574.104.063	3,57%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	10%	25%	6.156.522.300	35%	7.052.650.000	45%	9.112.915.088	45%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa dan Kelurahan yang mampu mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	1,92%	2,75%	6.617.125.500	3,25%	7.807.150.000	3,75%	9.861.213.420	3,75%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total	2,18%	2,10%	600.000.000	55%	500.000.000	60%	550.000.000	60%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern	55,5%	67,98%	500.000.000	68,42%	650.000.000	68,87%	800.000.000	68,87%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	56,72 indeks	63,46 indeks	906.858.000	65,54 indeks	1.050.000.000	67,62 indeks	500.000.000	67,62 indeks	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
												Perlindungan Anak	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	195 Kejadia n	175 Kejadian	6.000.000.000	165 Kejadian	6.000.000.000	155 Kejadian	6.000.000.000	155 Kejadian	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	74,00%	82,00%	7.704.000.000	86,00%	56.859.000.000	90,00%	3.964.000.000	90,00%	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan	0,008 Angka	0,006 Angka	3.892.000.000	0,005 Angka	3.892.000.000	0,004 Angka	3.892.000.000	0,004 Angka	Dinas Perhubungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP	0,85 Angka	0,96 Angka	3.425.000.000	0,98 Angka	3.913.000.000	1,00 Angka	3.913.000.000	1,00 Angka	Dinas Perhubungan
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	0%	40%	850.000.000	45%	850.000.000	55%	850.000.000	55%	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah	50%	60%	19.750.000.000	70%	22.000.000.000	80%	19.750.000.000	80%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	70%	80%	23.600.000.000	82%	25.400.000.000	85%	23.600.000.000	85%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	15,29%	31%	1.068.670.000	35%	1.200.000.000	36%	1.500.000.000	36%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	2,03%	2,34%	1.700.000.000	4,97%	1.850.000.000	7,81%	2.000.000.000	7,81%	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
													Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi	0%	34%	1.965.315.000	66%	2.161.846.500	100%	2.378.031.150	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	0,91%	5%	968.165.000	10%	1.192.752.000	15%	1.271.328.850	15%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	50 UKM	20 UKM	2.197.850.000	40 UKM	14.944.139.692	60 UKM	18.375.756.486	60 UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	0 Dokumen IPRO	2 Dokumen IPRO	2.700.000.000	2 Dokumen IPRO	3.100.000.000	2 Dokumen IPRO	3.300.000.000	6 Dokumen IPRO	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	9 Minat	11 Minat	2.600.000.000	12 Minat	3.100.000.000	13 Minat	3.300.000.000	36 Minat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN Sektor Non Migas dan Non Batubara	101%	100%	2.700.000.000	100%	3.100.000.000	100%	3.600.000.000	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	700.000.000	100%	780.000.000	100%	880.000.000	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
													Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	100%	100%	2.050.000.000	100%	2.656.262.000	100%	3.389.090.000	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	100%	100%	600.000.000	100%	800.000.000	100%	1.000.000.000	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA										
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,87%	1,02%	11.350.000.000	1,31%	20.500.000.000	1,45%	23.000.000.000	1,45%	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	17,76%	20,49%	13.339.900.000	27,32%	23.750.500.000	34,97%	31.345.500.000	34,97%	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	130 Keping Medali	100 Keping Medali	124.590.297.400	135 Keping Medali	140.235.874.000	135 Keping Medali	111.435.798.000	135 Keping Medali	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	8%	8,21%	9.193.569.600	8,66%	12.250.000.000	9,52%	13.250.000.000	9,52%	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	80%	80%	5.500.000.000	85%	6.000.000.000	90%	6.250.000.000	90%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	3 Tingkat	1.900.000.000	3 Tingkat	2.100.000.000	3 Tingkat	1.900.000.000	3 Tingkat	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	85%	86%	8.628.175.290	87%	9.490.992.819	88%	10.440.092.101	88%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	65%	66%	6.400.000.000	67%	7.040.000.000	68%	7.744.000.000	68%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	75%	77%	845.339.660	78,5%	929.873.626	80%	1.022.860.989	80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	32 OPK	34 OPK	1.400.000.000	37 OPK	1.470.000.000	40 OPK	1.543.500.000	40 OPK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	55%	62%	800.000.000	63,5%	880.000.000	65%	968.000.000	65%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	59,92%	62%	1.800.000.000	63,5%	1.890.000.000	65%	1.984.500.000	65%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45%	47%	2.866.129.700	48,5%	3.152.742.670	50%	3.468.016.937	50%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	34 indeks	35 indeks	5.860.000.000	40 indeks	6.225.000.000	45 indeks	6.900.000.000	45 indeks	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	45 nilai	46 nilai	2.875.000.000	47 nilai	3.825.000.000	48 nilai	4.380.000.000	48 nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Kategori baik	2 OPD	5 OPD	2.950.000.000	7 OPD	3.690.000.000	9 OPD	3.660.000.000	9 OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional	74,84%	76,00%	1.775.000.000	77,00%	2.530.000.000	78,00%	3.313.000.650	78,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	70%	72,97%	6.726.502.000	75,45%	6.093.202.000	77,12%	7.262.183.000	77,12%	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	177514 Ton	190000 Ton	9.700.000.000	195000 Ton	8.250.000.000	200000 Ton	8.500.000.000	200000 Ton	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	300000 0000 Ekor	1000000 000 Ekor	4.994.285.850	1100000 000 Ekor	3.194.285.850	1200000 000 Ekor	3.194.285.850	1200000000 Ekor	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	379700 0 Ekor	4181000 Ekor	1.675.718.640	4393750 Ekor	1.732.379.140	4612500 Ekor	1.624.210.400	4612500 Ekor	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	162114 Ton	200000 Ton	8.209.895.361	201000 Ton	8.103.195.000	202000 Ton	10.500.774.000	202000 Ton	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	59,09%	100%	3.299.287.000	100%	3.299.287.000	100%	3.340.000.000	100%	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	4 Produk Olahan	7 Produk Olahan	1.723.064.000	11 Produk Olahan	1.463.064.000	15 Produk Olahan	1.510.000.000	15 Produk Olahan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	60%	70%	500.949.831	80%	243.296.074	90%	240.351.240	90%	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	0%	30%	10.673.000.000	63,33%	9.300.000.000	100%	9.845.000.000	100%	Dinas Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata - rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara	2,70 Hari	2,70 Hari	1.950.000.000	2,70 Hari	1.500.000.000	2,70 Hari	1.750.000.000	2,70 Hari	Dinas Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata - rata lama tinggal Wisatawan Nusantara	1,64 Hari	1,65 Hari	2.950.000.000	1,65 Hari	2.500.000.000	1,65 Hari	2.750.000.000	1,65 Hari	Dinas Pariwisata
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	63%	75%	5.720.000.000	88%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	Dinas Pariwisata
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	28%	33%	5.500.000.000	66%	5.700.000.000	100%	6.000.000.000	100%	Dinas Pariwisata
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	659222 3 Benih	6000000 Benih	1.054.463.000	6000000 Benih	1.075.860.000	6000000 Benih	1.041.260.000	18000000 Benih	Dinas Perkebunan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi	97%	98%	1.300.000.000	98%	1.332.500.000	99%	1.349.500.000	99%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	20%	30.33 %	1.300.000.000	50%	1.300.000.000	66.67 %	1.300.000.000	66.67 %	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	11.22 %	11.56 %	700.000.000	11.95 %	740.000.000	13.07 %	800.000.000	13.07 %	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	94.08 %	95%	4.500.000.000	96.5 %	4.500.000.000	98%	4.500.000.000	98%	Dinas Perkebunan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	24%	32%	495.000.000	36%	510.000.000	40%	515.000.000	40%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	78.51 Skor	96.21 Skor	3.086.450.185	97.29 Skor	3.894.542.987	97.30 Skor	3.493.838.829	97.30 Skor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	63.12 Skor	87.53 Skor	22.963.189.378	88.00 Skor	28.975.399.825	87.46 Skor	25.994.160.891	87.46 Skor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	72.91 Skor	88.54 Skor	3.271.637.196	98.73 Skor	4.128.215.566	99 Skor	3.703.469.159	99 Skor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25.26 %	25.36 %	19.552.056.400	25.41 %	20.287.620.260	25.46 %	17.158.809.300	25.46 %	Dinas Perkebunan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	36.84 %	39.29 %	6.050.000.000	41.57 %	6.125.000.000	48.84 %	6.195.750.000	48.84 %	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	35%	35,5%	11.950.000.000	35,7%	12.020.000.000	35,9%	12.062.700.000	35,9%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Kebun yang dibangun	24623 Ha	50702 Ha	600.000.000	49000 Ha	650.000.000	50000 Ha	700.000.000	149702 Ha	Dinas Perkebunan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	26%	34%	1.450.000.000	43%	1.450.000.000	52%	1.455.000.000	52%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	36.37 %	41.39 %	1.750.000.000	41.76 %	1.750.000.000	41.81 %	1.780.000.000	41.81 %	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	89.61 Skor	99.54 Skor	1.234.580.074	99.72 Skor	1.557.817.195	99.80 Skor	1.397.535.532	99.80 Skor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	92.08 Skor	98.68 Skor	1.728.412.104	99.18 Skor	2.180.944.073	99.44 Skor	1.956.549.744	99.44 Skor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	75.08 Skor	95.11 Skor	3.703.740.222	95.81 Skor	4.673.451.585	97.75 Skor	4.192.606.595	97.75 Skor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Wilayah dari PHMSZ	87.08 Skor	91.79 Skor	6.666.732.400	92.41 Skor	8.412.212.852	92.45 Skor	7.546.691.872	92.45 Skor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	72%	75.80 %	2.202.750.000	75.9 %	2.226.750.000	76%	2.280.000.000	76%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	27,39%	40,59%	1.626.421.100	55,45%	1.436.242.850	70,30%	1.566.399.000	70,30%	Dinas Perkebunan
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	67.17 Skor	99.35 Skor	617.290.037	99.59 Skor	778.908.597	99.73 Skor	698.767.766	99.73 Skor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	51.66 Skor	99.74 Skor	4.321.030.259	99.73 Skor	5.452.360.182	99.78 Skor	4.891.374.361	99.78 Skor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan	15.38 %	26.5 %	3.121.820.700	52.99 %	2.951.404.040	79.49 %	3.299.406.000	79.49 %	Dinas Perkebunan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	75%	77%	2.849.500.000	80%	2.865.000.000	80%	2.915.500.000	80%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	5.15 %	11.15 %	1.904.358.500	23.03 %	1.418.825.100	34.55 %	1.826.689.300	34.55 %	Dinas Perkebunan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	117%	100%	5.499.080.100	100%	5.292.006.770	100%	8.268.601.000	100%	Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	36,37%	55%	1.504.783.300	60%	1.483.793.200	65%	2.183.793.200	65%	Dinas Perkebunan
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	826,05 Ton	850 Ton	5.558.990.000	900 Ton	5.558.990.000	950 Ton	5.558.990.000	950 Ton	Dinas Kehutanan
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu	4.471.286,16 m3/tahun	4.420.000 m3/tahun	25.324.422.000	4.450.000 m3/tahun	25.324.422.000	4.475.000 m3/tahun	27.324.422.000	4.475.000 m3/tahun	Dinas Kehutanan
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	0,12%	1%	135.892.372.000	1%	114.300.629.000	1%	125.760.723.000	1%	Dinas Kehutanan
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	0,47%	0,47%	89.670.958.000	0,71%	92.830.132.000	0,95%	102.670.958.000	0,95%	Dinas Kehutanan
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi Yang Dikelola	72.311,38 Ha	610.540,98 Ha	18.556.035.000	730.007,98 Ha	18.556.035.000	930.007,98 Ha	18.556.035.000	930.007,98 Ha	Dinas Kehutanan
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Kelompok	20 Kelompok	35.296.415.000	20 Kelompok	35.296.415.000	20 Kelompok	45.796.415.000	60 Kelompok	Dinas Kehutanan
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	48.258 Ha	20.000 Ha	35.367.302.000	20.000 Ha	35.367.302.000	20.000 Ha	41.167.302.000	60.000 Ha	Dinas Kehutanan
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS Yang Dikelola	258.130,31 Ha	10.104 Ha	4.289.275.000	196.336 Ha	4.289.275.000	358.190 Ha	4.289.275.000	358.190 Ha	Dinas Kehutanan

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam	83,33%	92,97%	5.000.000.000	97,78%	33.000.000.000	100,00 %	35.000.000.000	100,00%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Zona Konservasi Air Tanah Yang Terpetakan	29,5%	45,38%	3.020.000.000	53,38%	3.300.000.000	61,38%	3.530.000.000	61,38%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	86,17%	100,00%	2.750.000.000	100,00%	4.675.550.000	100,00%	5.027.550.000	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	136.682,402 Ton CO2e/Tahun	243.246,516 Ton CO2e/Tahun	0	484.906,515 Ton CO2e/Tahun	0	726.566,514 Ton CO2e/Tahun	0	726.566,514 Ton CO2e/Tahun	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	43,76%	43,76%	0	45,76%	0	47,76%	0	47,76%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	28,00%	33,56%	6.500.000.000	35,78%	23.080.900.000	38,00%	15.485.000.000	38,00%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN	24,28%	34,10%	50.743.953.000	38,73%	66.300.000.000	42,20%	69.100.000.000	42,20%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani	100,00 %	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT	238,98 kWp	250,00 kWp	0	300,00 kWp	0	400,00 kWp	0	400,00 kWp	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga	70%	80%	150.000.000	85%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
													Usaha Kecil Menengah
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu	100%	100%	156.798.600	100%	368.157.600	100%	441.789.120	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Surat Rekomendasi yang Tepat Waktu	100%	100%	100.000.000	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	0%	10%	500.000.000	50%	800.000.000	100%	900.000.000	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	64 Jenis	67 Jenis	1.570.000.000	70 Jenis	1.895.509.000	73 Jenis	2.085.059.900	73 Jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Mutu layanan UPTD BPSMB	(A) 85 %	(A) 82 %	898.600.000	(A) 83 %	809.855.000	(A) 84 %	1.000.000.000	(A) 84 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	76,09%	77%	5.000.000.000	79%	8.660.171.780	80%	9.566.188.958	80%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	72,22%	73%	898.600.000	74%	809.855.000	75%	1.061.474.239	75%	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
													Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri	50%	75%	1.078.201.400	90%	988.785.000	100%	1.150.380.000	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	18,47%	16%	995.000.000	14%	1.055.500.000	12%	1.148.000.000	12%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	92,27%	85%	250.000.000	90%	250.000.000	92%	250.000.000	92%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3	31	02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	4,76%	5,20%	2.820.000.000	5,56%	13.020.000.000	5,92%	12.920.000.000	5,92%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	5%	5%	680.000.000	10%	690.000.000	15%	700.000.000	15%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	17,04%	18,69%	500.000.000	19,02%	500.000.000	19,58%	500.000.000	19,58%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
3	32	02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi	1 kawasan	1 kawasan	477.054.000	1 kawasan	1.005.000.000	1 kawasan	1.850.000.000	1 kawasan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah rencana kawasan transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	1 kawasan	1 kawasan	545.791.300	1 kawasan	1.100.000.000	1 kawasan	1.000.000.000	1 kawasan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang ditingkatkan ketrampilannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan	100%	100%	477.154.700	100%	1.000.000.000	100%	450.000.000	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01		SEKRETARIAT DAERAH										
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	71,53 Indeks	72 Indeks	1.450.000.000	73 Indeks	1.510.000.000	74 Indeks	1.550.000.000	74 Indeks	Sekretariat Daerah
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kematangan Organisasi	43,59 Indeks	44 Indeks	750.000.000	45 Indeks	780.000.000	47 Indeks	800.000.000	47 Indeks	Sekretariat Daerah
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	0 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	900.000.000	1 Perangkat Daerah	920.000.000	3 Perangkat Daerah	950.000.000	3 Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Klaster Pendukung yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal BB (Sangat Baik)	40%	40%	1.200.000.000	60%	1.220.000.000	100%	1.250.000.000	100%	Sekretariat Daerah
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	85,11%	86%	1.100.000.000	87%	1.119.761.000	89%	1.150.000.000	89%	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi	95%	100%	2.100.000.000	100%	1.559.001.875	100%	1.559.001.875	100%	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase LPPD yang dilaporkan	100%	100%	765.344.800	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah	100%	100%	5.963.504.480	100%	2.555.007.780	100%	2.555.007.780	100%	Sekretariat Daerah
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	1.750.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.800.000.000	100%	Sekretariat Daerah
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100%	100%	4.100.000.000	100%	4.200.000.000	100%	4.325.000.000	100%	Sekretariat Daerah
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100%	100%	4.452.178.000	100%	4.322.222.000	100%	4.444.666.000	100%	Sekretariat Daerah
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	100%	13.137.769.473	100%	13.078.561.000	100%	21.722.000.000	100%	Sekretariat Daerah
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	90%	90%	1.808.000.000	95%	2.189.000.000	100%	5.540.000.000	100%	Sekretariat Daerah
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase transaksi e- purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	10%	30%	1.297.422.000	35%	1.297.422.000	40%	1.297.422.000	40%	Sekretariat Daerah
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	3 Level	3 Level	6.166.479.900	3 Level	6.166.479.900	3 Level	6.166.479.900	3 Level	Sekretariat Daerah
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	83,57%	80%	6.700.000.000	85%	6.700.000.000	90%	6.700.000.000	90%	Sekretariat Daerah

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
4	02		SEKRETARIAT DPRD										
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	83 Indeks	83 Indeks	49.536.128.656	84 Indeks	50.000.000.000	85 Indeks	51.500.000.000	85 Indeks	Sekretariat DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang-undangan	83 Indeks	83 Indeks	49.536.128.657	84 Indeks	50.000.000.000	85 Indeks	51.500.000.000	85 Indeks	Sekretariat DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan	83 Indeks	83 Indeks	49.536.128.656	84 Indeks	50.000.000.000	85 Indeks	51.500.000.000	85 Indeks	Sekretariat DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	49.536.128.656	100%	50.000.000.000	100%	51.500.000.000	100%	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	01		PERENCANAAN										
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	100%	4.361.900.000	100%	4.361.900.000	100%	4.361.900.000	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100%	100%	4.361.904.100	100%	4.361.904.100	100%	4.361.904.100	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	100%	100%	4.361.909.000	100%	4.361.909.000	100%	4.361.909.000	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100%	100%	8.068.975.000	100%	8.068.975.000	100%	11.250.249.900	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100%	100%	8.068.970.000	100%	8.068.970.000	100%	11.250.245.000	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
5	02		KEUANGAN										
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu	89 %	100 %	6.707.422.666.000	100 %	6.419.544.067.184	100 %	7.005.794.848.696	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	93%	100%	128.000.000	100%	141.000.000	100%	155.000.000	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100%	100%	129.000.000	100%	141.500.000	100%	155.850.000	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	100%	100%	128.000.000	100%	141.000.000	100%	155.000.000	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100%	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPP Sebelumnya (t-1) yang Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Sesuai pada Tahun Ini (t-0)	0 %	40 %	11.850.000.000	45 %	10.688.655.000	47 %	11.073.088.000	47 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100%	100%	269.797.000	100%	296.776.700	100%	326.454.370	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	100%	100%	384.991.200	100%	423.490.320	100%	465.839.352	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	97%	100%	297.214.000	100%	321.935.400	100%	349.128.940	100%	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	100%	100%	384.854.800	100%	423.340.280	100%	465.674.308	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	100%	100%	526.067.960	100%	578.674.756	100%	636.542.232	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	100%	100%	227.810.000	100%	250.591.000	100%	275.650.100	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	99%	100%	468.637.000	100%	500.500.700	100%	535.550.770	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100%	100%	405.927.000	100%	441.519.700	100%	480.671.670	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	100%	100%	483.671.200	100%	522.038.320	100%	564.242.152	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	180.000.000	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	100%	100%	82.830.000	100%	91.113.000	100%	100.224.300	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)	100%	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100%	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)	100%	100%	92.560.000	100%	106.816.000	100%	122.497.600	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	100%	100%	82.412.000	100%	90.653.200	100%	99.718.520	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100%	100%	62.700.000	100%	68.970.000	100%	75.867.000	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	100%	100%	36.025.000	100%	39.627.500	100%	43.590.250	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)	100%	100%	104.265.000	100%	129.691.500	100%	157.660.650	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Penajam Paser Utara (UPTD PPRD PPU)	100%	100%	121.190.800	100%	138.309.880	100%	157.140.868	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100%	100%	184.706.400	100%	213.177.040	100%	244.494.744	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target Pajak Daerah	100%	100%	13.835.359.300	100%	15.218.895.230	100%	16.742.284.753	100%	Badan Pendapatan Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	89 indeks	90 indeks	21.160.000.000	90,5 indeks	21.783.000.000	91 indeks	22.465.000.000	91 indeks	Badan Kepegawaian Daerah
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	70 Indeks	85,5 Indeks	350.000.000	86 Indeks	450.000.000	86,5 Indeks	550.000.000	86,5 Indeks	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	80%	86%	2.497.802.000	87%	2.997.802.000	88%	3.497.802.000	88%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial	80%	86%	8.268.078.000	87%	10.302.198.000	88%	10.502.198.000	88%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	80%	86%	4.200.000.000	87%	5.150.000.000	88%	5.650.000.000	88%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah	80%	86%	2.234.120.000	87%	1.000.000.000	88%	1.000.000.000	88%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	80%	87%	7.450.200.000	88%	8.050.000.000	89%	8.500.000.000	89%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	63%	65%	3.617.500.000	66%	4.183.837.500	67%	5.322.175.000	67%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	63%	70%	3.617.500.000	72%	4.183.837.500	75%	5.322.175.000	75%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG										
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga yang ditindaklanjuti	100%	100%	1.264.933.410	100%	1.264.933.410	100%	1.264.933.410	100%	Badan Penghubung Provinsi
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitasi Promosi dan Informasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.684.233.789	100%	2.684.233.789	100%	2.684.233.789	100%	Badan Penghubung Provinsi
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess yang ditindaklanjuti	100%	100%	986.376.200	100%	894.536.200	100%	1.078.216.200	100%	Badan Penghubung Provinsi
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6	01		INSPEKTORAT DAERAH										
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100%	100%	16.862.522.000	100%	18.270.000.000	100%	23.270.000.000	100%	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	83%	83%	3.700.000.000	85%	4.700.000.000	87%	5.700.000.000	87%	Inspektorat
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	16,67%	100%	18.700.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.360.000.000	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,28%	1,30%	288.338.302.963	1,32%	3.000.000.000	1,34%	3.360.000.000	1,34%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	28,85%	31,21%	80.961.724.037	33,58%	1.500.000.000	35,94%	1.680.000.000	35,94%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100%	100%	1.850.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.680.000.000	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	90,63%	100%	6.700.000.000	100%	6.000.000.000	100%	6.360.000.000	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X													
X	XX												
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0 Indeks	90 Indeks	724.418.873.029	91,5 Indeks	742.699.605.554	93 Indeks	921.756.484.743	93 Indeks	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	667.719.904.868	100%	674.094.129.002	100%	749.577.256.087	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	75 Indeks	80 Indeks	33.826.207.500	90 Indeks	33.826.207.500	100 Indeks	33.826.207.500	100 Indeks	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Laboratorium Kesehatan)	75 Indeks	80 Indeks	10.416.142.480	90 Indeks	10.976.142.480	100 Indeks	11.536.142.480	100 Indeks	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSJ Atma Husada)	77 Indeks	82 Indeks	83.287.926.296	84 Indeks	83.813.388.749	86 Indeks	86.042.855.759	86 Indeks	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD AWS)	75 Indeks	80 Indeks	733.526.992.150	82 Indeks	762.643.893.555	85 Indeks	806.122.073.094	85 Indeks	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD Kanujoso)	65 Indeks	70 Indeks	429.318.866.512	70 Indeks	444.093.866.512	70 Indeks	457.593.866.512	70 Indeks	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Bapelkes)	75 Indeks	80 Indeks	8.559.395.000	90 Indeks	8.582.892.000	100 Indeks	8.982.892.000	100 Indeks	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD RS Mata)	75 Indeks	80 Indeks	21.711.925.000	90 Indeks	22.148.163.500	100 Indeks	22.593.126.770	100 Indeks	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD RSUD Korpri)	75 Indeks	80 Indeks	14.492.275.335	90 Indeks	15.173.275.335	100 Indeks	14.692.275.335	100 Indeks	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Layanan yang Ditindaklanjuti (RS Korpri)	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	33.826.207.500	100%	33.826.207.500	100%	33.826.207.500	100%	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (RSUD AWS)	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (RSUD Kanujoso)	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Bapelkes)	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Laboratorium Kesehatan)	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada)	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD RS Mata)	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	70,80 Indeks	72,20 Indeks	75.693.034.373	74,60 Indeks	73.950.653.464	77,00 Indeks	73.473.405.619	77,00 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	39.502.793.503	100%	38.111.895.561	100%	38.175.977.906	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	17.907.176.278	90 Indeks	16.565.702.208	90 Indeks	16.527.991.828	90 Indeks	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	6.347.562.822	100%	6.990.036.592	100%	7.027.747.272	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks	19.735.450.000	85 Indeks	18.451.450.000	85 Indeks	19.812.450.000	85 Indeks	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80%	80%	564.550.000	80%	564.550.000	80%	564.550.000	80%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	77 Indeks	82 Indeks	46.416.830.431	84 Indeks	45.473.288.414	86 Indeks	49.647.550.043	86 Indeks	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	77 Indeks	82 Indeks	2.715.062.654	84 Indeks	2.838.495.466	86 Indeks	2.971.810.463	86 Indeks	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	77 Indeks	82 Indeks	3.015.917.000	84 Indeks	3.011.323.000	86 Indeks	3.261.379.250	86 Indeks	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS)	77 Indeks	82 Indeks	2.575.436.000	84 Indeks	2.842.980.000	86 Indeks	3.137.277.000	86 Indeks	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	77 Indeks	82 Indeks	1.179.931.000	84 Indeks	1.136.996.000	86 Indeks	1.244.292.000	86 Indeks	Dinas Sosial

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
				GELANDANGAN DAN PENGEMIS)									
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	77 Indeks	82 Indeks	3.645.162.930	84 Indeks	4.019.678.723	86 Indeks	4.060.519.725	86 Indeks	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS PENYANDANG DISABILITAS)	77 Indeks	82 Indeks	10.000.000	84 Indeks	1.208.800.000	86 Indeks	1.207.480.000	86 Indeks	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD PMKS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD PMKS ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS)	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD PMKS LANJUT USIA)	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD PMKS PENYANDANG DISABILITAS)	100%	100%	2.000.000	100%	3.200.000	100%	4.520.000	100%	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	77 Indeks	82 Indeks	43.397.438.250	84 Indeks	44.670.218.800	86 Indeks	48.496.468.100	86 Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Bontang)	77 Indeks	82 Indeks	6.648.881.950	84 Indeks	6.903.567.950	84 Indeks	6.603.567.950	84 Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BLKI Bontang)	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD BLKI Balikpapan)	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Balikpapan)	77 Indeks	82 Indeks	5.373.509.000	84 Indeks	6.398.575.000	86 Indeks	5.898.557.000	86 Indeks	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	77 Indeks	82 Indeks	20.741.194.000	84 Indeks	23.959.255.000	86 Indeks	22.455.118.000	86 Indeks	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DPTPH)	81.45 Indeks	82 Indeks	61.334.646.000	82.7 Indeks	61.189.793.000	83.4 Indeks	61.258.163.000	83.4 Indeks	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH)	81.1 Indeks	81.5 Indeks	3.616.580.000	82 Indeks	3.616.580.000	82.8 Indeks	3.615.960.000	82.8 Indeks	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD BPPSDMP)	81.1 Indeks	81.5 Indeks	2.227.579.850	82 Indeks	2.240.520.840	82.8 Indeks	2.232.722.040	82.8 Indeks	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PSBTPH TPH)	81.1 Indeks	81.5 Indeks	1.631.608.000	82 Indeks	1.619.730.000	82.8 Indeks	1.634.305.000	82.8 Indeks	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PTPH)	81.1 Indeks	81.5 Indeks	2.461.000.000	82 Indeks	2.411.000.000	82.8 Indeks	2.415.000.000	82.8 Indeks	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DPTPH)	100%	100%	1.640.000.000	100%	1.864.853.000	100%	1.878.853.000	100%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH)	100%	100%	583.420.000	100%	605.420.000	100%	608.040.000	100%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP)	100%	100%	422.920.150	100%	444.479.160	100%	457.277.960	100%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH)	100%	100%	318.392.000	100%	330.270.000	100%	331.520.000	100%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH)	100%	100%	841.250.000	100%	912.250.000	100%	910.000.000	100%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	87,76 Indeks	88,0 Indeks	19.420.000.000	88,5 Indeks	19.300.000.000	89,0 Indeks	19.499.446.555	89,0 Indeks	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	8.700.000.000	100%	8.500.000.000	100%	8.500.000.000	100%	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	77 Indeks	82 Indeks	21.200.469.200	84 Indeks	21.489.176.000	86 Indeks	22.751.089.429	86 Indeks	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	62,00 Indeks	70,00 Indeks	18.475.000.000	74,00 Indeks	18.475.000.000	76,00 Indeks	18.975.000.000	76,00 Indeks	Dinas Perhubungan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	9.715.000.000	100%	9.715.000.000	100%	9.715.000.000	100%	Dinas Perhubungan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	34.366.942.000	100 Indeks	35.636.931.000	100 Indeks	32.531.435.000	100 Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	19.956.262.000	92 Indeks	28.855.000.000	93 Indeks	21.909.250.000	93 Indeks	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	89 Indeks	90 Indeks	28.934.100.000	91 Indeks	29.688.000.000	92 Indeks	30.375.500.000	92 Indeks	Dinas Pemuda dan Olah Raga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	80%	82%	24.500.000.000	84%	25.000.000.000	86%	25.500.000.000	86%	Dinas Pemuda dan Olah Raga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	76,21 Indeks	80 Indeks	13.750.486.000	82 Indeks	13.920.716.000	84 Indeks	15.280.164.000	84 Indeks	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	92%	95%	10.736.013.000	96%	10.888.043.000	97%	10.395.780.350	97%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Kelautan dan Perikanan)	89.4 Indeks	90.4 Indeks	37.820.820.000	91.4 Indeks	37.497.028.000	92.4 Indeks	37.812.028.000	92.4 Indeks	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar)	89.4 Indeks	90.4 Indeks	1.020.338.800	91.4 Indeks	1.020.338.800	92.4 Indeks	1.020.338.800	92.4 Indeks	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan)	89.4 Indeks	90.4 Indeks	993.966.249	91.4 Indeks	730.341.277	92.4 Indeks	733.163.120	92.4 Indeks	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD SPAPAL Sebulu)	89.4 Indeks	90.4 Indeks	3.455.275.360	91.4 Indeks	3.335.164.860	92.4 Indeks	3.515.758.600	92.4 Indeks	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar)	100%	100%	928.985.750	100%	928.985.750	100%	928.985.750	100%	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Kelautan dan Perikanan)	100%	100%	4.873.393.600	100%	5.097.185.600	100%	5.032.397.600	100%	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan)	100%	100%	537.790.559	100%	559.069.649	100%	559.192.640	100%	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD SPAPAL Sebulu)	100%	100%	1.070.150.000	100%	1.133.600.000	100%	1.061.175.000	100%	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0 Indeks	81 Indeks	14.713.920.000	81 Indeks	14.406.920.000	81 Indeks	14.506.920.000	81 Indeks	Dinas Pariwisata

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Akhir
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	1.993.080.000	100%	1.993.080.000	100%	1.993.080.000	100%	Dinas Pariwisata
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Dinas Perkebunan)	73.08 Indeks	78.93 Indeks	27.084.029.000	84.88 Indeks	28.640.427.790	90.83 Indeks	26.473.084.500	90.83 Indeks	Dinas Perkebunan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	85.56 Indeks	85.87 Indeks	744.616.700	86.2 Indeks	756.819.700	87.2 Indeks	756.819.700	87.2 Indeks	Dinas Perkebunan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	74.37 Indeks	79 Indeks	1.105.854.800	83.75 Indeks	1.105.854.800	88.38 Indeks	1.106.854.800	88.38 Indeks	Dinas Perkebunan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	77.25 Indeks	80 Indeks	1.866.775.000	82.75 Indeks	3.676.009.000	85.5 Indeks	3.176.009.000	85.5 Indeks	Dinas Perkebunan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	100%	100%	717.083.000	100%	717.083.000	100%	716.083.000	100%	Dinas Perkebunan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Perkebunan)	100%	100%	3.358.476.100	100%	3.690.705.190	100%	3.456.839.900	100%	Dinas Perkebunan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100%	100%	987.254.300	100%	953.654.300	100%	988.254.300	100%	Dinas Perkebunan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100%	100%	754.754.000	100%	745.520.000	100%	745.520.000	100%	Dinas Perkebunan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	90 Indeks	93.3 Indeks	27.119.727.711	95.17 Indeks	29.940.159.548	96.88 Indeks	30.103.401.390	96.88 Indeks	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)	90 Indeks	93,3 Indeks	1.814.832.710	95,17 Indeks	10.289.991.276	96,88 Indeks	2.054.377.233	96,88 Indeks	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTHPT)	90 Indeks	93,3 Indeks	2.030.884.221	95,17 Indeks	2.562.609.285	96,88 Indeks	2.298.945.950	96,88 Indeks	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)	95%	100%	777.785.446	100%	981.424.834	100%	880.447.384	100%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTHPT)	95%	100%	870.378.953	100%	1.098.261.123	100%	985.262.550	100%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	95%	100%	1.728.412.104	100%	2.180.944.072	100%	1.956.549.744	100%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	81 Indeks	191.764.977.000	83 Indeks	158.605.803.000	85 Indeks	160.605.803.000	85 Indeks	Dinas Kehutanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	45.271.844.000	100%	45.271.844.000	100%	45.271.844.000	100%	Dinas Kehutanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	77,35 Indeks	84,20 Indeks	26.575.000.000	86,51 Indeks	20.912.000.000	89,12 Indeks	21.172.000.000	89,12 Indeks	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	5.547.000.000	100%	5.705.500.000	100%	5.661.000.000	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,09 Indeks	88,5 Indeks	33.000.000.000	88,8 Indeks	35.993.138.428	89 Indeks	31.523.465.536	89 Indeks	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPSMB)	88,09 Indeks	88,5 Indeks	2.502.800.000	88,8 Indeks	3.180.290.000	89 Indeks	3.238.525.761	89 Indeks	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pelatihan Koperasi)	88,09 Indeks	88,5 Indeks	3.000.000.000	88,8 Indeks	3.250.000.000	89 Indeks	3.500.000.000	89 Indeks	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BPSMB)	100%	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Pelatihan Koperasi)	100%	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 Indeks	100 Indeks	11.473.710.132	100 Indeks	8.287.788.232	100 Indeks	9.520.888.232	100 Indeks	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	79 Indeks	80 Indeks	5.800.000.000	83 Indeks	6.050.000.000	85 Indeks	6.305.000.000	85 Indeks	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas layanan kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 Indeks	100 Indeks	6.093.092.387	100 Indeks	6.293.092.387	100 Indeks	6.354.909.387	100 Indeks	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum	87 Indeks	87 Indeks	1.800.000.000	88 Indeks	1.800.000.000	90 Indeks	1.800.000.000	90 Indeks	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks	2.505.746.000	100 Indeks	2.522.861.000	100 Indeks	2.568.319.000	100 Indeks	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan Biro Organisasi	81 Indeks	82 Indeks	2.088.046.000	83 Indeks	2.088.046.000	84 Indeks	2.090.563.000	85 Indeks	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks	4.179.414.720	87 Indeks	2.434.420.345	90 Indeks	2.577.388.345	90 Indeks	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	2.833.969.100	78 Indeks	3.039.927.100	80 Indeks	3.250.003.100	80 Indeks	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	2.495.711.527	82 Indeks	2.317.862.000	83 Indeks	3.275.706.000	83 Indeks	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	211.686.351.300	84,5 Indeks	204.195.480.980	85 Indeks	208.361.158.779	85 Indeks	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pimpinan yang ditindaklanjuti (Biro Umum)	83%	100%	17.300.372.700	100%	21.941.044.020	100%	23.038.096.221	100%	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Biro Administrasi Pimpinan)	100%	100%	603.879.481	100%	436.199.381	100%	501.099.381	100%	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan Biro	85 Indeks	85 Indeks	156.855.485.375	90 Indeks	160.000.000.000	95 Indeks	159.000.000.000	95 Indeks	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	75,88 Indeks	80 Indeks	37.442.315.900	82 Indeks	38.142.496.900	85 Indeks	35.675.921.000	85 Indeks	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	1.875.181.000	100%	1.175.000.000	100%	1.705.469.000	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan keseekretariatan	72 Indeks	75 Indeks	226.873.344.200	76 Indeks	267.512.220.620	77 Indeks	285.118.615.282	77 Indeks	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan keseekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	72 Indeks	75 Indeks	6.917.623.000	76 Indeks	7.389.911.300	77 Indeks	7.894.064.930	77 Indeks	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan keseekretariatan (UPTD PPRD Berau)	72 Indeks	75 Indeks	3.995.234.400	76 Indeks	4.257.576.040	77 Indeks	4.536.549.944	77 Indeks	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan keseekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	72 Indeks	75 Indeks	4.009.358.000	76 Indeks	4.277.487.600	77 Indeks	4.563.134.260	77 Indeks	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan keseekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	72 Indeks	75 Indeks	4.207.514.200	76 Indeks	4.485.328.520	77 Indeks	4.780.920.572	77 Indeks	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan keseekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	72 Indeks	75 Indeks	6.946.556.040	76 Indeks	7.589.130.244	77 Indeks	8.299.509.168	77 Indeks	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan keseekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	72 Indeks	75 Indeks	4.176.922.000	76 Indeks	4.457.729.900	77 Indeks	4.757.037.090	77 Indeks	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	72 Indeks	75 Indeks	3.906.065.000	76 Indeks	4.161.470.800	77 Indeks	4.432.952.380	77 Indeks	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	72 Indeks	75 Indeks	3.836.933.200	76 Indeks	4.088.433.220	77 Indeks	4.355.830.342	77 Indeks	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	72 Indeks	75 Indeks	8.231.930.600	76 Indeks	8.819.414.360	77 Indeks	9.451.391.496	77 Indeks	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100%	100%	2.074.616.500	100%	2.282.078.150	100%	2.510.285.965	100%	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)	100%	100%	45.540.000	100%	50.094.000	100%	55.103.400	100%	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	100%	100%	109.982.400	100%	120.980.640	100%	133.078.704	100%	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang)	100%	100%	27.720.000	100%	30.492.000	100%	33.541.200	100%	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar)	100%	100%	89.760.000	100%	98.736.000	100%	108.609.600	100%	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)	100%	100%	76.560.000	100%	84.216.000	100%	92.637.600	100%	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim)	100%	100%	170.236.000	100%	187.259.600	100%	205.985.560	100%	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser)	100%	100%	27.720.000	100%	30.492.000	100%	33.541.200	100%	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU)	100%	100%	42.372.000	100%	46.609.200	100%	51.270.120	100%	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)	100%	100%	69.484.800	100%	76.433.280	100%	84.076.608	100%	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	80,22 Indeks	82 Indeks	63.449.356.000	84 Indeks	58.951.617.816	86 Indeks	60.774.478.304	86 Indeks	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	24.550.000.000	100%	22.437.859.000	100%	23.293.874.000	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	80 Indeks	85 Indeks	23.052.000.000	87 Indeks	23.779.000.000	89 Indeks	24.907.000.000	89 Indeks	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	0%	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	0 Indeks	88 Indeks	31.429.800.000	90 Indeks	33.744.324.000	92 Indeks	38.974.086.000	92 Indeks	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	0%	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Akhir			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	83 Indeks	83 Indeks	23.765.000.000	84 Indeks	26.382.325.000	85 Indeks	24.874.400.000	85 Indeks	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	82,5 Indeks	82,5 Indeks	17.564.456.601	83 Indeks	18.156.296.601	83,5 Indeks	18.472.616.601	83,5 Indeks	Badan Penghubung Provinsi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	26.116.486.800	100 Indeks	26.100.000.000	100 Indeks	26.478.000.000	100 Indeks	Inspektorat
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	17.410.991.200	100%	17.400.000.000	100%	17.652.000.000	100%	Inspektorat
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	7.037.018.500	100%	5.408.512.500	100%	4.968.512.500	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	78 Indeks	78,63 Indeks	11.591.460.500	78,68 Indeks	11.591.487.500	78,72 Indeks	12.091.487.500	78,72 Indeks	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja pembangunan daerah merupakan capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran berkenaan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah dimuat pada Bab V dokumen ini. Pelaksanaan pembangunan pada periode tersebut diharapkan mencapai kinerja tujuan dan sasaran, yang akan diukur dengan beberapa alat ukur yang disebut indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Peristilahan kinerja sebagaimana dijelaskan di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 memiliki peristilahan yang berbeda, namun memiliki arsitektur atau penjenjangan kinerja yang sama. Adapun pemetaan penjenjangan kinerja kedua aturan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tujuan dan sasaran pada RPD memiliki kinerja dampak (*impact*) sama dengan *ultimate outcome*.
- b. Tujuan dan sasaran pada Renstra PD memiliki kinerja dampak (*impact*) sama dengan *intermediate outcome* urusan.
- c. Program pada Renstra PD memiliki kinerja hasil (*outcome*) sama dengan *intermediate outcome* sub urusan.
- d. Kegiatan pada Renstra PD memiliki kinerja keluaran (*output*) sama dengan *immediate outcome*.
- e. Sub Kegiatan pada Renstra PD memiliki kinerja keluaran (*output*) sama dengan *Output*.

Pada subbab ini memuat beberapa indikator kinerja yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2024-2026. Rincian masing-masing indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

8.1. Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja makro dan indikator kinerja utama (IKU) memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam membangun Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja makro dapat diartikan sebagai indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Pencapaian indikator makro didorong oleh pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah dengan melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan. Indikator makro Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang memuat 6 (enam) indikator beserta target per tahun disajikan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Makro Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal			Target			Kondisi Akhir
			2021	2022	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76,88	77,44	77,78	78,32	78,60	78,92	78,92
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,83	5,71	5,63	5,46	5,30	5,14	5,14
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	2,55	4,48	3,5±1	4,10-4,90	4,30-5,10	4,50-5,30	4,50-5,30
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,54	6,31	6,19	5,78	5,67	5,55	5,55
5	Indeks Gini	Poin	0,334	0,327	0,320	0,316	0,310	0,305	0,305
6	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	41,96	70,73	29,33	31,05	31,89	32,03	32,03

Sumber: Hasil proyeksi, 2023

Target indikator makro Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimuat pada tabel diatas diproyeksikan dengan asumsi bahwa pembangunan IKN telah dilakukan dan masih terus berlanjut sampai beberapa tahun kedepan secara bertahap. Provinsi Kalimantan Timur diposisikan sebagai Daerah Mitra yang akan berkembang bersama IKN. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan di Kalimantan Timur dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja daerah pada tingkat tertinggi yang menggambarkan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah Tahun 2024-2026 merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis dalam RPD yang paling berdaya ungkit dan menjadi prioritas bagi pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan. Adapun IKU dan target per tahun disajikan pada Tabel 8.2 berikut ini.

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal			Target			Kondisi Akhir
			2021	2022	2023 (target)	2024	2025	2026	
I. INDIKATOR KINERJA TUJUAN									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,88	77,44	77,78	78,32	78,60	78,92	78,92
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	2,55	4,48	3,5 _± 1	4,10-4,90	4,30-5,10	4,50-5,30	4,50-5,30
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,54	6,31	6,19	5,78	5,67	5,55	5,55
4	Indeks Gini	Indeks	0,334	0,327	0,320	0,316	0,310	0,305	0,305
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,06	74,46	74,90	75,00	75,10	75,20	75,20
6	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	41,96	70,73	29,33	31,05	31,89	32,03	32,03
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,47 (B)	67,70 (B)	68,81 (B)	69,00 (B)	69,50 (B)	70,01 (BB)	70,01 (BB)
II. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
8	Prevalensi Stunting	Persen	22,80	23,90	21,40	12,83	11	10	10
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,83	5,71	5,63	5,46	5,30	5,14	5,14
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66,64	66,84	66,97	67,31	67,64	67,98	67,98
11	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	6,46	6,74	7,26	7,74	8,39	9,05	9,05
12	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persen	6,53	7,27	8,40	10,39	12,39	14,68	14,68

Sumber: Hasil proyeksi, 2023

8.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut juga Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. IKD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 memuat indikator yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dengan mengacu pada IKK *Outcome* yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Indikator kinerja dan target setiap tahun mulai 2024 sampai dengan 2026 disajikan pada Tabel 8.3 dibawah ini.

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal			Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2021	2022	2023 (Target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	96,77	92,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	78,97	81,36	80,00	82,50	100,00	100,00	100,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
2.1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi	%	1,97	1,73	1,81	1,86	1,91	1,96	1,96
2.2	Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	100,00	72,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
3.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	27,70	47,66	58,95	70,78	82,60	94,43	94,43
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan Provinsi	%	35,29	15,08	55,29	65,29	77,06	97,65	97,65

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal			Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2021	2022	2023 (Target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	73,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
7.1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	60,00	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,66	51,00	50,00	50,00	50,00	50,00	55,00
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	7,23	7.512,81	7,00	7,00	7,00	7,00	7,50
7.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	94,76	20,52	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
7.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	70,13	26,10	27,20	27,20	27,60	28,10	28,00
7.6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	100,00	86,26	85,00	85,00,	85,00	86,00	86,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	1,96	11,38	13,00	14,00	15,00	16,00	16,00
8.2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	2,76	1,07	2,01	2,00	1,99	1,98	1,98
8.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 anak	%	1,11	2,46	23,58	23,46	23,23	23,11	23,11

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal			Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2021	2022	2023 (Target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
9.1	Persentase Cadangan Pangan	%	49,26	70,52	86,96	88,83	92,07	96,91	96,91
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
10.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	75,06	74,46	74,90	75,00	75,10	75,20	75,20
10.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	17,65	96,34	97,00	97,00	98,00	98,00	98,00
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
11.1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.2	Pemanfaatan data kependudukan	%	18,92	26,47	32,50	38,23	44,11	50,00	50,00
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
12.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	90,00	68,52	68,52	59,00	50,00	0,00	0,00
12.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0,66	92,25	4,42	6,27	8,50	11,36	11,36
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
13.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,51	2,18	2,08	2,04	2,02	2,01	2,01
13.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	50,82	55,50	60,18	67,98	68,01	68,23	68,23
13.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	22,18	29,70	7,72	7,54	7,38	7,24	7,24
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
14.1	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,798	0,816	0,834	0,846	0,864	0,882	0,882

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal			Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2021	2022	2023 (Target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
20.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	173,33	38,76	51,80	53,00	54,00	55,00	55,00
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
21.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	45,55	59,92	65,00	62,00	63,50	65,00	65,00
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
22.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Skor	60,85	46,27	46,90	46,00	47,00	48,00	48,00
22.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	17,74	34,16	34,90	35,00	40,00	45,00	45,00
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
23.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	64,30	74,65	75,00,	76,00	77,00	78,00	78,00
23.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	7,39	3,34	3,50	3,50	4,50	4,70	4,70
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
24.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: <i>one data</i> KKP)	Ton	334.236	339.631	333.900	370.000	376.000	382.000	382.000

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal			Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2021	2022	2023 (Target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	52,65	59,09	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
25.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	11,73	-7,53	11,82	11,82	12,00	12,10	12,10
25.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	25,03	67,47	60,00	62,00	63,00	64,00	64,00
25.3	Tingkat hunian akomodasi	%	1,64	1,67	1,63	1,65	1,68	1,70	1,70
25.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,95	0,82	0,83	0,83	0,84	0,85	0,85
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
26.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	3,69	3,63	3,70	3,67	3,69	4,00	4,00
26.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	53,1	83,67	-2,00	-2,74	-2,75	-3,64	-3,64
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
27.1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	56,52	76,19	75,00,	75,00	75,75	78,78	78,78
27.2	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	%	0,12	0,12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27.3	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	66,74	80,86	84,93	89,00	93,07	97,14	97,14
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
28.1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	Belum dilaksanakan	86,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal			Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2021	2022	2023 (Target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
29.1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	80,87	55,71	55,73	55,75	55,77	55,80	55,80
29.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00,	100,00	100,00
29.3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	19,28	72,22	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00
29.4	Tertib Usaha	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	75,29	92,67	76,00	85,00	90,00	92,00,	92,00,
29.6	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	95,65	76,04	75,00	77,00	79,00	80,00	80,00
29.7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	1,30	1,17	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
30.1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	45,26	20,70	18,00	17,00	16,00	15,00	15,00
30.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	112,09	124,25	115,00	117,00	118,00	120,00	120,00
30.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	16,67	23,61	24,50	25,00	25,50	26,00	26,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal			Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2021	2022	2023 (Target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	95,00	220,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
31	PERENCANAAN DAN KEUANGAN								
31.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	7,39	5,44	9,63	9,65	9,67	9,69	9,69
31.2	Rasio PAD	%	59,80	53,54	55,02	50,45	53,14	52,75	52,75
31.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer <i>expenditures</i>)	%	44,21	62,58	65,18	65,05	64,93	64,80	64,80
31.4	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.5	<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	7,68	15,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31.6	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	13,25	27,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31.7	<i>Assets Management</i>	Aspek	3	4	4	4	4	4	4
31.8	<i>Cash Management</i> : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	24,11	54,01	17,56	15,49	15,51	15,52	15,52
32	PENGADAAN								
32.1	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	34,84	4,35	4,00	3,90	3,80	3,70	3,70
32.2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	84,29	63,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
32.3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	-	-	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal			Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2021	2022	2023 (Target)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	KEPEGAWAIAN								
33.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	200,63	157,53	91,00	90,00	90,00	90,00	90,00
33.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,11	17,53	91,00	86,00	87,00,	88,00	88,00
33.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21,32	18,27	91,00	86,00	87,00	88,00	88,00
34	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
34.1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
34.2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4

Sumber: Hasil proyeksi, 2023

BAB IX

PENUTUP

Rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun kedepan telah dimuat dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Pelaksanaan RPD serta RENSTRA Perangkat Daerah pada periode tersebut menjadi penentu pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur yang akan berakhir pada tahun 2025. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan kaidah-kaidah yang dapat mengarahkan pelaksanaan RPD agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan beberapa kaidah, yaitu:

1. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, serta memperhatikan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait untuk sinergi pembangunan;
3. Kepala Perangkat Daerah dan seluruh aparatur melaksanakan program dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, serta program, kegiatan, dan subkegiatan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
4. Pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah daerah sekitar (terutama Otorita IKN), serta masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa;
5. RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) tahun 2024, 2025, dan 2026;

6. Gubernur melalui Kepala BAPPEDA dan seluruh Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 secara periodik;
7. RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 menjadi tolok ukur kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RPD kabupaten/kota;
9. RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman pembangunan sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode berikutnya yang merupakan penjabaran visi dan misi serta program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SEKRETARIAT DAERAH
KALIMANTAN TIMUR
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

